

Drs. Abdul Wahid, M.Ag.

Isu-Isu Kontemporer
**PENDIDIKAN
ISLAM**

Buku ini merupakan bunga rampai yang menyajikan potret Pendidikan Islam pada masa sekarang. Pembaca akan diajak untuk mencermati beberapa persoalan di seputar pendidikan Islam baik menyangkut substansi, metodologi maupun kelembagaan, serta fenomena sosial lain yang memiliki kaitan erat dengan Pendidikan Islam.

Isu-Isu Kontemporer
**PENDIDIKAN
ISLAM**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan/atau denda paling sedikit 1.000.000.00,- (satu juta), atau penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengandakan Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

Drs. Abdul Wahid, M.Ag.

Isu-Isu Kontemporer
**PENDIDIKAN
ISLAM**



Perpustakaan Nasional: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Wahid, Abdul

Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam/Drs. Abdul Wahid,
M.Ag; Editor: Mohammad Nor Ichwan; cet. 1; -- Semarang:
Walisongo Press, 2011.

viii + 209 hlm.; 14 x 21 cm.

ISBN 978-602-9029-15-4

1. Pendidikan Islam

2. Isu Kontemporer

I. Judul

II. Ichwan, Mohammad Nor

ISU-ISU KONTEMPORER PENDIDIKAN ISLAM

Penulis: Drs. Abdul Wahid, M.Ag.

Editor: Mohammad Nor Ichwan, M.Ag.

Proof Reader: M. Mukhsin Jamil, M.Ag.

Desain Cover: Sagha Grafika Solusindo Semarang

Setting/Lay-Out: Mohammad Nor Ichwan

Diterbitkan oleh:

Walisongo Press

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185

Telp. (024) 7615923; 081325619531; 081325639165

E-mail: walisongopress@gmail.com

Cetakan I: Nopember 2011

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., atas perkenannya buku ini akhirnya dapat diterbitkan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berhasil dikumpulkan oleh penulis. Buku ini bisa dikatakan wujud dari sebuah harapan yang telah sekian waktu tertunda.

Berbicara tentang Pendidikan Islam, tentu kita akan menemukan di lembar sejarah umat Islam, bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaan (*the golden age of Islam*). Masa ini, praktik-praktik pendidikan menemukan momentum puncak, sehingga jati diri Islam benar-benar terwujud. Namun demikian, pada masa berikutnya, di tengah keterlenaan, secara cukup drastis umat Islam terpuruk. Bangsa Eropa yang dahulu banyak belajar dari umat Islam, justru pada masa berikutnya (hingga kini) berhasil mentransfer dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pernah dibanggakan oleh umat Islam pada masanya. Umat Islam mengalami proses "tidur panjang". Pendidikan Islam yang diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan, pembuka jalan menuju kemajuan nampaknya belum cukup efektif memainkan perannya.

Mengharapkan kembalinya masa keemasan Islam di masa sekarang tentu merupakan harapan setiap muslim. Harapan tersebut tentu ditumpukan terhadap dunia Pendidikan Islam sebagai

garda depan penggerak pembangunan umat Islam. Pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa yang besar dan maju adalah mereka yang menekankan atau menempatkan pendidikan pada prioritas pertama. Namun demikian, di kalangan umat Islam yang sebagian besarnya merupakan warga di negara dunia ketiga, masih dihadapkan oleh banyak pilihan yang sulit. Kemiskinan, lemahnya kesadaran dan semangat untuk maju, lemahnya kinerja, minimnya SDM, masih menjadi kendala utama bagi memajukan sektor pendidikan.

Buku ini mencoba memotret dan memetakan beberapa kendala, kelemahan dan tantangan Pendidikan Islam, bersamaan dengan itu mencoba memunculkan prospek yang memungkinkan terurainya belitan masalah yang menghambat kemajuan Pendidikan Islam. Beberapa tema yang diangkat tentu tidak dapat mewakili seluruh problem yang dihadapi oleh dunia Pendidikan Islam, namun setidaknya bisa menjadi bahan bagi perenungan panjang menyangkut upaya membangun kembali kejayaan umat Islam melalui pendidikan.

Tegur sapa, kritik dan saran tentu sangat dinantikan dalam rangka memperkaya pemahaman tentang tema ini. Tak lupa, apresiasi dan ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman dan semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini. Semoga Allah melimpahinya dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga tulisan ini bermanfaat, Amin ...

Semarang, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSEMBAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv

PENDAHULUAN --- 1

A. Pendidikan Islam-Antara Tantangan dan Prospek --- 4

1. Pendidikan Islam Kontemporer: Problem utama, Tantangan dan Prospek --- 5
2. Potret Pendidikan Islam di Tanah Arab (Pemikiran A.L. Tibawi tentang Pendidikan Islam) --- 23

B. Pendidikan Islam dan Transformasi Sosial --- 42

1. Manajemen Berbasis Madrasah: Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri --- 43
2. Fenomena Sekolah Islam Elite: Format Baru Lembaga Pendidikan? --- 60
3. Pendidikan Versus Kemiskinan --- 79

C. Pendidikan Islam di Tengah Pluralitas --- 94

1. Pendidikan Pluralistik: Belajar dari SMU Muthahhari --- 95
2. Agama dan Konflik Sosial --- 112

D. Pendidikan Agama dan Pendekatan Psikologis --- 132

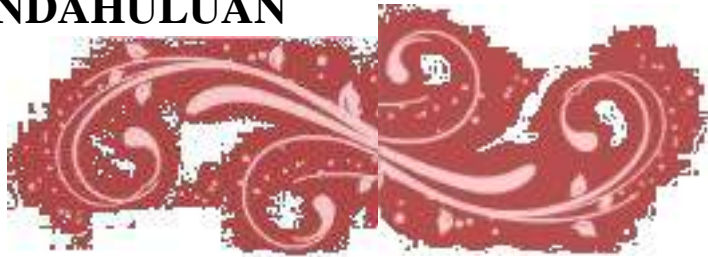
1. Psikoterapi dan "*the Agony of Modernization*" --- 133
2. Psikologi dan Pendidikan Agama Islam (Urgensi IQ, EQ dan SQ dalam Pembelajaran PAI) --- 154

E. Problematika Metodologis Pembelajaran --- 163

1. *Developmentally Appropriate Practice*: Mengisi "Ruang Kosong" Pembelajaran PAI untuk Anak Usia Dini --- 164
2. Kemandirian Belajar di Perguruan Tinggi --- 191

Tentang Penulis

PENDAHULUAN



ISU-ISU KONTEMPORER

PENDIDIKAN ISLAM

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam telah berjalan setua agama Islam itu sendiri, lebih kurang 14 abad. Bermula dari pembelajaran Al Qur'an dan Al Hadits, dimana proses selajar mengajar berpusat di masjid, pendidikan Islam terus berkembang. Semangat untuk menuntut ilmu untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Al Qur'an dan Al Hadits, semakin gencar dilakukan oleh para ulama pendahulu.

Sejarah mencatat kemajuan yang luar biasa pada abad pertengahan dimana masa itu disebut sebagai *the Golden Age of Islam* –masa keemasan dan kejayaan Islam-. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai buah dari prakti-praktik pendidikan Islam pada waktu itu sangat pesat. Pada masa itulah lahir ulama-ulama terkenal yang bisa dikatakan sebagai *encyclopedic scholar*, yang sangat mumpuni diberbagai bidang. Sebut saja Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al Farabi, Ibnu Rusyd, Al Kindi, Al Khwarizmi dan sederat nama-nama besar lain yang menjadi rujukan dunia Barat untuk belajar tentang kemajuan dan peradaban umat manusia. Pendidikan Islam masa klasik telah berhasil membawa Islam sebagai *pioneer* pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus jembatan menuju peradaban modern.

Namun demikian, kemajuan itu bukannya memacu generasi berikutnya untuk mengibarkan panji-panji kebesaran ilmu pengetahuan Islam, tetapi justru menjadikan mereka penikmat kemajuan semata. Generasi berikutnya jatuh dalam keterlenaan dan tidak mampu mewarisi semangat yang diwariskan para pendahulunya. Di sisi lain, bangsa Eropa yang sedikit-demi sedikit “mengintip” karya-karya besar ulama klasik ini semakin giat berbenah diri. Mereka berhasil mentransfer dan mewarisi semangat ilmiah tersebut sehingga menjadikannya kiblat ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang.

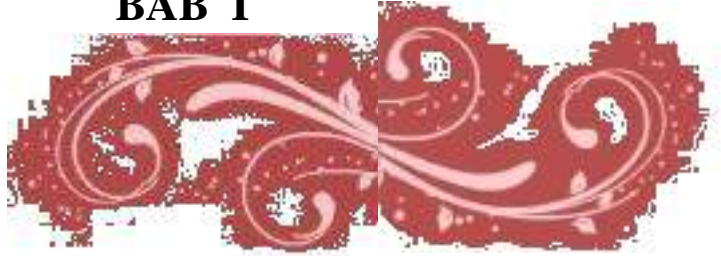
Kesadaran terhadap kemunduran keilmuan sebenarnya telah nama tumbuh di kalangan Islam. Namun upaya-upaya yang ditempuh melalui praktik-praktik pendidikan dewasa ini seolah masih “berjalan di tempat” dan selalu gagal menemukan momentumnya. Kesadaran itu seolah terus berputar-putar pada dataran keinginan atau bahkan keprihatinan. Kebangkitan Islam tentu harus segera

diwujudkan jika kita tidak ingin semakin tergilas oleh umat lain. Sikap terbuka dan siap berdialog dengan budaya dan peradaban lain sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentu menjadi sebuah keniscayaan.

Apa yang telah dialami oleh generasi pasca masa klasik harus menjadi pelajaran berharga bagi generasi Islam sekarang. Menjadi penikmat karya-karya besar tanpa diiringi sikap kritis dan inovatif justru akan menjadi boomerang bagi keruntuhan peradaban besar itu sendiri. Kelemahan-kelemahan dalam praktik-praktik Pendidikan Islam tentu harus dipetakan, dan kepekaan terhadap permasalahan yang melingkupi dunia pendidikan Islam harus selalu kita *update*. Bersamaan dengan itu upaya-upaya berani, kreatif dan inovatif harus terus dikembangkan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Buku ini merupakan bunga rampai yang menyajikan potret Pendidikan Islam pada masa sekarang. Pembaca akan diajak untuk mencermati beberapa persoalan di seputar pendidikan Islam baik menyangkut substansi, metodologi maupun kelembagaan, serta fenomena sosial lain yang memiliki kaitan erat dengan Pendidikan Islam.

BAB I



PENDIDIKAN ISLAM

ANTARA TANTANGAN DAN PROSPEK

PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER: PROBLEM UTAMA, TANTANGAN DAN PROSPEK

Sebagai *the agent of social change*, pendidikan Islam dituntut untuk mampu memainkan peran secara dinamis dan proaktif. Di antara belitan berbagai persoalan besar, ia dihadapkan pula pada berbagai tantangan dan prospek ke depan.. Mampukah pendidikan Islam keluar dari belitan permasalahan tersebut dan ikut ambil bagian secara aktif dalam hiruk-pikuknya lalu-lintas perubahan intelektual dan sosio-kultural *Global Village* dewasa ini? Adakah pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis di berbagai bidang dalam siaran dan terintegrasi dengan Islam, merupakan kata kunci yang harus dipercepat prosesnya, baik pada dataran teoritis maupun praksis.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan yang cukup signifikan pada paruh pertama abad XX adalah semakin meningkatnya intensitas perjuangan negara-negara Muslim Untuk melepaskan diri dari dominasi kolonial Barat. Perjuangan tersebut banyak membuahkan hasil, dengan dicapainya kemerdekaan di banyak negara Muslim. Namun dengan kemerdekaan yang dicapai tersebut, tidak berarti pula mereka telah lepas sama sekali, dari bayang-bayang dan dominasi Barat. Tidaklah mudah untuk merubah tatanan politik dan sosio-kultural Barat yang telah cukup lama mengakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Upaya-upaya untuk melepaskan diri dari hegemoni Barat terus bergulir. Kenyataan tersebut dapat dicontohkan dengan munculnya *bias* di dalam menerapkan sistem pemerintahan ke negara-negara Muslim. Ada yang berpegang pada bentuk kerajaan; ada yang menerapkan sistem Kerajaan plus Perdana Menteri; ada yang mengangkat Presiden dan Perdana Menteri; atau yang hanya Presiden. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh pula terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sektor pendidikan.

Berbicara tentang Pendidikan Islam atau pendidikan yang ada dan berkembang di negara-negara Muslim pada abad XXI, meskipun terdapat beberapa kasus perkecualian, maka akan dijumpai polarisasi baik dari aspek epistemologis, ontologis maupun aksiologisnya. Baik sistem, tujuan sampai pada dataran operasionalnya masih menjadi bahan kajian yang *debatable* di kalangan para ahli pendidikan Islam.

Ada beberapa faktor yang ditengarai menjadi penyebab munculnya silang pemikiran tersebut. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan Islam yang sekarang dikembangkan baik sistem maupun substansinya adalah cenderung diadopsi dari Barat. Kalaupun muncul gagasan-gagasan baru yang lahir dari pemikir-pemikir Muslim, hal tersebut dianggap hanya bersifat *tambal-sulam*. Dengan kata lain, melepaskan diri sama sekali dari pengaruh Barat adalah suatu hal yang *impossible*. Harus diakui bahwa sebagian besar negara Islam masih merupakan negara Dunia ketiga (miskin atau masih berkembang), yang saat ini masih tertinggal beberapa langkah dari kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Barat, yang mau tidak mau jalur atau *track*, track tersebut harus dilalui oleh negara-negara Muslim. *Kedua*, karya-karya klasik pada masa kejayaan Islam yang merupakan representasi pemikiran pendidikan Islam yang komprehensif cukup jarang dijumpai. Dalam hal ini kitab *Ta'limu al Muta'alim* al-Zarnuji sajalah yang boleh jadi dipandang sebagai pemikiran yang komprehensif tentang pendidikan Islam. Sementara, pemikiran-pemikiran pendidikan dari para tokoh lain seperti al-Ghazali, al-Mawardi ataupun Ibnu Khaldun, merupakan serpihan-serpihan yang berserakan di berbagai karyanya. Sehingga cukup sulit bagi para pakar pendidikan Islam dewasa ini untuk menggali dan mengembangkan pemikiran-pemikiran orisinal dari kalangan Muslim sendiri, supaya tidak dicap menjiplak produk Barat.

Rahman menyatakan bahwa, faktor yang makin membuat lebih *complicated* adalah, bahwa pendidikan baru tersebut telah dicangkok dari organisme hidup lainnya di Eropa, dengan *background* kultural, struktur internal dan konsistensinya sendiri. Meskipun hal seperti ini juga pernah terjadi pada masa awal Islam dengan mengalirnya filsafat dan sains Yunani dalam intelektual Islam dan aliran spiritual. Perbedaan pokok yang terjadi sekarang adalah bahwa peradaban Yunani telah musnah sementara peradaban Islam tetap hidup dan kuat serta mampu menghadapi tantangan dari sains Yunani dalam terma-termanya sendiri. Tetapi Peradaban Islam menghadapi sains barat moderen, pada berbagai posisi yang tak menguntungkan secara psikologis maupun

intelektual yang disebabkan oleh dominasi politik, agresi ekonomi dan hegemoni intelektual Barat.¹

Tulisan ini berupaya menyorot problem-problem utama yang dihadapi Pendidikan Islam kontemporer yang antara lain meliputi; Dikhotomi, masih bersifat terlalu general dan belum paling tidak kurang adanya “*problem-solving*” dari ilmu yang menjadi bahan kajian (*Too general knowledge – No problem solving*), rendahnya semangat penelitian (*Lack of spirit of inquiry*), Memorisasi, dan Orientasi pada ijazah/sertifikat (*Certificate oriented*)

B. SITUASI SOSIO-KULTURAL

Situasi dunia secara umum, oleh Tibi digambarkan bahwa, muncul perjuangan-perjuangan dan konflik di dalam masyarakat dunia kita yang mengambil bentuk-bentuk regional pada semua level, baik ekonomi, politik dan budaya. Konflik yang secara luas terjadi adalah antara budaya Barat yang sangat dominan dengan tradisi ilmu bersifat *pre-industrial*, yang masih rendah tingkat penguasaannya terhadap alam. Masyarakat dunia, oleh Tibi, dipandang sebagai masyarakat *non-egalitarian* karena memiliki struktur yang *asymmentric*.² Dari sinilah pangkal tolak munculnya subordinasi Non-Barat terhadap Barat. Dunia Barat dengan kekuatan kultur industrinya yang ditopang dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu menaklukkan dan menata kembali sebagian besar negara-negara Perindustri (negara-negara Dunia Ketiga). Tibi mencatat bahwa *gap* antara masyarakat Industri (yang disebut dengan Kelompok Utara) dengan masyarakat Perindustri (yang disebut dengan kelompok Selatan) semakin lebar dalam kurun 1970-an.³

Situasi tersebut merupakan buah yang dipetik dari kegagalan masa sebelumnya yang terus berlangsung. Rahman menggambarkan bahwa, sejenis sekularisme telah muncul di dunia Islam pada masa-masa premoderenis yang

¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 71.

² Bassam Tibi, *The Crisis of Modern islam; A preindustrial Culture in the Scientific-technological Age*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988), hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm.3.

disebabkan karena kemandegan pemikiran Islam (*the stagnation of Islamic thinking*) pada umumnya, dan pada khususnya, disebabkan oleh kegagalan hukum dan lembaga-lembaga shari'ah mengembangkan diri dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini jelas mempengaruhi jalannya modernisasi Islam, khususnya dalam lapangan pendidikan.⁴

Selanjutnya, proses modernisasi di berbagai kawasan Muslim menampakkan perbedaan-perbedaan substansial, yang disebabkan oleh empat faktor: (1) apakah suatu wilayah budaya akan tetap mempertahankan kedudukannya *vis-a-vis* ekspansi politik Eropa atau ia didominasi dan diperintah oleh sebuah negara kolonial Eropa, baik secara *de jure* maupun *de facto*, (2) karakteristik organisasi ulama atau kepemimpinan keagamaan, dan sifat hubungan mereka dengan institusi-institusi pemerintah sebelum terjadinya penjajah; (3) keadaan perkembangan pendidikan Islam dan budaya yang menyertainya sesaat sebelum terjadinya penjajahan; dan (4) sifat kebijakan kolonial secara keseluruhan dari kekuatan penjajah tertentu seperti Inggris, Perancis atau Belanda.⁵

C. PROBLEM UTAMA

Beberapa problem utama yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan Islam pada umumnya setidaknya dapat diklasifikasikan dalam lima hal. Jika dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa problem-problem tersebut merupakan rangkaian yang saling kait-mengkait dan berjalan secara berkelindan. Persoalan-persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dichotomic

Masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan Islam adalah *dikhotomi* dalam beberapa aspek yaitu; antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum, antara Wahyu dengan Akal setara antara Wahyu dengan Alam.

⁴ Fazlur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 43.

⁵ *Ibid.*

Munculnya problem dikhotomi dengan segala perdebatannya telah berlangsung sejak lama. Boleh dibilang gejala ini mulai tampak pada masa-masa Pertengahan. Rahman dalam melukiskan watak ilmu pengetahuan Islam zaman Pertengahan menyatakan bahwa, muncul persaingan yang tak pernah berhenti antara *Hukum* dan *Teologi* untuk mendapat julukan sebagai 'mahkota semua ilmu'. Tetapi *penutupan pintu ijtihad* (yakini pemikiran orisinal dan bebas) yang berlangsung selama abad 4H/10M dan 5H/11M telah membawa kepada kemandegan umum baik ilmu Hukum maupun ilmu Intelektual.⁶

Watak ilmu pengetahuan Islam zaman Pertengahan tersebut ternyata juga diikuti oleh pandangan ulama yang juga tidak jauh berbeda. Rahman mengutip pandangan Syatibi yang menyatakan bahwa, "mencari ilmu apa pun yang tidak berhubungan langsung dengan amal adalah terlarang (*forbidden*)". Menurut Rahman, *Judgement* tersebut, jika ditujukan kepada pemikiran yang sia-sia, adalah cukup valid, dan pragmatisme modern juga telah menempuh sikap korektif yang serupa terhadap jenis-jenis pemikiran murni di Barat. Tetapi dalam pernyataan para penulis muslim zaman pertengahan, prinsip ini tidak hanya mengesampingkan filsafat, tetapi bahkan juga matematika, kecuali ilmu berhitung tingkat dasar.⁷ Seyyed Hossein Nasr menyatakan, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, suatu doktrin atau ide entah itu benar atau salah, tidak bisa begitu saja disisihkan atau diabaikan jika keberadaannya diketahui. Perlu diketahui, pandangan-pandangan mereka (para ilmuwan) tidak bisa begitu saja diabaikan. Jika pandangan mereka benar maka harus diterima dalam skema ilmu pengetahuan Islam dengan pertimbangan nilai universal, atau jika mereka salah, maka harus dibantah. Dalam kedua kasus tersebut harus dipelajari dan akan lebih baik jika diketahui.⁸

⁶ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), hlm. 185-6.

⁷ *Ibid*, hlm. 186.

⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Life and Thought*, (London: Luzac, 1927), hlm. 200.

Mengenai pendidikan Teknik dan Kejuruan, Tibawi ketika menyimpulkan potret pendidikan Islam di Arab abad XX menyebutkan bahwa, secara keseluruhan dengan sedikit kemungkinan perkecualian pendidikan Kejuruan dan Teknik adalah tidak lebih dari sekedar hiasan (*decorative*) yang berbeda di pinggiran dan sistem-sistem Nasional (Arab),⁹ dengan kata lain pendidikan kejuruan dan Teknik menempati prioritas ke sekian. Terdapat kecenderungan untuk berkonsentrasi pada pendidikan akademis yang lebih berorientasi pada posisi di pemerintahan atau profesi-profesi umum daripada pendidikan kejuruan dan teknik; pendayagunaan kemampuan tangan (ketrampilan) sebagaimana akal masih merupakan sesuatu yang asing (*alien*) dalam konsep pendidikan Islam (*moderen*) sebagaimana telah berkembang pada kultur-kultur pra-modern.¹⁰

Masih tentang potret pendidikan Islam di Arab, pandangan dikotomik ini berdampak cukup luas terhadap aspek-aspek lain. Tibawi mencatat munculnya ketidakseimbangan antara jumlah siswa pria dan wanita di semua jenjang, antara kuantitas dan kualitas pendidikan Kejuruan Praktis dengan pendidikan di perkotaan dengan pedesaan. Persoalan besar dari ketidakseimbangan itu adalah anggapan masyarakat yang negatif (*social prejudice*) yang masih melekat tentang kehadiran atau keberadaan pendidikan bagi kaum wanita.¹¹

Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan ataupun modernis-modernis Turki Klasik seperti, Cevdet Pasyadan Namik Kemal, tak seorang pun kelihatannya mendukung diberikannya pendidikan moderen bagi kaum wanita dalam garis tradisional dan domestik.¹²

Aspek lain yang cukup menjadi perhatian pada era sekarang adalah *isu lingkungan*. Banyak dari negara-negara Muslim kalau tidak bisa dikatakan semua merupakan negara yang cukup kaya dengan sumber daya alam. Timur

⁹A.L. Tibawi, *Islamic Education, Its Traditions and Modernization in the Arab National Systems*, (London: Luzac, 1972), hlm. 200.

¹⁰Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*, (New York; Warner Books, 1991), hlm. 391.

¹¹ Tibawi, *Op.Cit.*, hlm. 205.

¹² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Op.Cit.*, hlm.77.

Tengah terkenal sebagai negeri-negeri “*Petro dollar*”, negeri Muslim Afrika yang cukup kaya dengan berbagai mineral atau mereka yang terletak di daerah khatulistiwa, sebagai negeri tropis, yang juga kaya dengan sumber daya alam. Itu semua sebenarnya merupakan kekuatan besar bagi kemajuan negeri-negeri Muslim tersebut, bila mereka memiliki kapabilitas untuk menggarap secara optimal namun tetap memperhatikan aspek lingkungan. Namun yang terjadi, kekayaan alam justru telah “*memanjakan*” mereka sehingga kekayaan alam itu justru banyak dinikmati oleh negara-negara Barat yang memiliki kemampuan lebih.

Lebih dari itu, sebagaimana tersurat pada awal bagian ini, “ayat-ayat Allah” yang dihamparkan di alam semesta, berupa kekuatan-kekuatan natural atau gejala-gejala alam (*sunnatullah*)¹³ kurang mampu dibaca serta dipahami dengan baik oleh kaum Muslim.

2. *Too General Knowledge*

Kelemahan dunia Pendidikan Islam berikutnya adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general/umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah (*problem-solving*). Produk-produk yang dihasilkan cenderung kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat. Syed Hussein Alatas menyatakan bahwa, kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, mendefinisikan, menganalisis dan selanjutnya mencari jalan keluar/pemecahan masalah tersebut merupakan karakter dan sesuatu yang mendasar kualitas sebuah intelektual. Ia menambahkan, ciri terpenting yang membedakan dengan non-intelektual adalah tidak adanya kemampuan untuk berpikir dan tidakmampu untuk melihat konsekuensinya.¹⁴

¹³ Lihat Qur'an (17:77) yang pada intinya menyebutkan bahwa segala sesuatu ciptaan Allah di alam semesta ini telah ada aturan atau hukum yang berlaku atasnya, bersifat tetap, pasti dan takkan berubah.

¹⁴ Tibi, *Op.Cit.*, hlm. .

Sebuah artikel tentang Kesepakatan Penyatuan Budaya Arab yang ditandatangani tahun 1964 mendefinisikan tujuan umum pendidikan moderen Arab sebagai berikut:

Penciptaan generasi-generasi Arab yang percaya kepada Tuhan, loyal kepada tanah air Arab, memiliki keyakinan yang kuat kepada diri dan bangsa sendiri, sadar akan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan kemanusiaan.....membekali diri dengan sains dan moral, juga membagi kemakmuran terhadap masyarakat Arab dengan tetap menjaga posisi kejayaan Arab, menjaga hak-hak dan kemerdekaan, keamanan dan menghargai kehidupan.....

Menurut Tibawi tujuan tersebut terkesan lebih bersifat *ideal* daripada *praktis*, dan lebih berorientasi kepada kepentingan nasional/bangsa daripada kemanfaatan bagi warga negara secara individual. Tidak ada penjelasan dan filsafat yang komprehensif sejauh ini, yang diformulasikan baik pada tahapan yang bersifat umum maupun yang dipandang khusus dalam pendidikan. *There is still a great deal of generalization.*¹⁵

Adalah banyak dijumpai di beberapa negara Muslim, khususnya bekas jajahan Perancis, Fakultas *seni* dan *hukum* menjadi fakultas yang paling penting, *faculte des lettres* dan *faculte des droits* mendominasi seantero kampus. Para lulusan dari fakultas-fakultas tersebut mendapat ajaran ilmu yang bersifat general, yang satu terlalu general dengan fungsi-fungsi praktis dan yang lainnya dengan hafalan, tanpa memberikan perhatian terhadap usaha pemecahan masalah(*problem-solving*).¹⁶

3. Lack of Spirit of Inquiry

Persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia Pendidikan Islam adalah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian/penyelidikan. Syed Hussein Alatas merujuk kepada pernyataan *the spiritus rector* dari modernisme Islam, al-Afghani, menganggap

¹⁵ Tibawi, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁶ Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of social Change*, (San Fransisco: Westview Press,1985), hlm. 111.

rendahnya *“the intellectual spirit* (semangat intelektual) menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah. Hal tersebut masih diperparah dengan; semangat untuk menyelidiki/meneliti, rasa cinta untuk mencari ilmu, dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan serta Ilmu Rasional tidak berkembang luas di negara-negara dunia ketiga.¹⁷ Alatas yang mengajar di Singapura itu, mengutuk rendahnya *“Spirit of inquiry”* di kalangan para intelektual di negara-negara berkembang.¹⁸

Pendidikan model barat di masa kolonial merupakan suatu bentuk *imitasi* dari westernisasi. Alatas menggambarkan: “Signifikansi pendidikan kolonial terletak pada usaha-usahnya untuk menghambat munculnya tradisi intelektual, bahkan dalam suatu masyarakat yang masih memiliki tradisi terbelakang sekalipun. Regime Kolonial menciptakan kebiasaan pacuan kuda, minum bir, kehidupan klub, musik yang bercitarasa barat, dan jenis-jenis lainnya. Ia (regime Kolonial) bisa saja merangsang ketertarikan intelektual dalam skala yang besar, *tapi hal itu tidak dilakukan.*¹⁹

Dalam masyarakat Muslim di mana lembaga-lembaga pendidikan tinggi memiliki akar kuat terhadap cara-cara hafalan, isi (*content*) dari sains-sains positif yang diadopsi dari Eropa tetap di ajarkan dengan model yang sama (hafalan). Ayat-ayat Al-Qur’an dipelajari dengan hati sebab ayat-ayat tersebut adalah sempurna dan tidak untuk diselidiki apa yang terkandung di dalamnya (*not to be inquired into*).²⁰

4. Memorisasi

Rahman menggambarkan bahwa, kemerosotan secara gradual dari standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentu terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku-buku yang tertera

¹⁷ Sebagaimana dikutip oleh Tibi dalam *The Crisis of Modern Islam* dari karya Syed Hussein Alatas, *Intellectuals in Developing Societies*, (London, 1977), hlm. 15.

¹⁸ Sebagaimana dikutip oleh Tibi dalam *Islam..., Loc.Cit.*

¹⁹ Tibi, *The Crisis, Op.Cit.*, hlm. 16.

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam, Op.Cit.*, hlm. 110.

dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi siswa-siswa untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti, tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat *studi tekstual* dari pada *pemahaman* pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan untuk belajar dengan sistem hafalan (*memorizing*) daripada pemahaman yang sebenarnya. Kenyataan menunjukkan bahwa abad-abad Pertengahan yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukan karya-karya yang pada dasarnya orisinal. Fenomena ini berkembang secara fundamental dari kebiasaan-kebiasaan berkonsentrasi pada *buku* dan bukunya pada *pelajaran*. Bisa dipastikan bahwa banyak pemikiran yang asli dan seringkali juga memiliki kadar orisinalitas besar terdapat pada karya komentar-komentar tersebut, tetapi orisinalitas yang mendasar dalam suatu *subyek* adalah relatif jarang.²¹

Sinyalemen Tibi menyebutkan bahwa Universitas Islam di Arab dan Afrika dengan berbagai bidang studinya, mendasarkan semata-mata pada kapasitas belajar model hafalan (*rote learning*) dalam rangka mencapai kelulusan. Di sebagian negara berkembang, *rote learning* mengambil tempat di publik dan bisa diamati oleh siapapun di jalan dan sudut-sudut kota.²²

5. Certificate Oriented

Di antara semua umat atau masyarakat, orang-orang Islam memiliki keunikan dalam mengembangkan sains (*ilm*) terhadap penyebarluasan tradisi keagamaan (*hadit*). Bagi Muslim yang saleh ilmu *hadith* telah menjadi ilmu yang *pra excellence*. Hal tersebut menjadi sesuatu yang mendasari tugas bagi mereka yang disebut ilmuwan, dalam merespon salah satu hadith Nabi yang cukup kondang: “Carilah ilmu walaupun sampai ke negri Cina”, menempuh perjalanan jauh dan melelahkan hingga ke luar wilayah

²¹ Fazlur Rahman, *Islam, Op.Cit.*, hlm. 189.

²² Bassam Tibi, *Islam...*, *Loc.Cit.*

kekhalfahan. Perjalanan-perjalanan tersebut (*al-rihlah fi talab al'ilm*) memiliki derajat yang tinggi di antara perbuatan-perbuatan yang saleh; barang siapa yang mati dalam perjalanan mencari ilmu adalah seperti mereka yang mati (sahid) di medan perang suci.²³ Semangat inilah yang menjadi pola yang diterapkan dan dikembangkan pada masa-masa awal Islam dalam pencarian, pengumpulan dan penyeleksian *Hadith* menjadi suatu disiplin yang memenuhi kriteria-kriteria ilmiah. Hitti menyebutnya sebagai "keunikan" yang belum dijumpai dalam masyarakat lain semasanya.

Potret di hampir seluruh universitas Islam di Arab dan Afrika menurut Tibi bahwa, para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dengan metode *rote-learning* dibekali dengan sebuah sertifikat/ijazah tetapi bukan dengan "kualitas substansial", yang dapat di terapkan atau dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Belajar, oleh kebanyakan orang dianggap hanyalah alasan pemenuhan kebutuhan perut (*a bread winning ticket*) atau ticket untuk masuk ke posisi-posisi yang lebih baik. Dalam perbincangan dengan otoritas akademik di berbagai negara Muslim dan berkembang lainnya, pada tuntutan akademik terhadap disiplin/lapangan mereka sesuai dengan jenjang akademik yang diperolehnya, dan yang terpenting lagi, terhadap universitas-universitas dari mana mereka berasal.²⁴

Pola yang dikembangkan pada masa awal-awal Islam; yaitu *Talab al-ilm*, telah memberikan semangat di kalangan Muslim untuk gigih mencari ilmu, melakukan perjalanan jauh penuh resiko guna mendapatkan kebenaran suatu *Hadith*, mencari guru di berbagai tempat, dan sebagainya. Hal tersebut memberikan isyarat bahwa karakteristik para ulama Muslim masa-masa awal di dalam mencari ilmu adalah *knowledge oriented*. Sehingga tidak mengherankan jika pada masa-masa itu, banyak lahir tokoh-tokoh besar yang memberikan banyak kontribusi berharga, ulama-ulama *encyclopedic*, karya-karya besar sepanjang masa. Sementara, jika dibandingkan dengan

²³ Philip K. Hitti, *History of Arabs, From the Earliest Time to the Present*, (London: MacMilan, 1970), hlm. 393-4.

²⁴ Bassam Tibi, *Islam, Loc.Cit.*, lihat juga hlm. 112.

pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu menunjukkan kecenderungan adanya pergeseran dari *knowledge oriented* menuju *certificate oriented* semata. Mencari ilmu hanya merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sertipikan atau ijazah saja, sedangkan semangat dan kualitas keilmuan menempati prioritas berikutnya. Fenomena tersebut memunculkan kelompok intelek yang kurang atau bahkan tidak *capable*, yang pada gilirannya akan berguguran oleh seleksi alam.

D. Tantangan dan Prospek

Tantangan

Pendidikan diyakini merupakan salah satu agen perubahan sosial. Pada satu segi pendidikan dipandang sebagai suatu variabel modernisasi atau pembangunan. Tanpa pendidikan yang memadai, akan sulit bagi masyarakat mana pun untuk mencapai kemajuan. Karena itu banyak ahli pendidikan yang berpandangan bahwa “pendidikan merupakan kunci yang membuka pintu kearah modernisasi”. Tetapi pada segi lain, pendidikan sering dianggap sebagai obyek modernisasi atau pembangunan. Dalam konteks ini, pendidikan di negara-negara yang telah menjalankan program modernisasi pada umumnya di pandang masih terbelakang dalam berbagai hal, dan karena itu sulit diharapkan bisa memenuhi dan mendukung program pembangunan. Karena itu program pendidikan harus diperbaharui, dibangun kembali atau dimodernisasi sehingga dapat memenuhi harapan dan fungsi yang dipikulkan kepadanya.²⁵

Rahman menarik satu benang merah dari pandangan 5 tokoh Muslim yaitu; Sayyid Akhmad Khan, Sayyid Amir ‘Ali, Jamaludin al-Afghani, Namik Kemal dan Muhammad Abduh, terdapat krisis yang melanda dunia pendidikan Islam. Bagian-bagian integral dari penalaran mereka adalah (1) bahwa tumbuh suburnya perkembangan sains dan semangat ilmiah dari abad kesembilan hingga kesepuluh di kalangan kaum muslimin adalah buah dari usaha memenuhi seruan Al-Qur’an agar manusia mengkaji alam semesta hasil karya Tuhan, yang

²⁵ Azyumardi Azara, *Pembaruan Pendidikan Islam*, dalam Mawar Saridjo, *Bunga Rumpai Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Amissco, 1996, hlm. 2-3.

menciptakan baginya; (2) bahwa pada abad-abad pertengahan yang akhir semangat penyelidikan ilmiah telah merosot dan karenanya masyarakat Muslim mengalami kemandegan dan kemerosotan; (3) bahwa Barat telah mengalahkkan kajian-kajian ilmiah yang sebagian besarnya telah dipinjamnya dari kaum Muslimin dan karenanya mereka mencapai kemakmuran, bahkan selanjutnya menjajah negeri-negeri Muslim; dan (4) bahwa karena kaum Muslimin, dalam mempelajari kembali sains barat yang telah berkembang, berarti menemukan kembali perintah Al-Qur'an yang telah terabaikan.²⁶ Pandangan ini nampaknya dapat direkomendasikan menjadi semangat utama untuk mengejar ketertinggalan kaum Muslimin.

Hal terpenting dan paling mendesak dari sudut pandang ini adalah "melepaskan kaitan" *secara mental* dengan bangsa Barat serta menanamkan suatu sikap yang independent namun penuh pengertian terhadapnya, sebagai terhadap peradaban-peradaban lain, meskipun lebih dikhususkan kepada barat karena ia merupakan sumber dari banyak perubahan sosial di seluruh dunia. Selama kaum Muslimin tetapi terbelenggu kepada Barat *secara mental*, bagaimanapun mereka tidak akan mampu untuk bertindak secara independent dan otonom.²⁷ Pokok permasalahan dari seluruh masalah "moderenisasi" pendidikan, yang diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*), adalah membuatnya mampu mencetak produktivitas intelektual yang kreatif dan dinamis dalam semua bidang usaha intelektual yang terintegrasi dengan Islam.

Sikap anti barat yang berlebihan dan tidak realistis justru menggiring dunia pendidikan Islam mengalami kemerosotan. Sikap tersebut terimplementasi ke dalam penolakan ilmu-ilmu "sekuler" yang disinyalir merupakan produk Barat, sehingga dari sinilah pangkal tolak munculnya dikhotomi. Berpangkal dari *dikhotomi* inilah masalah terus bergulir bagaikan 'bola salju' yang kian lama kian membesar. Ilmu-ilmu "sekuler" berikut perlengkapan-perlengkapan ilmiahnya seperti; penyelidikan, pengenalan,

²⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, *Op.Cit.*, hlm. 50-51.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 136-137.

difinisi masalah, analisa dan diikuti dengan *problem-solving-nya*, didepak dari struktur intelektual Muslim. Kondisi tersebut masih diperparah dengan tradisi *role-learning* yang mengakar kuat di kalangan intelektual Muslim, yang ternyata mandul dalam menghasilkan *output* yang memiliki “kualifikasi substansial”, dan lebih memiliki kecenderungan berorientasi pada sertifikat/ijazah.

Upaya lain yang tidak kalah penting untuk mendapatkan penanganan serius adalah pembrnahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Problem yang menyelimuti dunia pendidikan Islam adalah kesenjangan di antara jenjang pendidikan. *Higher Education* biasanya berdiri sebagai menara gading. Baik infra maupun supra struktur bagi Pendidikan Tinggi sering kali tidak memadai.²⁸ Pendidikan di tingkat dasar dan menengah kurang atau tidak mampu menyediakan calon-calon mahasiswa yang memenuhi standar kualifikasi yang diharapkan, untuk menempuh studi di perguruan tinggi. Dan kasus lainnya, bagi para mahasiswa baik dari negeri Muslim atau berkembang lainnya yang menamatkan pendidikan di luar negeri, seringkali tidak dapat diakomodir sekembali ke tanah airnya. Supra struktur, dalam hal ini lapangan pekerjaan maupun untuk pengembangan keilmuan yang telah mereka dapatkan seringkali menemui kesulitan, mereka mengalami *stock culture* atau bahkan alienisasi. Inilah pekerjaan rumah bagi pendidikan Islam untuk membenahi kelembagaannya, dengan satu pendekatan bahwa pembenahan itu tidak bisa dilakukan secara sepele-sepele.

Prospek

Kaum muslimin merupakan komunitas terbesar kedua yang ada di bumi ini. Tentu merupakan sebuah potensi yang sangat besar bila hal ini mampu digarap dengan baik, dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Lebih dari itu, jika dilihat, sebagian besar negara Muslim merupakan negara yang memiliki potensi alam yang sangat kaya. Sehingga dua potensi, yaitu sumber daya manusia dan

²⁸ Lihat Tibawi, *Op.Cit.*, hlm.198-201

sumberdaya alam, jika mampu dipadukan secara simultan, maka akan menjadi sebuah kekuatan besar di dunia ini.

Semakin terbukanya cakrawala pemikiran di antara sebagian intelektual Muslim, salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya pelajar/sarjana Muslim yang belajar di Barat, merupakan angin segar bagi upaya menemukan kejayaan masa lalu yang hilang.

Satu hal lagi yang perlu disorot adalah gerakan-gerakan negara Islam seperti OKI atau Liga Arab, jika mampu mengoptimalisasi peran, khususnya pencerahan dalam bidang pendidikan, akan memberikan kontribusi dan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Islam dunia

E. Penutup

Sebagai agen perubahan sosial, Pendidikan Islam yang berbeda dalam atmosfer Modernisasi dan Globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perubahan umat Islam, baik pada daratan intelektual teoritis maupun praktis. Adalah bukan sikap yang tetap membiarkan diri tertidur lelap, menutup mata atau mengisolir diri terhadap hiruk pikuknya perubahan sosial yang tengah berlangsung, dan tidak mau mengambil bagian daripadanya.

Solusi pokok yang ditawarkan Rahman, sebagaimana telah dikutip dimuka adalah; Pengembangan wawasan intelektual yang kreatif dan dinamis dalam sinaran dan terintegrasi dengan Islam harus segera dipercepat prosesnya. Dendam lama yang terus dilanggengkan serta penolakan kultur terhadap Barat secara membabi-buta bukanlah sikap yang arif. Hal tersebut hanya akan menjadi bumerang bagi pengembangan intelektual Islam. Di sinilah “sikap mental” kalangan intelektual Muslim perlu di kaji dan ditata kembali. Sikap ini bisa dikatakan cukup moderat dan cukup *acceptable* di kalangan Muslim.

Sedang solusi pokok yang dilontarkan oleh Tibi adalah *secularization*, yaitu industrialisasi sebuah masyarakat yang berarti difrensiasi fungsional dari

struktur sosial dan sistem keagamaannya.²⁹ Solusi ini nampaknya hanya akan membuka front yang berhadapan dengan kaum Muslimin pada umumnya. Sekularitas bukanlah pilihan yang realistis ketika ditawarkan dalam Islam, sehingga sudah pasti banyak tantangan terhadapnya. Meskipun Tibi merupakan seorang intelektual muslim yang handal, akurat dalam memotret problem yang dihadapi dunia pendidikan Islam pada umumnya, tapi untuk solusi lebih banyak diwarnai oleh sikap keagamaan sehari-harinya, yaitu seorang Muslim yang tidak taat menjalankan agamanya.

Jika bicara dalam konteks Pendidikan Islam di Indonesia, maka menurut hemat penulis, problem yang harus dihadapi tidaklah jauh berbeda dengan Arab, meskipun terdapat pula unsur-unsur yang membedakan. Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya, menghadapi persoalan seperti; lemahnya sumberdaya manusia, angka kemiskinan absolut akibat badai krisis ekonomi, menggelembungnya kuantitas anak-anak putus sekolah, kualitas lembaga-lembaga pendidikan. Dari aspek tujuan dan falsafah Nasionalisme Arab, sedang Indonesia dengan pancasilanya, terlebih lagi dalam iklim reformasi seperti sekarang ini, relatif lebih terbuka menyerap unsur-unsur luar.

Perubahan sosial merupakan sebuah proses yang menyeluruh dengan melibatkan semua komponen yang ada. Untuk itu pendayagunaan semua komponen dalam hal ini potensi insani dan non-insani yang terlibat di dalamnya (khususnya di sektor pendidikan) harus dimaksimalkan. Peluang dan kesempatan harus disediakan seluas-luasnya kepada semua komponen tersebut. Hal ini tentunya harus diikuti dengan perbaikan Islam di semua lini.

Perbaikan-perbaikan tersebut tak dapat dipungkiri harus diawali dengan tumbuhnya *political will* dari para aktor kunci, yang selanjutnya ditindaklanjuti pada dataran aksi. Beberapa hal yang perlu direkomendasikan sebagai solusi adalah:

1. Perlu segera diwujudkan Masyarakat/Komunitas Pendidikan Islam, yang terdiri para profesional, baik teoritis maupun praktisi Pendidikan

²⁹ Tibi, *The Crisis...*, *Op.Cit.*, hlm. 127.

Islam, yang secara penuh memiliki keberpihakan dan kepedulian terhadap nasib dan kemajuan Pendidikan Islam.

2. Perlu diciptakan iklim kondusif untuk dapat melahirkan kembali para intelektual Muslim yang handal, sebagaimana *encyclopedic scholars* di masa kejayaan Islam dahulu.
3. Perlu dilakukan dialog yang intensif dan terbuka dengan barat yang dimaksudkan untuk membandingkan, menimba, dan kalau perlu menyerap unsur-unsur yang dapat diterapkan bagi kemajuan Islam, khususnya Pendidikan Islam.
4. Perlu lebih dikembangkan model kajian/pendidikan yang mampu berdialog secara terbuka dengan unsur-unsur luar, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*, (New York; Warner Books,1991).
- A.L. Tibawi, *Islamic Education, Its Traditions and Modernization in the Arab National Systems*,(London: Luzac, 1972).
- Bassam Tibi, *The Crisis of Modern islam; A preindustrial Culture in the Scientific-technological Age*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988).
- , *Islam and the Cultural Accommodation of social Change*,(San Fransisco: Westview Press,1985).
- Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979).
- , *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).
- Mawar Saridjo, *Bunga Rumpai Pendidikan Agama Islam*,(Jakarta: Amisso, 1996).
- Philip K. Hitti, *History of Arabs, From the Earliest Time to the Present*, (London: MacMilan, 1970).
- Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Life and Thought*, (London:Luzac,1927).

POTRET PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH ARAB (Pemikiran A.L. Tibawi tentang Pendidikan Islam)

*B*erbicara tentang pendidikan Arab di era moderen, maka tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan pendidikan kaum muslimin yang telah ada sejak misi Nabi Muhammad itu sendiri. Sebab antara keduanya memiliki akar atau pertalian yang sangat erat, yaitu Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sebuah peradaban. Sehingga tidak akan dapat menilai secara tepat antara masyarakat Arab modern dan pendidikan Arab modern tanpa memiliki pemahaman yang akurat terhadap Islam sebagai faith dan Islam sebagai civilization.

A. Pendahuluan

Berbicara tentang Islam, khususnya Pendidikan Islam, tentu rujukan pertama akan menunjuk jazirah Arab, sebagai tempat lahirnya Islam. Bayangan yang muncul tentu praktik-praktik yang berlaku di jazirah ini akan dirujuk oleh belahan lain yang berpenduduk muslim pula. Bagaimanakah sesungguhnya potret Pendidikan Islam di Jazirah Arab? Tulisan ini akan mengangkat pandangan salah seorang tokoh yang secara intens mengamati praktik-praktik pendidikan yang berlaku di 14 negara Timur Tengah. Dari sini tentu diharapkan akan memperoleh gambaran yang dapat kita jadikan cermin bagi Pendidikan Islam di kawasan yang lain.

Berbicara tentang pemikiran para tokoh pendidikan Islam modern, nama A.L. Tibawi tidak begitu populer di Indonesia. Orang akan lebih melirik pada pandangan-pandangan Fazlur Rahman. Jika ditelaah lebih jauh justru pandangan Tibawilah yang sebetulnya lebih representatif dalam menyorot masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan Islam moderen.

Tibawi yang berlatar belakang seorang sejarawan ini, cukup menaruh perhatian yang serius terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di dunia Islam. Riset-risetnya memang lebih banyak dilakukan di negri-negri Muslim di Timur Tengah, namun bukan berarti bahwa analisis dan kesimpulannya tentang potret pendidikan Islam yang berkembang disana tidak memiliki benang merah sama sekali dengan potret di belahan lain. Pemikiran Tibawi sangat jeli dan kritis, terutama ketika ia berseberangan dengan pandangan orientalis Barat, hal ini setidaknya didorong oleh jiwa nasionalisme Arabnya yang cukup kuat dan upaya ilmiah untuk meluruskan pandangan mereka tentang Islam.

Karya-karya yang dijadikan sebagai acuan utama untuk menelaah pemikiran Tibawi tentang pendidikan Islam yaitu¹ *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National Systems*, dan *Arabic and Islamic themes: Historica, Education, and Literary Studies*.² Dua karya Tibawi –yang merupakan representasi pemikiran pendidikannya- ini jika dikategorisasikan termasuk dalam “Sejarah Sosial Pendidikan” (*Social History of Education*). Karakteristik pemikiran Tibawi –khususnya dalam dua buku ini menampilkan adanya *interplay* antara elemen pendidikan dan elemen sosial maupun politik. Karya-karya ini bercorak New History. Di samping pengkajian terhadap data-data ataupun arsip-arsip kesejarahan, pada saat yang sama ia juga memanfaatkan jasa disiplin-disiplin ilmu lain (*social sciences*) untuk mengadakan kritik dan interpretasi terhadap sejarah tersebut. Ia secara cermat mampu mengkorelasikan satu fenomena yang terdapat di sebuah negara dengan fenomena di negara lain.

Untuk memperkuat atau membandingkan pendapat Tibawi, maka akan dikompromikan dengan sumber-sumber lain, dengan harapan akan didapat sebuah hasil kajian cukup akurat.

B. Sekilas Tentang A.L. Tibawi

Berbicara tentang pemikiran seorang tokoh, tidak akan lengkap tanpa mengetahui latar belakangnya. A.L. Tibawi atau lengkapnya ‘Abd al-Latif Tibawi adalah seorang sejawahan –lebih tepatnya Medievalist- keturunan Arab Lebanon. Penulis belum berhasil menemukan riwayat masa kecil ataupun mudanya; apakah ia lahir dan sempat dibesarkan di Lebanon atau tidak? Ia adalah seorang penulis yang sangat kritis (*critical writer*). Dengan bekal penguasaan bahasa Inggris yang baik dan kemampuan intelektual yang sangat memadai, ia berhasil menjadi ‘professor’ di Harvard University kurang lebih 10 tahun, sekitar tahun 1960-1970. Sebagaimana diketahui oleh Harvard boleh dibilang merupakan “sarangnya orientalist”. Tokoh – tokoh keturunan Arab lain, yang bisa disepadankan dengan Tibawi antara lain Edward Said dan Albert Hourani sedangkan dari Barat adalah W. Montgomery Watt, dikarenakan ia memiliki sikap empati terhadap Islam.

¹ A.L. Tibawi, *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National System* (London: Luzac, 1972), merupakan hasil *field research* di 14 negara Muslim di kawasan Timur Tengah yaitu: Iraq, Trans-Jordan (Yordania-Palestina), Mesir, Sudan, Lebanon, Syria, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Saudi Arabia, Kuwait, Yaman, dan Yaman Selatan.

² A.L. Tibawi, *Arabic and Islamic themes: Historica, Educationa, and Literary studies* (London: Luzac, 1976).

Mengapa ia Hijrah ke Barat? Adalah karena didorong oleh sikap kritisnya yang berupaya untuk meluruskan pandangan para orientalis Barat yang keliru dalam memandang Islam. Dalam posisi seperti itu maka ia dapat digolongkan sebagai seorang *Revisionist*. Meskipun ia berada di sarang orientalis, namun ide dan kritiknya -secara konsisten- banyak ditujukan untuk mengcounter ide-ide atau pandangan-pandangan para orientalis. Anggapan para orientalis Barat atas kritik-kritik Tibawi berada dalam lingkungan orientalist, yang setidaknya mengenal betul pola-pola orientalisme Barat.

Sebagaimana umumnya orang Arab, ia memiliki semangat Nasionalisme Arab yang kuat namun tidak kaku, dikarenakan kapasitas intelektualnya yang bersikap fair. Dalam diri seorang Tibawi cukup terdapat keseimbangan antara pandangan *tradisional* dan *modernis*, yaitu keseimbangan antara seorang peneliti, modern-scholar di satu sisi, dan kajian-kajiannya yang cukup mendalam terhadap literatur Islam klasik di lain sisi. Ia berpandangan *Sunni* namun pemikirannya bisa juga sangat rasional. Tibawi meninggal dalam sebuah kecelakaan jalan raya sekitar pertengahan dekade 1980-an di Amerika Serikat.³

Ide-idenya banyak diadopsi oleh para penulis lain seperti Jonathan Berkey dalam *Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*, juga oleh Albert Hourani dalam *A History of the Arab Peoples*. Sementara itu Tibawi juga pernah menentang antara lain, George Makdisi, seputar beberapa aspek yang disimpulkan Makdisi tentang 'asal-usul dan ciri Madrasah', yang oleh Tibawi dianggap hanya menyorot pada institusi (formal) dan melewatkan aspek-aspek yang berkembang di luar institusi tersebut. Para peneliti sejarah pendidikan Islam yang menulis dalam bahasa-bahasa Barat menerjemahkan Madrasah secara bervariasi, misalnya: '*schule*' atau '*hochschule*' (Jerman), '*School*', '*college*' atau '*Academy*'. (Inggris). Tetapi, tak satupun dari kata-kata ini yang benar-benar memadai untuk menggambarkan secara tepat.⁴ *Judgment* Tibawi didasarkan pada contoh-contoh dari masa awal sejarah kemunculan Madrasah dan institusi-institusi pendidikan lainnya yang berkembang di Iraq, Syiria, serta wilayah Timur. Apa yang dikemukakan oleh Tibawi akan mengingatkan kita untuk

³ Dikarenakan sejauh ini penulis mendapatkan kesulitan dalam pelacakan sumber tertulis, menyangkut latar belakang A.L. Tibawi penulis lebih banyak memperoleh data melalui wawancara dengan Abdurrahman Ma'ud, Ph.D.

⁴ A.L. Tibawi, "Origin and Character of Madrasah", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 25 (1962): 227, sebagaimana dikutip oleh Hasan Asari dalam *Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 44.

melihat secara luas, tidak sebatas pada struktur institusional dari pendidikan tinggi tapi juga kepada kegiatan-kegiatan pengajaran secara personal serta berkembang dalam lembaga-lembaga informal yang merupakan upaya “*the transmission of Muslim knowledge*” (transmisi ilmu pengetahuan Muslim).⁵

Beberapa buku lainya buah karya Tibawi antara lain *Arab Education in Mandatory Palestine 1918-1948*, *British Interest in Palestine 1800-1901*, *America Interest in Syiria 1800-1901* dan *A Modern History of Syiria including Lebanon and Palestine*. Jika dilihat, khususnya, dalam buku *Islamic Education* nampak bahwa kontak intelektual Tibawi cukup *balance*. Kolega-koleganya mencakup berbagai belahan pusat-pusat intelektual seperti, King Abdul Aziz University di Jeddah, Ain Shams University di Cairo, British Council, America University of Beirut, juga termasuk Mr.H.L. Elvin direktur University of London Institut of Education.

C. Falsafah Pendidikan

Konsep Muhammad tentang ilmu pengetahuan telah membangun kehidupan intelektual Islam dan bagian yang secara prinsip tidak dapat berubah. Pengaruh dan perkembangan pada masa-masa selanjutnya telah mampu menyempurnakan (konsep tersebut) dengan jalan meyuntikkan ide-ide baru kedalam struktur fundamental pemikiran Nabi atau dengan memperkaya materinya.⁶

Berbicara tentang falsafah pendidikan Islam. Pendidikan Islam boleh dibilang tumbuh bersamaan dengan proses penyebaran Islam itu sendiri. Menurut Tibawi, pada masa awal pertumbuhan (Islam) prinsip-prinsip dasar dari pendidikan Islam adalah (a) belajar dan mengamalkan/mengajar (mencari dan mengamalkan Ilmu) sebagai pekerjaan yang tergolong kewajiban agama (*religious duty*), kemudian (b) bagi mereka yang terkait dengan aktivitas tersebut sepakat pada satu tujuan, mendapatkan berkah ataupun ridla dari Allah semata, aktivitas mereka merupakan gerakan yang bersifat spontan tanpa disertai tujuan material dan organisasi yang sistemati. Dalam prakteknya, falsafah ini seringkali dimodifikasi baik oleh kebijakan yang diambil oleh negara maupun oleh praktek-praktek individu. Tetapi secara teoritis, dalam pemikiran dan hasil karya para

⁵ Jonathan Berkey, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*, (Princeton: Princeton University Press, 1992), hlm. 17.

⁶ Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant, the Concept of Knowledge in Medieval Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1970), hlm. 19.

teolog, ahli tasawuf maupun guru prinsip-prinsip dasar tersebut hanya menerima tidak lebih dari sekedar elaborasi dan ilustrasi.⁷

Dari prinsip pertama yang dimaksudkan dalam term adalah ilmu pengetahuan dan belajar segala sesuatu tentang agama (*religious knowledge and learning*). Untuk dapat sampai kepada pemahaman yang baik, maka harus menguasai berbagai ilmu bantu, yang diharapkan mampu memfasilitasi pencapaian tujuan utama. Upaya penguasaan ilmu-ilmu bantu ini berkembang sedemikian pesat, yang meliputi berbagai disiplin seperti; tata bahasa, Retorika, Logika dan bahkan filsafat. Seyyed Hossein Nasr menyatakan, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, suatu doktrin atau ide entah itu benar atau salah, tidak bisa begitu saja disisihkan atau diabaikan jika keberadaannya diketahui. Jika pandangan mereka itu benar, maka harus diterima dalam skema ilmu pengetahuan Islam dengan pertimbangan nilai-nilai universal dan jika mereka salah maka harus dibantah. Dalam kedua kasus ini, pandangan-pandangan tersebut harus dipelajari dan harus lebih baik jika diketahui/dipahami.⁸ Sedangkan prinsip kedua nampaknya telah mengalami modifikasi. Ada diantara mereka yang kemudian menerima imbalan materi karena dipaksa oleh keadaan. Perkembangan selanjutnya, pemerintah saat itu mengambil langkah pendanaan dalam pengelolaan pendidikan secara formil termasuk bagi kesejahteraan guru.⁹

Pada masa kejayaan itu lahirlah tokoh-tokoh seperti al-Ghazali, yang ide-idenya mampu mendominasi pemikiran pendidikan Islam hingga berabad-abad setelah meninggalnya, karena dipandang *balance* dalam memberikan porsi bagi wahyu, pengalaman batin, pemikiran rasional, deduksi logis dan observasi empiris.¹⁰ Tibawi mencatat pula nama-nama lain seperti Az-Zarnuji, Ibn Khaldun mewakili masa klasik dan tokoh seperti Muhammad Abduh untuk masa moderen.

D. Tinjauan Historis

Pendidikan Islam pada masa awal adalah berangkat dari tema utama yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang direpresentasikan oleh perkataan dan perbuatan Muhammad, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

⁷ Tibawi, *Arabic...*, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Life and Thought*, (London: George Allen & Unwin, 1970), hlm. 57.

⁹ Tibawi, *Arabic...*, *Loc. Cit.*

¹⁰ Tibawi, *Islamic Education*, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Berbicara tentang pendidikan Arab di era moderen, maka tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan pendidikan kaum muslimin yang telah ada sejak misi Nabi Muhammad itu sendiri. Sebab antara keduanya memiliki akar atau pertalian yang sangat erat, yaitu Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sebuah peradaban. Sehingga tidak akan dapat menilai secara tepat antara masyarakat Arab modern dan pendidikan Arab modern tanpa memiliki pemahaman yang akurat terhadap Islam sebagai *faith* dan Islam sebagai *civilization*.¹¹ Inilah hal pokok yang ditekankan oleh Tibawi ketika berbicara tentang pendidikan Islam di Arab khususnya. Sehingga dari essensi permasalahan ini ia mengkritik Barat, bahwa banyak literatur Barat yang telah salah memahami bahkan terjadi distorsi dalam mengkaji Islam.

Karya-karya klasik Arab sepakat bahwa pendidikan kaum muslimin dimulai dengan satu tema: Melacak akar-akar al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan cerminan dari perkataan dan praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari situ dimungkinkan didapat asal-usul dan karakter pendidikan Islam. "*Amar ma'ruf nahi mungkar*" merupakan standar moral yang penting, sehingga melahirkan karakter khusus pendidikan Islam pada masa Nabi. Totalitas individu merupakan tuntunan utama: Pemimpin merupakan pendidik, *model*. Pendidikan merupakan *social order*, sehingga praktek-praktek pada masa Nabi, apa yang dilakukan merupakan pola-pola atau 'jiwa' yang *interpretable*, menuntut tumbuhnya inovasi-inovasi baru.

Beberapa perubahan radikal yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, dan selanjutnya dikembangkan pada masa-masa kejayaan Islam adalah: *pertama*, budaya *Iqra'*. Budaya ini mengubah secara revolusioner sebuah masyarakat atau lingkungan yang *illiterate* (buta huruf) serta melawan tradisi yang bersifat *oral* (lisan, termasuk hafalan) menuju masyarakat yang memiliki budaya ilmiah; membaca mengkaji dan meneliti. *Kedua*, seruan untuk gemar mencari ilmu, dan bahwa mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Menurut ibn Khaldun, karakteristik yang menonjol –yang merupakan aktualisasi dari seruan ini- adalah bahwa pendidikan/upaya mencari ilmu dari para pelajar/ilmuwan pada masa keemasan Islam sangat didukung dengan perjalanan (*travelling*) dalam rangka mencari ilmu pengetahuan dan mencari /berguru

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

kepada para ulama *authoritative* pada masa itu.¹² *ketiga*, tumbuhnya semangat mencari ilmu (*talab al 'ilm*) dan mengajarkannya kepada orang lain, dengan dilandasi semangat mencari ridha Allah semata.

Prinsip-prinsip tersebut dapat diaktualisasikan hingga mencapai hasil yang memuaskan. Keberhasilan perluasan wilayah Islam oleh dua dinasti besar, Amawiyah dan Abbasiyah, semasa *the golden age of Islam*, mengindikasikan bahwa Islam maupun bahasa Arab mampu secara perlahan diadopsi secara sukarela di sebagian besar wilayah taklukan. Sehingga secara gradual kerajaan Islam menjadi sebuah *Multiracial cultural unit*, dimana Islam menjadi agama yang dominan dan bahasa Arab merupakan alat untuk mengekspresikan diri dalam banyak literatur. Sebagai sebuah sistem peradaban, Islam sangat *receptive* dan *adaptable*. Ia mampu *absorb* dan mengasimilasi nilai budaya yang telah ada sebelumnya seperti; Yunani, Persia dan lainnya.¹³ Tibawi menggaris-bawahi kontribusi terbesar bagi dunia Islam adalah ketika terjadinya proses asimilasi dengan warisan Yunani.

E. Tantangan Modernisasi Pendidikan

Beberapa hal pokok yang menjadi tantangan dunia pendidikan Islam di jazirah Arab adalah (1) pengaruh dari Turki Uthmani, sebab sebagian dari mereka merupakan bekas wilayah kerajaan Turki Uthmani, (2) Dominasi dan hegemoni kolonial Barat, khususnya terhadap dunia pendidikan (3) Gerakan Missionaris dalam dunia pendidikan, dimana mereka yang merupakan golongan Kristen minoritas ini sangat menikmati dukungan (*previllege*) baik secara politis maupun pendanaan.

Satu peristiwa besar yang perlu dicatat adalah ketika Barat melewati masa Renaissance, menuju penerapan temuan-temuan ilmiah dalam seni perang, pada akhirnya berhasil menaklukkan dominasi Turki Uthmani. Mau tidak mau hal ini mulai berpengaruh terhadap penguasa Ottoman untuk melirik kemajuan itu, bagaimana meminjam atau mengadopsinya. Konsekuensi dari hal tersebut pada gilirannya membawa pengaruh pula ke dalam sistem pendidikan modern di negara-negara Arab, sebagai penerus kerajaan Uthmani.

¹² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (English version), Terj. Franz Rosenthal, (Princeton: Princeton University Press, 1992), hlm. 426.

¹³ Tibawi, *Islamic Education, Op. Cit.*, hlm. 21.

Sedang ketika berhadapan dengan dominasi dan hegemoni Barat, Faktor yang makin membuat rumit adalah bahwa pendidikan baru tersebut dicangkok dari organisme hidup lainnya di Eropa, dengan latar belakang kultural, struktur intern dan konsistensinya sendiri. Meskipun hal seperti itu juga pernah terjadi pada masa awal Islam dengan mengalirnya filsafat dan sains Yunani dalam intelektual Islam dan aliran spiritual, perbedaan pokok dari situasi yang sekarang adalah bahwa peradaban Yunani telah musnah sementara peradaban Islam tetap hidup dan kuat, serta mampu menghadapi tantangan dari sains-sains Yunani dalam tema-temanya sendiri. Tetapi peradaban Islam ketika menghadapi sains-sains Barat modern berbeda pada berbagai posisi yang tidak menguntungkan baik secara psikologis maupun intelektual yang disebabkan oleh dominasi politik, agresi ekonomi dan hegemoni intelektual Barat¹⁴.

Asumsi yang dilontarkan oleh Tibawi menyebutkan, baik dalam unit besar maupun kecil, kaum Muslim harus menghadapi suatu kenyataan bahwa modernisasi yang terjadi pada paruh kedua abad ke-19 telah menimbulkan *a crisis of orientation* (Krisis orientasi).¹⁵

Baik Dominasi kolonial Barat maupun gerakan-gerakan Missionaris merupakan dua komponen yang saling terkait dan tak terpisahkan satu sama lain, dan merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Arab. Setidaknya ada dua asumsi yang biasa berlaku dalam iklim kolonial; *pertama*, pemerintah kolonial beserta gerakan Missionarisnya berupaya untuk “menina-bobokan” kehidupan/aktivitas intelektual di negara-negara jajahan (dalam hal ini negara-negara Muslim Arab) dan selanjutnya, kedua, kolonial Barat hendak menguasai mereka secara kultural, dengan sistem pendidikannya. Senada dengan Tibawi, Syed Hussein Alatas menggambarkan: “*Signifikasi pendidikan kolonial terletak pada usaha-usahanya untuk menghambat munculnya tradisi terbelakang sekalipun . . . Regime kolonial menciptakan kebiasaan pacuan kuda, minum bir, kehidupan klub malam, musik bercita rasa Barat, olahraga model Barat dan jenis-jenis lainnya. Ia (regime kolonial) biasa saja merangsang ketertarikan intelektual dalam skala yang besar, tetapi hal itu tidak dilakukan.*”¹⁶

¹⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Traditions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 71.

¹⁵ Tibawi, *Arabic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 108.

¹⁶ Sebagaimana dikutip oleh Bassam Tibi dalam *The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific-technological Age*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988), hlm. 16.

Pada dataran filosofis, kolonialisasi di sebagian besar negara Arab sekitar abad ke-19, menimbulkan pengaruh yang signifikan, lebih khusus dalam dunia pendidikan. Berbagai pernyataan mendasar muncul : “Mana yang baik dan mana yang buruk”, “Apa atau mana yang tepat untuk diambil dan untuk dihindari “, melingkupi atmosfer pendidikan di dunia Arab saat itu.¹⁷

Menurut Arkoun, Krisis Barat yang diakibatkan oleh kolonialisasi dan akselerasi industrialisasi disertai dengan kemajuan dalam kematangan pemikiran Barat, dan hal ini telah memperlebar jurang pemisah antara pemikiran Barat dan pemikiran Arab, karena pemikiran Arab hampir sepenuhnya berkuat dengan masalah politik dan pembangunan. Sekarang, jika pembangunan merupakan suatu fenomena total, yang menyentuh setiap aspek kemasyarakatan dan keseluruhan rentangan pemikiran, maka pengkajian ulang sejarah Islam Arab awal dan lebih mutakhir secara kritis dalam kerangka kepentingan ilmu tidak dapat ditunda lagi.¹⁸

F. Beberapa Permasalahan Krusial

Pasca Perang Dunia I jazirah Arab terbagi menjadi dua area besar, yang memiliki ketergantungan besar terhadap Inggris dan Perancis. Di antara keduanya ada Libya kepada Italia dan Maroko kepada Spanyol. Sistem pendidikan di 14 negara Muslim Arab, memulai proses modernisasi yang melalui langkah-langkah yang cukup berarti hingga tahun 1967. Proses ini menunjukkan bagaimana sebuah “Tradisi besar” mengalami proses fragmentasi dan transformasi. Tibawi dalam mengkaji permasalahan ini menarik beberapa agenda besar yang secara umum dihadapi oleh negara-negara Muslim Arab tersebut.

Tibawi menyoroti kompleksitas persoalan pendidikan, khususnya terhadap sistem pendidikan yang diterapkan di negara-negara Muslim Arab, yang *notabene* sebagian besar adalah bekas negara-negara jajahan, khususnya Inggris dan Perancis (dan beberapa negara Eropa lainnya). Dalam posisi yang demikian tentunya dapat dimengerti akan terjadi proses tarik menarik antara hegemoni Barat yang diwariskan penjajah dan upaya perbaikan dan pencarian identitas Sistem pendidikan Islam. Di sisi lain yang berpengaruh kuat adalah ‘Nasionalisme Arab’, yang implikasinya tercermin dalam polarisasi sistem di masing-masing

¹⁷ Tibawi, *Islamic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 68.

¹⁸ M. Arkoun, *Pemikiran Arab*, Terj. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 126.

negara. Tibawi juga mencatat adanya beberapa problematika sosial yang telah cukup akut, yang tentunya akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap langkah-langkah perencanaan pendidikan (hal ini akan dipaparkan dalam pembahasan berikutnya). Dalam kasus ini Tibawi berusaha mencari satu formulasi dengan tetap menyadari keterbatasan karena ada kekhususan di masing-masing negara tersebut yang dipandang mampu memberikan solusi terhadap dunia pendidikan Islam pada umumnya.

Beberapa permasalahan krusial yang dihadapi meliputi:

1. Dari Islam menuju Nasionalisme Arab

Tidak dapat disangkal bahwa Muhammad bermaksud untuk mempersatukan semua bangsa Arab ke dalam sebuah *Persaudaraan Islam*.¹⁹ Penyatuan tersebut tidak hanya ditujukan kepada mereka yang bergaris keturunan Arab, tetapi menjangkau seluruh komponen bangsa di jazirah Arab.

Pada masa kejayaan Islam (baik Ammawiyah maupun Abbasiyah), telah muncul dan berkembang pandangan hidup yang *universal*, serta dikembangkan sikap *toleransi* oleh umat maupun pemerintahan Muslim terhadap warga yang non-Muslim untuk berperan aktif dalam mencapai kejayaan bersama sebagai bangsa.²⁰

Tibawi melihat bahwa telah terjadi pergantian atau perubahan radikal dalam pemikiran dan praktek pendidikan dari orientasi *religious* ke *nasional*. Perubahan tersebut ditengarai karena adanya keraguan terhadap rata-rata Muslim Arab, bahwa Islam lebih dipahami, secara intelektual dan emosional, daripada *Nasionalisme Arab*.²¹ Di dalamnya terdapat elemen-elemen umum yang dipahami, atau mungkin disepakati, meski dalam suasana heterogenitas agama. Meskipun dalam hal ini mereka tidak bersatu dalam sebuah bentuk kesadaran universal, namun filsafat Nasionalisme Arab ini tetap merupakan suatu ikatan, termasuk salah satunya filsafat pendidikan Arab modern. Sentimen Nasionalisme Arab ini secara tidak langsung merupakan *pemisahan Peradaban dengan Agama*.²²

¹⁹ De Lacy O'Leary, *How Greek Science Passed to the Arabs*, (London: Routledge & Keagan Paul, 1980), hlm. 134

²⁰ Tibawi, *Arabic...*, *Op. Cit.*, hlm. 100.

²¹ Tibawi, *Islamic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 197.

²² Tibawi, *Arabic...*, *Op. Cit.*, hlm. 109.

Menurut Philip K. Hitti, jika dalam Perang Dunia I komponen-komponen Arab bekas Kerajaan Uthmani memutuskan untuk bersatu dalam ikatan baik secara penuh maupun semi kebangsaan, maka dalam Perang Dunia II semakin nyata dan solid karena faktor tekanan politik Zionis, yang dalam pandangan orang Arab di manapun berada merupakan *an intrusive movement* (gerakan pengacau). Faktor inilah yang selanjutnya lebih mempererat persatuan di antara mereka.²³ Kepentingan bersama dan solidaritas di antara mereka selanjutnya terlembaga dalam suatu pakta, Liga Arab, yang didirikan di Kairo pada bulan Maret 1945. Pakta ini mengindikasikan adanya kerjasama yang semakin intense dalam bidang pendidikan, perdagangan dan komunikasi.

Indikasi dari Nasionalisme Arab ini tampak ketika dimasukkannya mata pelajaran *Bahasa Arab, Sejarah Arab dan Peradaban Islam* ke dalam kurikulum pendidikan di Arab.²⁴

Menurut Tibawi, bagaimanapun dalam mengadopsi ide-ide Eropa, termasuk nasionalismenya, merupakan hal yang tak dapat dielakkan, namun demikian mereka (Arab) harus dapat memberinya sentuhan warna lokal. Beberapa pemikiran tentang 'nasionalisme keagamaan' adalah mungkin, demikian pula dengan 'nasionalisme regional' maupun nasionalisme etnis', dimana ketiganya dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan secara kaku.²⁵

2. Kualitas Pendidikan

Pada akhir paruh pertama abad 20, mayoritas negara Arab untuk pendidikan dasar menerapkan wajib belajar 6 tahun. Namun dalam kenyataannya, masih jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan. Problem tersebut terkait erat dengan lingkungan sosial Arab. Pernyataan yang masih diperdebatkan; Apakah sekolah itu untuk anak laki-laki, perempuan atau campuran? Di kota, desa atau di daerah Badui? Pada tingkat berapa drop-out dimulai sebelum wajib belajar 6 tahun?

Kesadaran akan arti penting pendidikan masih sangat rendah, dibuktikan dengan tingginya angka *illiteracy* (buta huruf) dan angka drop-out pelajar di tingkat pendidikan dasar. Tibawi melihat bahwa dalam masa

²³ Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: MacMilan Press, 1974). Hlm. 756.

²⁴ Tibawi, *Islamic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 202.

²⁵ Tibawi, *Arabic...*, *Loc. Cit*

ini tidak terdapat bantuan pendidikan kepada anak-anak yang putus sekolah baik yang sementara maupun tetap untuk alasan-alasan sosial dan ekonomi. Pangkal permasalahan ini disebabkan, *decision maker* lebih di tangan politisi daripada ahli pendidikan. Masih ditambah lagi dukungan dana untuk pendidikan yang minim dari kementrian pendidikan (meskipun dana tersebut dihimpun dari publik), serta tidak ada dorongan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi. Untuk itu Tibawi merekomendasikan perlunya perubahan yang radikal, dikarenakan kondisi yang ada hanya bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang berkualifikasi rendah. Di lapangan, statistik lapangan kerja sangat buruk, sehingga perencanaan ketenaga kerjaan (melalui pendidikan) juga akurat.

Adalah hal mendasar yang menjadi keprihatinan Tibawi, yaitu penciptaan “masyarakat terdidik”. Kesadaran untuk mensukseskan wajib belajar tingkat dasar yang minim, jelas akan berpengaruh untuk jenjang-jenjang berikutnya. Pada gilirannya akan terjadi kelangkaan tenaga-tenaga terdidik yang diproyeksikan sebagai pemimpin di masa depan. Unuversitas sulit mendapatkan siswa yang sesuai kualifikasi yang mereka harapkan.

Secara umum pendidikan *kejujuran* dan *teknik* lebih bersifat *decorative*.²⁶ Keberadaannya hanya sekedar hiasan di pinggiran sistem pendidikan di Arab. Sistem pendidikan yang dikembangkan lebih bertujuan mencetak pegawai kantor, atau profesi-profesi yang bersifat umum. Hourani menyebutkan, terdapat kecenderungan untuk berkonsentrasi pada posisi di pemerintahan atau profesi-profesi umum daripada pendidikan teknik dan kejujuran, pendayagunaan kemampuan tangan (keterampilan) sebagaimana akal masih merupakan yang asing dalam konsep pendidikan Islam (modern) sebagaimana telah berkembang pada kultur-kultur pra-modern.²⁷

3. Perencanaan dan Tujuan

Ketimpangan-ketimpangan kualitas maupun kuantitas yang terjadi seperti, kualitas lembaga pendidikan, problem illeteracy, pendidikan antara pria dan wanita, kesenjangan desa dan kota, problem putus sekolah, materi umum dan teknik, nampaknya memperoleh pencerahan ketika ditemukannya ladang-ladang minyak. Adanya keuntungan besar dari minyak

²⁶ Tibawi, *Islamic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 200.

²⁷ Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*, (New York: Warner Books, 1991), hlm. 391.

ini, mendorong untuk mengalokasikan bantuan untuk *pertahanan* dan *pendidikan*.²⁸ Di satu sisi kekayaan ladang minyak perlu dipertahankan dari ancaman luar, dan di lain sisi perlu tenaga terdidik dan terampil.

Tibawi mensyaratkan adanya pembenahan secara menyeluruh pendidikan dasar yang masih rapuh, selanjutnya baru menempatkan pada prioritas kedua; pendidikan kejuruan dan Iptek. Namun dibalik itu nampaknya masih ada prasyarat lagi yang ini sangat serius, yaitu minimnya penyelenggaraan sensus penduduk sebagai basis perencanaan.

Perjanjian Penyatuan Budaya Arab yang ditanda tangani tahun 1964 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah sebagai berikut :

*“Penciptaan generasi-generasi Arab yang percaya kepada Tuhan, loyal kepada tanah Arab, percaya akan kemampuan sendiri dan bangsanya, sadar akan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan kemanusiaan.. membekali dengan ilmu pengetahuan dan moral, pemerataan hasil kemajuan masyarakat Arab dengan memelihara posisi kemuliaan bangsa Arab, melindungi hak-hak untuk bebas, aman dan menghargai kehidupan...”*²⁹

Tujuan tersebut dalam pandangan Tibawi lebih bersifat retorik, ideal dan tidak konkret. Tujuan tersebut belum menyentuh implikasi praktis. Terdapat dua budaya yang dihadapi atas ketidakseimbangan posisi materi umum dan teknik. Pertama, keterasingan generasi muda terdidik dan lingkungannya, dan kedua, proses pendidikan hanya menghasilkan klas “penganguran intelektual” untuk itu perlu belajar dari negara maju, yang kesempatan kerja sedemikian bervariasi dan tersedia untuk semua jenis keahlian. Tibawi juga mengajukan tawaran *Sentralisasi* sistem-sistem pendidikan di dunia Arab, dalam rangka perencanaan yang lebih terkoordinir.

4. Pendidikan Tinggi

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi di Arab adalah kelemahan baik infra maupun supra-struktur-nya. Para lulusan sekolah lanjutan pada umumnya kurang memenuhi standard kualitas yang diharapkan untuk dapat dididik di perguruan tinggi. Hal ini dimungkinkan karena masih banyak agenda permasalahan yang belum terselesaikan pada

²⁸ Tibawi, *Islamic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 205.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 207.

jenjang dasar dan menengah. Sedang masalah supra-struktur, adalah ketiadaan atau minimnya jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi para sarjana yang memiliki gairah keilmuan tinggi, serta kesenjangan antara lapangan kerja dengan disiplin-disiplin yang mereka geluti.

Standar kualitas lulusan sekolah lanjutan di Arab khususnya sekitar tahun 1960-an masih jauh bila dibandingkan dengan di Inggris, Prancis ataupun Rusia. Terdapat alasan-alasan politis dan sosial yang kuat mewarnai kondisi ini. Hal ini dikarenakan otoritas dan dominasi universitas-universitas tua yang keterbukaannya patut dipertanyakan, serta ketatnya pemberian ijin bagi universitas-universitas baru yang akan muncul, dengan berbagai persyaratan yang lebih berorientasi pada tatanan yang telah diciptakan universitas tua.

Bassam Tibi menggambarkan bahwa potret di hampir seluruh Universitas Islam di Arab dan Afrika, para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dengan metode hafalannya dibekali dengan sebuah sertifikat/ijazah dan bukan dengan “kualifikasi substansial”, yang dapat diterapkan atau dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Belajar, oleh kebanyakan orang dianggap hanyalah urusan pemenuhan kebutuhan perut (*a bread-winning ticket*) atau tiket untuk masuk ke posisi-posisi yang lebih baik. Dalam perbincangan dengan otoritas akademik di berbagai negara Muslim dan negara berkembang lain, pada umumnya bagi para sarjana tidak ada tuntutan akademik terhadap disiplin/bidang keilmuan mereka sesuai dengan jenjang akademik yang diperolehnya, bahkan juga terhadap universitas-universitas dari mana mereka berasal.³⁰

Selanjutnya hal lain yang dicatat oleh Tibawi adalah ‘keyakinan diri’ yang kuat boleh dibilang berlebihan dari otoritas akademik Arab yang jarang sekali mengirim siswa ke luar negeri untuk belajar materi-materi tertentu, yang tidak dapat diperoleh di tempatnya (sains dan teknologi). *Overconfidence* yang menganggap bahwa kualitas mereka setara bahkan lebih hebat daripada Barat, pada gilirannya menjadi bumerang. Jika ditelusuri, maka muaranya akan kembali ke Nasionalisme Arab. Di sisi lain muncul pula kekhawatiran, bahwa mereka yang dikirim ke luar negeri nantinya akan mengalami *brain-drain*.³¹ Mereka yang telah menyelesaikan

³⁰ Bassam Tibi, *Islam ...*, *Op. Cit.*, hlm. 110-112.

³¹ Tibawi, *Islamic ...*, *Op. Cit.*, hlm. 220.

studinya baik arab maupun lainnya merasa lebih nyaman, mendapatkan penghargaan dan penghidupan yang lebih layak di luar negeri daripada bila mereka pulang ke tanah air. Dan sebaliknya, jika mereka kembali ke negeri asal akan mengalami *culture shock*.

Fenomena tersebut membuat ketidak puasan bagi mereka yang kritis dan dahaga akan intelektualisme. Respon ataupun protes mereka akhirnya membuahkan hasil, dengan berdirinya beberapa universitas asing, seperti di Kairo dan Beirut. Kehadiran beberapa universitas asing tersebut memberikan angin segar bagi dinamika keilmuan di Arab.

5. Metode Pengajaran

Pengajaran tingkat universitas ditengarai masih bersifat *spoon-feeding* (menyuapi), menimbulkan asumsi bahwa proses pendidikan hanya mempersiapkan siswa hanya untuk menghadapi ujian atau menulis paper. Meskipun terdapat pula keunggulan *personal contact* antara guru-murid, yang selanjutnya dikembangkan oleh Barat menjadi sistim "tutorial".³² Kritik Tibawi dalam hal ini adalah, bahwa pengajar kurang memberikan ruang bagi tumbuhnya semangat untuk meneliti, menemukan sesuatu yang baru, serta akulturasi bakat/kemampuan siswa secara maksimal.

Metode *spoon-feeding* pada gilirannya akan terkait dengan model belajar hafalan. Sinyalemen Tibi menyebutkan bahwa Universitas-universitas Islam baik di Arab maupun di Afrika dengan berbagai bidang studinya mendasarkan semata-mata pada kapasitas belajar model hafalan (*rotelearning*) dalam rangka mencapai kelulusan. Di sebagian besar negara berkembang, *rote-learning* mengambil empat di publik dan bisa diminati oleh siapapun, di jalan-jalan dan di sudut-sudut kota.³³

Sedangkan Fazlur Rahman menilai bahwa kondisi yang demikian itu sudah berlangsung lama, kemerosotan secara gradual standar-standar akademis yang berlangsung selama berabad-abad tentunya terletak pada kenyataan bahwa, karena jumlah buku-buku yang tertera dalam kurikulum sedikit sekali, maka waktu yang diperlukan untuk belajar juga terlalu singkat bagi siswa untuk dapat menguasai materi-materi yang seringkali sulit untuk dimengerti tentang aspek-aspek tinggi ilmu keagamaan pada usia yang relatif

³² *Ibid.*, hlm. 217.

³³ Bassam Tibi, *Islam and Cultural Accomodation of Social Change* (San Francisco: Westview Press, 1991), 110.

muda dan belum matang. Hal ini pada gilirannya menjadikan belajar lebih banyak bersifat tekstual daripada pemahaman pelajaran yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan dorongan hafalan daripada pemahaman sebenarnya. Kenyataan bahwa abad-abad pertengahan yang akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan bukanya karya yang pada dasarnya orisinal. Fenomena ini berkembang secara fundamental dari kebiasaan-kebiasaan berkonsentrasi pada buku dan bukannya pada pelajaran. Bisa dipastikan bahwa banyak pemikir yang asli dan seringkali juga memiliki kadar orisinalitas besar terdapat pada komentar-komentar tersebut, tetapi orisinalitas yang mendasar dalam suatu subyek adalah relatif jarang.³⁴

E. Catatan

Dari sekian kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan Islam di Arab khususnya, Tibawi yang ide-idenya banyak diwarnai dengan filsafat Humanisme merekomendasikan beberapa solusi. Konsep filosofis yang diajukan olehnya adalah kembali kepada semangat ilmiah, bahwa belajar dan ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai sesuatu yang netral, melampaui batasan-batasan geografis maupun kebangsaan, sebagaimana yang pernah terjadi pada *the Golden Age of Islamic Civilization* (masa kejayaan peradaban Islam) dan masa *Medieval Christendom*.³⁵ Pada masa ini Pendidikan betul-betul diabadikan kepada Agama. Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan keyakinan, memelihara tatanan sosial universal, mentransmisikan budaya universal. Dengan kata lain perlu reposisi fungsi pendidikan secara proporsional. Dalam hal ini semangat ilmiah berupa semangat untuk menyelidiki selanjutnya menemukan mutlak dihidupkan, dan kelemahan-kelemahan metodologis dalam pengajaran harus segera disadari dan dikikis.

Tibawi sebagaimana orang arab lainnya, memiliki nasionalisme Arab yang kuat. Ia termasuk orang yang agak benci terhadap pola pendidikan Barat. Namun demikian ia cukup realistis dalam menangkap dinamika modernisasi pendidikan Islam. Kemajuan Barat adalah sesuatu yang sulit untuk ditolak. Langkah kompromistis yang dapat diambil adalah mewarnainya dengan unsur-unsur lokal. Tidak semua ide yang berasal dari Barat itu harus ditolak.

³⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), hlm. 189.

³⁵ Tibawi, *Islamic ... Op. Cit.*, hlm. 236.

Hal lain yang disarankan oleh Tibawi adalah perlunya penyelenggaraan sensus penduduk secara periodik, sebagai basis awal perencanaan pendidikan. Baru selanjutnya diikuti dengan pembenahan secara menyeluruh di semua lini/tingkat pendidikan. Upaya menanamkan arti pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius jika tidak ingin terjadi kelangkaan sumberdaya manusia untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Dengan kata lain pembenahan 'infra' dan 'supra struktur pendidikan tinggi harus ditangani secara serius. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka *decision maker* harus berada di tangan orang yang tepat, bukan politisi.

Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah, ditumbuhkannya kesadaran tentang pentingnya pendidikan kejujuran dan teknik dalam sistem pendidikan di Arab. Sebab tak dapat dipungkiri, kemajuan peradaban satu bangsa salah satunya banyak ditentukan oleh kemajuan bidang ini.

Kritik penulis terhadap Tibawi adalah; dari sudut sejarah terdapat suatu kelemahan yaitu, ketika ia membahas tentang Pendidikan Islam hanya menyorot pada masa Nabi, masa keemasan Islam namun selanjutnya meloncat ke masa kontemporer (*Contemporary Education*). Masa-masa di antara keduanya, di mana umat Islam mengalami kemunduran tidak disinggung. Disini terjadi keterputusan pembahasan, sehingga akar-akar permasalahan yang menyebabkan kemunduran atau kemerosotan dunia Pendidikan Islam kontemporer tidak terlacak.

Namun demikian sebagai seorang sejarawan, ia sangat jeli dan komprehensif ketika berbicara tentang dunia Pendidikan Islam, khususnya di Arab. Meskipun sebagian pemikirannya; seperti Sentralisasi sistem pendidikan di Arab sangat sulit untuk direalisasikan, sebab disana terdapat kendala kompleksitas *conflict of interest* dalam berbagai bidang diantara negara-negara Arab.

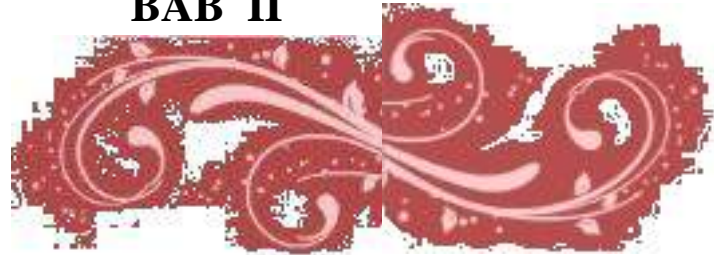
Dalam konteks negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), potret pendidikan Islam di Arab, sebagaimana digambarkan oleh Tibawi ini, menurut hemat penulis memiliki banyak kesamaan. Salah satu contohnya; bahwa sebagian besar negara berkembang merupakan bekas jajahan negara-negara Barat (Eropa), yang setidaknya sama-sama mewarisi kultur kolonial yang ditinggalkan penjajah. Di samping itu, kondisi sosio-kultural saat ini antara negara maju dengan negara berkembang menampakkan profil yang *asymetric*, dikarenakan terjadi sub-ordinasi negara-negara berkembang atas negara-negara maju. Sehingga kajian atas permasalahan maupun tawaran solusi atas permasalahan

yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Arab, cukup relevan untuk dijadikan rujukan, pada dataran filosofi maupun praktisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Hourani, *A History of the Arab Peoples*, (New York: Warner Books, 1991).
- A.L. Tibawi, *Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National System* (London: Luzac, 1972).
- , *Arabic and Islamic themes: Historical, Educational, and Literary studies* (London: Luzac, 1976).
- Bassam Tibi, *The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific-technological Age*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988).
- , *Islam and Cultural Accommodation of Social Change* (San Francisco: Westview Press, 1991).
- De Lacy O'Leary, *How Greek Science Passed to the Arabs*, (London: Routledge & Keagan Paul, 1980).
- Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1979).
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Traditions* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982).
- Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant, the Concept of Knowledge in Medieval Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1970).
- Hasan Asari dalam *Menyingkap Zaman Keemasan Islam, Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (English version), Terj. Franz Rosenthal, (Princeton: Princeton University Press, 1992).
- Jonathan Berkey, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*, (Princeton: Princeton University Press, 1992).
- M. Arkoun, *Pemikiran Arab*, Terj. Yudian W. Asmin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Seyyed Hossein Nasr, *Islamic Life and Thought*, (London: George Allen & Unwin, 1970).

BAB II



PENDIDIKAN ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL

MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH Ikhtiar Menuju Madrasah yang Mandiri

Sebagai starting-pont dalam upaya membangun madrasah adalah bagaimana men-set ulang pola pikir para pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut. Bagaimana meningkatkan citra dan gengsi madrasah dengan instrumen prestasi? Bagaimana mengubah pola manajemen –pameo masyarakat menyebutnya- lillahi ta'ala? Serta Bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka merasa memiliki madrasah? dengan kata lain madrasah tidak terpisah dari masyarakatnya. Kesemuanya merupakan pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh para pengelola madrasah.

A. PENDAHULUAN: SEBUAH REFLEKSI TERHADAP MADRASAH

Pendidikan merupakan kunci pembuka ke arah kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang maju dan kuat akan mempercepat terjadinya perubahan sosial. Namun jika pendidikannya mundur maka bisa dipastikan akan kontra produktif terhadap jalannya proses perubahan sosial, dan justru akan menimbulkan ketidak-harmonisan tatanan sosial.

Berbicara dalam konteks Pendidikan Islam, Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap *prestasi* Pendidikan Islam yang masih menempati posisi *marjinal*. Azra menyatakan bahwa; dikarenakan pengelolaan yang secara umum tidak atau kurang profesional, Pendidikan Islam seringkali kalah bersaing dalam berbagai segi dengan sub-sistem Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain. Bukan rahasia lagi, bahwa citra dan gengsi (utamanya: prestasi) lembaga Pendidikan Islam sering dipandang sebagai subordinat dari pendidikan yang diselenggarakan pihak lain.¹

Dalam kaitan dengan *statement* tentang posisi Pendidikan Islam tersebut (termasuk di dalamnya lembaga pendidikan Islam), Mochtar Naim menuding bahwa dualisme dan dikhotomi pendidikan yang diwariskan pemerintah kolonial, setidaknya, sebagai penyebab utama. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem yang dualistik ini menurutnya adalah :

- a. Arti agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama (madrasah) selama ini.

¹ Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 60.

- b. Sekolah-sekolah agama (madrasah) telah terkucil dalam kubu tersendiri dan menjadi eksklusif.
- c. Sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam rata-rata ber-IQ rendah dan *residual*, dan karena masuknya residual maka mutu tamatannya adalah *medioker* (tergolong kelas dua).²

Dua pendapat di atas memperlihatkan benang merah dari kelemahan besar yang diperlihatkan oleh lembaga pendidikan Islam yakni; *kelemahan manajerial, eksklusifitas dan rendahnya prestasi*. Jika diamati, maka ketiga titik lemah tersebut, kesemuanya merupakan permasalahan yang sangat esensial.

Atmosfer Reformasi yang mulai bergulir pada tahun 1998, tampaknya membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan Nasional berubah seiring dengan pergantian pemerintahan. Pada tanggal 7 Mei 1999, Presiden Habibie menandatangani Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi dari Undang-undang tersebut (meskipun belum bisa dilaksanakan sepenuhnya) akan segera merubah secara drastis konsep penyelenggaraan negara. Dengan Undang-undang ini, Kabupaten dan Kotamadia memiliki kewenangan yang sangat besar, termasuk dalam bidang pendidikan.³ Sebab dalam pasal 7 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 ini dinyatakan bahwa *kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang; Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama dan kewenangan bidang lain*.⁴ Dengan kata lain, salah satu imbas dari digulirkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU ini, telah menggeser pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik

Momentum otonomi daerah dan otonomi pendidikan yang pada gilirannya akan mengarah kepada tuntutan kemandirian lembaga pendidikan jika tidak

² Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1999), hlm. 27.

³ Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si, *Desentralisasi dan Otonomi Pendidikan*, dalam Modul Inservice Training KKM Mts/MI, (Jakarta: PPIM, 2001), hlm. 9.

⁴ Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

segera disikapi dengan segera, maka akan menjadi tantangan yang sangat berat bagi lembaga pendidikan Islam. Terlebih lagi ketika menengok kepada permasalahan-permasalahan yang menyelimuti lembaga pendidikan Islam, yang seolah sukar bergeming dari kebekuannya. Di sinilah arti penting bagaimana menata ulang lembaga-lembaga pendidikan Islam agar bisa survive dan tumbuh menjadi institusi yang mampu memenuhi harapan pengguna jasanya.

B. MEMBANGUN KESADARAN BARU

Sebagai *starting-pont* dalam upaya membangun madrasah adalah bagaimana men-*set* ulang pola pikir para pengambil kebijakan dan pengelola lembaga pendidikan tersebut. Bagaimana meningkatkan citra dan gengsi madrasah dengan instrumen prestasi? Bagaimana mengubah pola manajemen - pameo masyarakat menyebutnya- *lillahi ta'ala*? Serta Bagaimana meningkatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka merasa memiliki madrasah? dengan kata lain madrasah tidak terpisah dari masyarakatnya. Kesemuanya merupakan pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus segera dijawab oleh para pengelola madrasah.

Dalam kaitan dengan prestasi; Shipman mengelompokkan fungsi pokok pendidikan dalam masyarakat modern yang tengah membangun terdiri dari tiga bagian; Sosialisasi, Pembelajaran dan Pendidikan. Sebagai lembaga *Sosialisasi*, pendidikan adalah wahana bagi integrasi anak didik ke dalam nilai-nilai kelompok atau nasional yang dominan. Sedangkan "Pembelajaran" (*Schooling*) adalah guna mempersiapkan mereka untuk mencapai dan menduduki posisi sosial-ekonomi tertentu dan karena itu, pembelajaran harus dapat membekali peserta didik dengan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka mampu memainkan peranan sosial-ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan dalam fungsi ketiga yakni "*education*", pendidikan merupakan sarana untuk menciptakan kelompok elit yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program pembangunan.⁵

⁵ Shipman, M.D., *Education and Modernization*, (London: Faber, 1972), hlm. 33-35.

Tuntutan masyarakat terhadap Pendidikan semakin tinggi seiring dengan tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan zaman yang sangat cepat. Mughtar Buchori mengidentifikasi tiga kemampuan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan, yakni (1) kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan, (2) kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi tadi, dan (3) kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Adapun kegagalan untuk mengembangkan ketiga kemampuan tersebut akan mengakibatkan sistem pendidikan terperangkap ke dalam rutinitas bahkan akan membatu atau menjadi fosil.⁶ Dua pendapat di atas setidaknya bisa dijadikan acuan dalam upaya menyiapkan komponen-komponen yang akan menjadi bekal bagi peserta didik atau output madrasah ketika mereka kembali ke pangkuan masyarakatnya.

Patut diakui bahwa hal tersebut tidaklah semudah membalik telapak tangan, terlebih lagi bila melihat realitas bahwa input madrasah kebanyakan adalah, boleh dibilang, bukan kualitas prima. Di samping itu dihadapkan pula pada tantangan umum dunia pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Battle. Ia melihat kenyataan ironis yang terjadi secara umum, dan terlebih lagi untuk negara berkembang, adalah problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan, bahwa perkembangan zaman selalu lebih cepat dari perkembangan pendidikan.⁷

Seperempat terakhir abad ke-20 telah muncul fenomena yang menggembirakan. Dengan semakin menguatnya orientasi Islam ke kehidupan perkotaan, maka dapat dimaklumi bahwa gerakan pembaharuan pemikiran Islam dan gerakan "Islam modern" menjadi lebih solid, sehingga pada akhir abad ke-20 terasa bahwa bobot "Islam modern" sudah lebih dominan daripada Islam tradisional. Hal ini nampak jelas dengan munculnya ulama-ulama hasil

⁶ Dr. Mughtar Buchori, *Pendidikan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 45.

⁷ Battle, J.A., *The New Idea of Education*, (New York: Harper & Row Publisher, 1986), hlm. 105.

didikan Islam kota yang kini memiliki pengaruh luas dalam skala nasional.⁸ Di tambah lagi semakin tersedianya peluang bagi pendidikan Islam yakni; dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Sarana dan prasarana yang diperlukan bagi peningkatan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya sarana pendidikan agama pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan, termasuk prasekolah yang pelaksanaannya sesuai dengan UU yang berlaku.⁹

Tersemainya kesadaran dan semakin meningkatnya kekuatan serta peluang tersebut, kiranya merupakan modal yang sangat besar bagi upaya meningkatkan citra dan pembenahan manajemen madrasah pada saat-saat ini. Untuk itulah Departemen Agama melalui *madrasah* memiliki dua program prioritas yaitu; *kualitas pendidikan* dan *pendidikan terpadu*. Artinya kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang memadai serta pemantapan kesejahteraan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Peningkatan ini antara lain melalui *Basic Education Project* (BEP) dan *Development of Madrasah Aliyahs Project* (DMAP), program penyetaraan pendidikan guru dan sebagainya (sebagian besarnya didanai dari pinjaman ADB).¹⁰ Proyek-proyek dan kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi lokomotif dalam upaya menggerakkan peran serta aktif masyarakat juga lembaga pendidikan (madrasah) dalam rangka memajukan madrasah dan menumbuhkan kemandirian madrasah.

C. MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH

Isu tentang Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) sebenarnya merupakan tema sentral dalam reformasi pendidikan di berbagai

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia pada Seperempat Terakhir Abad ke-20*, (Semarang: Walisongo Press, 1997), hlm. 24.

⁹ Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hlm. 134.

¹⁰ Drs. H.M. Chabib Thoha, MA., *Harapan Masyarakat dan Model Madrasah*, dalam Rindang Nomor 12 Th. XXVI, Juli 2001, hlm. 26.

negara. Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai “suatu pengalihan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dari birokrasi sentral kepada pengelola terdepan pendidikan yaitu sekolah dan komunitasnya”.¹¹

Sedangkan rumusan Bappenas menyatakan bahwa SBM adalah upaya konkrit otonomi sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui ; antara lain keleluasaan mengelola sumberdaya, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sedangkan peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui kontrol dan partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif, dan lain-lain.¹²

Manfaat utama SBM (dalam konteks madrasah; MBM) adalah terbangunnya peran serta aktif masyarakat (*stakeholder*), meningkatnya profesionalisme dan kesejahteraan kepala sekolah dan guru, tumbuhnya kreativitas, inisiatif, serta inovasi dari kepala sekolah, guru, bahkan juga tenaga administrasi sekolah.

Kemunculan madrasah merupakan realisasi upaya pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut meliputi tiga hal yaitu: (1) upaya penyempurnaan sistem pesantren, (2) penyesuaian terhadap sistem Barat, dan (3) menjembatani antara sistem pendidikan tradisional Pesantren dengan sistem pendidikan modern Barat.¹³

Madrasah pada umumnya didirikan oleh masyarakat (swasta) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama anak-anak mereka. Pada perkembangannya madrasah juga didirikan oleh pemerintah dan juga mengajarkan pelajaran umum. Pada tahun 1998/1999 Madrasah Ibtidaiyah Negeri lebih kurang 6,1%, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri 11,9% dari jumlah keseluruhan MI dan MTs yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah madrasah

¹¹ Didik Komaidi, *Manajemen Berbasis Sekolah Era Otonomi Daerah*, dalam Majalah Rindang No. 1 Th. XXVII, Agustus, 2001, hlm. 20.

¹² Tim Teknis BAPPENAS, *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar*, (Jakarta: 1999), hlm. 11-12.

¹³ Karl A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 26.

cukup besar (MI: 23.298, atau 13,34% dari total SD; dan MTs: 9.860, atau 32,43% dari total SLTP)..¹⁴

Sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah menyatu dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian madrasah juga menjadi sarana wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan mengikuti EBTANAS. Pada tahun 1999/2000 MI memberikan kontribusi dalam menyerap 2.894.128 anak atau 10,5% dari keseluruhan anak yang sekolah di tingkat dasar yang mencapai 28.561.706. Sedang MTs menyerap 1.823.135 murid atau 12,9% dari keseluruhan murid SLTP yang berjumlah 9.419.521 orang.¹⁵

Data di atas menunjukkan bahwa potensi madrasah sangat besar. Meski perhatian pemerintah selama ini dirasa masih sangat kurang, namun madrasah tetap *survive*. Namun demikian, *survive* tentu belumlah cukup ketika dihadapkan pada kondisi masyarakat dewasa ini yang demikian cepat berubah. Madrasah juga dituntut harus mampu merespons pasar serta tuntutan *stakeholder*, tentunya ditumpukan di atas kemampuan madrasah “berimprovisasi”.

Kembali kepada isu MBM, Beberapa permasalahan yang dipandang sangat mendesak untuk diatasi adalah masalah pengelolaan atau manajemen. Dengan manajemen yang baik, maka berbagai persoalan lainnya akan dapat diselesaikan secara lebih mudah.

Identifikasi Permasalahan

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali secara cermat berbagai permasalahan yang membelit madrasah selama ini. Langkah ini bisa disebut dengan *Self-assessment* (evaluasi diri). Pihak madrasah harus mampu dan “legawa” mengenali kelemahan yang ada. Beberapa kelemahan yang kiranya melanda madrasah pada umumnya antara lain :¹⁶

¹⁴ Drs. Zubaidi, M.Ed, *Manajemen Berbasis Madrasah*, Makalah (tidak diterbitkan) *Inhouse Training KKM MTs/MI Propinsi Jawa Tengah*, 21-26 Agustus 2000.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Beberapa kelemahan ini penulis rangkum dari acara *TOT Inservice Training KKM MTs/MI Se-Indonesia Tahun Anggaran 2001*, (Jakarta: PPIM, Juli 2001), yang diikuti oleh utusan dari 6 propinsi

1. *Ketidakjelasan Struktur dan Tata kerja;*

Di lapangan seringkali terjadinya tumpang tindih antara wewenang Yayasan dengan pengelola madrasah. Salah satu konflik laten dalam pengelolaan madrasah adalah perbedaan kepentingan antara pihak pengelola madrasah dengan Yayasan. Yayasan sebagai “pemilik” biasanya memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih, dan pada umumnya menggunakan kekuasaannya untuk mengatur segala hal. Sebaliknya, madrasah cenderung tidak/kurang memiliki posisi tawar, sehingga secara psikologis menjadikan pengelola madrasah ter-subordinasi-kan.

Antara Madrasah dengan pihak Yayasan secara garis besar telah dibagi bidang pekerjaannya, namun dalam realisasinya sering terjadi silang pendapat. Hal ini disebabkan karena pihak Kepala Madrasah lebih cenderung mengutamakan hal-hal yang bersangkutan-paut dengan akademik dan kurang memperhatikan misi lembaga tersebut, sedang pihak Yayasan lebih cenderung memperhatikan *status quo*-nya. Akibatnya terjadi saling tuding, yang pada akhirnya menghambat kemajuan madrasah itu sendiri.¹⁷

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Dewan Madrasah yang diharapkan dapat berperan sebagai mediator antara Madrasah dan Yayasan. Dewan Madrasah dapat terbentuk dari beberapa unsur seperti; wakil yayasan, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid, perwakilan guru, perwakilan masyarakat sekitar madrasah. Dewan ini dapat difungsikan sebagai institusi pemberi saran dan pertimbangan terhadap upaya pengelolaan madrasah. Dewan ini diharapkan pula menjadi lembaga yang memiliki akses langsung ke publik (masyarakat), sehingga bisa sangat membantu dalam membangun dukungan baik finansial maupun bentuk dukungan lain dalam rangka pengembangan madrasah.

(18 Kabupaten). Meskipun secara teknis tidak sama persis, namun substansi permasalahan yang dihadapi oleh banyak madrasah dari ke enam propinsi tersebut menunjukkan kesamaan.

¹⁷ Drs. Darmuin M.Ag., *Prospek Pendidikan Islam di Indonesia: Suatu Telaah terhadap Pesantren dan Madrasah*, dalam Chabib Thoah & Abdul Mukti (Ed), *PBM PAI di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 87.

2. *Ketidakjelasan Misi, Visi dan Tujuan*

Setiap organisasi pasti memiliki target. Husni Rahim menyatakan bahwa; madrasah adalah sekolah berciri khas Islam, dan ini merupakan *nilai jual utama*. Tetapi jika madrasah sudah tidak lagi memperkuat pendidikan agamanya maka dia akan “ditinggalkan” oleh masyarakatnya.¹⁸

Sebagai upaya memberikan panduan kerja dan memperjelas arah yang hendak dituju, sekaligus motivasi bagi seluruh komponen madrasah yang terlibat dalam pengembangan madrasah, maka diperlukan penancangan misi dan visi. Misi dan visi bisa menjadi sarana penyatuan persepsi dan cita-cita sebuah madrasah, keduanya merupakan pengejawantahan ide-ide konstruktif dalam setiap aktivitas.

Misi dan visi madrasah ini perlu memenuhi minimal dua persyaratan: (1) sejalan dengan kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat (*stakeholder*), dan (2) mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Misi merupakan cita-cita luhur almamater yang dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas akademika madrasah. Ia merupakan nilai, denyut nadi organisasi dan acuan seluruh kegiatan edukatif di madrasah. Sedang visi dapat dipahami sebagai pandangan dunia suatu organisasi baik terhadap internal maupun eksternal organisasi itu, yang mempengaruhi statemen misi, dan sekaligus menjadi pemahaman yang sama oleh sivitas akademika madrasah tentang misi dan jati diri madrasah. Dengan demikian misi dan visi ini dipahami, diyakini dan dipegang teguh oleh setiap orang yang menjadi anggota sivitas akademika madrasah.¹⁹

Tujuan, meskipun sudah tertuang dalam tujuan instusional dalam kurikulum Departemen Agama, namun ia masih bersifat umum. Mampukah tujuan tersebut dijabarkan dan dicapai dalam pelaksanaan kurikulum? Jika setiap madrasah telah mencanangkan misi dan visi secara baik, maka tujuan akan lebih mudah dilaksanakan, dikontrol dan dievaluasi.

Kelemahan ketidak-jelasan misi visi dan tujuan ini juga banyak sekali mengemuka dari berbagai daerah. Seringkali program yang telah

¹⁸ Bulletin *Masyarakat Pendidikan*, Vol. I No. 1 (Jakarta: INSEP, 2001), hlm.23.

¹⁹ Zubaidi, *Op.cit.*

dicanangkan pada tahun sebelumnya berhenti di tengah jalan, atau ketika ganti kepala madrasah, maka berubah pula arah yang dituju. Hal ini tentu dapat dieliminir ketika misi, visi dan tujuan sudah dirumuskan secara jelas dan bisa diakses dan dipahami oleh semua komponen madrasah.

3. Lemahnya Manajemen

Kelemahan di bidang ini boleh dibilang merupakan “wabah” yang menjangkiti sebagian besar madrasah. Pendanaan terbatas, lemahnya SDM dan minimnya pengetahuan tentang organisasi dan tatakerja, merupakan beberapa penyebab yang saling kait-mengait. Beberapa langkah manajemen modern; *planning, organizing, staffing, controlling* dan *evaluating*, belum bisa berjalan secara tertib di madrasah. Dikarenakan keterbatasan-keterbatasan tersebut, seringkali manajemen madrasah lebih bercirikan “*lillahi ta’ala*”. Sehingga beberapa prinsip manajemen yang baik seperti; optimalisasi kemampuan sekolah (*capacity building*), keterbukaan khususnya dalam hal administrasi keuangan (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) seringkali macet. Hal ini diperparah intervensi yayasan, yang terkadang masuk di wilayah akademis. (sebagaimana telah diungkap pada poin 1)

Pengelola pendidikan madrasah yakni yayasan dan pelaksana pendidikan madrasah (kepala madrasah, guru dan tenaga administrasi) merupakan SDM yang menjadi mesin penggerak dinamika madrasah. Kepada mereka harus ditanamkan kesadaran, pengertian dan pemahaman serta tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Dimensi ini merupakan bagian dari dimensi lain yang tingkat mutunya bersifat sinergi. Dimensi lain adalah *ketrampilan manajemen*. Rasa tanggung jawab yang tinggi tanpa dibarengi *managerial skill* yang memadai, akan menjadi *treatment* manajemen bersifat uji coba, dan akibatnya dana serta daya yang dikeluarkan tidak memperoleh hasil yang seimbang. Demikian pula ketrampilan manajemen yang baik tanpa dibarengi kesadaran perjuangan (yang sebagian besar pengelola madrasah telah memiliki unsur ini) juga akan menuntut banyak biaya.²⁰

²⁰ Abdul Rachman Shaleh, *Op.Cit.*, Hlm. 132.

4. *Kurangnya keterlibatan Masyarakat*

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian madrasah berdiri atas prakarsa dan usaha masyarakat sendiri. Di tempat dimana masyarakat (Muslim) perlu lembaga pendidikan bagi anaknya, maka secara antusias mereka bergotong-royong mendirikan madrasah. Namun problem klasik yang sering muncul adalah, ketika madrasah sudah berdiri, maka keterlibatan aktif masyarakat untuk memikirkan nasib, kelangsungan hidup (apalagi pengembangan dan kemajuan) madrasah relatif kurang (kalau tidak bisa dikatakan tidak ada). Memang susah mencari jawaban tentang siapa yang bersalah dalam hal ini. Namun yang jelas sikap proaktif dari keduanya mutlak perlu ditumbuhkan.

Keberadaan lembaga-lembaga seperti Forum Masyarakat Peduli Madrasah (FMPM) atau sejenisnya, yang relatif masih sedikit perlu lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hal ini pihak madrasah harus secara intensif bermitra dengan lembaga-lembaga seperti ini.

Harus disadari betul oleh para pengelola madrasah, bahwa keterbukaan dan hubungan yang bersifat timbal balik antara madrasah dengan masyarakat ini secara bertahap dan kontinu akan meningkatkan ketahanan hidup (*survival*) madrasah. Masyarakat akan puas dan tumbuh rasa memiliki yang semakin besar. Made Pidarta merumuskan beberapa butir manfaat hubungan yang harmonis antara madrasah dengan masyarakat sebagai berikut²¹ :

MANFAAT HUBUNGAN MADRASAH DENGAN MASYARAKAT	
Bagi MADRASAH	Bagi MASYARAKAT
• Memperbesar dorongan untuk mawas diri	• Mengetahui aktivitas madrasah dan program-programnya
• Memudahkan memperbaiki pengelolaan madrasah	• Kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan madrasah lebih mudah

²¹ Diadopsi dari Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), sebagaimana dikutip oleh Daryono, *Modul Inservice Training KKM, Op.Cit.*, hlm. 122.

	diwujudkan
• Mengurangi miskonsepsi masyarakat tentang madrasah	• Mendapatkan nilai tambah dalam hal inovasi dan kreativitas madrasah
• Mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat	• Memberikan harapan yang lebih baik terhadap masa depan anak-anak.
• Memudahkan meminta bantuan dan dukungan dari masyarakat	• Menyalurkan dukungan (amal, zakat dan infaq) dari masyarakat
• Memudahkan menggunakan media pendidikan di masyarakat	• Mendorong terciptanya masyarakat madani
• Memudahkan pemandatan narasumber	

Dari tabel di atas ternyata cukup banyak aspek keterlibatan masyarakat yang bisa diimplementasikan di dalam madrasah, tidak hanya dalam hal dukungan dana saja. Agar madrasah benar-benar menjadi milik masyarakat, maka dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi perlu mengikutsertakan masyarakat

5. Lemahnya Jejaring (*Networking*)

Cukup banyak kasus yang diungkapkan oleh kawan-kawan dari berbagai daerah peserta TOT KKM 2001, bahwa banyak tempat/ desa yang memiliki dua (bahkan lebih dari dua) madrasah. Potensi tersebut tampaknya belum bisa bergandeng tangan secara maksimal. Yang terjadi antara mereka justru terkadang saling mematikan. Setidaknya, hal ini berarti beberapa forum seperti KKM yang sudah ada, belum banyak berperan mengatasi hal ini.

Tentunya, jejaring ini tidaklah terbatas antar madrasah atau yayasan saja, namun bisa dikembangkan pada skala yang lebih luas. Membangun jejaring ini memerlukan kemampuan berkomunikasi yang handal dari *top manager* madrasah maupun yayasan, karena harus mampu meyakinkan *stakeholder* yang mencakup banyak kalangan. Sebagai modal utama dalam meyakinkan *stakeholder* tentunya madrasah harus mampu menampilkan “keunggulan komparatif”.

Membangun jejaring (*networking*) adalah suatu usaha atau proses aktif untuk membangun dan mengelola kemitraan yang produktif, yang terdiri kemitraan pribadi (antar individu) dan organisasi (antar institusi).²²

Penelitian yang pernah dilakukan penulis terhadap beberapa Sekolah Elit (Unggulan) baik yang dikelola oleh Yayasan Islam maupun Non-Islam (dalam hal ini Kristen/Katholik) di Semarang, menunjukkan bahwa mereka memiliki *networking* yang solid dengan menerapkan sistem subsidi silang dari sekolah “gemuk” kepada sekolah “kurus” (di lingkungan Yayasan Kristen Katholik dikenal dengan “Sekolah Missi”, yang oleh Yayasan Islam belum banyak dikembangkan). Lebih dari itu, mereka piawai dalam menggalang keterlibatan berbagai pihak seperti; tempat ibadah, LSM, Rumah sakit, para dermawan, alumni dan sebagainya, untuk ikut menjadi kontributor bagi sekolah.²³

Menghadapi iklim persaingan yang ketat di era global sekarang ini, mustahil bagi suatu organisasi (baca: madrasah) bertahan dengan kekuatan sendiri. Membangun jejaring merupakan suatu keniscayaan yang tak terelakkan, agar madrasah mampu berkembang mencapai kemajuan.

Kepemimpinan Visioner

Dalam setiap organisasi peran pemimpin sangatlah vital. Pemimpin ibarat lokomotif yang akan menarik gerbong dibelakangnya. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain. Dalam sebuah organisasi, seni tersebut digunakan untuk mempengaruhi individu dan kelompok guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Supaya kepemimpinan bisa efektif maka dituntut kemampuan seorang pemimpin untuk secara terus menerus mempengaruhi perilaku bawahan (baca: mitra kerja) untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Jika paradigma kepemimpinan lama bisa diibaratkan dengan perahu yang meluncur di sungai yang tenang, dimana tugas kepemimpinan bisa relatif stabil

²² Dina Mustafa, *Membangun Jejaring Madrasah*, dalam Modul Inservice Training KKM, *Op.Cit.*, hlm. 145.

²³ Lihat Abdul Wahid, *Fenomena Sekolah Elite di Semarang*, Tesis S.2, (Semarang: IAIN Walisongo, 1999)

dan linear, maka pada masa sekarang bisa diibaratkan seperti perahu yang mengarungi jeram, di mana situasi bisa berubah setiap saat. Untuk model yang kedua ini, maka setiap unsur yang ada di dalam perahu tersebut harus mampu bertindak sebagai pemimpin, artinya tidak selalu menunggu perintah. Dengan kata lain model *Bottom up* atau mendorong selalu terciptanya pengambilan keputusan yang partisipatoris adalah menjadi keharusan dalam sebuah organisasi.

Membangun peranan baru kepala madrasah adalah persyaratan penting untuk membangun madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Kepala madrasah dan ketua Yayasan merupakan *top leader* di madrasah, yang diharapkan mampu menjadi lokomotif dalam upaya mewujudkan cita-cita madrasah. Manajemen madrasah (di semua lini) dapat berjalan baik manakala kepala madrasah mampu mengelola segala sumber daya/potensi yang dimiliki madrasah. Untuk itu mereka harus memiliki jangkauan ke depan serta keberanian untuk menentukan sikap. Dalam organisasinya (madrasah) mereka dituntut memiliki ketrampilan dalam :

- Mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan dengan melibatkan seluruh komponen madrasah.
- Mendayagunakan daya dan dana untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dan mencapai target yang optimal.
- Mengolah dan menyajikan informasi secara cepat dan akurat dan mudah dicerna oleh para pelaksana.
- Mahir berkomunikasi dengan berbagai pihak.
- Mengoptimalkan partisipasi seluruh komponen madrasah maupun pihak lain untuk ikut memikirkan madrasah.

Adapun karakteristik Kepemimpinan Visioner meliputi :

- a. memiliki *kredibilitas* dan dapat dipercaya oleh pengikutnya (mengakar)
- b. memiliki *integritas* yang tinggi terhadap pekerjaannya
- c. *Kompeten* di bidangnya dan mampu membangun komunikasi
- d. *Konsisten* dan *loyal*, yakni memiliki ketaatan kepada misi dan visi organisasi
- e. *Terbuka*, yakni tidak menutup diri dari input yang berasal dari luar

Setidaknya ada lima peran²⁴ yang bisa dilakukan oleh kepala madrasah dalam menerapkan kepemimpinan visioner yaitu sebagai berikut :

a. Merumuskan visi (*The Vision Role*)

Peran ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan arah organisasi (madrasah). Meski gagasan datang dari kepala madrasah, namun peran ini tidak harus dilakukan sendiri, melainkan bisa melibatkan atau membentuk tim untuk merumuskannya.

b. Menjalin Hubungan (*The Relationship Role*)

Sebagai seorang kepala madrasah atau ketua yayasan tentu tidak dapat mengelak atau mengabaikan arti penting menjalin hubungan. Sebab eksistensi madrasah akan sangat ditentukan oleh bagaimana kepiawaian mereka menjalin hubungan dengan semua pihak.

Dalam kaitan dengan peran ini, dalam lingkup internal madrasah kepala madrasah harus mampu membangun *tim kerja* yang solid, dengan memiliki person-person yang memiliki kemampuan yang bersifat komplementer. Di samping itu juga perlu menyusun *struktur personel*, yang mendeskripsikan bagaimana seharusnya hubungan kerja antar mereka dibangun.

Sedangkan untuk lingkup eksternal madrasah, kepala madrasah maupun ketua yayasan harus mampu membangun jejaring dengan berbagai pihak terkait.

c. Mengendalikan (*The Control Role*)

Dalam hal kepala madrasah harus mampu berperan sebagai konsultan bagi “bawahan”-nya. Ia juga bertindak selaku pengendali organisasi madrasah. Fungsi konsultasi dan pengendalian ini akan berjalan efektif jika kepala madrasah mampu menjabarkan tujuan yang hendak dicapai oleh madrasah, Fungsi ini bisa dilakukan dengan mendefinisikan masalah dan jalan keluarnya, pembuatan keputusan, mendelegasikan, deskripsi kerja dan yang tak kalah penting adalah mengelola konflik.

²⁴ Dra. Tri Darmayanti, *Organisasi, Manajemen dan Kepemimpinan*, dalam Modul Inservice Training KKM, *Op.Cit.*, hlm. 203-213.

d. Melakukan dorongan (*The Encourage Role*)

Peran ini bisa dilakukan dengan beberapa variasi teknik seperti; system penggajian yang adil, pengakuan prestasi kerja dengan memberikan pujian atau pemberian ganjaran dan hukuman (*reward and punishment*). Yang jelas, peran ini diarahkan untuk memacu dan menggairahkan iklim kerja yang produktif dalam madrasah.

e. Pemberi Informasi (*The Information Role*)

Dalam memainkan peran ini kepala madrasah harus memiliki akses yang luas baik ke dalam maupun keluar madrasah. Dengan kata lain ia harus mampu membangun dan memelihara jejaring informasi yang dapat dijadikan saluran komunikasi internal maupun eksternal madrasah.

Demikianlah beberapa butir pemikiran dalam rangka melakukan pembenahan terhadap madrasah, yang merupakan potensi besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. *School Based Management* (SBM) dalam konteks ini manajemen berbasis Madrasah, merupakan suatu konsep yang telah dicobakan di banyak negara (terutama di negara-negara maju) yang menginginkan perbaikan dan kemajuan mutu pendidikan. Konsep ini bisa dikatakan paradigma baru terhadap hasil analisis konsep manajemen sebelumnya, yang lebih bertumpu pada konsep *Top-down*, yakni dari pemerintah kepada masyarakat. Di era otonomi daerah, konsep ini merupakan suatu keniscayaan yang cepat atau lambat tidak bisa dihindari. Pendidikan adalah wilayah kewenangan publik. Meskipun menyimpan berbagai harapan dan tantangan, namun konsep ini telah dan harus terus digulirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000).
- Abdul Wahid, *Fenomena Sekolah Elite di Semarang*, Tesis S.2, (Semarang: IAIN Walisongo, 1999)
- Azyumardi Azra, Prof. Dr., MA., *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Battle, J.A., *The New Idea of Education*, (New York: Harper & Row Publisher, 1986).
- Chabib Thoha & Abdul Mukti (Ed), *PBM PAI di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Karl A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisco, 1999).
- Masyarakat Pendidikan*, (Bulletin) Vol. I No. 1 (Jakarta: INSEP, 2001).
- Modul Inservice Training KKM Mts/MI*, (Jakarta: PPIM, 2001).
- Muctar Buchori, Dr., *Pendidikan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Rindang* Nomor 12 Th. XXVI, Juli 2001.
- Rindang* No. 1 Th. XXVII, Agustus, 2001.
- Shipman, M.D., *Education and Modernization*, (London: Faber, 1972).
- Tim Teknis BAPPENAS, *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar*, (Jakarta: 1999).
- Zamakhsyari Dhofier, *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia pada Seperempat Terakhir Abad ke-20*, (Semarang: Walisongo Press, 1997).
- Zubaidi, Drs., M.Ed, *Manajemen Berbasis Madrasah*, Makalah (tidak diterbitkan) *Inhouse Training KKM MTs/MI Propinsi Jawa Tengah*, 21-26 Agustus 2000.

FENOMENA SEKOLAH ISLAM ELITE: FORMAT BARU LEMBAGA PENDIDIKAN?

Di lingkungan perkotaan, fenomena berkembangnya sekolah Islam elite, bisa dikatakan merupakan sebuah penyikapan terhadap “dikhotomi” sekolah umum dan madrasah. Sebagian kaum Muslim yang berlatar belakang sosial-ekonomi menengah keatas, yang mulai muncul pada dekade 1980-an, dalam memilih sekolah di satu sisi lebih cenderung kepada kemasakan atau bentuk sekolah umum, namun bersamaan dengan itu tumbuh pula kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya nilai-nilai agama. Model sekolah swasta Islam elite inilah oleh mereka dipandang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Sehingga sejak dekade 1980-an sekolah Islam elite menjadi fenomena baru di daerah perkotaan, yang cukup mampu memainkan peran sosial yang signifikan di kalangan Muslim kelas sosial-ekonomi menengah ke atas.

A. DUALISME PENDIDIKAN DI INDONESIA

Munculnya kecenderungan sebagian kelompok masyarakat Islam yang pada akhirnya lebih memiliki kecenderungan mengawinkan pendidikan agama dan umum, namun jalur atau kemasakan yang dipilihnya adalah pendidikan umum kian marak, khususnya di masyarakat perkotaan. Fenomena ini dipandang sebagai upaya “mengawinkan” dua model pendidikan yang telah sekian lama mengakar dan berkembang di masyarakat.

Jika dirunut kebelakang, masuknya penjajahan Portugis, Inggris dan Belanda di Indonesia mulai memperkenalkan sistem pendidikan barat, sungguhpun dilihat dari pendekatan sistem nampak sekali keunggulannya, akan tetapi falsafah yang diterapkan bersifat *rasialisme* dan *kolonialisme*.¹ Pada akhir abad ke-19, Belanda atas saran Snouck Hurgronje mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonialnya dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa.²

Steenbrink menggambarkan bahwa sejak abad-abad awal memperluas daerah kekuasaannya di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda telah memperlihatkan sikap diskriminatif terhadap sekolah Islam dibandingkan dengan sikapnya terhadap sekolah-sekolah Kristen yang diselenggarakan oleh kalangan *Missi* dan *Zending*. Memang pada akhir abad yang lalu (abad-19), beberapa kali diusulkan agar lembaga pendidikan Islam yang ada dimanfaatkan pada kebijaksanaan untuk mengembangkan sistem pendidikan umum. Akan

¹ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 20.

tetapi pada reorganisasi dan pengembangan sistem pendidikan kolonial, dalam kenyataannya selalu memilih jalan lain dari pada menyesuaikan diri dengan pendidikan Islam.³ Akhirnya sistem pendidikan Islam pada abad ke-20 masuk dalam isolasi dan malah perlu menyesuaikan diri kepada syarat-syarat pemerintah untuk menerima bantuan dan pengakuan resmi.⁴ Perlunya satu sistem pendidikan nasional menggantikan sistem pendidikan kolonial dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan pertama dan Bapak Pendidikan Nasional kita sehari setelah proklamasi kemerdekaan.⁵

Di kalangan kaum Muslimin Indonesia bentuk pendidikan sekuler warisan kolonial maupun yang telah dimodifikasi sehingga melahirkan sistem pendidikan nasional ini tidak bisa begitu saja menampung aspirasi mereka, dikarenakan selama berabad-abad mereka telah akrab dengan bentuk pengajaran tradisional mereka sendiri, yang dapat dikatakan mengambil posisi berseberangan dengan pendidikan sekuler, sebagai salah satu bentuk perlawanan yang cukup efektif kepada pemerintah kolonial pada saat itu.

Dalam masyarakat Indonesia, terdapat beberapa kelompok antara lain, yang *pertama* menganggap dan mempertahankan madrasah sebagai lembaga *tafaqqahu fi al-din*, dan *kedua*, berpendapat bahwa pendidikan atau keberadaan madrasah telah menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomi antara “pengetahuan umum” dan “agama” di Indonesia. Kelompok ini juga berpendapat madrasah cenderung mencetak warga negara yang eksklusif.⁶

Mochtar Naim menuding dualisme dan dikhotomi pendidikan yang diwariskan pemerintah kolonial sebagai penyebab utama kerancuan dan kesenjangan pendidikan di Indonesia dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Di antara dampak negatif dari sistem pendidikan yang dualistis itu menurutnya adalah:

² K.H. M.A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 271.

³ Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (terj.), (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 3.

⁴ Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indoonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 159.

⁵ A.M.W. Pranarka dalam Conny R. Semiawan, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁶ Marwan Saridjo, *Op. Cit.*, hlm. 162.

- a. Arti agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah agama (madrasah) selama ini.
- b. Sekolah-sekolah agama (madrasah) telah terkucil dalam kubu tersendiri dan menjadi eksklusif.
- c. Sumber masukan sekolah agama dan perguruan tinggi agama Islam rata-rata ber-IQ rendah dan residual, dan karena masuknya residual maka mutu tamatannya adalah *medioker* (tergolong kelas dua).⁷

Kondisi semacam ini kemudian mendorong munculnya alternatif pemikiran yang berupaya untuk memperbaikinya, memodernisasi baik sistem, substansi maupun metodenya.

B. MODERNISASI PENDIDIKAN

Hubungan antara pendidikan dengan modernisasi adalah sangat erat. Kebijakan-kebijakan pendidikan adalah refleksi dari tendensi-tendensi utama dalam perkembangan sosial-ekonomi suatu negara. Tisna Amidjaja mengemukakan beberapa pokok pikiran tentang hubungan erat dunia pendidikan dengan arus modernisasi dalam beberapa pertanyaan berikut:

- Bagaimana hubungan pendidikan dengan dunia kerja?
- Bagaimana memelihara kualitas pendidikan, seraya melayani permintaan akan kesempatan untuk pendidikan yang meningkat secara eksponensial, dengan persyaratan kecanggihan luaran yang lebih tinggi disertai spesialisasi yang lebih tajam?
- Bagaimana pendidikan itu dapat tetap dipelihara relevansinya dengan perkembangan sosial ekonomi?⁸

Untuk waktu-waktu mendatang, para pendidik dan pengambil kebijakan pendidikan akan tetap disibukkan dalam usaha menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Karena itulah banyak ahli pendidikan yang menganggap bahwa “pendidikan merupakan kunci yang membuka ke arah modernisasi”.⁹

⁷ *Pelita*, tanggal 13-14 Desember 1991.

⁸ Conny R. Semiawan, *Op. Cit.*, hlm. 37.

⁹ Harbison F., C.A. Myers, *Education, Manpower and Growth Strategies of Human Resources Development*, (New York: McGraw Hill, 1964), hlm. 181.

Fazlur Rahman mengakui bahwa ia tidak banyak mengenal tentang Indonesia. Namun catatan yang dibuat olehnya bahwa; Indonesia, seperti halnya negeri-negeri Muslim besar lainnya, juga menghadapi masalah pokok dalam modernisasi pendidikan Islam: masalah kelangkaan tenaga yang memadai untuk mengajar dan melakukan riset, dan bagaimana memproduksi tenaga seperti itu. Karenanya, tidak bisa dihindari dilakukannya percobaan-percobaan dalam penyempurnaan materi-materi pelajaran Islam klasik dengan pelajaran-pelajaran modern.¹⁰

Kemunculan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia, berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisme Islam di kawasan ini. Menurut Steenbrink salah satu faktor pendorong penting bagi perubahan Islam di Indonesia pada permulaan abad ini (baca: abad-20) adalah; dorongan yang berasal dari pembaharuan pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari Qur'an dan studi agama, maka pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada permulaan abad ke-20 ini berusaha memperbaiki pendidikan Islam, baik dari segi metode maupun isinya. Mereka juga mengusahakan kemungkinan memberikan pendidikan umum untuk orang Islam.¹¹

Gagasan modernisme Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad 20, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi "modernis" Islam seperti Jami'at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain.¹² Penyikapan para tokoh terhadap kolonialisme khususnya system pendidikan yang dikembangkan, telah melahirkan kesadaran baru yang selanjutnya diekspresikan dalam wadah organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Organisasi-organisasi bentukan para tokoh ini semakin menemukan bentuk dan momentum seiring semakin tumbuhnya kesadaran serta kebanggaan berbangsa dan bernegara.

Dengan semakin menguatnya orientasi Islam ke kehidupan perkotaan, maka dapat dimaklumi bahwa gerakan pembaharuan pemikiran Islam dan gerakan

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 102.

¹¹ Steenbrink, *Op. Cit.*, hlm. 28.

“Islam modern” menjadi lebih solid, sehingga pada akhir abad ke 20 ini terasa bahwa bobot “Islam modern” sudah lebih dominan daripada Islam tradisional. Hal ini nampak jelas dengan munculnya ulama-ulama hasil didikan Islam kota yang kini memiliki pengaruh luas dalam skala nasional.¹³

Pada awal perkembangan adopsi gagasan modernisme pendidikan Islam ini setidaknya-tidaknya terdapat kecenderungan pokok dalam eksperimentasi organisasi-organisasi Islam di atas. Pertama adalah adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan tradisional. Di pihak lain terdapat eksperimentasi yang bertitik tolak justru dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri.

Sistem pendidikan madrasah atau pondok pesantren, yang memang secara tradisional merupakan kelembagaan pendidikan Islam *indigenous*, dimodernisasi misalnya dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran, dan sebagainya,¹⁴ yang terjadi pada tahun 1905, dimana ‘*ulama* mengambil inisiatif memperkenalkan *madrasah*, yang mengambil model sistem pendidikan Barat ke dalam institusi-institusi pesantren, dan pada tahun 1926 beberapa pesantren mengajarkan beberapa mata pelajaran sekuler seperti bahasa Indonesia dan Belanda, Matematika, Geografi dan Sejarah.¹⁵ Hal ini nampaknya sejalan dengan sinyalemen Steenbrink, terdapat kecenderungan di awal abad-20 bahwa, sistem pendidikan umum di Indonesia, bukanlah timbul akibat penyesuaian dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Sebaliknya sistem pendidikan Islam seperti yang terlihat sekarang ini, lama kelamaan akan menyesuaikan diri dengan dan masuk ke dalam sistem pendidikan umum.¹⁶

Meski antara sistem pendidikan Islam yang dikembangkan melalui bentuk pesantren atau madrasah dengan sistem pendidikan umum melalui sekolah,

¹² Marwan Saridjo, *Op.Cit.*, hlm. 10.

¹³ Zamakhsyari Dhofier, *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia Pada Seperempat Terakhir Abad ke-20*, (Semarang: Walisongo Press, 1997), hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11.

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier, *Tradition & Change In Indonesian Islamic Education* (Jakarta: Balitbang Depag, 1995), hlm. 44-5.

¹⁶ Steenbrink, *Op. Cit.*, hlm. 7.

memiliki ciri dan kelebihan masing-masing, namun secara umum dapat dikatakan bahwa lambat-laun model pesantren dan madrasah-lah yang cenderung lebih menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan umum baik dari segi substansi maupun bentuk pengajarannya.

Baik untuk alasan politis maupun dinamika sosial, upaya penyesuaian system pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional terus mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitas, dalam dua dekade terakhir.

C. BERBAGAI KEBIJAKAN TENTANG SEKOLAH

Sistem pendidikan modern, pada umumnya dilaksanakan oleh pemerintah, yang pada mulanya adalah dalam rangka memenuhi tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan pemerintah, dengan menggunakan kurikulum dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan modern. Sedangkan sistem pendidikan tradisional yang merupakan sisa-sisa dan pengembangan sistem *zawiyah*, *ribat* atau pondok pesantren dan madrasah yang telah ada di kalangan masyarakat, pada umumnya tetap mempertahankan kurikulum tradisional yang hanya memberikan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Dualisme sistem dan pola pendidikan inilah yang selanjutnya mewarnai pendidikan Islam di semua negara dan masyarakat Islam, di zaman modern.¹⁷

Sebetulnya sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berupaya menjembatani atau bahkan menghilangkan dualisme tersebut. Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai murid klas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat (= SD). Peraturan tersebut ditingkatkan lagi melalui SKB dua departemen yang sama pada bulan Januari 1951¹⁸, yang antara lain; membolehkan daerah-daerah yang agamanya kuat untuk memberikan pendidikan agama mulai klas I, dan diberikannya pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu untuk SLTP dan SLTA baik umum maupun

¹⁷ Zuhairini, et. al., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama, 1986), hlm. 123.

¹⁸ Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, cet. IV), hlm. 373-387.

kejuruan.¹⁹ Sedangkan kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama, dengan persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.²⁰ Di sini nampak sekali bahwa kewenangan legitimasi tetap berada di tangan kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Ada sedikit catatan dari peraturan-peraturan ini, bahwa untuk mengikuti pendidikan agama perlu mendapat ijin dari orang tua. Mulai tahun 1966, masa Orde Baru, serta dikuatkan melalui GBHN tahun 1973, 1978 dan 1983 pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dalam semua jenjang pendidikan.²¹

Di sisi lain, kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah diberikan pula perhatian, pembinaan maupun bantuan, khususnya melalui Departemen Agama. Didirikannya MI, MTs dan MA berstatus negeri oleh Departemen Agama ditujukan guna memberikan bimbingan dan percontohan yang konkrit kepada masyarakat Islam tentang pengelolaan madrasah-madrasah swasta Islam yang jumlahnya sangat banyak. Pada madrasah-madrasah negeri itu diatur perbandingan antara pelajaran agama dan pelajaran umum.²² Hal ini nampak jelas dalam beberapa kebijakan teknis dan strategi pengembangan madrasah/perguruan Agama Islam yang digariskan oleh Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, bahwa:

- 1) Peningkatan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan pada perguruan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan masyarakatkat.
- 2) Pembinaan madrasah negeri diusahakan untuk menjadi contoh (model) bagi madrasah swasta terutama dalam soal mutu.
- 3) Pembinaan madrasah swasta diarahkan agar sistem pendidikannya selaras dengan sistem pendidikan nasional. Mutunya sama dengan madrasah negeri.
- 4) Pembinaan pondok pesantren diarahkan di samping memantapkan sistem pendidikannya juga ditingkatkan perannya dalam pembangunan.²³

¹⁹ Zuhairini, *Op. Cit.*, hlm. 152-3.

²⁰ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Jambatan, 1970), hlm. 376-9.

²¹ Zuhairini, *Op. Cit.*, hlm. 154-5.

²² *Ibid.*, hal. 200.

²³ Marwan Saridjo, *Op. Cit.*, hlm. 170-1.

Perhatian dan pembinaan pemerintah terhadap perguruan Islam cukup besar. Pemerintah memberikan bantuannya dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya dengan memberikan subsidi keuangan, peralatan pendidikan, tenaga guru yang digaji oleh pemerintah, pengakuan ijazah dari lulusannya, petunjuk kurikulumnya, latihan dan penataran para pengurus dan guru-gurunya dan lain sebagainya. Pondok-pondok pesantren diberi bantuan alat-alat ketrampilan, keuangan dan lain-lain. Penyaluran bantuan tersebut ada yang melalui Departemen Agama, departemen lain atau langsung dari presiden.²⁴

Akhirnya suatu langkah “peng-integrasian” sistem pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional terlihat jelas ketika muncul PP Nomor 28 tahun 1990, yang menyebutkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah adalah “sekolah umum” (SD dan SMP) yang berciri khas Islam.²⁵ Ada keuntungan yang diperoleh dari PP ini, yaitu bahwa ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum, sehingga dengan demikian lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.

Jika dicermati perkembangan sistem pendidikan Islam, dalam hal ini lembaga pendidikannya, dalam sistem pendidikan nasional nampak jelas bahwa secara prinsip mereka mengalami pergeseran dan perubahan dari orientasi dan eksistensi awalnya, yang akhirnya masuk dan mengikuti sistem pendidikan nasional. Setidaknya hal inilah yang menjadi catatan penting bagi sebagian kalangan umat Islam di Indonesia, yang berhubungan secara praktis dengan lembaga pendidikan, untuk lebih berafiliasi kepada model sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Fenomena menarik yang tumbuh subur di masyarakat adalah Madrasah Diniyah (Madin) ataupun Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ), sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1983 (sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 1964), TPQ umumnya diselenggarakan sore hari.²⁶

Jika di pedesaan fenomena ini sudah mengakar, namun di perkotaan hal ini boleh dibilang relatif baru, yang tumbuh seiring dengan meningkatnya

²⁴ Zuhairini, *Loc. Cit.*

²⁵ Marwan Saridjo, *Op. Cit.*, hlm. 169.

kualitas dan kesadaran beragama masyarakat perkotaan. Kehadiran Madin dan TPQ ini bisa diartikan sebagai wujud ketidakpuasan akan minimnya, baik kualitas maupun kuantitas, pendidikan agama sebanyak 2 jam pelajaran per minggu di sekolah-sekolah umum (yang kebanyakan dipilih oleh mereka). Sehingga respons yang sangat positif diberikan kepada dua lembaga ini.

Tahun 1994 muncul kebijakan rencana dan uji coba sekolah lima hari dalam seminggu. Secara garis besar, rencana sekolah lima hari dan reaksi tokoh-tokoh masyarakat sebagai berikut: Dari jadwal uji coba sekolah lima hari itu, para siswa harus masuk pukul 07.30 pagi dan keluar pukul 15.30 sore. Kalau masuk pukul 08.00 pagi, para siswa baru bisa pulang (keluar) pukul 16.00 sore. Berarti mereka tidak bisa lagi mengikuti Madrasah Diniyah yang umumnya dimulai pukul 14.30 atau 15.00 sore.²⁷ Bagi masyarakat Indonesia, Madin atau TPQ sudah dianggap sebagai “subkultur” umat Islam. Sebagai “subkultur”, oleh sebagian umat Islam keberadaannya telah dianggap sebagai identitas umat Islam. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan dalam masyarakat Indonesia.²⁸ Rencana dan uji coba sekolah lima hari mendapat reaksi dan tantangan keras dari berbagai lapisan masyarakat, hingga pada akhirnya dicabut kembali.

Dari berbagai fenomena dan tuntutan yang berkembang di sebagian masyarakat muslim inilah, maka lahir sebuah konsep sekolah umum dipadu dengan pendidikan agama, yang keduanya memiliki kualitas prima serta berimbang. Konsekuensi dari konsep tersebut adalah, salah satunya adalah jam pelajaran di sekolah menjadi lebih panjang dari pada sekolah pada umumnya. Harapan dari konsep ini setidaknya mampu memadukan Sekolah Umum dengan Madrasah Diniyah/TPQ.

D. SEKOLAH SEBAGAI AGEN PERUBAHAN SOSIAL

Masyarakat bukan hanya sekedar sebuah struktur sosial tetapi juga merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Hubungan, nilai, dan tujuan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 149

²⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 149.

masyarakat hanya relatif stabil pada setiap momen tertentu saja; Dalam dirinya selalu bergerak perubahan yang lambat namun kumulatif.²⁹

Pendidikan dalam masyarakat modern atau masyarakat yang tengah bergerak ke arah modern, pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kaitan antara anak didik dengan lingkungan sosio-kulturalnya yang terus berubah dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, pendidikan dalam banyak hal secara sadar digunakan sebagai instrumen untuk perubahan dalam sistem politik dan ekonomi secara keseluruhan.³⁰ Hal ini sejalan dengan pendapat Collins yang menyatakan bahwa; perbincangan *the 'new' Sociology of Education* pada dekade 80-an telah bergerak pada sebuah isu sentral; hubungan *micro* dan *macro* proses-proses sosial; Bagaimana hubungan atau keterkaitan event-event yang terjadi di dalam ruang kelas dengan struktur-struktur sosial, politik dan ekonomi?³¹

Tentang tuntutan masyarakat terhadap peran pendidikan Muchtar Buchori menyatakan bahwa, Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan semakin tinggi, seiring dengan tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan zaman yang sangat cepat. Tiga kemampuan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan yaitu;

- a. Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan.
- b. Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang berjalan tadi.
- c. Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu.

Kegagalan untuk mengembangkan tiga kemampuan di atas akan berakibat suatu sistem pendidikan terperangkap oleh rutinitas bahkan akan membatu atau menjadi fosil.³²

Bassam Tibi menggambarkan, bahwa tengah terjadi perjuangan dan konflik di dalam masyarakat dunia. Konflik yang secara luas terjadi adalah

²⁹ Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Terj., (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), hlm. 106.

³⁰ Marwan Saridjo, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³¹ Ronald King, *Weberian Perspectives and Study of Education*, British Journal of Sociology of Education, Vol. 1, No. 1, 1980, hlm. 7.

³² Muchtar Buchori, *Pendidikan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 45.

antara budaya Barat, yang sangat dominan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi, dengan kultur non-Barat yang masih bersifat pre-industri, yang masih rendah tingkat penguasaannya terhadap alam. Masyarakat dunia berada dalam kondisi *non-egalitarian* karena memiliki struktur yang *asymetric*.³³ Dari sinilah pangkal tolak munculnya sub-ordinasi non-Barat terhadap Barat. Barat dengan kekuatan kultur industri, yang ditopang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menaklukkan dan menata kembali sebagian besar negara-negara pre-industri (negara dunia ketiga). Tibi melihat bahwa, *gap* antara masyarakat industri maju (yang disebut Kelompok Utara) dengan masyarakat preindustri (yang disebut Kelompok Selatan) semakin lebar dalam kurun 1970-an.³⁴ Kenyataan ironis yang terjadi secara umum, dan terlebih lagi untuk negara berkembang, menurut Battle adalah; problem yang dihadapi oleh dunia pendidikan adalah bahwa perkembangan zaman lebih cepat dari perkembangan pendidikan.³⁵

Sebagian besar negara berkembang adalah negara-negara dengan penduduk muslim, sehingga apa yang digambarkan oleh Tibi tersebut sangat perlu untuk direnungkan. Dunia pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam, dihadapkan kepada tantangan besar, yaitu bagaimana ia mampu berperan aktif sebagai *agent of social change* bagi masyarakat Islam. Di satu pihak dihadapkan pada ketertinggalan ilmu dan teknologi, namun di pihak lain dihadapkan pada persoalan; bagaimanakah nilai-nilai Islam tetap mampu *survive* atau bahkan memiliki nilai supremasi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi tersebut.

Shipman menyimpulkan bahwa, fungsi pokok pendidikan dalam masyarakat modern yang tengah membangun terdiri dari tiga bagian; Sosialisasi, Pembelajaran (*Schooling*), dan Pendidikan (*Education*). Sebagai lembaga sosialisasi, pendidikan adalah wahana bagi integrasi anak didik ke dalam nilai-nilai kelompok atau nasional yang dominan. Adapun pembelajaran (*schooling*) mempersiapkan mereka untuk mencapai dan menduduki posisi sosial-ekonomi tertentu dan karena itu, pembelajaran harus dapat membekali

³³ Bassam Tibi, *The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific-technological Age*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988), hlm. 2.

³⁴ *Ibid.*, hal. 3.

³⁵ J.A. Battle, *The New Idea of Education*, (New York: Harper & Row Publisher, 1986), hal. 105.

peserta didik dengan kualifikasi-kualifikasi pekerjaan dan profesi yang akan membuat mereka mampu memainkan peran sosial-ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan dalam fungsi ketiga, pendidikan merupakan “*education*” untuk menciptakan kelompok elit yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan besar bagi kelanjutan program pembangunan.³⁶

Steenbrink menggambarkan pandangan atau persepsi terhadap pesantren, madrasah dan sekolah yang ada di dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut:

... berkenaan dengan persyaratan dalam masyarakat Indonesia modern bagi mereka yang ingin meraih karir dalam masyarakat, harus memiliki ijazah yang mencantumkan derajat pendidikan umumnya. Sementara itu, gambaran mengenai beberapa pesantren tradisional menyatakan (dengan gaya yang kadang-kadang agak memuji diri) bahwa para murid pesantren dengan mudah dapat mencari penghidupan mereka sendiri, karena mereka tidak diasingkan dari masyarakat seperti pada sekolah umum. Para santri dengan mudah dapat kembali ke bidang pertanian misalnya, sedangkan dari kalangan madrasah modern sering muncul keluhan bahwa para alumninya tidak begitu mudah mendapatkan pekerjaannya. Orang yang melihat mata pelajaran umum di madrasah menyetujui bahwa mata pelajaran tersebut tidak berbeda dengan yang ada di sekolah umum, hanya tingkatannya saja yang relatif lebih rendah dibanding dengan sekolah umum. Oleh karena tingkatannya tersebut, maka lulusan madrasah biasanya tidak mendapatkan penghargaan yang sama dengan sekolah umum, meskipun banyak pengumuman yang menyatakan bahwa madrasah sederajat dengan sekolah umum.³⁷

Sementara Sahal Mahfudh menyatakan; Ketika awal masa kemerdekaan RI sampai adanya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase lumayan masih konsisten berdiri di atas orientasinya sendiri. Perubahan struktur sosial kemudian mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan kebutuhan mendasar yang dipolakan oleh sistem pendidikan nasional.³⁸ Perubahan di madrasah kini tidak hanya terjadi pada kurikulum silabusnya dengan literatur yang baru, akan tetapi wawasannya juga berubah.

³⁶ Shipman, M.D., *Education and Modernization*, (London: Faber, 1972), hlm. 33-35.

³⁷ Steenbrink, *Pesantren, Op. Cit.*, hlm. 231-2.

Pendidikan di madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal madrasah, ijazah hasil ujian persamaan negeri menjadi amat penting dan berpengaruh mengubah pandangan ke arah duniawi. Gambaran di atas menunjukkan adanya perubahan nilai di madrasah.³⁹ Meski disertai keprihatinan akan kondisi tersebut, namun kondisi riil semacam itulah yang tengah terjadi di dalam masyarakat, akibat tuntutan sosial maupun kebutuhan hidup, terlebih lagi di daerah perkotaan dengan tingkat kompetisi yang semakin ketat.

E. GAMBARAN SEKOLAH IDEAL

Sekolah merupakan salah satu sentra pendidikan. Kalau di lingkungan keluarga, pendidik dalam hal ini ayah dan ibu, tidak dapat dijamin akan berada di rumah pada saat anak-anak membutuhkannya, kalau di lembaga pendidikan masyarakat sukar memperoleh peserta didik yang secara sukarela mengikutinya, dan di masyarakat luas keadaannya belum serasi dengan harapan dan cita-cita, maka di sekolah para pendidik memperoleh tugas untuk selalu bersama anak didik selama jam sekolah, mereka tanpa dipaksa berebut memasuki sekolah, bahkan dengan usaha keras, termasuk membayar dan cara-cara lainnya. Dua hal ini saja menunjuk kepada kenyataan betapa *potensial* dan *strategisnya* lembaga pendidikan (sekolah) bagi proses pengembangan sumber daya manusia.⁴⁰ Pada zaman yang telah maju ini semakin banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan kepada sekolah. Itu lebih murah, lebih efisien dan juga lebih efektif. Seandainya orang tua mendidik anaknya sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi, di rumah, oleh dirinya sendiri, sekalipun katakanlah orang tua mampu menyelenggarakan itu, apa yang akan terjadi? Mahal, tidak efisien, dan mungkin juga tidak efektif.⁴¹ Inilah mengapa sekolah dikatakan memiliki peranan yang sangat potensial dan strategis, dibandingkan dengan dua lingkungan pendidikan yang lain, yaitu keluarga dan masyarakat.

³⁸ Sahal Mahfudh, *Op. Cit.*, hlm. 273

³⁹ *Ibid.*, hlm. 276.

⁴⁰ Conny R. Semiawan, *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁴¹ Ahmad Tafsir, *Op. Cit.*, hlm. 75.

Berbicara mengenai sekolah ideal, maka tentu akan diukur berdasarkan beberapa parameter tertentu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sebagai pijakan untuk mengukurnya, maka layak untuk diperhatikan; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0424/U/1993 tentang Pembakuan Tipe Sekolah pada satuan pendidikan dasar (sesuai dengan satuan pendidikan yang menjadi kajian dalam penelitian ini), pasal 1 yang menyebutkan bahwa; (1) Pembakuan adalah penentuan syarat dan kriteria baik kualitatif maupun kuantitatif serta penerapan persyaratan dan kriteria tersebut. (2) Tipe sekolah adalah sebutan suatu sekolah ke dalam suatu kelompok berdasarkan persyaratan tertentu.⁴² Sedangkan pada pasal 4 disebutkan bahwa; Pembakuan tipe sekolah bertujuan memberikan arahan dalam merencanakan serta melaksanakan pengelolaan sekolah secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.⁴³

Penyelenggaraan pendidikan semata-mata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga masyarakat. Dikarenakan keterbatasan dana yang disediakan pemerintah di bidang pendidikan, maka peran serta masyarakat secara aktif sangat diharapkan, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 pasal 47 ayat 1; Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan pada ayat 2 ditambahkan; Ciri khas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.⁴⁴

Kesempatan luas dalam menyelenggarakan serta menampilkan ciri khas pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 47 ayat 1 dan 2 tersebut, memberikan dorongan kuat bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun sebuah model pendidikan sesuai harapan mereka. Peran serta tersebut merupakan refleksi, bahwa pendidikan tidak akan berhasil tanpa kerja sama yang saling mendukung antara pemerintah, keluarga dan masyarakat.

⁴² *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 1993-1994*, (Jakarta: Eko Jaya, 1994), hlm. 215.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 216.

⁴⁴ Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Eko Jaya, 1989), hlm. 68.

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang potensial dan strategis perlu dioptimalkan peranannya. Di samping dukungan fisik, yang tak kalah menentukan adalah faktor non-fisik seperti para pengelola, pengajar, kurikulum dan sebagainya. Menurut Soedijarto, upaya optimalisasi sekolah ini merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan berangkat dari beberapa kenyataan bahwa; (1) bagaimanapun waktu yang tersedia untuk terjadinya proses belajar-mengajar di sekolah sangat terbatas; (2) harapan terhadap sekolah sedemikian besar, karena lembaga pendidikan lainnya (baca: keluarga dan masyarakat) tidak memiliki potensi yang memadai; (3) perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlangsung; (4) terbatasnya dana dan daya yang mendukung pelaksanaan peranan sekolah; (5) heterogennya kemampuan dasar kognitif dan keterbelakangan budaya peserta didik.⁴⁵ Setidaknya berangkat dari kerangka pikir ini, proses optimalisasi sekolah menjadi sesuatu yang sangat perlu, dalam rangka membangun sebuah sekolah yang ideal.

Hal yang sangat mendasar adalah perhatian terhadap proses belajar-mengajar yang tercipta dari komunikasi antara guru dan murid. Dalam istilah Bruner, untuk hal itu perlu menjadikan struktur pengetahuan suatu disiplin (konsep, prinsip, dan *mode of inquiry*) sebagai objek belajar, sehingga dapat dikembangkan proses belajar yang memungkinkan terjadinya *transfer of training*.⁴⁶

Dalam konteks sekolah Islam, pada dataran epistemologi, Ali Ashraf memberikan beberapa pertimbangan dasar dalam mendesain kurikulum pendidikan Islam; *pertama*, pengembangan pendekatan keagamaan ke dan melalui semua mata pelajaran dan kegiatan, *kedua*, kurikulum harus disusun sesuai dengan taraf perkembangan kemampuan pelajar, dan *ketiga*, kurikulum haruslah disusun berdasarkan prinsip kesinambungan, berurutan dan terintegrasi.⁴⁷

Pertimbangan pertama yang dikemukakan oleh Ashraf patut diberikan penekanan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Hal ini sejalan dengan pemikiran Nasr yang mengatakan bahwa; “sains dalam Islam selalu disatukan

⁴⁵ Conny R. Semiawan, *Op. Cit.*, hlm. 146.

⁴⁶ Jerome S. Bruner, *The Process of Education*, (New York: Vintage Books, 1960), hlm. 17-30.

dengan yang sakral. Apapun yang diketahui mempunyai karakter religius yang mendalam, bukan saja karena obyek setiap jenis pengetahuan itu dicipta oleh Tuhan, tetapi sebagian besar lantaran intelegensi dengan mana manusia mengetahui adalah karunia Ilahi, bahkan kategori-kategori logika juga refleksi kecerdasan Ilahi pada tataran pikiran manusia.”⁴⁸ Lembaga pendidikan Islam harus memiliki komitmen yang kuat sebagai basis utama dalam proses pendidikannya, sehingga diharapkan tidak memperpanjang lagi pemikiran yang dikhotomik di kalangan generasi muslim yang akan datang.

Faktor lain yang tak kalah menentukan, terlebih untuk pendidikan dasar, adalah peranan guru. Bertolak dari keharusan menjaga keseimbangan antara kedaulatan murid dan otoritas guru, maka peranan kunci guru di dalam interaksi pendidikan adalah melakukan *pengendalian*; makna pengendalian disini perlu diartikan secara khas- sejak awal tujuannya adalah *pemandirian murid*, bukan penjinakan.⁴⁹ Pengendalian yang dimaksud pada dasarnya dapat ditinjau dari tiga segi, yang secara sistematis mengupayakan (1) pembentukan kemandirian muurid dengan mengatur pemberian kesempatan untuk mengambil keputusan, mula-mula mengenai cara dan kemudian mungkin juga mengenai tujuan, kegiatan belajar, sesuai perkembangan kemampuannya, (2) pemupukan kemampuan murid di dalam pengambilan keputusan yang dimaksud, dengan meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan yang relevan, dan (3) penyediaan sistem dukungan yang memungkinkannya melakukan pelbagai alternatif bentuk kegiatan belajar yang mencerminkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan yang semakin meningkat di pihak murid.⁵⁰

Beberapa hal inilah, baik aspek fisik maupun non-fisik, yang setidaknya yang patut digagas dalam menggambarkan sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang ideal, terlebih khusus lagi konteksnya terhadap lembaga pendidikan Islam.

Memang beberapa yang dituangkan di sini masih bersifat umum dan menyangkut hal-hal pokok saja, sebab untuk membahas secara lebih detail dan

⁴⁷ Lihat Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1989), hlm. 37-42.

⁴⁸ Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisional di Tengah Kancah Dunia Modern*, (terj.), (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 125.

⁴⁹ Conny R. Semiawan, *Op. Cit.*, hal. 121.

teknis tentu akan memerlukan kajian tersendiri yang cukup panjang. Lebih dari itu, menurut hemat penulis, implementasi teknis dari pokok-pokok pikiran di atas akan bergantung kepada kemampuan inovatif dan kreativitas masing-masing pengelola serta pelaksananya, tentunya dengan melihat konteks situasional dalam dinamika masyarakat.

F. KESIMPULAN

Patut juga diakui bahwa masing-masing lembaga pendidikan memiliki keunggulan komparatif dan fungsi sosial masing-masing. Di sinilah diperlukan suatu sikap dan kreativitas untuk mampu menangkap konteks situasional, yang selanjutnya mampu diwujudkan dalam bentuk-bentuk inovasi menuju perubahan yang positif. Menyadari fungsi lembaga pendidikan atau sekolah sebagai salah satu agen bagi perubahan sosial, maka apa yang diupayakan oleh pihak sekolah harus mampu menjawab atau memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakatnya.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli sebagaimana telah dipaparkan di atas, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan oleh penulis. Secara historis, keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya, baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan cenderung mengambil posisi berseberangan dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah. Posisi berseberangan tersebut menjadikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren agak *ter-marginal*-kan, meskipun tidak disemua tempat berlaku kondisi seperti ini. Kondisi ini lebih berkembang di wilayah perkotaan. Lebih dari itu, dari sudut pandang kebutuhan pasar, *out put* lembaga pendidikan Islam dinilai kurang kompetitif dibanding lulusan sekolah-sekolah umum. Ini dikarenakan muatan kurikulum yang kurang aspiratif terhadap akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kenyataan tersebut secara “evolitif” melahirkan kesadaran bahwa lembaga pendidikan Islam memerlukan pencerahan. Implementasi dari hal tersebut adalah masuknya pendidikan Islam sebagai sub-sistem dari Sistem Pendidikan Nasional. Langkah tersebut diambil setidaknya untuk mengejar ketertinggalan lembaga pendidikan Islam selama ini, dan supaya mendapatkan

pengakuan formal serta kedudukan yang sederajat dengan sekolah umum, meski harus dibayar dengan perubahan yang sangat radikal pada muatan kurikulumnya. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, penyebutan *Madrasah* bagi lembaga pendidikan Islam, secara formalnya, tidak lebih dari sekedar kemasakan saja. Sebab muatan kurikulumnya adalah sama dengan sekolah umum. Demikian pula dengan keberadaan *Pesantren*, kurang lebih, dalam dua dekade terakhir yang tidak lagi mengambil posisi berseberangan secara penuh dengan pemerintah. Bantuan-bantuan pemerintah sudah mulai masuk, baik berupa bantuan materi maupun teknis. Di dalam pesantren dibuka model madrasah, diberikannya materi pelajaran umum dan teknik, dan orientasi kepada sertifikat/ijazah-pun menjadi hal yang tak terelakkan.

Di lingkungan perkotaan, fenomena berkembangnya sekolah Islam elite, bisa dikatakan merupakan sebuah penyikapan terhadap “dikhotomi” sekolah umum dan madrasah. Sebagian kaum Muslim yang berlatar belakang sosial-ekonomi menengah keatas, yang mulai muncul pada dekade 1980-an, dalam memilih sekolah di satu sisi lebih cenderung kepada kemasakan atau bentuk sekolah umum, namun bersamaan dengan itu tumbuh pula kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya nilai-nilai agama. Model sekolah swasta Islam elite inilah oleh mereka dipandang mampu memenuhi tuntutan tersebut. Sehingga sejak dekade 1980-an sekolah Islam elite menjadi fenomena baru di daerah perkotaan, yang cukup mampu memainkan peran sosial yang signifikan di kalangan Muslim kelas sosial-ekonomi menengah ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1989).
- Bassam Tibi, *The Crisis of Modern Islam: A Preindustrial Culture in the Scientific-technological Age*, (Salt Lake City: University of Utah Press, 1988).
- Chabib Thoaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982).
- Harbison F., C.A. Myers, *Education, Manpower and Growth Strategies of Human Resources Development*, (New York: McGraw Hill, 1964).
- J.A. Battle, *The New Idea of Education*, (New York: Harper & Row Publisher, 1986).
- Jerome S. Bruner, *The Process of Education*, (New York: Vintage Books, 1960).
- Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indoonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- , *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (terj.), (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995, cet. IV).
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Amisso, 1998).
- M.A. Sahal Mahfudh, K.H., *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994).
- Muchtar Buchori, *Pendidikan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 1993-1994*, (Jakarta: Eko Jaya, 1994).
- Pelita*, tanggal 13-14 Desember 1991.
- Ronald King, *Weberian Perspectives and Study of Education*, British Journal of Sociology of Education, Vol. 1, No. 1, 1980.
- Seyyed Hossein Nasr, *Islam Tradisional di Tengah Kancah Dunia Modern*, (terj.), (Bandung: Pustaka, 1994).
- Shipman, M.D., *Education and Modernization*, (London: Faber, 1972).
- Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Jambatan, 1970).
- Thomas F. O'dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Terj., (Jakarta: Rajawali Pers, 1994).
- Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Eko Jaya, 1989).
- Zamakhshyari Dhofier, *Tradition & Change In Indonesian Islamic Education* (Jakarta: Balitbang Depag, 1995).
- , *Perkembangan Pemikiran Islam di Indonesia Pada Seperempat Terakhir Abad ke-20*, (Semarang: Walisongo Press, 1997).
- Zuhairini, et. al., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama, 1986).

PENDIDIKAN VERSUS KEMISKINAN

“Jer basuki mawa bea” adalah ungkapan yang telah akrab di telinga masyarakat, yang menunjuk pada konsekuensi finansial atas perolehan prestasi. Dewasa ini, pendidikan – terlebih yang berkualitas – sering diidentikkan dengan mahalnyanya biaya. Sebagian kalangan memandang bahwa gejala kapitalisasi sekolah telah merebak, sehingga pendidikan yang diharapkan mampu memobilisasi potensi kaum papa untuk meraih masa depan yang lebih baik semakin jauh dari kenyataan. Sungguh ironis, bahwa pendidikan yang dianggap sebagai salah satu cara ampuh untuk menanggulangi kemiskinan, justru menjadi penghambat atau penghalang perubahan nasib kaum papa ini. Keadaan ini masih ditambah sangat kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya penyediaan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang murah dan berkualitas.

A. PENDAHULUAN

Opini public yang barangkali patut dibenarkan adalah bahwa kemiskinan bisa menutup akses kemajuan seseorang, termasuk salah satunya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depannya. Biaya sekolah mahal! Itulah keluhan yang sering muncul di kalangan masyarakat akar rumput, bahkan di kalangan menengah sekalipun. Telah banyak konsep yang dikemukakan, yang pada intinya menggagas upaya penyediaan pendidikan bagi kaum miskin. Hal ini berangkat dari fenomena riil di lapangan banyaknya anak terlantar dan putus sekolah. “*Education for All*”, di Indonesia pernah disosialisasikan program “Ayo Sekolah” dan sederet program lain yang bertujuan sama kian gencar digalakkan.

Korelasi antara pendidikan dan kemiskinan sudah lama menjadi isu sentral di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat miskin. Sedangkan di Indonesia misalnya, permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan, antara si kaya dan si miskin. Hal ini terlihat jelas, bahwa biaya menyekolahkan anak dalam system pendidikan formal, bagi orang kaya maupun miskin relative sama (lihat di sekolah-sekolah negeri). Penyebabnya adalah, sekolah-sekolah negeri yang lebih kurang 90% pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah justru banyak diduduki oleh anak-anak orang berada maupun kelas menengah. Di sisi lain, anak-anak dari kelompok masyarakat miskin (yang dikarenakan minimnya potensi akademis) harus rela mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah swasta, yang 90% pembiayaannya dipikul oleh mereka sendiri.¹

Pemicu ketimpangan ini adalah sistem seleksi lewat NEM (Nilai Ebtanas Murni), dimana besarnya NEM menjadi syarat mutlak penerimaan siswa. Semakin tinggi NEM yang diperoleh, maka semakin besar peluang untuk dapat duduk di bangku sekolah negeri. Fenomena paradoksal ini tentu bisa dimengerti, anak-anak orang kaya tumbuh

¹ Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-rusakan*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 326.

dengan fasilitas yang lebih baik, gizi cukup dan ditambah perhatian orang tua yang relative lebih baik tentu menghasilkan prestasi yang baik. Sementara anak-anak dari kelompok masyarakat miskin tumbuh di dalam lingkungan yang minim fasilitas, perhatian orang tua maupun tingkat asupan gizi yang kurang memadahi, tentu berakibat pada lemahnya prestasi akademik mereka. Sehingga jelas bias ditebak, anak-anak keluarga kayalah yang lebih memiliki peluang untuk diterima di sekolah-sekolah negeri, yang justru sebagian besar biayanya ditanggung oleh pemerintah.

B. KEMISKINAN DAN FAKTOR PENYEBAB

Masalah kemiskinan dan kaum fakir bukanlah masalah baru. Sejak dahulu, berbagai agama dan aliran filsafat mencoba telah berupaya memecahkan untuk mengakhiri penderitaan kaum papa. Terkadang mereka memberi pengarahan dan peringatan. Selain itu, tak jarang pula mereka menyuguhkan pandangan ideal yang utopis tentang terciptanya kemakmuran di kalangan rakyat, seolah tidak terdapat realitas kemiskinan di dunia ini.²

Kata “miskin” diartikan sebagai “serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah), sedang “kemiskinan” dipandang sebagai “keadaan miskin” Dalam konteks penelitian ini, menurut hemat penulis, predikat yang bisa mewakili kondisi kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah “kemiskinan absolut” yang diartikan sebagai “situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minim”.³

Kemiskinan yang mencekam sepertiga umat manusia saat ini sangat meresahkan seluruh bangsa di dunia. Proposisi Selo Sumardjan tentang kemiskinan structural lebih menjelaskan kondisi realistik dari kemiskinan tersebut. Kemiskinan struktural diartikannya sebagai kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Adapun yang termasuk golongan ini di antaranya para petani yang tidak memiliki lahan sendiri, petani yang hanya memiliki lahan sempit yang hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup keluarga, kaum buruh yang tidak terpelajar/terlatih, pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah yang termasuk golongan ekonomi sangat lemah.⁴

Banyak orang menjelaskan buruknya kesehatan orang miskin, karena kebodohan, kejerokan dan perilaku mereka yang tidak tertib. Mereka tinggal di gubug-gubug karena mereka belum dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kota.

² Dr. Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 11-12.

³ Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 587

⁴ Wahyudi Ruwiyanto, *Peranan Pendidikan dan Pengentasan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 1.

Mereka melarat karena kurang semangat berusaha, tidak memiliki hasrat untuk berprestasi, fasilitas dan hal-hal lain yang disebut sebagai “*culture of poverty*”. Pendek kata, mereka miskin karena memang mereka pantas untuk miskin.⁵

Jika dipetakan, maka kelompok masyarakat miskin yang ada di Indonesia bisa jadi termasuk kategori miskin structural. Jika dilihat dari upaya yang mereka lakukan, tentu mereka telah cukup maksimal. Namun akses untuk menikmati sumber-sumber ekonomi yang ada selalu tidak terkejar oleh kemampuan yang mereka miliki secara financial. Tentu akses dari keadaan ini juga dapat merembet kepada timbulnya berbagai permasalahan social lain, yang akan berdampak kepada kehidupan social secara makro.

Berbicara tentang faktor penyebab kemiskinan, maka akan dijumpai banyak variable yang ikut memberikan kontribusi ke arah itu. Adi Sasono menyatakan bahwa; kemiskinan rakyat Indonesia bukan disebabkan mereka sejak semula tidak mempunyai faktor-faktor kultural yang dinamis. Mereka terbelakang dan miskin karena kesempatan-kesempatan tidak diberikan kepada mereka. Atau karena kesempatan-kesempatan sudah dihancurkan dari mereka. Proses penghancuran ini sudah telah berlangsung sejak zaman feodal kerajaan-kerajaan Hindu maupun Islam, zaman kolonialisme Belanda, dan akhirnya zaman ketergantungan yang terjadi belakangan ini ⁶

Faktor-faktor kultural yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda (juga Jepang) ini membawa kejatuhan dari sisi mentalitas. Di sebagian kelompok masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah mentalitas “kawula” nampaknya cukup mengakar kuat. Sehingga mengakibatkan kurangnya semangat untuk mengubah predikat dan harkat tersebut.

Faktor lain sebagaimana dinyatakan oleh Todaro dalam bukunya “*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*” mensinyalir bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni :

- a. Tingkat pendapatan nasional rata-rata.
- b. Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.⁷

Indonesia yang termasuk dalam kelompok negara dunia ketiga, ternyata juga mengalami problem kemiskinan yang cukup berat, terlebih memasuki masa multi krisis. Masalah kemiskinan merupakan dilemma bagi Indonesia, terutama melihat kenyataan bahwa laju pengurangan jumlah orang miskin berdasarkan garis kemiskinan yang berlaku jauh lebih lambat daripada laju pertumbuhan ekonomi

⁵ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 228.

⁶ M. Amin Rais, *Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca diri*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 100.

⁷ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa Drs. Haris Munandar, MA.,(Jakarta: Erlangga, 1998), hlm. 51

dalam kurun waktu sejak Pelita I sampai VI. Penyebab rendahnya sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Indonesia rendah.⁸

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan berkembangnya kondisi kemiskinan adalah:

- a. Faktor lemahnya mentalitas untuk bertahan dan berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pada kelompok masyarakat miskin, seringkali hanya mengandalkan belas kasih dari kelompok masyarakat lain yang mereka anggap lebih berhasil dalam hidupnya.
- b. Sebagaimana halnya kondisi negara di dunia ketiga, maka rendahnya tingkat pendapatan secara nasional, merupakan faktor makro yang membawa dampak yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi secara nasional. Hal ini tentu berimbas pula pada pendapatan per kapita penduduk.
- c. Distribusi hasil ekonomi yang “juling”, ditandai dengan masih lebarnya kesenjangan dalam hal pendapatan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

C. PENDIDIKAN DAN TANTANGAN KRISIS

Krisis moneter yang menerpa Indonesia sejak awal semester ke-dua tahun 1997, yang kemudian berkembang menjadi multi krisis, telah menggelembungkan jumlah kelompok masyarakat miskin. Meningkatnya angka pengangguran di satu pihak dan harga-harga barang yang melambung berkisar 100-400% di pihak lain telah menambah angka kemiskinan di Indonesia. Jika pada tahun 1996 jumlah orang miskin “tinggal” 22,5 juta jiwa, dan kemudian meningkat menjadi 30 juta jiwa, maka pada tahun 1998 jumlah orang miskin itu meningkat menjadi 80 juta jiwa (versi BPS). Sedangkan versi IMF jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 124,5 juta jiwa.⁹ Peningkatan atau percepatan tersebut sungguh fantastis. Hal ini menunjukkan akses kepada sumber-sumber ekonomi cenderung hanya dimiliki oleh sebagian kecil kelompok masyarakat kita. Sementara sebagian besar yang lain, disamping harus berjuang mengatasi kekurangannya, juga harus “membayar” atau menanggung akibat perilaku “penjahat kerah putih” di negeri ini.

Bidang pendidikan boleh dikatakan menempati urutan ketiga yang merasakan dampak dari multi krisis ini, setelah pangan dan kesehatan. “Dampak lebih jauhnya dengan semakin banyaknya jumlah anak usia sekolah yang tidak bisa bersekolah. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka partisipasi pendidikan. Pada tahun ajaran

⁸ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 51.

⁹ Majalah D&R, 28 Desember 1998 - 2 Januari 1999, hlm. 49-50.

1998/1999 jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah diperkirakan mencapai 5-6 juta".¹⁰

Situasi krisis menuntut kesigapan mengambil langkah untuk segera bangkit dari keterpurukan. Langkah yang ampuh untuk mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing. Tentu kita bisa belajar dari "Restorasi Meiji", program yang dicanangkan oleh Pemerintah Jepang begitu kalah perang dari Sekutu. Mereka segera mengirimkan para pemuda dan pelajar untuk menimba ilmu di dunia Barat, dengan maksud untuk segera mengejar ketertinggalan. Penciptaan manusia-manusia yang cerdas, kreatif dan unggul disadari oleh mereka sebagai sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan. Hasilnya sungguh fantastis, dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah kalah perang, bangsa ini telah berhasil bangkit dari kehancuran total hingga mampu menjadi raksasa industri yang menguasai dunia. Dalam konteks ini keberhasilan Jepang bukan ditentukan oleh sumber daya alam, karena memang keadaan alamnya tidak menyediakan *natural resources* yang cukup untuk mereka olah. Kuncinya adalah penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing sehingga mampu memberikan nilai tambah terhadap bahan baku yang mereka datangkan dari santero dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Masyarakat tentu masih ingat bahwa sumber krisis multi dimensi adalah krisis ekonomi, yang bermula dari runtuhnya system perbankan di negeri ini. Disinilah tampak kebijakan yang sungguh tidak adil dan tidak masuk akal. Ketika pemerintah diminta menaikkan anggaran untuk dunia pendidikan, dijawab bahwa mereka tidak punya cukup anggaran untuk sector itu. Namun di lain pihak, untuk "*nomboki*" atau merestrukturisasi dunia Perbankan yang ambruk, pemerintah justru menggelontor dana yang konon mencapai Rp. 600 triliun (sejak awal krisis yakni pertengahan 1997 hingga tahun 2002). Hal tersebut sungguh sulit diterima oleh *common sense* masyarakat awam, jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan untuk dunia pendidikan, guna keperluan A sampai Z, yang hanya Rp. 11 triliun.¹¹ Keadaan ini secara jelas menunjukkan betapa keberpihakan pemerintah kepada dunia pendidikan sangat minim dan mengecewakan rasa keadilan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat akar rumput yang memerlukan dukungan dan perlindungan.

Melihat keberpihakan yang kurang tentu menimbulkan kejengkelan, namun tentunya tetap harus dihindarkan keputusan terhadap keadaan yang sedang terjadi. Kemauan, inisiatif dan harapan tentu selalu terbuka bagi setiap upaya. Meski

¹⁰ Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7.

¹¹ Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-rusakan, Op. Cit.*, hlm. 24-25.

dengan berbagai keterbatasan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk tetap memberikan harapan yang baik bagi kesinambungan dan terjaganya mutu pendidikan di Indonesia di masa krisis. Program *Jaring Pengaman Sosial* (JPS) bidang pendidikan digulirkan dengan berbagai jenisnya seperti; “Aku Anak Sekolah” yang didukung oleh berbagai lembaga internasional seperti; Bank Dunia (*World Bank*), Bank Pembangunan Asia (ADB) maupun UNICEF, yang diwujudkan dalam bentuk Dana Bantuan Operasional (DBO) kepada sekolah-sekolah yang tidak mampu. Bantuan tersebut diharapkan dapat menyelamatkan secara kualitas maupun kuantitas, terutama untuk Pendidikan Dasar.

Keberhasilan program DBO, maupun program-program sejenis, tentunya terpulung kepada masyarakat secara luas, dikarenakan bantuan tersebut tidak lebih dari sekedar *stimulant* (perangsang) yang jumlahnya jelas terbatas sekali. Komitmen dari Pemerintah terhadap dunia pendidikan tersebut tentunya harus didukung oleh komitmen masyarakat, dalam hal ini orangtua siswa, untuk tetap memperhatikan keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka, meskipun dililit berbagai kesulitan hidup.

Darmaningtyas memetakan apa yang hendak dibangun dari berbagai program tersebut bertujuan; *Pertama*, untuk melihat dampak krisis terhadap dunia pendidikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, jangka pendek maupun jangka panjang, beserta respons Pemerintah untuk mengatasinya. *Kedua*, sebagai bahan refleksi terhadap pengelolaan dunia pendidikan pada masa Orde Baru, dan *ketiga*, menawarkan alternatif lain (yang dalam hal ini; belum tentu baru) tentang pengelolaan maupun pengembangan pendidikan pada masa-masa mendatang, terutama setelah masa multi krisis ini terlewati.¹² Dari sinilah akan dapat dirancang sebuah program yang relative matang dalam upaya mendorong percepatan dunia pendidikan, khususnya semakin memberikan akses yang luas kepada kelompok masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan. Partisipasi masyarakat inilah yang tentu diberdayakan, sebagai upaya mencari keseimbangan tanggung jawab dalam penanganan masalah pendidikan. *Stimulant* yang telah digulirkan oleh Pemerintah sudah sepatutnya direspon secara baik oleh masyarakat.

Penyadaran dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan memang sesuatu yang cukup berat. Mereka pada umumnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok daripada kebutuhan pendidikan, yang tidak dapat mereka rasakan efeknya secara langsung pada saat itu. Tentu diperlukan strategi jitu dan langkah-langkah inovatif serta kerja keras banyak pihak, dalam hal ini elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat

¹² Darmaningtyas, Pendidikan pada *Ibid.*, hlm. 8.

sebagai ujung tombak program-program pemberdayaan. Wadah-wadah atau organisasi-organisasi social kemasyarakatan sangat mungkin mengambil peran ini, karena merekalah yang relative lebih dekat dengan masyarakat akar rumput. Dan pada tingkat *decision maker* dalam hal ini pemerintah harus memformat ulang cetak biru pembangunan. Belajar dari Jepang, apapun resikonya dan berapapun harga yang harus dibayar, anggaran pendidikan yang menurut UUD besarnya telah ditetapkan 20% harus segera direalisasikan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lebih dari itu, keberpihakan terhadap pendidikan kelompok masyarakat miskin perlu memperoleh porsi yang lebih. Kesempatan yang cukup terhadap kelompok ini tentu akan dapat menggerakkan partisipasi mereka, yang pada gilirannya akan menghasilkan generasi dari anak-anak mereka yang juga bisa ikut memberikan kontribusinya bagi kemajuan bangsa. Keberpihakan terhadap kelompok minoritas (kelompok kaya) yang secara financial sudah lebih mandiri harus direduksi seminimal mungkin. Program-program penyelamatan ekonomi yang bersifat penghamburan keuangan negara, seperti restrukturisasi perbankan, yang sebenarnya “pembelaan” terhadap para penjahat “kerah putih”, harus segera dialihkan untuk kepentingan yang lebih berpihak kepada masyarakat luas.

D. TUNTUTAN JANGKA PENDEK DAN KEPENTINGAN JANGKA PANJANG

Jika ditanya manakah yang lebih diutamakan; pendidikan atau mengatasi kemiskinan? Tentu jawabannya akan cukup sulit, sebab keduanya sama-sama mendesak dan saling mempengaruhi. Segala daya upaya sudah pasti akan dilakukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan kunci pembuka ke arah kemajuan”. Pendapat yang demikian kiranya cukup logis sebagai *problem solving* atas persoalan ini.

Meskipun diakui kebenarannya, namun banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dihadapkan kepada persoalan klasik di bidang pendidikan. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan spesifik di masing-masing tempat, umumnya mereka dihadapkan pada dilema; “apakah pertumbuhan ekonomi yang lebih dahulu dipacu ataukah meningkatkan kualitas pendidikannya”. Kedua kepentingan tersebut boleh dikatakan menuntut perhatian yang bobotnya sama beratnya. Di satu pihak adalah urusan “perut” di lain pihak adalah persoalan “kualitas sumber daya manusia”. Persoalan ini sukar dijawab, sehingga ia lebih merupakan sebuah “lingkaran setan” (*vicious circle*).¹³ Dua pilihan yang sulit ini tentu membutuhkan pertimbangan yang

¹³ Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 157.

matang untuk menentukan langkah penyelesaiannya. Jangan sampai ditempuh langkah setengah-setengah yang justru dapat menjadi bumerang bagi runtuhnya kedua aspek tersebut.

Hingga saat ini hampir semua orang masih meyakini bahwa pendidikan adalah “jimat” yang dapat membebaskan manusia dari kemiskinan dan keterbelakangan. Schumacher misalnya, menganggap pendidikan adalah sumber daya yang terbesar. Namun ia juga menyadari, bahwa keyakinan “pendidikan adalah kunci segala-galanya” sudah demikian menurun. Hal tersebut bisa dipahami jika melihat kenyataan bahwa, kemiskinan merupakan persoalan terberat yang dihadapi oleh dunia ketiga dewasa ini. Diperkirakan tidak kurang dari 800 juta manusia hidup di bawah garis kemiskinan dan kemelaratan, yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar dalam kehidupan, termasuk di dalamnya *pendidikan*.¹⁴

Banyak ahli yang sepakat bahwa pendidikan merupakan sebuah proses Humanisasi, proses memanusiakan manusia. Bertolak dari pandangan filsafat tentang manusia dan dunia, bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan itu tidak cukup itu tidak cukup hanya bersifat obyektif dan subyektif, tetapi haruslah kedua-duanya. Kebutuhan obyektif untuk merubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subyektif (kesadaran subyektif) untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi, yang tidak obyektif. Obyektivitas dan subyektivitas dalam pengertian ini menjadi dua hal yang tidak saling bertentangan. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yakni: Pengajar, Pelajar atau anak didik dan Realitas dunia.¹⁵

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Meskipun demikian masih terdapat pendapat yang beragam mengenai peranan yang seharusnya dilakukan oleh pendidikan agar dapat menunjang kegiatan ekonomi dan kemajuan suatu bangsa.

Abd. Khoir Mohd. Memberikan sedikit ilustrasi tentang apa yang seharusnya dibangun dalam sebuah system pendidikan dewasa ini:

The educational system shouldn't only produce literate, but it should, in addition to building moral character, be able to bring out people having the modern skills, technological know-how, who have the incentive to research invent cost saving techniques of production and measures of equitable distribution so as to efficiently utilize Allah's resources, it must also inculcate in trueness the ideal of hard working frugality, moderation, saving and most

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro & Fuad Arif F., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Read, 1999) hlm. ix-x.

*productive investment so that economic activity and growth will accelerate in the economy.*¹⁶

Tekanan yang diberikan dalam pendapat di atas adalah, bahwa pendidikan semestinya tidak hanya mampu mencetak manusia yang pandai, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga harus memberikan bekal sikap hidup seperti; semangat terus untuk mengembangkan apa yang telah diperoleh melalui penelitian, efisiensi dalam memanfaatkan sumber alam yang dikaruniakan oleh Allah, kerja keras, mengembangkan keadilan dan pemerataan dalam upayanya mencapai kemajuan ekonomi.

Namun demikian konsep ideal tersebut terkadang berbenturan dengan realitas yang ada. Kondisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia pada saat ini, mengharuskan munculnya pilihan-pilihan berat di antara konsep ideal dengan realitas.

Boediono melontarkan sebuah keprihatinan bahwa, tekanan yang terlalu berat pada usaha untuk mengaitkan secara langsung kegiatan pendidikan untuk memenuhi permintaan pembangunan ekonomi yang berjangka sedang, untuk menyiapkan tenaga kerja, seolah-olah telah mendangkalkan tujuan pendidikan yang berjangka panjang untuk membentuk manusia seutuhnya. Sedangkan memberikan tekanan terlalu berat pada perwujudan jangka panjang untuk membentuk manusia seutuhnya akan menyebabkan hasil proses pendidikan itu sendiri tidak dapat secara langsung dinikmati untuk mempertahankan hidupnya dari hari ke hari.¹⁷ Kenyataan ini nampaknya menjadi dilemma yang sangat besar dan pilihan yang teramat sulit, terlebih lagi dalam kondisi perekonomian negara yang masih lemah. Jelas sekali, bahwa pilihan kedua sukar untuk dihindari, dikarenakan tekanan untuk jangka pendek akan lebih besar. Sementara, rasanya terlalu naif jika mengorbankan kepentingan ideal jangka panjang.

Pendidikan juga merupakan investasi ekonomis, karena pengembangan sektor ekonomi sangat bergantung pada besarnya kuantitas dan tingginya kualitas tenaga terdidik, yang mana keduanya dapat diperoleh lewat sistem pendidikan. Pendidikan juga mempunyai nilai konsumsi, di samping komponen investasi. Jika pendidikan hanya dipandang dan dipergunakan sebagai jalan masuk utama ke dalam elit yang ketinggalan zaman, atau semata-mata sebagai pengalaman estetis dalam studi kemanusiaan, tidak mungkin pendidikan akan meningkatkan sumbangan ekonomi terhadap aspek lainnya. Aspek "konsumsi" pendidikan tidak menguntungkan secara

¹⁶ Abul Khoir Mohd, Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1991), hlm. 45.

¹⁷ Dr. Boediono, *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 69.

relatif, lebih lazim dalam negara terbelakang dapat dikurangi daripada di negara maju yang dengan mudah dapat melahirkan aspek konsumsi ekonomi¹⁸

Berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi, ada beberapa masalah pelik yang tengah dihadapi oleh pemerintah kita di masa sekarang, yaitu :

1. Sistem pendidikan kita baru sampai pada taraf menghasilkan lulusan sebanyak-banyaknya dan belum sampai pada taraf efisiensi, produktivitas ekonomi, kreatifitas dan kualitas lulusannya belum mampu mengembangkan aspek-aspek tersebut di atas.
2. Pendidikan kita lebih banyak bersifat umum dan kurang menyiapkan anak didik sebagai angkatan kerja yang produktif, kreatif dan sebagai manusia pembangunan (lebih banyak menyiapkan mereka menjadi insan intelektual). Juga jumlah lulusan sekolah tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada.
3. Orang sulit mendapatkan kesempatan kerja.
4. Banyak pekerjaan dalam pembangunan terhenti karena tidak adanya tenaga ahli dan lain-lain.¹⁹

Salah satu kritik yang sangat tajam terhadap pendidikan nasional adalah ketidakmampuannya membawa masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Antara pendidikan dan kemiskinan terbentuk semacam lingkaran setan; karena miskin orang tidak bisa bersekolah dan karena tidak bersekolah orang sulit keluar dari jeratan kemiskinannya. Pendidikan yang dikembangkan oleh Orde Baru justru mempercepat proses pemiskinan masyarakat, baik karena sistem pendidikan yang dikembangkan keliru, maupun karena kebijakan pengembangan pendidikan itu tidak didukung dengan pendanaan yang cukup. Upaya pemerintah untuk mendorong warga agar bersekolah setinggi-tingginya tidak disertai dengan tanggung jawab yang besar untuk menyediakan pembiayaan pendidikan, dan sering tidak melihat situasi dan kondisi sosial-ekonomi. Dalam kampanye pendidikan, aparat pemerintah dengan ringan (tanpa beban dosa) selalu berkata: "Kalau perlu apapun dijual untuk sekolah".²⁰

Pendidikan di Indonesia, selain dinilai mempunyai sumbangan yang besar atas tingginya angka pengangguran terdidik, juga mempunyai kontribusi yang besar dalam menciptakan ketimpangan (disparitas) antara kaya-miskin, pandai-bodoh, kota-desa, atau laki-perempuan. Hal itu disebabkan kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan cenderung memihak pada yang kaya, pintar, kota, dan laki-laki. Seperti dalam hal pemberian beasiswa JPS misalnya, ternyata unsur kepandaian paling

¹⁸ M. Sardjan Kadir dan Umar Ma'sum, *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang*, (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1982), hlm. 76,

¹⁹ Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm. 99.

²⁰ Darmaningtyas *Pendidikan pada ...*, 141

menentukan seseorang memperoleh beasiswa atau tidak, dibandingkan pertimbangan ketidakmampuan secara ekonomis.²¹

Pendidikan buat masyarakat miskin pada saat krisis ini hanya merupakan impian belaka, kecuali keluar kebijakan khusus pemerintah yang memungkinkan mereka pergi sekolah tanpa harus pusing-pusing memikirkan seluruh biaya. Biaya pendidikan yang sering dikeluhkan sebagai beban oleh masyarakat tidak hanya menyangkut soal SPP, tapi justru pungutan-pungutan lain yang tidak terduga besar maupun waktu penarikannya, termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi yang juga mengalami kenaikan rata-rata 25-50 % sejak Mei 1998.²²

Dalam konteks memberdayakan potensi besar yang ada di dalam masyarakat dalam dunia pendidikan, sejak tahun 1954 Menheim telah menyatakan bahwa pendidikan masyarakat merupakan salah satu penemuan paling menentukan dalam abad ini, yang lebih hebat dari pendidikan formal, belum dihargai sebagaimana seharusnya. Pendidikan non-formal dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif untuk menentukan kualitas hidup manusia, untuk segala strata ekonomi, strata sosial, dan strata pendidikan, di samping dapat pula untuk ikut memecahkan masalah-masalah kemanusiaan yang mendesak/meresahkan.²³ Model-model yang dikembangkan oleh masyarakat ini setidaknya merupakan alternatif yang mampu memadukan antara dua kepentingan, dan yang lebih penting lagi ia berangkat dari sebuah *realitas*.

Adalah hal yang sangat naif jika upaya mencapai kemajuan melalui pendidikan ini hanya disandarkan pada satu pihak saja. Kesadaran bersama, semangat dan kemauan yang kuat sajalah yang dapat mengubah kondisi sosial ekonomi dewasa ini melalui jalur pendidikan, serta peningkatan kualitas SDM. Masyarakatlah yang menjadi kunci utama bagi terciptanya iklim perubahan yang sama-sama diinginkan.

E. KEMISKINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam situasi negara yang miskin, masyarakat tidak akan banyak berpartisipasi secara aktif dan kreatif pada usaha pembangunan sekarang dan di masa yang akan datang selama tingkat pendidikan rakyat masih ada pada tingkat primitif. Faktor kesulitan ekonomi ini tentunya akan berpengaruh pada pandangan orangtua, yang notabene kelompok masyarakat miskin ini, terhadap pemberian bekal pendidikan bagi anak. Dengan kata lain, kemiskinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk di dalam bidang pendidikan.

²¹ *Ibid.*, 142

²² *Ibid.*, 29

²³ Wahyudi Ruwiyanto, *Op.Cit.*, hlm. 1.

Kendala yang dirasakan sangat besar adalah “ketidakbersedianya, perasaan tidak perlunya” orangtua menyekolahkan anak sesudah usia 10 tahun. Tingginya persentasi jebolan Sekolah Dasar pada kelompok usia 10 tahun dapat disebabkan oleh prinsip ini. Kenyataan yang harus dihadapi adalah memang rendahnya tingkat sosial ekonomi sebagian besar orangtua siswa, walaupun IPC (sebagai misal) pada tahun 1993 sudah mencapai US \$ 620,- per tahun, namun besarnya kesenjangan dalam pendapatan ini tetap menghantui masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk kelompok berpendapatan rendah yang (pada saat itu) berjumlah 40% dari jumlah penduduk, mungkin berkisar setengahnya (lebih kurang 30 juta) hanya berpenghasilan US \$ 100 per tahun. Kelompok inilah yang disebut sebagai *kelompok miskin* dan *sangat miskin*. Kelompok ini yang juga mempunyai anak usia 12-15 tahun yang harus terkena wajib belajar. Sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan menyekolahkan anaknya jika anak tersebut dapat membantu mencari nafkah. Kendala lain adalah yang disebabkan oleh jenis kelamin. Anak perempuan usia kurang dari 12 tahun sebagian besar sudah *haid*, dan bagi orangtua menyekolahkan anak perempuan yang dianggap “toh akan kawin” merupakan suatu hal yang sia-sia/*mubadzir*. Karena mereka pada akhirnya hanya akan masuk dapur saja (menjadi istri).²⁴

Pengaruh kemiskinan ini lebih jauh bisa dilihat dari terhambatnya perkembangan kognitif, intelektual dan mental anak-anak. Dalam kondisi ini, lagi-lagi anak-anaklah yang menjadi korban. Dalam lingkungan mereka yang miskin, sulit sekali memperoleh hal-hal yang dapat mengembangkan kemampuan dan peningkatan kualitas mereka. Ini berlainan sekali dengan keluarga mampu dan terdidik. Mereka mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh fasilitas dan sarana guna mengembangkan kemampuan anak-anaknya. Akibatnya, perkembangan anak-anak kalangan miskin pada umumnya tertinggal dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga yang mampu. Kondisi ini sangat mempengaruhi hasil/prestasi pendidikannya. Sehingga banyak yang tidak mampu menyelesaikan sekolah.²⁵

Dalam situasi ekonomi negara yang masih belum menentu ini, pendidikan harus tetap mendapat perhatian serius dari siapapun. Nasib bangsa ditentukan oleh berhasil tidaknya pendidikan. Upaya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, perlu didukung oleh semua pihak. Artinya, mesti ada perubahan kebijakan yang memudahkan mereka mengakses pendidikan.

²⁴ Maftuchah Yusuf, *Peran Perguruan Swasta dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2000), hlm. 56.

²⁵ Azra, *Op.Cit.*, Hlm. 159

F. CATATAN AKHIR

Pendidikan yang diyakini sebagai investasi bangsa untuk masa mendatang tentu harus dimiliki oleh semua elemen bangsa. Dalam konteks kepentingan pembangunan bangsa, pendidikan tidak boleh kehilangan “ruh”nya yaitu sebagai agen perubahan social (*the agent of social change*). Karenanya, dibutuhkan kesadaran dan keberpihakan semua pihak untuk membangun system pendidikan nasional yang sehat dan memiliki daya saing. Beberapa kebijakan yang kiranya perlu dilakukan antara lain :

1. Kesadaran akan Arti Penting Pendidikan

Jika pendidikan masih diyakini sebagai kunci terjadinya perubahan dan perbaikan kehidupan di masa yang akan datang, maka sudah selayaknya berbagai pihak merenung ulang tentang arti pendidikan –terutama bagi generasi penerus bangsa. Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam investasi pembangunan bangsa. Kepentingan-kepentingan jangka pendek yang sifatnya sementara dan konsumtif harus dapat dikurangi untuk sesuatu yang lebih dirioritaskan, yakni pendidikan sebagai investasi masa depan. Perencanaan yang matang dengan melibatkan pemerintah bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat harus terus digalang. Organisasi-organisasi social kemasyarakatan sebagai ujung tombak bagi penyadaran arti penting pendidikan bagi investasi masa depan harus bergerak aktif dan berkesinambungan

2. Peningkatan Anggaran Pendidikan

Undang-undang Dasar telah mengamanatkan kepada pihak eksekutif untuk membelanjakan 20% APBN pada sector pendidikan. Porsi ini –dalam skup nasional- pada dasarnya merupakan tugas pemerintah. Perencanaan anggaran ini harus lebih matang seiring tuntutan perubahan global, yang menuntut efektifitas dan efisiensi. Orientasi “proyek” yang bersifat formalistic, yang justru banyak dinikmati oleh para birokrat, harus segera dan sebesar-besarnya diarahkan kepada program-program realistis dan fungsional untuk memberdayakan masyarakat, serta hasilnya banyak dinikmati oleh masyarakat secara luas. Peningkatan anggaran pendidikan akan memberikan dampak yang positif terhadap kemampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak. Namun demikian perlu diingat, bahwa potensi yang lebih besar dalam hal pembiayaan pendidikan adalah di *masyarakat* itu sendiri. Kesadaran akan arti penting pendidikan bagi masa depan yang lebih baik, perlu terus ditumbuhkan di kalangan masyarakat (tentunya pemerintah juga harus menjadi *pioneer*-nya). Pandangan sebagian masyarakat, yang memandang bahwa pendidikan hanya membuang-buang biaya

saja, perlu segera dirubah. Untuk itu kampanye publik melalui berbagai media harus gencar dilakukan. Apabila kesadaran tentang arti penting pendidikan telah tumbuh dan kuat di kalangan masyarakat, maka hal ini akan mampu menggerakkan secara signifikan potensi masyarakat –di semua lapisan- dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan.

3. Pendidikan untuk Pendidikan

Di era sekarang, pendidikan nampaknya telah terkena imbas kapitalisme. Dunia pendidikan telah kehilangan “ruh”nya dikarenakan telah bergeser menjadi industri yang cukup menggiurkan banyak pemodal. Kondisi ini bak “gayung bersambut” karena masyarakat sendiri juga berperilaku oportunis, dimana mereka hanya mengejar status dan gelar, untuk segera dapat memasuki dunia kerja dengan bekal ijazah. Akhirnya pendidikan tidak lebih dari sekedar transaksi dagang dimana kepentingan masing-masing pihak selalu diukur dengan kapital atau materi. Jika keadaan ini terus berlanjut, tentu hanya kelompok menengah ke atas sajalah yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan, itupun hanya formalitas. Sementara kelompok masyarakat miskin yang jumlahnya mayoritas hanya menjadi penonton, yang pada gilirannya akan tergilas. Dalam kondisi yang masih sulit ini, para pejabat di lingkungan pendidikan, para pengelola sekolah (negeri-swasta), kalangan dunia usaha perlu sedikit berkorban dan kembali kepada misi yang murni “pendidikan untuk pendidikan”. Sekolah (pendidikan) adalah sarana untuk mencerdaskan bangsa. Sekolah sudah saatnya dibersihkan dari iklim bisnis –secara berlebihan- yang dilakukan oleh siapapun.

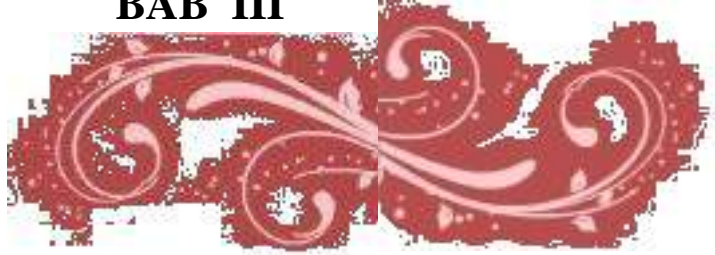
4. Penghapusan Pungutan

Banyak keluhan dari orangtua siswa terhadap berbagai pungutan di luar SPP (pungutan yang tidak prinsipil). Bagi mereka yang berasal dari ekonomi kelas atas, hal ini tidaklah menjadi masalah. Namun bagi kelompok ekonomi menengah dan bawah, hal ini dirasa cukup memberatkan. Adanya uang seragam, buku-buku pelajaran yang harus ganti setiap catur wulan, ulangan umum bersama, rekreasi dan pungutan sejenisnya, merupakan beban berat yang akan mengurangi partisipasi -kelompok masyarakat miskin khususnya- untuk menyekolahkan anak. Jika hal ini terus terjadi, maka hanya akan memperpanjang kualitas kemiskinan pada generasi berikutnya. Untuk itu, sudah saatnya dilakukan penghapusan berbagai pungutan yang tidak prinsipil ini bagi mereka, agar semangat menyekolahkan anak yang sudah tumbuh tidak layu atau bahkan mati

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Khoir Mohd, Jalaluddin, *The Role of Government in an Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1991).
- Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Azyumardi Azra, Prof. Dr., M.A., *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998).
- Boediono, Dr., *Pendidikan dan Perubahan Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997).
- Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis, (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- , *Pendidikan Rusak-rusakan*, (Yogyakarta: LkiS, 2005).
- Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997).
- Maftuchah Yusuf, *Peran Perguruan Swasta dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2000).
- M. Amin Rais, *Islam di Indonesia, Suatu Ikhtiar Mengaca diri*, (Jakarta: Rajawali, 1986).
Majalah D&R, 28 Desember 1998 - 2 Januari 1999.
- Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa Drs. Haris Munandar, MA., (Jakarta: Erlangga, 1998).
- M. Sardjan Kadir dan Umar Ma'sum, *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang*, (Surabaya: PT. Usaha Nasional, 1982).
- Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro & Fuad Arif F., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Read, 1999).
- Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
- Wahyudi Ruwiyanto, *Peranan Pendidikan dan Pengentasan Masyarakat Miskin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Yusuf Qardawi, Dr. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

BAB III



PENDIDIKAN ISLAM DI TENGAH PLURALITAS

PENDIDIKAN PLURALISTIK Belajar dari SMU Muthahhari

Kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA yang kerap terjadi di tanah air merupakan akibat dari ekspresi keberagaman yang keliru di dalam masyarakat kita. Ekspresi keberagaman yang ditampilkan seringkali masih bersifat eksklusif, fanatisme berlebih untuk memonopoli kebenaran dan keselamatan hidup. Ditengarai ekspresi keberagaman tersebut merupakan hasil dari pendidikan agama yang eksklusif. Pendidikan Agama masih banyak memprodukan individu-individu yang memandang golongan atau agama lain sebagai lawan. Bentuk-bentuk kerusuhan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa secara kolektif bangsa ini belum belajar banyak tentang bagaimana hidup berdampingan dalam harmoni, atau setidaknya sendi-sendi kebersamaan sudah mulai ditinggalkan. Hal ini tentu berawal dari kelemahan atau kurang berhasilnya agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga dan lembaga pendidikan dalam menanamkan sikap toleransi-inklusif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

A. PENDAHULUAN

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa manusia adalah umat yang satu (*Ummatan wahidah*), "*Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.*" Di dalam ayat lain juga secara tegas Allah menerangkan kepada kita bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku suku supaya mereka saling mengenal. Kemajemukan adalah sebuah ketentuan Allah terhadap kehidupan. Pada era multikulturalisme dan pluralisme seperti sekarang ini, manusia dihadapkan kepada beragam persoalan yang boleh jadi menguji karakter masing-masing individu dalam konteks relasi-relasi sosial. Keragaman dalam hidup merupakan sebuah kenyataan yang harus disadari oleh masing-masing individu.

Di dalam masyarakat sering dijumpai perselisihan antar kelompok yang bermotifkan keyakinan, baik intern maupun antar umat beragama. Perselisihan antar anggota masyarakat yang merasa berbeda mazhab, maupun antar pemeluk agama keram menghiasi lembar-lembar berita. Perbedaan dan perselisihan tersebut sering berujung pada pertikaian, bahkan hingga terjadi pengrusakan, penganiayaan hingga pembunuhan. Sebut saja kerusuhan berskala nasional seperti Ambon, Poso, Sambas, yang memakan ribuan korban, merupakan bukti

konkrit bahwa sikap saling menghargai pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang beragam ini belum terbangun dengan kokoh.

Kerusuhan-kerusuhan bernuansa SARA yang kerap terjadi di tanah air merupakan akibat dari ekspresi keberagaman yang keliru di dalam masyarakat kita. Ekspresi keberagaman yang ditampilkan seringkali masih bersifat eksklusif, fanatisme berlebih untuk memonopoli kebenaran dan keselamatan hidup. Ditengarai ekspresi keberagaman tersebut merupakan hasil dari pendidikan agama yang eksklusif. Pendidikan Agama masih banyak memproduksi individu-individu yang memandang golongan atau agama lain sebagai lawan.

Bentuk-bentuk kerusuhan tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa secara kolektif bangsa ini belum belajar banyak tentang bagaimana hidup berdampingan dalam harmoni, atau setidaknya sendi-sendi kebersamaan sudah mulai ditinggalkan. Hal ini tentu berawal dari kelemahan atau kurang berhasilnya agen-agen sosialisasi utama seperti keluarga dan lembaga pendidikan dalam menanamkan sikap toleransi-inklusif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dari sinilah disadari betapa urgennya ikhtiar membangun kesadaran pluralisme melalui jalur pendidikan, dengan maksud membuka cakrawala pandang masyarakat agar siap dan mampu melintas batas kelompok etnis, tradisi, budaya dan khususnya agama.

B. PENDIDIKAN AGAMA DAN PLURALISME

Sejak kelahirannya, Islam sudah berada di tengah-tengah budaya dan agama-agama lain. Ketika Rasulullah berdakwah, di sana sudah terdapat agama Yahudi dan Kristen. Di dalam Al Qur'an-pun juga banyak disebut kontak Islam dengan komunitas-komunitas agama lain. Perdagangan yang dilakukan bangsa Arab pada waktu itu ke Syam, Irak, Yaman dan Ethiopia, serta posisi kota Mekkah yang menjadi pusat transit perdagangan yang menghubungkan daerah-daerah di sekitar jazirah Arab seperti Byzantium, Persia, Mesir, Ethiopia,

menjadikan agama-agama yang ada di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya tidak asing lagi bagi Rasulullah Saw.¹

Pada era kenabian Muhammad, masyarakat pluralistic secara religius telah terbentuk dan sudah pula menjadi kesadaran umum pada saat itu. Keadaan demikian, sudah sewajarnya lantaran secara kronologis agama Islam memang muncul setelah terlebih dahulu berkembang agama-agama lain seperti Hindu, Budha, Kristen, Katholik, Majusi, Zoroaster, Mesir Kuno maupun agama-agama lain. Untuk itu “dialog” antar iman termasuk sentra yang mewarnai Al-Qur’an.²

Dalam konteks pluralisme, sikap yang hendaknya dibangun dalam diri setiap individu pemeluk agama adalah sikap saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, mau saling belajar, membiasakan hidup dalam perbedaan dan senantiasa menerapkan prinsip *agree in disagreement* (setuju dalam ketidaksetujuan). Hal ini sangat penting agar dapat meredam dan menangkal potensi konflik yang secara late nada di dalam masyarakat yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi.

Menurut John Sealy dalam bukunya *Religious Education: Philosophical Perspective* (1986), Pendidikan Agama mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam upaya menanamkan sikap pluralisme. Hal ini dikarenakan Pendidikan Agama memiliki fungsi *neo confessional*, yaitu disamping berfungsi untuk meningkatkan keberagaan peserta didik dengan keyakinan agamanya, juga berfungsi memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan mempermasalahkan agama lain sebatas bertujuan menumbuhkan sikap toleransi.³

Senada dengan pendapat di atas H.A.R. Tilar menyatakan pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama, kemudian direkonstruksi secara

¹ Machasin, *Pluralisme dalam Islam*, dalam Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana), hlm. 187.

² M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 73.

³ John Sealy, *Religious Education: Philosophical Perspective*, (London: George Allen & Unwin, 1986), hlm. 43-44

komprehensif dan dinamis dalam upaya membangun suatu masyarakat yang bermoral dan beradab.⁴ Dalam sebuah sinyalemennya Tilaar menyebut praktik pendidikan agama yang eksklusif dan dogmatis selama ini, sedikit banyak telah menyumbang dan mengabdikan konflik intern dan ekstern umat beragama.

Potensi konflik yang terjadi dalam masyarakat seringkali dipicu oleh praktik pengamalan keagamaan yang bersifat sempit. Ian G. Barbour, sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah menerangkan beberapa hal terkait dengan persoalan tersebut. Menurutnya, struktur fundamental bangunan pemikiran teologi selama ini, biasanya terkait erat dengan karakteristik berikut ini: *pertama*, kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas kepada kelompok sendiri yang sangat kuat. *Kedua*, adanya keterlibatan pribadi (*involvement*) dan penghayatan yang begitu kental dan pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang diyakini kebenarannya. *Ketiga*, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan menggunakan bahasa aktor dan bukannya bahasa seorang pengamat. Menyatunya ketiga karakteristik tersebut dalam diri seseorang atau kelompok tertentu memberi andil yang cukup besar bagi terciptanya 'enclave-enclave' komunitas teologi yang cenderung bersifat eksklusif, emosional dan kaku.⁵

Pluralisme dapat dipahami sebagai sebuah sikap yang mengakui dan menghargai keadaan yang plural secara etnis, kebudayaan dan keagamaan tertentu, karenanya sikap ini harus ditumbuh-kembangkan pada diri generasi muda melalui pendidikan agama khususnya. SMU Plus Muthahhari (SMUTH) memandang Pendidikan Agama merupakan sarana yang sangat efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan akidah inklusif kepada peserta didik. Perbedaan agama di antara peserta didik bukan merupakan penghalang untuk bisa bermuamalah. Pendidikan Agama justru dapat dijadikan sarana bagi peserta didik untuk menggali dan menemukan nilai-nilai keagamaan pada agamanya masing-masing sekaligus mengenal tradisi agama orang lain.

⁴ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Logoss, 2000), hlm. 5.

⁵ M. Amin Abdullah, *Op. Cit.*, hlm. 14.

Mencermati dan melihat maksud/tujuan didirikannya Yayasan Muthahhari⁶ setidaknya akan terbersit harapan untuk menemukan jawaban atau solusi bagi keinginan untuk merespon persoalan pluralisme. Maksud dan tujuan lembaga pendidikan ini adalah: *pertama*, Pendidikan Muthahhari bertujuan untuk mempelajari ide-ide baru bagi pengembangan pemikiran Islam dari Muthahhari yang relevan dengan tantangan-tantangan kontemporer. *Kedua*, menyebarkan sikap-sikap religius yang didasarkan pada keterbukaan, non-sektarianisme, toleransi dan pencerahan pemikiran Islam. *Ketiga*, membangun sistem pendidikan yang memberikan informasi mengenai persoalan-persoalan kontemporer kepada para pelajar dalam kalangan ilmu-ilmu tradisional, dan pada saat yang sama memberikan pelatihan dalam ilmu-ilmu Islam tradisional kepada para pelajar dari kalangan ilmu-ilmu modern. *Keempat*, menumbuhkan kesadaran Islam melalui gerakan dakwah yang direncanakan dan disusun secara professional.⁷

SMUTH menyadari, bahwa untuk menumbuh kembangkan kecintaan, saling menghormati satu agama dengan agama lain maupun intern umat beragama, perlu dikembangkan sebuah konsep dan pemahaman tentang pluralisme melalui Pendidikan Agama.

Dalam pendidikannya, pemahaman Islam yang hendak dikembangkan oleh SMUTH adalah pemahaman dan pemikiran yang bersifat inklusif. Artinya bersifat terbuka, mampu mengakomodasi dan menyerap sisi-sisi baik dari faham kemanusiaan dan faham keagamaan lain, sejauh hal itu tidak merusak prinsip-prinsip ajaran dasar Islam. Dalam praktiknya, Muthahhari tidak mengasramakan siswa (*boarding school*), sebab system ini dianggap akan mengisolir siswa dari lingkungan sosialnya, atau menempatkan peserta didik dalam sebuah lingkungan yang eksklusif. Asrama Muthahhari berada atau berbaur di

⁶ SMU Plus Muthahhari secara resmi berdiri pada tanggal 1 Juli 1992. Lembaga pendidikan ini berada di bawah Yayasan Muthahhari untuk Pencerahan Pemikiran Islam. Didirikan berdasarkan akta nnotaris No. 16 tanggal 3 Oktober 1988 di Bandung. Pendirinya adalah Jalaluddin Rahmat, yang termasuk salah seorang intelektual Islam terkemuka yang sangat mengagumi seorang pemikir Syi'ah, Muthahhari.

⁷ Djamaluddin Malik, *Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia*, (Bandung: Fak. Pasca Sarjana UNPAD, 1992), hlm. 113-114.

masyarakat, dengan harapan para peserta didik memiliki *social intelligence* dan membiasakan mereka mengembangkan sikap terbuka.

Kegiatan ini yang mungkin paling menarik dan jarang dijumpai di lembaga pendidikan lain. SMUTH tidak jarang mendatangkan intelektual ataupun teolog dari agama lain, bertaraf nasional bahkan internasional, untuk memberikan kuliah umum (*stadium general*). Sebut saja pada tanggal 12 Januari 2002, telah diselenggarakan Dialog Antar Agama yang bertemakan “*Muhammad dalam Pandangan Kristen*” yang menghadirkan salah seorang pengamat agama nasional, Jakob Sumardja. Dari hasil dialog tersebut, sampailah pada suatu kesimpulan di antaranya, “bahwa para sejarawan agama sudah lama dan bahkan berulang kali menyatakan bahwa Yahudi, Kristen dan Islam tumbuh dalam rumpun yang sama, dikenal dengan istilah *Abrahamic Religion* (Agama yang dibawa Ibrahim). Secara geneologis, semua pembawanya (para Nabi dan Rasul) merupakan anak keturunan Ibrahim, yang menyampaikan ajaran monoteisme yang intinya sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan”.

Forum-forum semacam ini tentu dapat menjadi wahana membangun sikap toleran dan memahami perbedaan sekaligus menemukan titik-titik persamaan dalam konteks perbedaan agama. Muthahhari nampaknya telah berusaha menumbuhkan dan memelihara pemahaman inklusif para peserta didik melalui system pendidikannya. Melalui forum dialog ini Muthahhari berusaha menunjukkan komitmennya terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang bersifat terbuka dan menjadi perintis kerjasama bagi agama-agama lain.

C. IMPLEMENTASI PLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA

Pluralitas agama merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa disangkal ataupun dihindari. Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam realitasnya terdapat ribuan agama di dunia. Menurutnya, pada agama-agama yang sudah diakui secara resmi saja kita melihat keragaman yang luar biasa, apalagi jika kita melihat cara setiap orang menjalankan agamanya. “Satu Tuhan banyak agama” merupakan realitas yang harus dihadapi oleh umat manusia pada masa sekarang.

Disebut SMU (Plus) Muthahhari –bukan SMU Unggulan- dikarenakan adanya tambahan beberapa mata pelajaran. Tambahan yang *pertama*, adalah bahasa Inggris ekstra, dimana tenaga pengajarnya adalah *native speaker*, yang berasal dari Amerika atau Australia. Tambahan yang *kedua* adalah computer, yang dipandang sudah menjadi kebutuhan untuk masa mendatang. Tambahan *ketiga* adalah *dirasah Islamiyyah*, yang mencakup pelajaran ilmu-ilmu dasar keislaman seperti; *Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadits, al-Fiqh al-Muqaran, Ushul Fiqh*. Ilmu-ilmu dasar keislaman ini dimaksudkan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan keagamaan. Di samping itu diberikan pula pelajaran *Bahasa Arab*.

SMUTH mempunyai karakter sebagai lembaga pendidikan berbasis agama yang mengembangkan kesadaran pluralisme. Dalam praktiknya, kesadaran akan heterogenitas, saling menghargai, serta membangun solidaritas sosial dijadikan sebagai orientasi pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Pendidikan Agama diarahkan dapat menjadi panduan dalam konteks hidup bersama dalam perbedaan, baik secara individual maupun kelompok, serta tidak terjebak pada primordialisme dan eksklusivisme kelompok agama dan budaya yang sempit dan kaku. Sikap ini disadari oleh SMUTH perlu ditumbuh-kembangkan pada diri generasi muda melalui dimensi-dimensi pendidikan agama.

Implementasi pluralisme dalam dimensi pendidikan agama ini dijabarkan dalam empat aspek yaitu:

1. Aspek Akidah

Akidah merupakan elemen sentral dan utama dalam ajaran Islam. Dalam Islam persoalan akidah harus didudukkan dalam kemutlakan. Namun demikian, akidah seseorang harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik secara individu maupun di dalam bingkai kehidupan sosial kemasyarakatan. Disinilah seringkali timbul "pertentangan" ketika akidah Islamiyah berhadapan dengan keimanan orang yang beragama lain. Persoalan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Islam, namun oleh agama lain pula. Dalam realitasnya, tak heran jika kemudian muncul persoalan *truth claim* dan

salvation claim di antara umat berlainan agama, yang acapkali berakhir dengan konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Untuk mengatasi persoalan tersebut SMUTH menekankan kepada peserta didiknya akan pentingnya "persaudaraan" umat beragama. Materi akidah tidak hanya ditekankan kepada hafalan-hafalan materi tentang keimanan, namun lebih menekankan penghayatan keimanan dalam praktik keseharian di dalam masyarakat. Akidah harus menghasilkan amal dan akhlak yang baik terhadap Allah, sesama umat manusia dan alam sekitarnya.

Secara prinsip Kurikulum Pendidikan Agama di SMUTH berorientasi pada akhlak. *Kelas Satu* berorientasi pada "mengguncangkan keimanan". Dalam praktiknya, pada tahap ini semua peserta didik diminta untuk merasakan jadi orang yang beragama lain atau atheis sekalipun. Tujuannya bukan untuk "konversi" namun justru dalam rangka meneguhkan iman. Akidah harus dipahami sendiri oleh mereka, bukan dengan cara taklid, karena taklid dalam persoalan akidah tidak dapat dibenarkan. *Kelas Dua* diarahkan kepada masalah syari'ah. Dalam persoalan syari'ah, sering dijumpai perbedaan pendapat yang kadang cukup tajam di kalangan umat Islam. SMUTH memberikan materi Fiqh Muqarran, dalam rangka memberikan penjelasan adanya perbedaan pendapat dalam Islam dan semua pendapat itu sama-sama memiliki dasar atau argumen. Karenanya, dalam menyikapi perbedaan itu harus dibangun sikap saling menghargai dan menerima perbedaan tersebut. Pihak sekolah tidak menentukan mazhab yang wajib diikuti oleh peserta didik, namun diserahkan kepada mereka masing-masing untuk menentukannya.

SMUTH memandang "iman" yang dimiliki oleh setiap pemeluk agama bersifat dialogis, dalam arti bahwa iman merupakan proses dialog antara manusia dengan Tuhan serta dengan sesama manusia. Iman merupakan sebuah pengalaman batiniah ketika seseorang melakukan "perjalanan" menemukan Tuhan. Pada tingkat tertentu iman harus didialogkan dengan sesama manusia dengan menggunakan "bahasa" manusia.

Pendidikan akidah seperti ini tentu menuntut *fairly and sensitively* serta menuntut keterbukaan fakir (*open-minded*). Di sisi lain juga menuntut peserta didik untuk bersikap *objective*, dalam arti sadar bahwa membicarakan iman secara fair itu tidak dalam rangka menemukan jawaban mengenai benar atau validnya suatu agama. Di sisi lain juga bersikap *subjective*, dalam arti menyadari bahwa pengajaran seperti itu sifatnya hanya untuk mengantarkan setiap peserta didik memahami dan merasakan sejauhmana keimanan suatu agama itu dapat dirasakan oleh orang yang mempercayainya.⁸

Penerapan *Akidah Inklusif* tentu bukan untuk menciptakan kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena jelas hal adalah *absurd*. Yang hendak ditemukan adalah titik-titik pertemuan yang dimungkinkan secara teologis oleh masing-masing agama. Untuk membangun hal tersebut dibutuhkan dialog dengan bermodalkan kerendahan hati dan keterbukaan pikiran untuk membandingkan konsep-konsep ideal yang dimiliki agama lain, agar terhindar dari penilaian dengan standar ganda, apalagi kebencian.

Berangkat dari asumsi dasar bahwa pluralitas agama merupakan *sunnatullah*, maka SMUTH melalui majalah dan buku-buku yang diterbitkan – baik yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat, para guru maupun siswa – memperkenalkan bahwa perbedaan manusia dengan agama yang dipercayainya merupakan merupakan kenyataan ontologis yang tak terbantahkan. Karenanya, dialog yang santun menjadi sebuah prasyarat terbangunnya pluralitas yang sehat, terlebih dalam era globalisasi dewasa ini. Dalam era globalisasi pluralitas sosial, kultur, ideologi bahkan agama merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap umat beragama, tidak bisa ditolak. Menolak pluralitas justru akan sangat membahayakan terciptanya kedamaian yang diidamkan semua pihak.

2. Aspek Spiritual

⁸ Alex R. Rodger, *Education and Faith in Open Society*, (Britain: The Handel Press, 1982), hlm. 61-62.

Pendidikan merupakan proses menuju kesempurnaan individu. Dalam pandangan SMUTH, pendidikan spiritual merupakan usaha sadar untuk menghantarkan peserta didik memiliki hubungan yang sangat kuat antara ruhani manusia dengan Sang Pencipta, dengan kata lain sebagai upaya mencapai *ma'rifah ruhiyah*. Dalam perjalanan ruhani ini manusia harus dapat menyerap asma Allah yang merupakan cerminan sifat-sifat-Nya, seperti Pengasih dan Penyayang.

Seseorang yang mengkaji tradisi keagamaan Islam segera akan menyadari bahwa di bawah lapisan dohma monoteistik yang kokoh serta ketat dan hukum monolitik terdapat kehidupan bawah tanah dari pengalaman keagamaan yang kaya. Kehidupan yang dimaksud disini adalah kehidupan para mistikus Islam. Kehidupan yang penuh toleransi dan keramahan mistisisme terhadap agama-agama lain yang terejawantahkan dalam dialognya yang mendalam dengan agama-agama lain.

Aspek spiritual yang ditanamkan di SMUTH adalah spiritual yang bukan sekedar metode pencarian makna, namun merupakan fondasi bagi pencarian itu sendiri. Berdasarkan pandangan tersebut, Jalaluddin Rahmat menjelaskan beberapa hal: *pertama*, pendidikan harus memperhatikan perpaduan antara tubuh dan jiwa. Harus disadari bahwa hal-hal yang bersifat fisik akan sangat mempengaruhi psikis, seperti, persepsi, kognisi, kensepsi diri dan sebagainya. *Kedua*, manusia memiliki kemampuan yang hampir tak terbatas. Tubuh dan jiwa manusia dapat berkembang jauh melebihi dari apa yang kita bayangkan. Pendidikan harus berusaha mengoptimalkan seluruh potensi ini. *Ketiga*, dimensi mistikal dalam kehidupan manusia harus dikembangkan lagi dalam situasi belajar.

Melalui metode *Riyadhah*, SMUTH mencoba merealisasikan tujuan tersebut. *Modelling* sangat ditekankan dalam proses belajar mengajar. SMUTH memberikan pengalaman langsung yang bersifat ritus-ritus keagamaan seperti salat, pengenalan tasawuf, latihan khusus dalam *ma'rifatullah*, pembacaan do'a, tadarrus dan pembiasaan lainnya. Metode-metode yang diterapkan ini nampaknya memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan. Spiritualitas peserta didik nampak sekali dan berimplikasi sosial. Kepekaan mereka terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial dibuktikan dengan seringnya mereka berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara yang kurang beruntung maupun tertimpa musibah.

Bagi mereka spiritualitas adalah "cinta", sehingga tidak ada kecanggungan bagi mereka ketika harus berinteraksi dengan orang yang berlainan keyakinan dengan mereka.

Jargon yang sangat dikenal di SMUTH adalah "dahulukan akhlak daripada fiqh". Hal ini menggambarkan bahwa SMUTH lebih mengutamakan kesalehan pribadi dan sosial daripada kesalehan spiritualitas yang eksklusif. Dalam konteks ini SMUTH menerapkan pembelajaran SQ (*Spiritual Quotient*), yakni pembelajara yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearifan di luar ego dan jiwa sadar serta berkaitan dengan pencarian nilai. Pada prinsipnya manusia memiliki banyak kecerdasan, tetapi jika tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritual, jiwa tidak akan merasakan kebahagiaan.

Pembinaan spiritual di SMUTH dilakukan dengan berbagai metode, sebagai berikut:

Pertama, Tadarus Al Qur'an yang diadakan pada jam pertama (sebelum pelajaran dimulai), paling sedikit tiga ayat. Kegiatan ini disamping untuk membiasakan siswa membaca Al Qur'an, juga dalam rangka membersihkan jiwa dengan bertabarruk (mencari berkah) dari bacaan Al Qur'an. *Kedua*, menggiatkan salat berjamaah dalam rangka membangun kebersamaan di antara guru dan siswa. *Ketiga*, membaca suat Yasin dan do'a pada malam Jum'at (minimal sekali dalam sebulan), dimana seluruh guru dan siswa diajibkan hadir. Acara ini juga mengundang masyarakat sekitar sekolah. *Keempat*, Pengajian Ahad Pagi bersama masyarakat sekitar. *Kelima*, mengadakan peringatan hari-hari besar Islam.

Disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual sebagaimana disebut di atas, masih terdapat beberapa upaya membangun SQ yang mungkin tidak dijumpai di sekolah-sekolah lain. Beberapa kegiatan dimaksud adalah,

(*keenam*) *Spiritual Camp* (Camping Ruhaniyah) yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah (*Tazkiyatu an-Nafs* atau membersihkan jiwa) dengan melakukan dzikir dan ibadah pada waktu malam. Sementara siang harinya pendekatan diri kepada Allah dilakukan dengan melakukan bakti sosial kepada masyarakat, berkhidmat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar kampus, yakni di pedesaan terpencil selama lebih kurang 3 (tiga) hari tiga malam. Kegiatan ini diwajibkan untuk siswa kelas I.

Ketujuh, kegiatan *Spiritual Work Camp* yang diadakan dalam rangka melatih kepekaan dan kepedulian sosial. Selama lebih kurang satu minggu peserta didik ditempatkan di rumah-rumah penduduk di pedesaan (semacam Kuliah Kerja Nyata) yang diwajibkan untuk siswa kelas II. Pada setiap satu rumah ditempatkan dua orang peserta didik. Mereka mengikuti “irama hidup” tuan rumah, dan harus membantu menyelesaikan pekerjaan. Misalkan si tuan rumah adalah petani, maka para siswa juga harus membantu bertani, demikian pula untuk pekerjaan-pekerjaan lain. *Kedelapan*, Pesantren Ramadhan yang diisi dengan melaksanakan ibadah-ibadah ritual, kunjungan sosial, *sahur on the road* (sahur bersama fakir-miskin di jalan) serta sahur di rumah kaum dhu’afa.

Kesembilan, adalah *Forum Demokrasi* dalam rangka mengembangkan iklim demokratis. Ada sebuah hari yang dinamakan “mimbar demokrasi” yang diadakan sekali dalam sebulan. Dalam forum ini peserta didik diberi kesempatan dan kebebasan untuk melakukan kritik terhadap system pendidikan. Jika terdapat kebijakan-kebijakan pendidikan tentu pihak sekolah melibatkan peserta didik dalam forum musyawarah. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap kritis sekaligus apresiasi dan menghormati perbedaan dengan penuh tanggung jawab. *Kesepuluh*, SMUTH mengembangkan pembelajaran dengan metode *Modelling (Uswah)* yang diakui merupakan metode paling baik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah. Akhlak tidak diajarkan melalui materi pelajaran, namun lebih ditekankan melalui metode *uswah*.

Dalam hal pelanggaran akhlak, SMUTH menerapkan model hukuman yang tetap mengacu pada pembinaan akhlak. Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran akhlak tertentu, hukumannya berupa bakti sosial ke tempat tertentu yang ditunjuk oleh Sekolah. Tempat-tempat yang dituju di sini termasuk tempat ibadah agama lain. Dalam konteks hukuman ini, siswa diminta selama 2 hari membersihkan gereja. Hal ini dalam rangka menumbuh kembangkan sikap toleransi dalam beragama dan saling menghormati, sehingga menghilangkan sikap-sikap *truth claim* dan fanatisme buta.

3. Aspek Intelektual

“Belajar berbasis Otak” (*Brain Based Learning*) merupakan metode yang diterapkan dalam rangka mengembangkan inteluktualitas peserta didik secara optimal. Beberapa teori yang kemudian dikembangkan oleh SMUTH untuk mengoptimalkan potensi intelektual peserta didik yaitu, *Quantum Learning (QL)*, *Accelerated Learning (AL)*, *Multiple Intelligence(MI)*. Pada prinsipnya antara ketiganya terdapat kesamaan. AL lebih menitik beratkan proses belajar mengajar bisa cepat dengan hasil yang optimal, sedangkan MI lebih menaruh perhatian terhadap kecerdasan siswa secara personal.⁹ Melalui penerapan Belajar berbasis Otak ini SMUTH ingin menciptakan iklim belajar yang manusiawi dan didasarkan pada cara kerja otak.

Dalam praktiknya, diterapkan slogan *Leraning is fun*. Semua pendidik maupun peserta didik harus merasakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak terjadi kekhawatiran dan kecemasan terhadap diri dan lingkungannya. Lingkungan belajar yang nyaman dapat dikelompokkan dalam lingkungan intern, melibatkan zona keamanan individu secara personal dalam pembelajaran. Sedangkan lingkungan ekstern melibatkan penataan lingkungan fisik pembelajaran.

⁹ Jalaluddin Rahmat, *Belajar Caerdas: Belajar Berbasis Otak*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 5.

BBL memandang bahwa otak manusia juga mengalami dehidrasi ketika terlalu lama diforsir untuk bekerja. Karenanya diperlukan jeda dan suplai oksigen untuk memulihkannya. SMUTH memperbolehkan setiap peserta didiknya keluar mengambil minum yang disediakan di setiap sudut di luar kelas. Sementara di dalam kelas, untuk menumbuhkan rasa nyaman dan rileks, dipedengarkan musik-musik lembut untuk pengiring pembelajaran. Gambar-gambar, kaligrafi hasil karya siswapun ikut menemani suasana belajar agar lebih bersemangat.

Menurut penuturan beberapa siswa, sistem belajar di SMUTH seperti halnya perkuliahan, dimana guru banyak memberikan tugas yang bersifat eksploratif. Di sini guru juga lebih memosisikan diri sebagai partner belajar.

Apa yang dapat ditarik dalam model pembelajaran ini adalah, SMUTH berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan kerja otak dengan cara yang baik. Otak merupakan organ paling penting dalam belajar. Kesulitan dan kegagalan belajar biasanya terjadi dikarenakan cara kerja otak yang salah. Karenanya, SMUTH menerapkan paradigma belajar didasarkan pada optimalisasi cara kerja otak.

4. Aspek Sosial

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa SMUTH tidak menerapkan *boarding school*. Hal ini dalam upaya membangun ikatan sosial yang kuat antara peserta didik dengan lingkungannya. Hal ini didasarkan pada pendapat Carnegie, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa yang paling menentukan sukses dalam kehidupan itu bukanlah *Intellectual Intelligence*, namun *Social Intelligence*. Kecerdasan Sosial ini mencakup beberapa kemampuan seperti; kemampuan memunculkan gagasan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berhubungan dengan orang banyak. Kontribusi *Social Intelligence* ini bisa mencapai 70% dalam

menentukan kesuksesan seseorang, sementara yang 30% adalah kemampuan akademis.¹⁰

Dengan menempatkan para peserta didik di tengah masyarakat, diharapkan akan menumbuhkan kecerdasan dan kepekaan sosial. Diharapkan setiap individu dapat merasakan adanya berbagai jalinan sosial dengan masyarakat dan berusaha mengokohkannya, menyadari makna kerja sama, serta ikut andil dalam aktivitas sosial, mau mengabdikan untuk kepentingan sosial, menghormati nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga setiap perilaku siswa akan selaras dengan norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan demikian tidak terjadi alienasi sosial siswa dengan masyarakatnya. Untuk tujuan pendidikan sosial, siswa juga dilibatkan di dalam kegiatan masyarakat seperti olah raga, camping.

Dalam kaitan dengan interaksi sosial siswa dengan masyarakat, SMUTH juga menekankan perlunya berinteraksi secara baik dengan komunitas agama lain. Akhlak merupakan tujuan dari pendidikan sosial. Karenanya, SMUTH juga memfasilitasi siswanya dengan menyelenggarakan aktivitas bersama komunitas penganut agama lain. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat jalinan persaudaraan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati demi terciptanya perdamaian. Kegiatan semacam ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan yang selama ini sudah ditanamkan oleh semua agama seperti cinta kasih, rendah hati dan peduli kepada sesama.

D. CATATAN AKHIR

Pendidikan bisa dikategorikan sebagai bentuk pendidikan yang berbasis pluralisme, apabila dari segi orientasi (landasan filosofis) pendidikan, komponen kurikulum, metode, sarana prasarana serta evaluasinya mengupayakan terciptanya prinsip-prinsip pluralisme.

Pendidikan pluralisme dalam mendekati dan memahami “objek agama” tentu saja berangkat dari berbagai sudut pandang yang beragam. Dari

¹⁰ Jalaluddin Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. 76.

sinilah nantinya diharapkan memunculkan pemahaman sosiologis, historis, psikologis, terhadap keberagaman manusia, untuk mengantarkan peserta didik “memiliki agama” sekaligus dapat “menghargai” agama orang lain.

Berangkat dari pemahaman tersebut SMUTH nampak telah menerapkan model pendidikan berbasis pluralisme. Melalui tujuan, kurikulum, metode dan perangkat pendidikan lainnya. Tampak apresiasi SMUTH terhadap kenyataan yang ada di masyarakat kita yang sangat pluralistik. SMUTH menyadari, dalam rangka menumbuhkan kecintaan, saling menghormati antar sesama penganut agama harus diawali dengan konsep dan pemahaman tentang penerapan pluralisme dalam pendidikan agama. Heterogenitas yang tinggi masyarakat Indonesia sangat rawan dengan konflik yang bermotifkan SARA. Beragam konflik yang terjadi dewasa ini adalah dikarenakan kegagalan memahami dan membangun kesadaran pluralitas, yang ini bisa berawal dari pendidikan agama yang tidak mampu menyemaikan prinsip-prinsip pluralisme.

Pendidikan Agama harus mampu melakukan transformasi kehidupan beragama itu sendiri dengan melihat sisi Ilahiyah dan sosial budayanya. Pendidikan Agama harus berusaha menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan mewariskannya kepada generasi penerus berupa, tata nilai, persahabatan dalam kemajemukan, kesadaran akan *unity in diversity*, mengembangkan sikap saling menghormati dan memahami, serta kesediaan berdialog secara terbuka,

Pada akhirnya “mendahulukan akhlak daripada fiqh” merupakan satu pandangan yang patut dikembangkan. Pandangan yang mampu menembus batas atau sekat-sekat primordial, ras, etnis dan agama ini tentu menjadi pilihan sikap dan tindakan dalam kerangka hidup yang pluralistik ini. *Wallahu a'lam...*

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Esei-esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logoss Wacana Ilmu, 1999).
- Alex R. Rodger, *Education and Faith in Open Society*, (Britain: The Handel Press, 1982).
- Djamaluddin Malik, *Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia*, (Bandung: Fak. Pasca Sarjana UNPAD, 1992).
- H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Logoss, 2000).
- Jalaluddin Rahmat, *Belajar Caerdas: Belajar Berbasis Otak*, (Bandung: Mizan, 2005).
- John Sealy, *Religious Education: Philosiphical Perspective*, (London: George Allen & Unwin, 1986).
- Machasin, *Pluralisme dalam Islam*, dalam Pergulatan Pesantren dan Demokrasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- M. Arkoun, *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2001).

AGAMA DAN KONFLIK SOSIAL

Sifat kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga menyimpan potensi maupun *factor disharmoni*. Pandangan umum yang telah lama dipopulerkan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah, serta akomodatif terhadap berbagai nilai budaya asing dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, tentu dapat dikatakan bahwa potensi konflik dan budaya kekerasan yang muncul terlihat relative sama kuatnya dengan budaya keramah-tamahan bangsa ini. Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya bisa juga dikatakan berbanding terbalik dengan sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asumsi yang berlaku mestinya, sikap religius dapat mencegah timbulnya konflik yang semestinya tidak perlu. Atau jika konflik berkembang pada skala kecil tentunya religiusitas ini bisa menjadi penyejuk dan unsur pendamai pertikaian antar kelompok tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak konflik yang terjadi justru dibangun dengan mengatasnamakan agama.

A. PENDAHULUAN

Tumbangnya Orde Baru yang dipandang telah memasung kehidupan berdemokrasi, mengantarkan bangsa Indonesia ke era Reformasi. Datangnya era Reformasi telah membawa warna baru dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Aspirasi yang telah sekian lama terpasung, seolah lepas bagaikan kuda liar. Tuntutan akan kebebasan berekspresi seolah tak terbendung. Setiap orang merasa berhak berbuat apa saja tanpa perlu mengindahkan aturan dan norma. Aturan dan norma yang dianggap sebagai produk Orde Baru dipandang tidak patut lagi untuk diindahkan. Pada gilirannya, kebebasan yang “tak terbatas” yang dituntut oleh setiap individu ini ketika dihadapkan dengan tuntutan kebebasan individu lainnya, tentu menimbulkan perselisihan. Rasa saling percaya sudah sedemikian terkikis baik dalam hubungan social yang bersifat horizontal maupun vertical. Hampir pada setiap kesempatan berkumpulnya massa, selalu menimbulkan kecemasan akan timbulnya konflik.

Dikembangkannya demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, disamping merupakan keniscayaan, di sisi lain membawa dampak yang negative. Meskipun oleh sebagian kalangan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar bagi penegakan demokrasi, namun di sisi lain ada harga yang terlampau mahal yang harus dibayar oleh bangsa ini. Konflik antar kelompok masyarakat di berbagai daerah seperti di Maluku, Poso, Sampit, Sambas, Aceh maupun beberapa daerah lain merupakan bukti konkrit melemahnya watak dasar bangsa Indonesia yaitu tenggang rasa, musyawarah

dan kekeluargaan. Konflik menjelang PEMILU, pemilihan kepala daerah hingga kepala desa, baik yang mengatasnamakan panji-panji partai maupun kelompok-kelompok pendukung para calon juga terus mewarnai lembaran suram kehidupan berdemokrasi bangsa ini. Masing-masing kelompok nampaknya tidak siap menerima kekalahan atau tidak mau mengalah. Kekerasan seringkali dihadapi dengan kekerasan, seolah sudah tidak ada lagi ruang untuk duduk bersama menemukan titik temu secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap reaktif dan balas dendam telah sedemikian sulit dipadamkan, karena terkait dengan emosi dan primordialisme. Luapan emosi biasanya diekspresikan dalam bentuk kerusuhan, perusakan, pembalasan, penganiayaan bahkan pembunuhan. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang menjadi tuntutan. Selama tujuannya belum tercapai, maka tindak kekerasanpun sulit untuk diredakan, bahkan memiliki tendensi lebih besar dan akan memusnahkan siapa saja yang dipandang menjadi penghalang tercapainya target tersebut. Sikap emosional menjadi sedemikian dominan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalnya. Akibat dari fenomena tersebut, sudah tak terhitung korban jiwa, materi maupun non-materi.

Sifat kebhinnekaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga menyimpan potensi maupun factor disharmoni. Pandangan umum yang telah lama dipopulerkan adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah-tamah, serta akomodatif terhadap berbagai nilai budaya asing dan berintegrasi di tengah-tengah masyarakat. Jika dikaji lebih mendalam, tentu dapat dikatakan bahwa potensi konflik dan budaya kekerasan yang muncul terlihat relative sama kuatnya dengan budaya keramah-tamahan bangsa ini.

Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya bisa juga dikatakan berbanding terbalik dengan sikap religius yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Asumsi yang berlaku mestinya, sikap religius dapat mencegah timbulnya konflik yang semestinya tidak perlu. Atau jika konflik berkembang pada skala kecil tentunya religiusitas ini bisa menjadi penyejuk dan unsur pendamai pertikaian antar kelompok tersebut. Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak

konflik yang terjadi justru dibangun dengan mengatasnamakan agama. Di tengah berkecamuknya konflik acapkali terdengar simbol-simbol agama seperti; pekikan Takbir, atau klaim jihad jika terkait dengan konflik antar kelompok agama yang berbeda. Memang terkadang dijumpai keadaan unik, dimana saat terjadi peredaan ketegangan dan perdamaian tercapai, keramahan dan persaudaraan kembali terjalin seperti sedia kala, walau mungkin sifatnya temporer. Dari situ dapat dipahami bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi terkadang sangat situasional dan bersifat laten, jika muncul kembali variable-variabel pemicu seperti ekonomi, politik, ras dan sebagainya, meskipun di lingkungan masyarakat dengan basis keagamaan yang baik. Fenomena ini tentu merupakan gejala yang sudah mencemaskan dan menjadi “pekerjaan rumah” bagi para pemuka masyarakat, khususnya para ulama. Bagaimana menciptakan pendidikan agama yang dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih santun?

B. AGAMA DAN KERAGAMAN SOSIAL

Dalam konteks hidup bermasyarakat, keragaman sosial atau yang sering disebut dengan *pluralisme*, seringkali menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu integritas masyarakat. Beberapa pandangan menunjukkan, *pluralisme* dipahami sebagai salah-satu faktor yang menimbulkan konflik-konflik sosial, baik bertolak demi satu kepentingan (*vested-interest*) keagamaan yang sempit, maupun bertolak dari supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu.¹ Pandangan demikian ada benarnya, karena di banyak negara terjadi kasus kekerasan masa yang dilatarbelakangi oleh persoalan-persoalan pluralisme ini. Dalam kehidupan moderen sekarang ini, masalah pluralisme harus mendapat perhatian yang serius.

Keragaman sosial, baik dalam kelompok budaya maupun pemikiran (perbedaan pendapat) adalah bagian dari “*sunnat Allah*” Bahkan dapat dikatakan, bahwa kehidupan ini ada karena dibangun di atas keragaman. Oleh

¹ Dr. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1993), hlm.64.

karena itu penyelesaian implikasi negatif dari pluralisme tidak mungkin mengingkari pluralisme itu sendiri. Tetapi yang harus dilakukan adalah membangun pemahaman yang utuh dan mengembangkan sikap arif dalam menyikapi perbedaan. Sehingga perbedaan akan menjadi kekuatan yang sinergis, saling mengisi dan melengkapi dalam membangun peradaban masa depan.

Sikap agama terhadap pluralisme sangat jelas. Ajaran Islam mengakui adanya pluralisme dalam berbagai aspek. Bahkan memberikan kerangka sikap etis yang tegas. Al-Qur'an sendiri menyatakan secara eksplisit, bahwa sengaja manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan menghargai.² Al-Qur'an juga menyatakan bahwa perbedaan warna kulit dan bangsa harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah.³ dalam ayat lain ditegaskan, tentang kemajemukan pandangan dan cara hidup diantara manusia yang tidak perlu menimbulkan kegusaran, akan tetapi hendaknya dipahami. Sebagai pangkal tolak dorongan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, karena tuhan sendirilah yang akan menerangkan sebab-sebab manusia berbeda nanti ketika kita kembali kepada Nya.⁴

Pengakuan ajaran Islam secara positif terhadap keagamaan tersebut dilanjutkan dengan penjelasan sikap etis yang harus dikembangkan untuk mengeliminir implikasi negatifnya. Hal demikian dapat dilihat penegasan al Qur'an yang perlu mencari titik temu (*kalimatun sawa*) dalam menghadapi pluralisme.⁵ Sikap toleransi (*tasamuh*) ini dalam sejarah dakwah Nabi pernah dicontohkan dengan jelas, ketika berhadapan dengan kelompok lain di Madinah. Menghadapi pluralistik masyarakat Madinah ini Nabi berusaha mencari titik temu berbagai golongan dengan terlebih dahulu mengakui eksistensi mereka. Keterangan demikian dapat dikaji dalam dokumen yang populer disebut "*Konstitusi Madinah*" Sunnah demikian lalu diteruskan oleh khalifah Umar r.a.

² Q.S. Al Hujurat: 13.

³ Q.S. Al-Rum: 22

⁴ Q.S. Al-Maidah: 48

⁵ Q.S. Ali 'Imron: 64

dalam menghadapi penduduk Yerusalem yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Aelia”⁶

Agama-agama lain, misalnya dalam Kristen, terdapat kecenderungan pemikiran yang sama dalam menghadapi persoalan pluralisme. Sebelumnya terdapat persoalan teologis yang menjadi kendala utama dalam pengembangan dialog antaragama lain. Persoalan tersebut berhubungan dengan ajaran “*Sateriologi*” (tentang konsep keselamatan di luar kristus) Sebelum konselin Vatikan II, terdapat penafsiran yang salah tentang kalimat “*extra ecelisian nulla salus*” (di luar gereja tidak memperoleh keselamatan). Dengan diterbitkannya naskah *Nostra Aetate*, gereja katolik Roma mengakui eksistensi agama-agama lain.⁷

Dilihat dari prespektif teologi agama-agama terhadap pengakuan yang positif terhadap pluralisme, sehingga terdapat titik singgung yang dipertemukan. Tetapi persoalan yang seringkali timbul dan menyebabkan dialog agama-agama mengalami hambatan lebih banyak berkaitan dengan persoalan interpretasi. Interpretasi ajaran-ajaran agama seringkali mengarah kepada klaim kebenaran yang mutlak. Apalagi ketika dimanfaatkan oleh kepentingan subyektif.

Dalam rangka kontekstualisasi agama, interpretasi menjadi satu kebutuhan (*necessity*) yang mendesak yaitu upaya pemakaian doktrin-doktrin agama yang lebih demokratis disamping pendewasaan sikap keberagamaan. Sikap demokratis akan tercermin sebagai kearifan dalam menafsirkan ajaran agama, serta pengembangan sikap eksternal ketika berhadapan dengan pemeluk-pemeluk agama lain. Sikap semacam inilah yang oleh Nurcholis Majid disebut dengan cara beragama “*al hanifiyyah al samhah*”, yaitu sikap beragama yang lapang dan terbuka.⁸

Dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang ditandai adanya pluralisme agama, sikap demokratis tersebut diatas perlu dikembangkan. Upaya penghapusan konflik-konflik dan kekerasan antar agama menuju kehidupan

⁶ Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Letera Antarnusa, 1990), Hal 199-205

⁷ Sudirman Tabba, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm: 75.

⁸ Nurcholis Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm: 89

bersama yang damai. Upaya ini dapat dilakukan dengan pola mengembangkan beragama dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan universal dari prespektis agama.

Dengan demikian, keragaman masyarakat khususnya aspek agama tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai potensi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kehidupan demokrasi, sebagaimana dalam pandangan teori struktur sosial, pluralisme justru sangat diperlukan sebagai salah satu prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi dalam masyarakat moderen.⁹ Dan dilihat dari sudut pandang ini, Indonesia mempunyai potensi besar untuk berkembang menjadi masyarakat moderen yang demokratis dan religius.

C. KONFLIK SOSIAL

Konflik social bisa dikatakan telah stua peradaban manusia itu sendiri. Setiap benturan antar kepentingan terjadi, disitulah muncul peluang konflik sosial. Banyak pakar ilmu social telah mengulas masalah konflik social ini berdasarkan sudut pandang yang beragam. Agus Maladi Irianto dan Mudjahirin Thohir dalam penelitiannya yang dibukukan dengan judul "*Membangun Rasa damai di Atas Bara*"¹⁰ mengklasifikasikan konflik sosial di Indonesia menjadi dua tipe, yaitu konflik *vertical* dan *horizontal*. Kedua tipe ini bisa berjalan sendiri-sendiri, namun terkadang juga bisa saling terkait. Konflik *vertical* dan *horizontal* dapat terjadi atas dua alasan. *Pertama*, ketidakmampuan Negara mengelola berbagai kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk. *Kedua*, keterlibatan Negara (pemerintah) bersikap berat sebelah dalam rangka memaknai konstalasi kepentingan mereka ketika berlawanan dengan kepentingan publik. Sebagai contoh yang diangkat dalam penelitian ini adalah di daerah Pekalongan dan Semarang. Meskipun sama-sama daerah pesisir, namun menunjukkan tipe konflik yang berbeda. Di Pekalongan terjadi konflik terbuka karena kebudayaan dominan (kebudayaan pesisir) tersosialisasi dalam kehidupan kewirausahaan

⁹ Dr. Nasikun, *Op.Cit.*, hlm. 67.

¹⁰ Agus Maladi Irianto & Mudjahirin Thohir, *Membangun Rasa Damai di Atas Bara* (Semarang: Limpad, 2000). Buku ini merupakan sajian hasil penelitian tentang kekerasan-kekerasan menjelang dan pasca PEMILU di Indonesia, khususnya di Jawa.

dan militansi keislaman yang egalitarian. Ketika pranata yang berdasarkan pada watak kewirausahaan dan keislaman diusik, maka dengan mudah mengemulsi dan mengukuhkan emosionalitas massa untuk melawan. Perlawanan ini dikeams dalam idiom “jihad”, yang merupakan aba-aba untuk melawan penguasa yang lalim (yang dalam kasus ini dialamatkan kepada partai tertentu yang menjadi penguasa).

Para pemikir lain yang menyumbangkan pandangannya tentang upaya penanganan konflik atau kekerasan, dalam buku “*Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*”¹¹ melihat penyelesaian kekerasan sebagai buah konflik dalam dua aspek sekaligus. *Pertama*, penghentian kekerasan harus dilihat secara serentak dalam struktur masyarakat, seperti adanya ketidakadilan dan penyimpangan kekuasaan. Semakin tidak adil struktur masyarakat dan semakin kuat tingkat represi kekuasaan akan makin tinggi pula skala dan frekuensi kekerasan dan konflik. Maka penanganan dan penyelesaian konflik haruslah bersifat simultan dengan peningkatan rasa keadilan dalam masyarakat dan tingkat kesejahteraan mereka. Pemicu kekerasan dan konflik dapat berangkat dari berbagai aspek seperti; ekonomi, politik, tanah, pemilu, perbedaan paham dan sebagainya. Aspek *kedua* adalah menyangkut cara atau metode penanganan kekerasan. Apakah penyelesaian kekerasan boleh dilakukan dengan kekerasan pula? Secara tegas tentu jawabannya adalah “tidak”. Setiap tindak kekerasan sudah pasti tidak akan melahirkan kedamaian, namun justru akan memperluas dan memperbesar skala konflik. Penyelesaian konflik atau kekerasan mensyaratkan daya inspirasi dan kreatifitas yang sangat tinggi dari masyarakat bersangkutan. Karenanya usaha penyelesaian konflik seringkali mengambil bentuk jangka panjang dan bertahap.

Alwi Shihab dengan menggunakan kacamata agama dalam bukunya “*Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*”¹² menyatakan bahwa agama Islam menghargai perbedaan-perbedaan dari setiap agama.. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar dan keenam dalam luas wilayah, merupakan rumah bagi populasi muslim terbesar di dunia. Dengan

¹¹ Ahmad Suaedi (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren* (Jakarta: Grasindo, 2000).

¹² Alwi Shihab, Dr., *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999).

perbedaan suku dan keyakinan beragamanya, Indonesia disifati oleh tradisi pluralisme yang luar biasa. Dengan adanya karakter mozaik latar belakang budaya Indonesia, rakyat Indonesia telah hidup dalam tatanan kerukunan dan keharmonisan yang baik. Tentu saja muncul konflik, tetapi segera dapat diselesaikan dalam semangat hubungan persaudaraan.

Melihat kenyataan bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentunya baik nilai-nilai universalitas dan pandangan pluralistis Islam telah menyumbang banyak untuk membangun falsafah hidup umat Islam *vis a vis* agama-agama lainnya. Kesantunan budaya muslim Indonesia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari ajaran Al Qur'an yang memerintahkan setiap orang beriman untuk menghargai satu sama lain atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Q.S. Ali Imran, 3: 64). Toleransi dan pemahaman Muslim di Indonesia tentunya juga diilhami oleh ayat “ *Untukmu Agamamu dan untukku agamaku*” (Q.S. Al Kafirun, 109: 6). Al Qur'an juga menyebutkan bahwa di dalam masyarakat yang pluralistik, semua agama dapat hidup damai secara berdampingan, dengan sikap saling menerima dan kreatif melebihi toleransi semata. Yang tak kalah menariknya adalah, bahwa sikap eksklusivisme agama tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan Islam.¹³

Pandangan Al Qur'an menyangkut dialog sebagai cara yang diperlukan untuk berhubungan dengan dunia secara keseluruhan, juga bertanggungjawab atas penghormatan dan toleransi Muslim Indonesia terhadap agama maupun kelompok lain sungguh patut dikembangkan.

Konsep tentang konflik berikut strategi penyelesaian konflik yang dikemukakan para pakar secara teoritik tersebut sebetulnya sudah nampak jelas arahnya. Namun dalam kenyataan, konflik demi konflik yang terjadi akhir-akhir ini di dalam masyarakat kita seolah menunjukkan adanya anomali-anomali akan jatidirinya. Banyak pertanyaan yang seolah tak terjawab dengan kerangka berpikir yang dikemukakan para ahli. Konflik semakin beragam dan menunjukkan karakteristik yang semakin garang.

¹³ Lihat Q.S. Al Maidah, 5: 48, Al Baqarah, 2: 148.

Permasalahannya adalah, apakah benar, bahwa perbedaan agama merupakan factor pemicu perpecahan dan kekerasan yang potensial, ataukah ada factor-faktor lain yang diatasnamakan agama? Karena, perlu dilakukan klarifikasi untuk menemukan factor mana yang paling dominan. Pada bagian selanjutnya dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa pandangan agama (Islam) tentang kerukunan hidup (*ukhuwwah*), masalah keragaman dan perbedaan pendapat (*ihtilaf*), agama dan ketegangan politik dan munculnya fenomena kekerasan di era Reformasi.

D. AGAMA, POLITIK DAN KONFLIK SOSIAL

Dalam sejarah agama-agama, kekuatan agama di satu sisi dan kekuatan agama di sisi lain seringkali terjadi ketegangan dan saling berhadapan. Misi agama Ibrahim menghancurkan bangunan politik Raja Namrud yang establish. Dakwah Nabi Musa meneggelamkan Fir'aun (Ramses II) beserta pengikutnya ke dasar laut merah. Demikian juga kebangkitan Nabi Muhammad sebagai penutup nabi mengakhiri hegemoni politik kaum Quraisy. Bahkan pada akhirnya mampu menjadi negara "adikuasa" menggantikan dua super power di barat Imperium Romawi dan super power di Timur kerajaan Persia Raya.

Terjadinya kontradiksi antara dua kekuatan agama dan politik bisa jadi karena perbedaan misi dari keduanya. Agama membawa misi moral dan politik bertujuan mencari kekuasaan. Agama memperjuangkan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sedangkan politik boleh jadi mempolarisasi manusia berdasarkan kepentingan individu dan kelompok. Keduanya selalu berkompetisi menjadi yang terkuat, jika agama kuat maka politik menjadi kuda tunggangan dan sebaliknya.

Fenomena ketegangan antar agama dan politik ini telah menjadi kenyataan di Eropa pada abad pertengahan, ketika gereja dianggap menjadi penghalang proses modernisasi. Atas dasar ini cendekiawan barat umumnya

begitu yakin bahwa persoalan politik dan modernisasi harus dipisahkan dengan persoalan agama, yang kemudian populer dengan istilah sekularisasi.¹⁴

Memperjuangkan agama dan politik seringkali membutuhkan korban. Dan pengorbanan. Risalah Nuh memakan korban tenggelamnya ribuan manusia dan binatang. Demikian pula kenabian Luth mendatangkan hujan batu bagi umatnya yang membangkang. Korban yang diakibatkan karena agama (atau diatasnamakan agama) nampaknya telah menjadi latent.

Sejarah mencatat terjadinya Perang Salib yang berlangsung selama berabad-abad antar Islam-Kristen. Perang saudara Hindu-Muslim di India, Perang Arab-Israel di Timur, kehancuran pengikut David Koresh di Texas Amerika Serikat, perang Muslim-Kristen di Bosnia Herzegovina, dan belakangan pecah di Ambon (antar Islam-Kristen). Perang agama telah menghancurkan, peradaban yang sangat dahsyat.

Demikian juga untuk kepentingan politik, seperti perang saudara Sparta-Athena, pembantaian massal yang dilakukan oleh Nazi, dan akibat kolonialisme negara-negara Eropa terhadap negara-negara dunia ketiga. Kekejaman politik terjadi di Tian Nan Men yang menewaskan ribuan manusia, demikian pula ketegangan politik yang tak kunjung reda di Timur Tengah. Menurut pandangan Nicollo Machievelli, politik itu menghalalkan segala cara. Orang umum menyimpulkan bahwa politik itu indah tapi kotor, licik bagai belut, pisik tapi menarik, dapat dipegang tapi tidak dapat diduga. Dan masih banyak ungkapan lain yang bernada sumbang sebagai pembenaran kerajaan politik.

Sulit dibedakan apakah satu peperangan atau konflik sosial muncul karena faktor agama atau faktor politik. Sebab fenomena sosial sering bersifat kompleks dan multidimensional. Boleh jadi kepentingan ekonomi atau separatisme menunggangi agama. Misalnya, perang Iran-Iraq yang berlangsung selama 8 tahun, sebenarnya bukan perang Islam Sunni di Iraq dengan Islam Syi'i di Iran, melainkan kepentingan pihak ketiga yaitu Amerika. Demikian juga perang Arab-Israel, perang Vietnam dan sebagainya.

¹⁴ Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politic*, (Ithaca: Cornell University Press, 1976), hlm. 107

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa apabila kemauan politik (*political will*) bertentangan dengan ide moral agama, maka ketegangan/konflik sosial akan terjadi. Idealnya misi agama dan politik dalam suatu masyarakat bangsa harus bisa berjalan selaras, saling mengisi dan bukan saling menunggangi.

Kolonialisme di Indonesia, misalnya, mendapatkan perlawanan yang keras dari umat Islam, karena tidak saja menjajah secara fisik, material dan politis, tetapi juga menjajah ideologi Islam dan bahkan membawa Ideologi baru (Kristen) yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang berkembang. Mungkin tidak demikian kejadiannya jika Belanda adalah bangsa Muslim. Atau sebaliknya, seandainya kedatangan para da'i dahulu juga menjajah secara politis, mungkin tidak akan terjadi mayoritas sebagai muslim seperti sekarang ini, dan agama Hindu atau Budha yang justru akan menjadi identitas bangsa Indonesia melawan penjajah.

Keberhasilan Islamisasi di Indonesia, salah satu faktor pendukungnya adalah justru penjajah Belanda. Gencarnya perlawanan kaum Muslimin terhadap Belanda yang dicap sebagai "bangsa kafir" mendorong Belanda untuk mengubah strategi pendekatan untuk memperoleh simpati dan dukungan dari umat Islam. Tiga strategi yang diterapkan yang sekarang ini dirasakan pengaruhnya adalah; *pertama*, berusaha memisahkan urusan agama dengan politik, yang disebut dengan *sekularisasi*; *kedua*, berusaha memanfaatkan agama dan para tokohnya untuk mendukung dan sebagai justifikasi segala kebijakan yang ditempuh, *ketiga*, fungsi sebagai missionaris Kristen dilakukan secara samar dan persuasif.¹⁵

Menjelang dan pasca kemerdekaan, ketegangan antar agama dan politik tetap berlanjut meskipun dalam bentuk dan motif yang berbeda. Ketegangan ini bermula dari kenyataan bahwa umat Islam sebagai mayoritas tidak mendapatkan porsi kekuasaan yang seimbang dengan perjuangan dan pengorbanannya, baik rezim Orde Lama maupun Orde Baru. Kondisi berhadapan-hadapan antara kekuasaan dengan agama di Indonesia ini terus berlangsung hingga pada dekade awal 90-an, ketika golongan Islam mulai masuk dalam lingkaran kekuasaan.

¹⁵ Donald K. Emmerson, *Op.Cit.*, hlm. 129.

Tetapi hal ini juga bukan jaminan terwujudnya stabilitas dan integrasi nasional. Sebab pada era Reformasi dan Demokratisasi sedang dibangun, ancaman stabilitas dan disintegrasi justru semakin berat. Hal ini ditandai oleh maraknya berbagai demonstrasi massa yang tidak dewasa, sehingga memicu timbulnya berbagai kerusakan dan kekerasan massa.

Cita-cita reformasi untuk mewujudkan masyarakat madani dan berkeadilan dan demokratis, agaknya masih jauh dari harapan. Diterpa oleh krisis yang berkepanjangan dalam berbagai aspek, membuat banyak kalangan hampir-hampir kehilangan pedoman dan kehabisan kesabaran. Kemelut politik dan keamanan di tanah air pasca Orde Baru belum mampu di atasi secara baik. Hal ini terbukti dengan masih sering munculnya berbagai gejolak sosial di beberapa daerah, berupa unjuk rasa dan bahkan meningkat menjani kerusuhan dan kekerasan. Ini semua menunjukkan bahwa ruwet masalah yang harus dihadapi.

Aksi-aksi kekerasan massa yang bermotifkan agama dan SARA menjadi tema dan model. Agama-agama memeang mengajarkan kepada umatnya kerukunan dan kedamaian hidup. Tetapi dalam implementasinya, keberagaman muncul dalam bentuk fanatisme sempit, ditambah dengan upaya-upaya politisasi agama yang marak pada era Multi partai sekarang ini. Dalam prespektif integrasi nasional, di samping faktor fanatisme agama tersebut, maka ada beberapa faktor yang dapat memicu lahirnya konflik dan kekerasan yang harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut adalah:

Faktor *pertama*; adanya pertarungan amatir antar kekuatan untuk dapat masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat berbentuk Parpol, Ormas, dan LSM sertadapat bersifat perorangan, seperti para elite polotik, eliteorimordial yangdekat dengan kekuasaan, dan sebagainya. Pertarungan antar kekuatan inilah potensial terjadinya konflik massa.

Faktor *kedua*; media informasi yang bebas dan hampir-hampir *out of control* juga dapat medorong ke arah disintegrasi. Seringkali opini politik dibangun, didesain sedemikian rapi untuk sarana-sarana tertentu. Demikian juga pemberitaan yang kurang obyektif dan memihak akan turut mempengaruhi

pendapat umum. Termasuk dalam hal ini adalah pemberitaan *vulgar* dan tidak selektif, akan membangkitkan semangat “meniru”.

Faktor *ketiga*; adanya intervensi pihak asing baik langsung maupun terselubung. Secara langsung kita melihat betapa kuatnya pengaruh IMF dan desakan negara-negara maju terhadap Indonesia. Umumnya pihak asing mempunyai misi mengarahkan Indonesia menjadi negara yang tak berdaya dan selalu tergantung kepada pemberian-pemberian yang tidakimbang, NGO dan infiltrasi yang bertujuan melakukan proses pembusukan dari dalam. Saat ini juga banyak LSM yang berpikir sepihak untuk mencari keuntungan ekonomi. Gejala lain yang terus harus diwaspadai adalah, mengalirnya barang haram, psikotropika (NARKOBA) yang turut memperkeruh dan merusak moral bangsa.

Faktor *keempat*; keresahan masyarakat lapis bawah yang merasa ditinggalkan oleh para elite politik yang dulu memberi janji-janji manis, setelah Pemilu usai mereka kecewa. Para elite politik dan pemimpin massa, kini sibuk mengurus kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Rakyat kecil merasa hanya diperalat dan digerakkan untuk memenangkan salah satu parpol saja, tanpa ada perubahan nasib yang signifikan. Contoh riil dalam hal ini, keprihatinan para petani dengan harga gabah yang anjlok, harga gula dan hasil-hasil pertanian lain yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Keadaan seperti ini bisa menimbulkan ari klimak dan frustrasi yang mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Faktor *kelima*; adanya fenomena budaya yang kontradiktif sedang terjadi, antara budaya *feodalistik otoritarian* pengikut *status quo*, dengan budaya *demokratis* yang sedang berkembang. Sebagian masyarakat masih menggambarkan masa lalu lebih baik daripada masa kini, atau masa depan. Mereka tidak sabar dan tidak tahan melihat perubahan-perubahan yang sedang terjadi saat ini, bahkan cenderung menolak dan menyalahkan apa yang terjadi. Karena mereka menganggap semua perubahan ini justru akan menuju kepada keadaan yang tidak tentu. Sementara itu masyarakat yang pro-reformasi, dan mendambakan lahirnya tata kehidupan yang demikritis, tetap sabar dan menyadari akan resiko-resiko dari perubahan sosial yang terjadi, dan yakin

bahwa badai akan segera berlalu dan berganti dengan suasana yang penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Dalam masa transisi yang penuh dengan gejolak ini banyak petualang yang sedang berspekulasi untuk memancing di air keruh.

Faktor *keenam*; yakni proses pemiskinan dan tekanan ekonomi yang kian sulit pada masyarakat kelas bawah. Kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan menjadi pemicu terjadinya revolusi sosial. Banyaknya penggunaan dan menurunnya pendapat masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buruh dan lain-lain akan melahirkan jurang kesenjangan yang semakin dalam dan memunculkan kecemburuan sosial.

Inilah beberapa faktor yang sewaktu-waktu dapat memicu lahirnya konflik yang bersifat "ideologis" dan ada konflik-konflik dan kekerasan, yang sangat bersifat "politis". Tetapi kadang-kadang perbedaan keduanya sangat tipis. Pada tingkatan yang bersifat ideologis, konflik tersebut muncul dalam bentuk konflik antar sistem nilai yang dianut dan telah menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Dalam hal ini konflik aram termasuk dalam konflik yang bersifat ideologis. Sedangkan pada tingkatan yang bersifat ideologis. Sedang pada tingkatan yang bersifat politis, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya di dalam masyarakat.

E. AGAMA SEBAGAI AJARAN KEDAMAIAN

Agama dan kekerasan tentu merupakan dua hal yang paradok. Semua agama tentu mengajarkan kepada umatnya tentang kerukunan, kedamaian, keadilan, toleransi (*tasamuh*) dalam keberagaman, saling menghormati dan menghargai sesame. Ajaran agama memberikan arah untuk mewujudkan pribadi yang paripurna (*insan kamil*), berpikir/berprasangka yang positif. Agama dan akal sehat akan menghindari sejauh mungkin konflik dan perpecahan dalam umat, terlebih disertai dengan tindak kekerasan.

Ajaran Islam sangat menganjurkan semua pemeluknya untuk senantiasa hidup rukun, bersatu dan tidak terpecah belah, sebagaimana disebutkan dalam Al

Qur'an' "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai ...".¹⁶ Di dalam ayat lain dinyatakan pula bahwa manusia adalah umat yang satu (*Ummatan wahidah*), "Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan."¹⁷

Pernyataan Al-Qur'an bahwa manusia adalah umat yang satu dan tidak terpecah-pecah diulang-ulang dalam berbagai tempat dengan konteks yang berbeda.¹⁸ Al-Qur'an juga menyatakan bahwa manusia –apapun jenis kelamin dan status sosialnya- diciptakan dari jenis yang sama (*min nafs wahidah*).¹⁹ Atas dasar prinsip inilah, maka interaksi manusia dengan sesamanya harus didasari keyakinan, bahwa semua manusia adalah bersaudara, dan bahwa anggota masyarakat muslim juga saling bersaudara.

Kerukunan dan persaudaraan di dalam istilah Islam disebut dengan "*ukhuwwah*", yang berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Dalam kamus bahasa, *ukhuwwah* juga dibangun dari akar kata "*akhhk*" (dalam bentuk *mufrad*) ditemukan 52 kali, sebagaimana dipakai arti untuk saudara kandung, misalnya pada ayat-ayat tentang waris dan sebagian yang lain dipakai untuk arti saudara sebangsa walau tidak seagama, seperti pada Q.S. al-A'raf: 65. sedangkan dalam bentuk *jama'*-nya, adakalanya "*ikhwan*" sebanyak 7 kali digunakan untuk makna persaudaraan seketurunan.²⁰

Ukhuwwah dalam arti asalnya, yaitu persamaan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam beberapa ayat maupun hadits Nabi, maka *ukhuwwah* dapat diklasifikasikan dalam empat tingkatan, sebagai berikut:

1. *Ukhuwwah fi al-'Ubudiyah*, yaitu *ukhuwwah* yang dibangun atas dasar persamaan se-mahluk. Manusia, binatang, tumbuhan dan alam semesta adalah sama-sama sebagai ciptaan Allah, yang oleh karenanya harus dapat

¹⁶ Lihat Q.S. Ali Imran, 3: 103.

¹⁷ Q.S. al-Baqarah: 213

¹⁸ Lihat misalnya; Q.S. Yunus: 19, al-Anbiya:92

¹⁹ Q.S. al-Nisa: 1.

²⁰ Dr. H.M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet IX, 1995), hlm.357

hidup berdampingan. Persaudaraan se-mahluk ini misalnya ditunjukkan dalam firman Allah:

“ Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat seperti kamu juga.” (Q.S. al-An’am:38)

Persamaan lain adalah, sebagai mahluk ciptaan Allah yang sama-sama tunduk dan sujud kepada Allah. Dalam Al-Qur’an disebutkan:

“ Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang melata, dan sebagian besar manusia.” (Q.S. al-Hajj: 18)

Dari konsep *ukhuwwah* semahluk ini, manusia dituntut berbuat baik dan ramah kepada alam lingkungannya. Dalam ajaran Islam, seorang muslim tidak boleh menyiksa binatang; menyembelih harus dengan pisau yang tajam,²¹

2. *Ukhuwwah fi al-Insaniyyah/Basyariyyah*, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan kemanusiaan. Manusia berasal dari keturunan yang sama, mempunyai bentuk fisik yang sama, diberikan potensi dasar yang sama, akal dan perasaan. Dari persamaan-persamaan inilah, sesama manusia harus hidup bersaudara dan saling membantu dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Dan persaudaraan *basyariyyah* tidak membedakan batas-batas agama, warna kulit, budaya, partai politik, status sosial dan sebagainya. Jadi *ukhuwwah* jenis ini dibangun atas prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal (lihat Q.S. al-Hujarat: 13).
3. *Ukhuwwah fi al-Wathaniyyah wa al-Nasb*, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan-persamaan sebangsa (tanah air) dan seketurunan (suku). *Ukhuwwah Wathaniyyah* termanifestasikan dalam

²¹ Larangan menyiksa binatang ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi Saw, lihat misalnya; *al-Muntaqa*, hlm. 515-516, Baihaqi; dalam *Sunan al-Kubra*, Juz 9, hlm. 280; *Lu’ul wa al-Marjah*, hadist ke 1279; *Musnad Ahmad*, Juz 4, hlm 180-181.

bentuk-bentuk; cinta tanah air, rasa memiliki dan mempertahankannya, yang sering disebut dengan istilah *nasionalisme*. Nasionalisme ini juga dibenarkan oleh Islam. Sabda Nabi "*hubb al-wathan min al-iman*" (Cinta tanah air adalah sebagian dari iman).

Sedangkan persaudaraan seketurunan akan melahirkan "*nepotisme*", yaitu perasaan ingin mendahulukan kerabat dari orang lain yang bukan kerabat. Nepotisme seperti ini sebenarnya tidak salah. Ajaran Islam justru selalu menekankan agar mendahulukan keluarga dekat, baru kemudian orang lain, baik dalam mendermakan harta maupun dalam mendakwahkan agama.²² Nepotisme yang dilarang adalah bentuk-bentuk mendahulukan dan memproteksi keluarga dengan cara yang tidak adil, pilih kasih, dan merampas hak-hak orang lain yang bahkan keluarga. *Ukhuwwah* jenis ini cakupannya lebih sempit, namun ikatan atau fanatismenya lebih kuat.

4. *Ukhuwwah fi al-Din al-Islam (Islamiyyah)*, yaitu persaudaraan yang dibangun atas persamaan seagama Islam. Ungkapan "Sesama muslim adalah saudara" adalah prinsip Islam yang sangat jelas diterangkan dalam Al-Qur'an,²³ maupun dalam hadist Nabi. Di antaranya Nabi Saw bersabda:

"Janganlah kamu saling dengki dan saling bermusuhan, dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Janganlah kamu saling mengkhianati, saling membohongi, dan jangan pula meninggalkan (saudara sesama muslim) tanpa pertolongan."

Dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Nabi Saw juga bersabda:

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kecintaan mereka, belas kasihan mereka, dan kelembutan mereka adalah bagaikan satu badan. Apabila salah satu dari anggota badan itu menderita, maka menjalarlah penderitaan itu ke seluruh badan, sehingga tidak bisa tidur dan terasa panas."

Berbagai jenis dan tingkatan *Ukhuwwah* ini dalam pelaksanaannya harus saling menguatkan. Tidak boleh mengatasnamakan *Ukhuwwah Islamiyyah*, jika

²² Lihat; Q.S. al-Baqarah: 177; al-Tahrim: 6, dan sebagainya.

²³ Lihat; Q.S. al-Hujurat: 10, at-Taubah: 71, dan sebagainya.

misalnya dalam pelaksanaannya mengganggu *Ukhuwwah Wathaniyyah* tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam dan kemanusiaan, dan sejenisnya. Islam menganjurkan untuk mencari titik singgung dan titik temu, tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan terhadap orang-orang non-muslim.²⁴ Dengan demikian perbedaan-perbedaan agama, budaya, dan status-status sosial lainnya, tidak menghalangi manusia untuk dapat hidup secara rukun dan saling mendukung.

Dalam ajaran Islam, meskipun tidak diturunkan aturan-aturan rinci dalam *mu'amalah* namun diberikan petunjuk yang jelas tentang etika-etika yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya harus ditegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran (adalah; *amanah*), dan segala urusan dalam tingkat apapun harus diusahakan dengan jalan musyawarah.

Menghadapi perbedaan golongan dan perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat *internal* (interen umat beragama) maupun *eksternal* (antar umat beragama) agar tidak berimplikasi negative, maka perlu ditegakkan beberapa prinsip dan etika sebagai berikut:

1. Perbedaan adalah *sunnat Allah*. Perbedaan pendapat dalam segala aspek kehidupan manusia merupakan fenomena yang telah lahir dan akan berkelanjutan sepanjang sejarah kemanusiaan. Dunia ini ada karena dibangun oleh pertautan berbagai unsur yang berbeda. Manusia diciptakan dalam dua jenis; laki-laki dan perempuan, dengan sifat baik dan buruk, ada yang kaya dan miskin, beriman dan kafir, surga dan neraka, dan sebagainya.

Allah Swt berfirman:

“ Untuk tiap-tiap umat diantara kamu (umat Muhammad dan sebelumnya), kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Maidah: 48)

²⁴ Lihat Q.S. Ali 'Imran: 64; Saba': 24-25.

Hikmah diciptakannya perbedaan ini, agar hidup menjadi dinamis dan berkembang, masing-masing mempunyai identitas, agar bisa saling mengukur dan berkompetisi secara sehat.

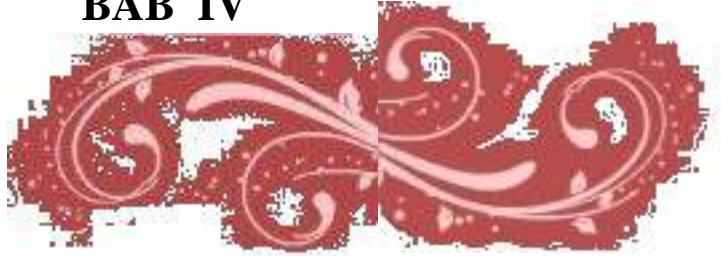
2. Dalam Islam, perbedaan pendapat dan lahirnya golongan-golongan sudah mulai muncul pada masa *Khulafah ar-Rasyidin* dan terus berkembang pada periode-periode berikutnya. Dalam bidang teologi, misalnya, lahir kelompok *Syi'ah, Khawarij, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Zhahiri*, dan sebagainya. Perbedaan ini tidak bisa dielakkan, karena Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber ajaran Islam yang utama bersifat *Interpretable*, dan potensial dipahami secara berbeda.
3. Menghilangkan perbedaan adalah hal yang mustahil, karena bertentangan dengan *sunnat Allah*. Yang penting adalah, menegakkan etika berbeda pendapat, yang meskipun berbeda-beda pandangan dan golongan, tetapi dapat hidup rukun dan aman. Ada beberapa etika yang harus dipegangi demi terwujudnya integritas sosial. *Pertama*, tidak boleh merasa benar sendiri, karena kebenaran mutlak adalah milik Allah dan kebenaran penemuan manusia bersifat relatif. *Kedua*, Perlu ditegakkan sikap-sikap toleransi (*tasamuh*), sikap "*tepo-seliro*" saling menghormati, tidak mengejek dan menghina pihak lain yang berbeda (Q.S. al-Hujurat: 11). *Ketiga*, perlu dikembangkan sikap berbaik sangka (*husnul al-dzan*), bersikap positif, yaitu menilai pihak lain yang berbeda secara proporsional dari sisi kekurangan dan kelebihan, *Keempat*, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dengan kekuasaan. Dakwah harus dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Inilah beberapa prinsip etika bermasyarakat menurut ajaran Islam, yang untuk saat sekarang ini semakin relevan untuk dikembangkan dalam kehidupan masyarakat plural seperti Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Maladi Irianto & Mudjahirin Thohir, ***Membangun Rasa Damai di Atas Bara*** (Semarang: Limpad, 2000).
- Ahmad Suaedi (ed.), ***Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*** (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Alwi Shihab, Dr., ***Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*** (Bandung: Mizan, 1999).
- Donald K. Emmerson, ***Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politic***, (Ithaca: Cornell University Press, 1976).
- M. Quraish Shihab, ***Membumikan al-Qur'an***, (Bandung: Mizan, cet IX, 1995).
- Muhammad Husain Haikal, ***Sejarah Hidup Muhammad***, (Jakarta: Letera Antarnusa, 1990).
- Nasikun, Dr., ***Sistem Sosial Indonesia***, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1993).
- Nurcholis Majid, ***Islam, Doktrin dan Peradaban***, (Jakarta: Paramadina, 1992).
- R.H.A. Soenarjo, S.H., ***Al Qur'an dan Terjemahnya***, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1994)
- Sudirman Tabba, Islam Orde Baru: ***Perubahan Politik dan Keagamaan***, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993).

BAB IV



PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDEKATAN PSIKOLOGIS

PSIKOTERAPI DAN “THE AGONY OF MODERNIZATION”

Di era modern yang penuh diwarnai dengan iklim “kompetisi” ini, manusia seringkali terperangkap ke dalam sebuah situasi dimana mereka terlalu mengedepankan atau berpacu dalam sikap-sikap “Bagaimana untuk memiliki sesuatu” (*to have*) dan lebih sering mengabaikan “Bagaimana menjadi sesuatu” (*to be*). Pola seperti inilah yang kemudian melemparkan manusia modern ke dalam keterasingan akan “kemanusiaan-nya”, kehilangan ciri-ciri humanisnya.

PENDAHULUAN

Ivan Illich menggambarkan potret kehidupan dunia modern, bahwa telah lahir manusia-manusia yang memiliki sifat rakus, dipenuhi iri hati, dan memiliki niat jahat dan mudak kehilangan kontrol. Sifat-sifat yang demikian itu akan dengan mudah menyulut motif untuk saling menjatuhkan atau menghancurkan. Motif untuk saling menjatuhkan, bahkan menghancurkan, ini bisa lahir karena keirian satu sama lain, kesalah-pahaman, atau karena ancaman.. Siapa yang mengancam atau atas ukuran-ukuran apa masing-masing pihak merasa dirinya terancam atau perlu mengancam, berbagai alasan mudah bisa saja diajukan. Dan alasan-alasan yang diajukan biasanya tendensius dan bersifat sepihak.¹ Kegelisahan, kecemasan yang berujung pada perilaku destruktif yang dilakukan oleh seorang individu pada zaman modern ini seringkali dipicu oleh hal-hal yang sepele. Bagaimana seseorang tega membunuh kawan akrabnya hanya karena dikatakan “pengecut”, atau kernet Angkot yang membunuh sopirnya karena permintaan kenaikan upah sebesar Rp. 500,- tidak dipenuhi. Di sisi kehidupan lain bisa disaksikan, banyaknya penyimpangan perilaku seksual; dimana sang ayah menggauli putri kandungnya sendiri, penyalahgunaan Narkoba dan sebagainya.

Fenomena tersebut dimungkinkan muncul karena akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mengubah secara drastis pola hidup dan perilaku manusia modern. Di era modern yang penuh diwarnai dengan iklim “kompetisi” ini, manusia seringkali terperangkap ke dalam sebuah situasi dimana

¹ Agus Maladi Irianto, Mudjahirin Thohir, *Kemajemukan dan Resolusi Konflik, Membangun Rasa Damai di Atas Bara*, (Semarang: Limpad, 2000), hlm. 14.

mereka terlalu mengedepankan atau berpacu dalam sikap-sikap “Bagaimana untuk memiliki sesuatu” (*to have*) dan lebih sering mengabaikan “Bagaimana menjadi sesuatu” (*to be*). Pola seperti inilah yang kemudian melemparkan manusia modern ke dalam keterasingan akan “kemanusiaan-nya”, kehilangan ciri-ciri humanisnya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakekatnya dimaksudkan untuk memudahkan dan menyejahterakan manusia. Namun demikian tidak bisa dihindarkan munculnya eksese-eksese negatif dari kemajuan tersebut. Irama dan pola kehidupan sebagaimana tergambar pada paragraph di atas, pada gilirannya melahirkan problem-problem, bahkan penyakit-penyakit, psikis yang akut. Penyakit-penyakit kejiwaan tersebut selanjutnya terejawantahkan ke dalam bentuk-bentuk perilaku menyimpang maupun tindak-tindak kriminal, seperti; depresi mental, stress, hingga bunuh diri, penganiayaan, perampokan, pelanggaran atas hak orang lain, prostitusi serta pembunuhan, lunturnya nilai-nilai social dan “keterasingan manusia”. Jika diamati, maka akan dapat ditemukan bahwa perilaku menyimpang serta tindak-tindak kriminal yang marak terjadi belakangan ini mengalami peningkatan pesat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Beberapa problematika sebagai efek samping dari proses modernisasi tersebut biasa diistilahkan dengan “*the agony of modernization*” (azab yang ditimbulkan dari proses modernisasi).

Problem-problem tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kegelisahan, kecemasan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan, yang berakibat pada rentannya kondisi kejiwaan manusia. Ketika mendapatkan tekanan tersebut secara alamiah dia akan melakukan perlawanan atau kontrol. Namun ketika tekanan demi tekanan sudah terakumulasi sedemikian besar, maka beberapa di antaranya dapat mengatasinya dengan baik dan menempuh jalan yang baik pula, namun beberapa lainnya gagal karena menempuh jalan yang kurang atau tidak baik. Kenyataan seperti itulah yang kemudian menarik para ahli yang bergerak di lapangan kejiwaan (psikologi) untuk merancang dan menawarkan berbagai konsep atau langkah preventif maupun kuratif terhadap persoalan tersebut.

THE AGONY OF MODERNIZATION

Akselerasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping membawa manfaat, di sisi lain mengharuskan manusia harus “membayar mahal” atas dampak negatif yang ditimbulkannya. Disadari atau tidak, secara berangsur-angsur telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai, sebagai akibat kontak yang sedemikian intens antara manusia dengan ilmu dan teknologi, berikut produknya. Pergeseran demi pergeseran tersebut lambat-laun memperoleh “pembenaran” dari komunitas manusia modern. Beberapa pergeseran nilai yang merupakan *side effect* dari proses modernisasi tersebut antara lain :

Kompetisi

Teknologi sebagai bagian dari peradaban manusia, saat ini terus berkembang pesat. Produk-produk baru yang dapat dihasilkan pada saat/hari ini bisa dinilai “ketinggalan zaman” pada keesokan harinya. Hal ini dimungkinkan karena adanya hubungan yang *komplementer* antara penyerapan dan penguasaan teknologi dengan pesatnya arus informasi.

Pada era saat ini keunggulan komparatif dan kompetitif menjadi prasyarat utama untuk memenuhi tuntutan prestasi atau mutu suatu produk. Kecepatan dan akurasi menjadi standard utama dalam banyak sisi kehidupan. Prasyarat semacam ini telah dengan cepat mempengaruhi dan merubah perilaku masyarakatnya. Persaingan ketat terjadi di semua sektor. Bahkan persaingan ketat ini acapkali menjurus ke arah yang sudah tidak sehat. Dapat dilihat dalam banyak kasus di masyarakat, dimana para orangtua sejak dini telah mengkondisikan anak-anak mereka ke dalam iklim persaingan yang “sengit”. Banyak di antara mereka menuntut (untuk tidak mengatakan memaksa) anak-anak mereka masuk ke sekolah-sekolah favorit, tanpa mempedulikan kemampuan dan kemauan mereka. Bahkan tidak jarang para orangtua rela mengeluarkan “uang ekstra” untuk maksud tersebut.

Adalah menarik membaca laporan majalah TIME awal Januari 1999, yang menyatakan bahwa sekitar 50.000 anak-anak di Jepang mengidap semacam penyakit kejiwaan (*syndrome*) yang disebut oleh kalangan ahli sebagai “fobi

sekolah". Sindrom ini adalah semacam gejala dan tingkah laku yang mencerminkan rasa takut terhadap sekolah. Anak-anak yang seharusnya sekolah tidak mau hadir ke sekolah, bahkan lebih parah lagi, mereka mengasingkan diri dari lingkungan pergaulan di sekolah. Terkadang mereka mengunci diri di kamar mandi atau di ruang gelap karena takut pada situasi kelas dan sekolah. Menurut para psikolog dan ahli pendidikan di Jepang, penyakit itu timbul karena belenggu sistem sekolah yang amat ketat di negara itu.² Jika sudah sedemikian kondisinya, maka inilah harga yang harus dibayar oleh para orangtua maupun lembaga pendidikan pada umumnya akibat "pemeriksaan" mereka terhadap anak. Karena di balik semua itu, sebenarnya hanyalah untuk memenuhi ambisi dan *prestige* semata.

Kondisi tersebut masih diperparah oleh munculnya *filosofi katak* (sikuk atas, tendang bawah) dalam upaya memenuhi ambisi dan gengsi tersebut. Dari gambaran semacam itu, maka tidak heran jika produk persaingan ketat dan tidak sehat ini pada gilirannya akan menghasilkan manusia-manusia dengan filosofi katak pula dalam menjalani kehidupannya. Adalah dipandang sebagai sesuatu yang menggelikan dan janggal, ketika seseorang berusaha mengalahkan ambisi pribadinya pada kesempatan tertentu demi kebahagiaan orang lain dalam rangka membangun kebersamaan.

Konformitas

Ciri lain dari manusia modern adalah sikap atau semangat "*Konformitas*" (*Conformity* berarti "persesuaian, kecocokan")³ yang membabi buta. Sedangkan dalam istilah psikologi *Konformitas* berarti "anak masuk ke dalam golongan yang serupa dengan golongan orangtuanya, bukan hanya anak harus merupakan duplikat dari orangtuanya semata".⁴

² Azyumardi Azra, Prof. Dr., MA., *Esei-Esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, Jakarta: Logoss, 1999), hlm. 164.

³ Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet XVII, 1989), hlm. 138.

⁴ Arifin, M.Ed., Drs. H.M., *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniyah Manusia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 127.

Dalam konteks ini, konformitas membabi buta yang terjadi di dalam masyarakat telah menjadi semacam *endemi* (wabah) yang cukup akut. Sehingga berkembang luas duplikasi dalam semua tingkatan stratifikasi sosial masyarakat. Seseorang akan merasa gelisah dan cemas ketika dia tidak *konform* dengan “sistem besar” yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai misal; orang akan merasa gelisah, *kemrungsung* dan merasa hidupnya belum lengkap ketika ia tidak/belum bisa memiliki barang-barang konsumtif yang mereka sebut sebagai “standard hidup modern”. Seorang pejabat atau pengusaha akan merasa kikuk dan malu jika tidak punya mobil mewah, atau siswa yang stress berat ketika salah satu nilai rapornya “merah” jauh di bawah nilai rata-rata kelas, meskipun ia unggul di bidang lainnya.

Munculnya kecenderungan yang besar untuk “ikut arus” yang dalam istilah Jawa dinyatakan “*hamenangi jaman edan, ora ngedan ora keduman*” membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Manakala seseorang tidak mengikuti *track* tersebut maka ia akan merasa belum menemukan kehidupan. Mustafa Fahmi menyatakan bahwa “cemas adalah inti dari semua kesukaran jiwa yang diderita oleh manusia, yang mendorongnya kepada situasi yang menyulitkan, sehingga menjadikannya bertingkah laku dengan cara yang mengejutkandiri sendiri dan orang lain”.⁵ Lebih dari itu Allah juga telah menggariskan bahwa manusia itu memiliki watak yang suka berkeluh kesah jika ditimpa kesusahan atau kecemasan.⁶

Berbagai kecemasan tersebut lebih dapat dirasakan peningkatannya secara cukup signifikan pada masa krisis multi-dimensional saat ini. Di saat kebutuhan hidup semakin sulit diraih secara ekonomi, di sisi lain peluang dan kesempatan kerja semakin susah diperoleh.

Kemudahan

“Cepat dan Tepat” merupakan dua dari sekian banyak simbolisasi kata produk-produk teknologi. Secara tidak langsung, karakter ini telah merasuk dan mempengaruhi perilaku manusia-manusia modern. Karakter “mesin” (cepat dan

⁵ Mustafa Fahmi, Prof. Dr., *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, alih bahasa Dr. Zakiyah Daradjat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 40.

⁶ Lihat al-Qur'an Surat 70: 19-22)

tepat) ini telah ikut memberikan kontribusi terhadap pergeseran nilai, serta sisi-sisi *humanis* manusia dewasa ini. Temuan-temuan baru dalam bidang sarana komunikasi, misalnya, disamping membawa manfaat positif, di sisi lain telah mereduksi makna hubungan antar manusia. Daripada bersusah-payah dengan menempuh resiko besar “hanya” untuk *Sungkem* pada orangtua dan kerabatsaat hari raya, akan lebih praktis, cepat dan aman dengan bicara di ujung telepon, telegram, E-mail atau sejenisnya.

Dampak lainnya adalah semakin tipisnya kesabaran manusia modern. Banyak permasalahan yang semestinya akan lebih elegan jika diselesaikan dengan “akal”, namun seringkali harus berakhir dengan adu “okol”. Perilaku semacam ini akan lebih kentara bila bersinggungan dengan urusan “perut”.

Kontrol

Era digital telah membawa konsekuensi logis terciptanya kontrol yang baik terhadap berbagai sistem. Namun jika dicermati secara mendalam, hal ini telah menjadikan manusia terjebak ke dalam ketergantungan terhadap hal tersebut. Pendewaan teknologi dan kemampuan menguasainya, menjadikan manusia lebih memilih “*hukum keteraturan*”, Birokrasi, Kepraktisan, Pengulangan dan Sistematika dibandingkan dengan Spontanitas, Kreatifitas, Orisinalitas dan Kegembiraan. Ketergantungan mereka yang besar terhadap keteraturan dan sistematika menjadikan mereka selalu berusaha “mengontrol” seluruh sisi kehidupannya. Manusia menjadi khawatir dan takut terhadap situasi spontanitas, karena spontanitas kemungkinan sulit untuk dikontrol.⁷

Dalam situasi seperti itu, kreatifitas menjadi sesuatu yang langka. De Porter memaknai orang kreatif adalah mereka yang mampu menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan membuat lompatan yang memungkinkan mereka memandang

⁷ Frieda NRH, Dra., M.Si., *Keterasingan Manusia Modern*, Makalah Seminar “Menggagas Prodi Tasawuf dan Psikoterapi”, Semarang, 24 Pebruairui 2001.

segala sesuatu dengan cara yang berbeda.⁸ Langkanya kreatifitas inilah yang menjadikan manusia modern menjauh dan merasa “risih” dari gagasan-gagasan brilliant serta pemikiran-pemikiran kreayif-inovatif. Dengan kata lain, pola semacam ini semakin menyempitkan jalan bagi tersemainya pola-pola berpikir *divergent*, spontan dan orisinil.

Kepatuhan pada Sistem

Ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah berdiri sendiri, melainkan berada di dalam suatu bingkai sosial. Proses industrialisasi yang disandarkan pada keunggungan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada dasarnya merupakan akibat dari “kebijakan ekonomi” yang didorong oleh “motif ekonomi”. Berangkat dari hal inilah manusia modern dihadapkan pada berbagai persoalan pelik, sehingga penciptaan dan kepatuhan pada sistem menjadi suatu keniscayaan.

Sebenarnya tujuan awal ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan manusia. Kehadirannya diharapkan dapat merangsang dan memacu nalar manusia. Akan tetapi, dalam sebuah tatanan industrialisasi yang bermotifkan ekonomi, manusia terjebak dalam suatu “sistem besar” yang sangat kompleks dan menjadikannya kurang berdaya. Manusia semakin kehilangan kepekaan manusiawinya karena hampir setiap saat dia *hanya, harus* atau *biasa* berhubungan dengan “tuan mesin”, atau dalam konteks ini teknologi telah berubah menjadi “musuh” atau bahkan “tuan” bagi manusia.⁹

Di era digital dewasa ini posisi manusia diwakili, atau bahkan digantikan, oleh “sederet angka”. Demi memenuhi asas kepraktisan dan keteraturan sistem, maka “sederet angka” inilah yang lebih penting dari sosok manusianya itu sendiri. Untuk mencairkan uang di bank atau ATM, maka siapa si A atau B tidak akan punya arti ketika tidak bisa menyebut atau menekan nomor PIN (*Personal Identification Number*), meskipun pegawai bank tersebut mengenalnya. Bagaimana seseorang diperlakukan secara kurang manusiawi ketika terjaring operasi yustisi/KTP, atau

⁸ De Porter, Bobby, Mike Hernacki, *Quantum Learning; Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, (Bandung: Kaifa, 1999) hlm. 295.

bagaimana kondisi psikis pekerja pabrik yang selama bertahun-tahun berhadapan dengan “tuan mesin”.

Dapat digambarkan bahwa “sistem besar” yang diciptakan ini telah mereduksi secara signifikan sisi-sisi humanis manusia-manusia modern. Hubungan antar manusia lebih bersifat mekanis. Bagaimanapun manusia tidak mampu mencegah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia diharapkan justru menunjukkan seberapa tinggi tingkat peradaban mereka. Namun demikian haruslah diwaspadai bahwa perkembangan yang diharapkan bisa mempertinggi harkat kemanusiaan tersebut, bukan mustahil akan berbalik pada “penghancuran” sisi-sisi kemanusiaannya.

Pergeseran nilai-nilai kehidupan yang disebabkan oleh terjadinya transformasi nilai-nilai modern ke dalam sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, menyebabkan terdesaknya nilai-nilai lama (tradisional) seperti; adat istiadat, tata krama, kepedulian, kolektivitas atau bahkan nilai agama, menuju pada nilai-nilai yang memiliki kecenderungan materialistik dan berorientasi kekinian secara membabi buta.

PSIKOTERAPI: SEBUAH DISIPLIN

Sebagai suatu disiplin ilmu yang merupakan hasil spekulasi pikiran dan keterbatasan pengamatan manusia, Psikologi tentulah mempunyai sejumlah kelemahan. Kelemahan itu antara lain dapat dilihat, bagaimana kemampuan psikologi yang ssedemikian terbatas dalam menerangkan siapa sesungguhnya manusia dan bagaimana seharusnya manusia menata dirinya sehingga mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupannya. Seringkali kita melihat , bahwa psikologi dengan mudahnya mereduksi kenyataan-kenyataan tentang siapa sesungguhnya manusia. Hal ini bisa dilihat; bagaimana B.F. Skinner bisa menyimpulkan bahwa perilaku manusia sangat ditentukan oleh hukum Stimulus-Respons (S-R) dan bagaimana Sigmund Freud bisa sampai pada pandangan bahwa manusia (hidupnya) hanya didorong oleh kebutuhan libidonya.¹⁰ Kaum Behavioris

⁹ Frieda, *Loc. Cit.*

lebih asyik menyelidiki rata-rata orang pada umumnya, dengan menggunakan metode statistik. Mereka lebih suka mempelajari “*apa yang ada*” daripada “*apa yang mungkin ataupun yang harus ada*”. Mereka juga lebih banyak mendasarkan penelitian mereka pada studi tentang binatang-binatang.¹¹

Sementara itu, dipihak lain kaum Behavioris lebih asyik menyelidiki rata-rata orang pada umumnya, dengan menggunakan metode statistik. Mereka lebih suka mempelajari “*apa yang ada*” daripada “*apa yang mungkin ataupun yang harus ada*”. Mereka juga lebih banyak mendasarkan penelitian mereka pada studi tentang binatang-binatang.¹²

Banyak Psikolog yang memfokuskan kemampuan mereka untuk membahas tentang berbagai dimensi psikis manusia. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an muncul gerakan psikologi sosial yang bergerak ke arah paradigma baru. Gerakan ini merupakan gejala ketidakpuasan terhadap konsepsi manusia menurut Behaviorisme. Gerakan baru ini tidak memandang manusia sebagai mahluk yang bereaksi pasif terhadap lingkungannya, melainkan sebagai mahluk yang “selalu berpikir” (*Homo Sapiens*). Paham Kognitivisme ini tumbuh dari pandangan filsafat Rasionalisme, yang mempertanyakan apakah betul bahwa penginderaan kita melalui pengalaman langsung, sanggup memberikan kebenaran. Kemampuan alat indera dinilai seringkali gagal menyajikan informasi yang akurat.¹³

Aliran Kognitif ini pada masa berikutnya disempurnakan oleh beberapa tokoh seperti Frankle dan Carl Rogers, yang mulai mengarah kepada corak Psikologi Humanisme. Ciri-ciri Kognitif masih nampak pada aliran ini adalah (a) mementingkan manusia sebagai pribadi; (b) mementingkan kebulatan pribadi; (c) mementingkan peranan kognitif dan afektif; d) mementingkan persepsi subjektif

¹⁰ Dr, Djamaluddin Ancok, Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi atas Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 63.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 36.

¹² *Ibid.*, hlm. 36.

¹³ Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, *Psikologi Belajar* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1989), h.100.

yang dimiliki tiap individu; (e) mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri; dan (f) Mengutamakan “*insight*”.¹⁴

Dalam tubuh aliran ini, terdapat dua aliran yang sangat intens membahas bagaimana individu memaksimalkan fungsi otak (kognisi), yakni Gestalt dan Medan. Suatu konsep yang penting dalam teori Gestalt ialah tentang “*insight*”. Insight ialah pengamatan/pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antar bagian-bagian di dalam situasi permasalahan. *Insight* ini sering dihubungkan dengan pernyataan spontan “*aha*” atau “*oh, I see*”.¹⁵ Manusia tidaklah memberikan respons secara otomatis kepada stimulus yang dihadapkan kepadanya. Manusia adalah makhluk aktif yang mampu menafsirkan lingkungan, bahkan dapat mendistorsinya. Sebelum memberikan respons, manusia dapat menangkap lebih dulu “pola” stimuli secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna, yang dinamakan “Gestalt”. Jadi manusialah yang menentukan makna stimuli itu, bukan stimuli itu sendiri. Sedangkan Kurt Lewin dengan teori Medannya, menyatakan bahwa tingkah laku individu merupakan fungsi dari pribadi dan lingkungannya.

Kelemahan-kelemahan dalam melihat fenomena-fenomena tentang manusia ini menimbulkan ketidakpuasan pada sebagian tokoh-tokoh psikologi. Muncullah kaum Freudian yang beranggapan bahwa semua bentuk tingkah laku luhur adalah hasil/proses belajar, dan bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Kelompok ini lebih memfokuskan diri pada penyelidikan tentang orang-orang yang mengalami gangguan *neuritis* dan *psikosis*¹⁶ yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Psikoanalisa.

Terhadap dua aliran ini Abraham W. Maslow merasa ada sesuatu yang “hilang dalam diri psikologi.” Menurutny, baik Behaviorisme maupun Psikoanalisis tidak memandang manusia sebagaimana mestinya, bahkan kedua aliran tersebut cenderung, kalau tidak bisa dikatakan sangat, menafikan potensi atau sisi-sisi keunggulan komparatif manusia. Pada akhirnya Maslow memelopori berdirinya Psikologi Humanistik. Maslow ingin membawa psikologi berbicara tentang siapa sesungguhnya manusia dan bagaimana seharusnya manusia menata dirinya. Aliran

¹⁴ *Ibid.*, h. 104-5.

¹⁵ Wasti Sumanto, Drs., *Psikologi Pendidikan* (Jakarta:Bina Aksara, 1987), h. 122.

ini mengajukan sebuah konsepsi tingkah laku manusia yang memiliki kesadaran dan bertanggung jawab. Aliran ini menawarkan orientasi baru terhadap psikologi, dan membawanya pada hubungan yang lebih dekat dengan persepsi keseharian manusia. Sebagai “kekuatan ketiga” dalam kancah psikologi kontemporer, aliran *Humanistik* lebih memberikan perhatian dan kepedulian terhadap topik-topik yang dianggap menempati posisi pinggiran dalam teori-teori besar yang sudah ada, seperti; kasih sayang, kreatifitas, aktualisasi diri, nilai-nilai yang lebih tinggi, “makna menjadi”, spontanitas, sisi afektif, otonomi, tanggung jawab, pengalaman transendental, keberanian serta konsep-konsep yang terkait.

*Humanistic Psychology is primarily an orientation toward the whole of psychology rather than a distinct area or school. It stands or respect for worth persons, respect for differences and interest in exploration of new aspect of human behavior. As a third force in contemporary psychology it is concerned with topics having little place in existing theories and systems: e.g. love, creativity, self actualization, higher values, being, meaning becoming, spontaneity, play, human affection, autonomy, responsibility, fair play, transcendental experience, courage, and related concept.*¹⁷

Dunia psikologi Barat dengan pengaruh gelombang positivisme-nya, yang mendasarkan sikap ilmiah mereka kepada fakta-fakta empiris, pada mulanya nampak masih ragu bahkan menolak psikologi yang berkembang di dunia Timur. Praktek-praktek metafisika yang telah lama berkembang di dunia Timur seperti Zen, Yoga, Budhism dan sufisme Islam masih disikapi secara apriori, karena terbentur dengan prinsip-prinsip empiris. Namun belakangan, praktek-praktek metafisika yang dikembangkan oleh dunia Timur, yang mencoba mencapai jalan kesempurnaan sebagai manusia, ini cukup dilirik oleh sebagian kalangan Barat. Hal ini membawa arti bahwa, ada benang merah antara dunia psikologi dan dunia metafisika, yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai *Sufisme*.

Merebaknya gerakan, atau sebutlah aliran, Psikologi Islam di dunia Barat (dalam hal ini di Amerika), merupakan satu bagian dari sebuah gerakan besar dan

¹⁶ Frank G. Goble, *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow)*, terj. A. Supratiknya, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 34.

menyeluruh yang berusaha menentang dan menunjukkan alternatif lain konsepsi tentang manusia, atau lebih tepatnya berupaya merekonstruksi asumsi-asumsi tentang sifat-sifat dasar manusia (*human nature*). Dari gerakan inilah lahir berbagai karya yang berupaya memunculkan kembali kontribusi pemikir-pemikir Islam dalam bidang psikologi, dan melontarkan kritik atas asumsi-asumsi yang dijadikan dasar untuk membangun teori-teori psikologi Barat, terutama teori-teori *Psikoanalisa*, *Behaviorisme* dan *Humanistic* (Psikologi kemanusiaan).¹⁸

Aliran psikologi lain yang sangat memiliki kedekatan dengan dunia tasawuf adalah *Psikologi Transpersonal*. Aliran Transpersonal yang juga tengah berkembang dewasa ini mencoba melakukan ekstensifikasi bidang kajian psikologi, dari wilayah jasad dan jiwa menuju kepada wilayah jasad-jiwa dan rohani. Dengan demikian, aliran ini mencoba membangun trilogi wilayah kajian yakni; psiko-fisik-spiritual.

Psikologi Transpersonal ini bisa dikatakan luapan ketidakpuasan atau penyempurnaan ketiga aliran psikologi sebelumnya yakni; Psikoanalisa, Behaviorisme dan Humanistik. Gambaran tersebut diungkapkan dalam sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 1969, *The Journal of Transpersonal Psychology* yang diterbitkan oleh *Association of Transpersonal Psychology* yang memberikan penjelasan secara rinci tentang arah aliran ini:

*Transpersonal Psychology is the title given to an emerging force in the psychology field by a group of psychologists and professional men and women from other fields who are interested in those ultimate human capacities and potentialities that have no systematic place in positivistic or behaviouristic theory (first force), classical psychoanalytic theory (second force) or humanistic theory (third force). The emerging Transpersonal Psychology (fourth force) is concerned specifically with the empiric scientific study of a responsible implementation of the findings relevant to becoming, individual and unitizes consciousness, ecstasy, mystical experiences, self actualization, transcendence of the self, spirit, cosmic self, etc.*¹⁹

¹⁷ A. Sutich, *American Association for Humanistic Psychology, Article of Association*, (Paulo Alto, CA. 1963).

¹⁸ Hasan Langgulung, *Kreatifitas dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1990). Hlm. 283-4.

¹⁹ Anthony Sutich, in the first issue of *The Journal of Transpersonal Psychology*, Spring 1969, dalam T. Tart (ed) *Transpersonal Psychologies*, (New York: Harper and Row Publisher, 1975), hlm. 11.

Artinya : Psikologi Transpersonal adalah nama yang diberikan kepada kekuatan baru yang muncul dalam lapangan psikologi yang diprakarsai oleh sekelompok ahli psikologi dan professional dari berbagai bidang, yang tertarik untuk mengupayakan pencapaian optimal kapasitas dan potensi manusia, dimana hal itu tidak mendapat tempat dalam teori positivistik atau behavioristik (kekuatan pertama) atau teori psikoanalisa klasik (kekuatan kedua) maupun dalam psikologi humanistic (kekuatan ketiga). Kemunculan Psikologi Transpersonal (kekuatan keempat) ini dikarenakan kepeduliannya secara spesifik terhadap studi sains empirik serta implementasinya terhadap beberapa hal yang cukup relevan untuk diwujudkan, menyangkut kesadaran individu dan kelompok, kenikmatan, pengalaman-pengalaman mistis, aktualisasi diri, transendensi diri, roh/jiwa, kosmik dan lainnya.

Meskipun aliran psikologi ini relatif baru dari segi usia, namun sebenarnya praktek-praktek keseharian manusia, yang diyakini merupakan indikator-indikator dari dunia psikologi transpersonal ini telah dikenal secara luas seperti; Zen, Budhism, Yoga Mistik Kristen, Sufism Islam dan sebagainya. Tetapi karena kebanyakan ilmuan Barat, relatif sedikit yang mempunyai apresiasi terhadap psikologi Timur, maka hal tersebut kurang mendapat perhatian secara ilmiah.²⁰ Hal ini dikarenakan, terhadap *transendensi*, ilmu pengetahuan Barat masih ditandai dengan sikap-sikap intelektual yang tidak begitu saja bisa mengakui dan menerima fenomena-fenomena religiusitas tersebut. Dikarenakan pengaruh kuat dari aliran-aliran besar yang ada sebelumnya seperti Positivisme, maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan biasanya diawali dengan melakukan riset empiris terhadap fakta-fakta dan praktek-praktek fenomena tersebut, dengan harapan bisa memberikan deskripsi secara ilmiah serta menemukan prinsip-prinsipnya. Sikap ini, setidaknya, bisa dimaklumi karena mereka hendak bersikap objektif dan nertral terhadap fenomena-fenomena metafisika dengan tanpa melakukan pemihakan terhadap agama atau keyakinan tertentu.

Setelah melalui kajian yang cukup mendalam terhadap 40 ragam definisi psikologi transpersonal selama kurun waktu 23 tahun, maka Shapiro dan Lajoie memberikan gambaran mengenai apa yang ditelaah oleh psikologi transpersonal.

²⁰ Robert Ornstein, *The Nature of Human Consciousness: A Book of Reading*, (New York: Harper and Row Publisher, 1973), hlm. 5.

Riset dari kedua tokoh tersebut mengarahkan kepada beberapa tema utama yang menurut mereka harus dijadikan pokok penelitian lebih lanjut oleh aliran Transpersonal. Tema-tema sentral tersebut meliputi: (1) keadaan kesadaran (*state of consciousness*), (2) potensi-potensi tertinggi, (3) melampaui *ego* atau diri pribadi, (4) transendensi dan (5) spiritual.²¹

Munculnya ragam aliran besar dan disusul oleh aliran Psikologi Transpersonal, dengan mencoba melakukan telaah secara ilmiah terhadap fenomena-fenomena transendensi, memberikan argumentasi kuat bagi lahirnya struktur kajian Tasawuf dan praktek Psikoterapi dalam perspektif ilmu pengetahuan. Kajian tersebut terkait dengan bagaimana perilaku sufi dengan pengalaman mistisnya (transenden) dapat diterangkan secara ilmiah, serta bagaimana pengalaman batiniah tersebut mampu diterapkan dalam praktek psikoterapi, baik sebagai langkah preventif maupun kuratif bagi penyakit kejiwaan manusia modern.

Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan Al-Qur'an* menyebutkan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia empat daya, yaitu :

1. *Daya Tubuh*, yang mengantar manusia berkekuatan fisik. Berfungsinya organ tubuh dan panca indera adalah berasal dari organ ini.
2. *Daya Hidup*, yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan.
3. *Daya Akal*, yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. *Daya Kalbu*, yang memungkinkannya bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah . Dari daya inilah lahirintuisi dan indera keenam.²²

²¹ Z.F. Joesoef Noesjirman (ed), *Konsep Manusia menurut Psikologi Transpersonal*, dalam *Metodologi Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 85.

²² Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 281.

Memang, psikologi yang membahas masalah-masalah yang bersifat transenden tidak sepenuhnya mampu menjelaskan secara ilmiah fenomena-fenomena batiniah ataupun mistis. Hanya para praktisi mistis sajalah yang dapat memahami fenomena-fenomena mistis ini secara paripurna. Di sisi lain nampaknya juga demikian, bahwa dunia sufi adalah dunia spiritual yang tidak dengan gampang bisa diperdebatkan secara diskursif. Hal ini dikarenakan dunia sufi memang tidak memiliki acuan-acuan yang bersifat konkrit-empirik. Karena sifatnya yang demikian, banyak fenomena-fenomena sufistik seperti ilmu Hudhuri (*Knowledge by Present*) atau puncak pengalaman sufi dalam *maqam-maqam* sufistik seperti; *ittihad* ataupun *hulul*, tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara ilmiah dengan pendekatan psikologi, dalam hal ini Transpersonal.

Psikologi Sufi yang arahnya hendak membangun kesadaran tinggi manusia dengan menerapkan teknik-teknik spiritual –memang sejauh ini- belum terumuskan dengan jelas. Praktek-praktek Psikoterapi dengan sentuhan ibadah seperti dzikir, tafakkur, tawakkal, maqamat-maqamat, ittihat, hulul, wahdatul wujud dan sebagainya, merupakan tema-tema yang sangat kental dengan transendensi diri. Dalam pandangan Sufism, sumber yang menjadi potensi bagi seseorang untuk mengalami transendensi adalah “roh” yang ditiupkan Allah kepada manusia. Ia merupakan sarana untuk menjalin komunikasi antara mahluk dengan al-Khaliq. Dan teknik-teknik, sebagaimana tersebut di atas, ini merupakan teknik serta metode yang diajarkan al-Qur’an serta Sunnah Rasul. Dari sorak yang demikian ini, maka sufisme merupakan psikologi dalam persektif Islam.

STRATEGI HOLISTIK DAN KONTRIBUSI PSIKOTERAPI

Dalam rumusan UNESCO disebutkan bahwa pendidikan mempunyai dua dimensi. *Pertama*, harus mempersiapkan orang menghadapi segala perubahan, menunjukkan bagaimana cara menerima perubahan itu dan memanfaatkannya, menciptakan kerangka pikiran yang non-konservatif, non-konformis dan dinamis. *Kedua*, pendidikan harus menjadi penawar terhadap pemutarbalikan kondisi yang banyak terdapat dalam diri manusia dan masyarakat. Sebab pendidikan demokratis harus mampu menyembuhkan frustrasi, depersonalisasi dan keterasingan dalam

dunia modern, dan dengan pendidikan seumur hidup akan mengurangi rasa tidak aman serta menaikkan mobilitas profesional.²³

Menurut Driyarkara, pendidikan merupakan proses “pemanusiaan” manusia muda. Pendidikan harus dapat membantu agar seseorang secara “tahu” dan “mau” bertindak sebagai manusia dan bukan hanya secara *instinktif* semata (proses hominisasi). Lebih lanjut, pendidikan hendaknya dipahami juga sebagai proses humanisasi, yaitu agar seluruh sikap dan tindakan serta kegiatan seseorang benar-benar bersifat manusiawi.²⁴

Sementara itu, Muchtar Buchori menyoroti tentang ketidakjelasan strategi yang diterapkan oleh dunia pendidikan dalam mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, dewasa ini terdapat dua jenis tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai bangsa, yaitu :

- 1) Mengejar ketinggalan kita terhadap bangsa-bangsa lain yang telah “maju” agar dapat berinteraksi dengan mereka secara *seimbang*, dan
- 2) Mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dituntut oleh perubahan-perubahan yang akan datang, yang tandatanya sudah terlihat sejak sekarang.²⁵

Lebih lanjut dikatakan, bahwa mengejar ketertinggalan merupakan suatu tuntutan dan keharusan, namun yang perlu dipikirkan secara cermat adalah “perumusan strategi” untuk mengujarnya. Penyusunan gambaran secara jelas tentang apa yang bersama sedang dikejar, merupakan hal yang sangat urgen. Ketertinggalan yang terdapat dalam diri bangsa ini begitu banyak, sehingga perlu dipilih mana-mana ketertinggalan yang akan dan perlu untuk dikejar terlebih dahulu, bukan serentak.²⁶ Strategi ini tentunya juga menjadi pilihan yang cukup

²³ UNESCO, *Belajar untuk Hidup, Pendidikan Hari Ini dan Hari Esok*, (Jakarta: Bhatara, 1981) hlm. 138.

²⁴ N. Driyarkara, *Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980) hlm. 69.

²⁵ Muchtar Buchori, Dr., *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 277.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 277-278.

akurat dalam konteks individu, di dalam menyikapi ketertinggalan mereka dalam kompetisi kehidupan.

Strategi *Link and Match*, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, perlu dikaji kembali. Konsep ini lebih memunculkan pemuliaan terhadap bidang-bidang *Hi-Tech* (yang berbasis pada ilmu-ilmu exact) ini, terlihat begitu mengesampingkan aspek sosio-psikologis, yang diharapkan mampu menjadi “penyeimbang” bagi pembangunan manusia seutuhnya. Konsep ini telah banyak memunculkan manusia-manusia modern dengan pribadi yang terbelah (*split personality*).

Pendidikan dalam era *Hi-Tech* dewasa ini selalu dituntut untuk memenuhi kebutuhan akan “tenaga siap pakai”. Istilah tersebut memberi arti secara tersirat bahwa manusia tidak lebih dari sekedar alat yang diabdikan untuk memenuhi/mencapai tujuan dari suatu sistem besar yang melingkupinya. Ia bisa saja kehilangan dirinya dan siap hanyut dalam kepentingan di luar dirinya.

Manusia menjadi terjebak mengejar ketrampilan yang berhubungan dengan produk teknologi, namun di sisi lain ia menjadi gagap ketika berhadapan dengan sisi-sisi manusiawi. Pendidikan “siap pakai” lebih mengantar individu pada pengembangan kognitif dan skill, akan tetapi aspek-aspek humanioral tercecer. Manusia mengalami “keterbelahan” antara rasio dan afeksi, yang secara klinis telah mengarah kepada *schizoprenia*.²⁷

Seharusnya pendidikan lebih diarahkan untuk menyiapkan manusia yang bukan hanya siap pakai, lebih dari itu juga siap melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan masyarakatnya, dengan kata lain manusia yang mampu melakukan sesuatu dalam posisinya sebagai “manusia”. Sosok manusia yang tahu persis kapasitas dan potensinya serta bisa mengaktualisasikan dalam karya-karya yang bermanfaat, adalah mereka yang bukan sekedar “melakukan karena mungkin untuk melakukan”. Untuk melakukan sesuatu karena mungkin atau karena mampu untuk melakukan, merupakan satu ciri “penyakit” manusia modern. Apapun yang “mungkin” (secara teknis bisa dilakukan) kenapa tidak? Terlepas dari apakah hal itu

²⁷ Frieda, *Loc. Cit.*

memang perlu/harus dilakukan dan dibutuhkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia atau tidak.

Dalam pandangan Ivan Illich, pertumbuhan pribadi bukanlah *entitas terukur*. Ia adalah pertumbuhan dalam pembangkangan terhadap pendisiplinan, yang tidak bisa diukur dengan penggaris, tidak pula dengan kurikulum manapun, tidak bisa dibanding-bandingkan dengan pencapaian pribadi lain. Belajar yang semacam itu, orang bisa mengikuti jejak orang lain hanya dalam penjelajahan imajinatif, itupun bukan meniru secara persis melainkan sekedar *napak tilas*. Dalam pandangan Illich, belajar yang ia hargai adalah karya cipta yang tak mungkin diukur. Orang yang menyerah ketika diukur oleh orang lain, maka akhirnya ia akan memakai alat serupa untuk mengukur pertumbuhannya sendiri. Ia tidak lagi harus “ditempatkan”, karena ia sudah masuk sendiri ke tempatnya -tempat yang diajarkan kepadanya untuk dijadikan tujuan- dan dalam proses itu ia menempatkan semua orang dan segala hal di tempat mereka masing-masing.²⁸

Jika “desain” semacam ini dibelokkan akan berakibat munculnya benturan-benturan kejiwaan baik individual maupun kolektif. Individu yang terkungkung atau terkekang oleh kondisi yang sama sekali tidak diinginkan akan mengalami kegelisahan dan kecemasan, yang akan bermuara pada munculnya gangguan atau penyakit kejiwaan. Jika hal itu terakumulasi pada suatu komunitas, maka akan menciptakan komunitas yang tidak sehat pula.

Kecemasan alamiah, dalam beberapa keadaan, sering muncul dengan didahului dan disertai oleh situasi kritis yang dihadapi manusia. Ini merupakan kesempatan fisiologis yang memungkinkan manusia menghadapi berbagai krisis atau melindungi diri darinya dengan persiapan psikologis dan struktur fisiologisnya. Kecemasan alamiah bukan hanya dialami oleh manusia, tetapi juga sering dialami oleh binatang bahkan tumbuhan serta segala hal yang memiliki naluri (insting) penjagaan diri.²⁹

²⁸ Omi Intan Naomi, Editor dan alih bahasa, *Menggugat Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1998), hlm. 538-539.

²⁹ Adnan Syarif, Dr., *Psikologi Qur'ani*, Terj. M. al-Mighwar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002) hlm. 86.

Psikoterapi mencoba menyelami penyebab gangguan kejiwaan tersebut, sekaligus mengembangkan teknik-teknik *terapeutik*-nya. Konsep gangguan kejiwaan dan manusia yang normal memang terkadang masih samar dan sukar ditentukan batas-batasnya. Sikap hidup yang dikatakan normal oleh suatu kelompok, bisa jadi dianggap abnormal oleh kelompok lain. Yang dianggap abnormal pada masa dulu, ternyata dianggap normal pada masa sekarang.³⁰

³⁰ Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: Eresco, 1988), hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Syarif, Dr., *Psikologi Qur'ani*, Terj. M. al-Mighwar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002).
- Agus Maladi Irianto, Mudjahirin Thohir, *Kemajemukan dan Resolusi Konflik, Membangun Rasa Damai di Atas Bara*, (Semarang: Limpad, 2000).
- Arifin, M.Ed., Drs. H.M., *Psikologi dan Beberapa Aspek Kehidupan Ruhaniyah Manusia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- A, Sutich, *American Association for Humanistic Psychology, Article of Association*, (Paulo Alto, CA. 1963).
- , in the first issue of *The Journal of Transpersonal Psychology*, Spring 1969, dalam T. Tart (ed) *Transpersonal Psychologies*, (New York: Harper and Row Publisher, 1975).
- Azyumardi Azra, Prof. Dr., MA., *Esei-Esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logoss, 1999).
- De Porter, Bobby, Mike Hernacki, *Quantum Learning; Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, (Bandung: Kaifa, 1999).
- Djamaluddin Ancok, Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islam: Solusi atas Problem-problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Echols, John M., Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, cet XVII, 1989).
- Frank G. Goble, *Madzhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (The Third Force, The Psychology of Abraham Maslow)*, terj. A. Supratiknya, (Yogyakarta: Kanisius, 1994).
- Frieda NRH, Dra., M.Si., *Keterasingan Manusia Modern*, Makalah Seminar "Menggagas Prodi Tasawuf dan Psikoterapi", Semarang,.
- Hasan Langgulung, *Kreatifitas dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1990).
- Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, (Bandung: Eresco, 1988).
- M. Quraish Shihab, *Membumukan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995).
- Muchtar Buchori, Dr., *Spektrum Problematika Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Mustafa Fahmi, Prof. Dr., *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, alih bahasa Dr. Zakiyah Daradjat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- N. Driyarkara, *Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980).

- Omi Intan Naomi, Editor dan alih bahasa, *Menggugat Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1998).
- Robert Ornstein, *The Nature of Human Consciousness: A Book of Reading*, (New York: Harper and Row Publisher, 1973).
- Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, *Psikologi Belajar* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1989).
- UNESCO, *Belajar untuk Hidup, Pendidikan Hari Ini dan Hari Esok*, (Jakarta: Bhatara, 1981).
- Wasti Sumanto, Drs., *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Z.F. Joesoef Noesjirman (ed), *Konsep Manusia menurut Psikologi Transpersonal*, dalam *Metodologi Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Urgensi IQ, EQ dan SQ dalam Pembelajaran PAI)

Sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan mata pelajaran lainnya. Tujuan yang dirumuskan "harus" mampu menjangkau ketika ranah; kognitif, afektif dan psikomotor dengan sempurna, agar tujuan pembentukan insan kamil bisa terwujud. Dengan kata lain; pengajaran PAI harus mencakup tiga hal yakni; transfer of knowledge, transfer of value dan transfer of skills/attitude. Hal ini diasumsikan bahwa, peserta didik mampu menyerap ilmu pengetahuan dari guru, meniru dan menyerap nilai, sikap dan ketrampilan dari proses interaksi dengan guru. Namun demikian, di lapangan ketiga hal tersebut tidak selalu bisa berjalan beriringan. Pemahaman yang baik terhadap IQ, EQ dan SQ diharapkan mampu menjembatani kelemahan-kelemahan dari aspek psikologis, atas pengajaran PAI. Sekaligus, dengan memanfaatkan jasa ketiganya, dapat memperkaya strategi pendekatan dan metode pengajaran PAI terhadap peserta didiknya secara lebih akurat dan bermakna.

APA ITU IQ, EQ DAN SQ?

Dalam *Multiple Intelligences*, Howard Gardner dari Harvard menyatakan bahwa sedikitnya ada tujuh macam kecerdasan, termasuk kecerdasan musical, interaksi, olahraga, rasional dan emosional. Sementara Danah Zohar dan Ian Marshall menyatakan bahwa semua kecerdasan, yang jumlahnya mungkin tak terbatas, dapat dihubungkan dengan salah satu dari ketiga system saraf dasar yang terdapat dalam otak. Bahkan semua jenis kecerdasan yang disebutkan Gardner pada hakekatnya adalah varian dari ketiga kecerdasan utama; IQ, EQ dan SQ serta pengaturan saraf ketiganya.¹

Orang mulai perlu untuk mengetahui secara lebih mendalam dan jelas, terutama kaitannya dengan kecerdasan rasional atau *Intelligence Quotient* (selanjutnya disebut IQ) yang selama ini kita kenal. Pada umumnya pengetahuan tentang IQ ini sudah cukup karena memang sudah dipelajari orang selama seratus tahun, dan selama ini pula orang percaya tentang kekuatan IQ sebagai penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Berawal dari tahun 1890, ketika Binet melakukan eksperimen-eksperimen laboratorium, tes IQ terus diuji ulang dan disempurnakan dengan berbagai modelnya hingga kurang lebih tahun 1960-an.² Hasil pengukuran IQ hingga saat ini masih dipercaya dan digunakan untuk berbagai keperluan peramalan keberhasilan akademik dan karir. Sampai pada kurang lebih dua dasa warsa terakhir ini, ketika

¹ Danah Zohar, Ian Marshall, *Spiritual Quotient*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 4

² Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 109-115.

Howard Gardner mengemukakan adanya intelegensi lain, yang disebut sebagai kecerdasan emosional, orang pun terbuka wawasannya.³

Kecerdasan emosional merupakan suatu konsep baru yang sekarang banyak diminati dan dipelajari masyarakat, baik kalangan pendidikan, orang awam, terutama para wiraswastawan (*enterpreunership*), karena peran kecerdasan emosi atau *emotional intelligence* (selanjutnya disebut EQ) ini sangat besar sumbangannya dalam mencapai keberhasilan.

Berdasarkan pengamatan dan kejadian dalam masyarakat mengisyaratkan bahwa kecerdasan emosional (EQ) dapat sama ampuhnya, bahkan terkadang lebih ampuh daripada IQ. Serangkaian studi menunjukkan bahwa orang yang secara intelektual cerdas seringkali bukanlah orang yang paling berhasil dalam pekerjaannya maupun dalam kehidupan pribadinya. Ternyata IQ yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan atau kebahagiaan hidup.⁴

Hal lain dari penemuan dan penelitian baru ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bukanlah merupakan bawaan sejak lahir, sehingga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri kita semua. Dalam hal ini peran orang tua dan sekolah sangat besar dalam memupuk dan memberikan kesempatan emas kepada anak-anak untuk mengembangkan yang satu ini.⁵

Bagi orang dewasa pun kecerdasan emosional ini dapat dikembangkan melalui berbagai pelatihan dan tambahan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosialnya. Sebagai pengelola atau perannya sebagai manajer suatu organisasi, perlu mengetahui secara mendalam tentang manfaat pengelolaan emosi kita dalam hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Lebih dari itu, penting bagi kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, sebelum membimbing anak-anak didik kita, perlu memahami benar makna dan peran kecerdasan emosional ini.

IQ, EQ, baik terpisah ataupun bersama-sama, tidaklah cukup untuk menjelaskan keseluruhan kompleksitas kecerdasan manusia dan jiwa serta imajinasinya. Komputer

³ Robert Cooper, Ph.D, *Kecerdasan dalam Kepemimpinan dan Organisasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 5.

⁴ Daiei Goleman, *Kecerdasan Emosional, Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ*, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 45.

⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

memiliki IQ tinggi; mereka mengetahui aturan dan mengikutinya tanpa salah. Banyak hewan memiliki EQ tinggi; mereka mengenali situasi yang ditempatinya dan mengetahui cara menanggapi situasi tersebut dengan tepat. Akan tetapi, baik komputer maupun hewan tidak pernah bertanya **mengapa** kita memiliki aturan atau situasi, atau bisakah aturan atau situasi itu diubah atau diperbaiki. Artinya, mereka bekerja **di dalam batasan**, memainkan “permainan terbatas”. *Spiritual Quotient* (SQ) memungkinkan manusia menjadi kreatif, mengubah aturan atau situasi. SQ memungkinkan kita untuk bermain **dengan** batasan, memainkan “permainan tak terbatas”. SQ memberi kita kemampuan membedakan. SQ memberi kita rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasannya. SQ digunakan untuk bergulat dengan ihwal *baik* dan *jahat*, serta untuk membayangkan kemungkinan yang belum terwujud, untuk bermimpi, bercita-cita, dan mengangkat diri kita dari kerendahan.⁶

Perbedaan penting antara SQ dan EQ terletak pada daya ubahnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Daniel Goleman, *Emotional Intelligence* memungkinkan seseorang untuk memutuskan dalam situasi apa dia berada, lalu bersikap secara tepat **di dalamnya**. Ini berarti bekerja **di dalam** batasan situasi dan membiarkan situasi tersebut mengarahkan seseorang. Akan tetapi, SQ memungkinkan seseorang bertanya apakah ia memang berada dalam situasi tersebut. Apakah seseorang lebih suka mengubah situasi tersebut, atau memperbaikinya? Ini berarti bekerja **dengan** batasan situasi yang memungkinkan seseorang untuk **mengarahkan situasi** itu.

Idealnya ketiga kecerdasan tersebut bekerja sama dan saling mendukung. Otak kita dirancang oleh Yang Kuasa, agar mampu melakukan hal ini. Meskipun demikian IQ, EQ dan SQ memiliki kekuatan tersendiri dan bias berfungsi secara terpisah. Oleh karena itu ketiga tingkat kecerdasan kita belum tentu sama-sama tinggi atau rendah. Seseorang tidak harus tinggi dalam IQ atau SQ agar tinggi dalam EQ, karena seseorang mungkin tinggi IQ-nya, tapi rendah EQ dan SQ-nya

⁶ Danah Zohar, *Op. Cit.*, hlm. 4-5.

PROBLEMATIKA PENGAJARAN PAI

Dewasa ini banyak muncul keprihatinan, bahwa PAI hanya berhasil pada dataran kognitif saja. Banyak siswa yang prestasinya tinggi, namun sikap, akhlak serta pengamalan ibadahnya sangat jauh dari harapan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar sejauhmana efektifitas pengajaran PAI saat ini.

Sebagai salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan mata pelajaran lainnya. Tujuan yang dirumuskan “harus” mampu menjangkau ketika ranah; kognitif, afektif dan psikomotor dengan sempurna, agar tujuan pembentukan insan kamil bisa terwujud. Dengan kata lain; pengajaran PAI harus mencakup tiga hal yakni; *transfer of knowledge*, *transfer of value* dan *transfer of skills/attitude*. Hal ini diasumsikan bahwa, peserta didik mampu menyerap ilmu pengetahuan dari guru, meniru dan menyerap nilai, sikap dan ketrampilan dari proses interaksi dengan guru. Namun demikian, di lapangan ketiga hal tersebut tidak selalu bisa berjalan beriringan.

Dalam konteks ini, seorang Guru PAI yang lebih merupakan *figure* sekaligus *model* harus piawai dalam melakukan pendekatan dan menerapkan metode pengajaran PAI terhadap peserta didiknya. Hal ini dikarenakan figure Guru PAI berbeda dengan guru mata pelajaran lain. Barangkali tidak demikian halnya dengan guru mata pelajaran umum, kesalahan atau kekhilafan kecil yang dilakukan oleh Guru PAI akan membawa dampak yang besar di kalangan peserta didiknya.

Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap IQ, EQ dan SQ ini diharapkan mampu menjembatani kelemahan-kelemahan dari aspek psikologis, atas pengajaran PAI. Sekaligus, dengan memanfaatkan jasa ketiganya, dapat memperkaya strategi pendekatan dan metode pengajaran PAI terhadap peserta didiknya secara lebih akurat.

IQ, EQ DAN SQ DALAM PEMBELAJARAN PAI

IQ (kecerdasan rasional) dan EQ (kecerdasan emosional) bukanlah kemampuan yang bertentangan, melainkan kemampuan yang sedikit terpisah. Kita seringkali mencampurkan ketajaman akal dengan ketajaman emosi; misalnya mengatakan orang

yang IQ-nya tinggi tetapi Kecerdasan Emosional (EQ-nya) rendah; atau IQ rendah dengan EQ tinggi, sebenarnya relatif jarang terjadi.⁷

Pengukuran IQ yang pada mulanya diyakini menjadi penentu keberhasilan seseorang di bidang akademik dan kehidupan, sekarang selama dua dasa warsa ini mendapat kritik, antara lain :

1. Bahwa tes intelegensi yang disusun tersebut hanya menguji kemampuan tertentu, yaitu logika, tetapi tidak menguji semua kemampuan; padahal logika hanyalah salah satu bentuk pikiran atau kemampuan berpikir. Tes intelegensi yang ada menganut konsep bahwa kecerdasan itu merupakan suatu kesatuan yang tunggal dan konsisten sejak lahir.
Bahwa tes intelegensi yang ada pada saat itu terlalu menggambarkan kemampuan sekolah, suasana perkotaan, sehingga kurang dapat digunakan untuk anak-anak di daerah pedesaan.
2. IQ hanya menjadi ramalan sukses di kelas, atau sebagai sarjana.
3. Skor IQ dianggap tidak mampu berbicara banyak tentang keberhasilan anak di sekolah maupun dalam kehidupan mereka. Banyak anak yang memperoleh skor tinggi dalam Tes Intelegensi tradisional, memiliki kemampuan analitik yang tinggi, mereka tidak mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang praktis, kurang memiliki pemikiran kreatif dan mendalam.⁸

Beberapa kelemahan inilah yang nampaknya bias dipandang sebagai pangkal tolak tidak terjadinya sinkronisasi antara prestasi akademik dengan prestasi akhlak dan ibadah siswa.

Sebelum membangun kaitan antara IQ dengan EQ, maka perlu ada kejelasan tentang apa itu EQ. Kecerdasan Emosional (EQ) memiliki lima unsur yaitu kesadaran diri (*self-awareness*), pengaturan diri (*self-regulation*), motivasi (*motivation*), empati (*empathy*) dan ketrampilan sosial (*social skill*).

1. Kesadaran diri (*Self-awareness*): mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. *Self-awareness* meliputi kemampuan :

⁷ Dreyden Gordon, *Revolusi Cara Belajar*, (Bandung: Mizan Media Utama, 1999), hlm.14.

⁸ Fauzia, Aswin H, Prof, Dr, *Peranan IQ dan EQ bagi Keberhasilan Studi dan Hidup Seseorang, suatu Tinjauan Psikologis*,(Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 56-58.

- a. Kesadaran emosi (*emotional awareness*): yakni mengenali emosi diri sendiri dan efeknya,
 - b. Penilaian diri secara teliti (*accurate self-assessment*); mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri,
 - c. Percaya diri (*self-confidence*): keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri.
2. Pengaturan diri (*self regulation*): menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu segera pulih dari tekanan emosi. Pengaturan diri meliputi kemampuan :
- a. Mengendalikan diri (*self-control*): mengelola emosi dan desakan hati yang merusak,
 - b. Sifat dapat dipercaya (*trustworthiness*): memelihara norma kejujuran dan integritas,
 - c. Kehati-hatian (*concioussness*): bertanggung jawab atas kinerja pribadi,
 - d. Adaptabilitas (*adaptability*): keluwesan dalam menghadapi perubahan,
 - e. Inovasi (*innovation*): mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi-informasi baru.
3. Motivasi (*motivation*): menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif, serta untuk bertahan untuk menghadapi kegagalan dan frustrasi. Kecenderungan emosi yang mengantar atau memudahkan pencapaian sasaran meliputi :
- a. Dorongan prestasi (*Achievement drive*): yaitu dorongan untuk menjadi lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan,
 - b. Komitmen (*commitment*): yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok atau lembaga,
 - c. Inisiatif (*initiative*): yaitu kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan,
 - d. Optimisme (*optimism*): yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati ada halangan dan kegagalan.

4. Empati (*empathy*): merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan orang lain. Empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan dan kepentingan orang lain. Kemampuan ini meliputi kemampuan :
 - a. Memahami orang lain (*understanding others*): yaitu mengindera perasaan dan perspektif orang dan menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan mereka,
 - b. Mengembangkan orang lain (*developing others*): yaitu merasakan kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan kemampuan mereka,
 - c. Orietasi pelayanan (*service orientation*): yaitu kemampuan mengantisipasi, mengenali dan berusaha memenuhi kebutuhan orang lain,
 - d. Memanfaatkan keragaman (*leveraging diversity*): yaitu kemampuan menumbuhkan peluang melalui pergaulan dengan orang lain,
 - e. Kesadaran politis (*political awareness*): yaitu mampu membaca arus emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan.
5. Ketrampilan sosial (*social skill*): menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Dalam berinteraksi dengan orang lain ketrampilan ini dapat dipergunakan untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, serta untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Kepintaran dalam menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain meliputi :
 - a. Pengaruh (*influence*): yaitu melakukan taktik untuk melakukan persuasi,
 - b. Komunikasi (*communication*): yaitu mengirim pesan yang jelas dan meyakinkan,
 - c. Manajemen konflik (*conflict management*): meliputi kemampuan melakukan negosiasi dan pemecahan silang pendapat,
 - d. Kepemimpinan (*leadership*): yaitu membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok dan orang lain,
 - e. Katalisator perubahan (*change catalyst*): kemampuan memulai dan mengelola perubahan,

- f. Membangun hubungan (*building bonds*): kemampuan menumbuhkan hubungan yang bermanfaat,
- g. Kolaborasi dan kooperasi (*collaboration and cooperation*): kemampuan bekerja sama dengan orang lain demi tujuan bersama,
- h. Kemampuan tim (*team capability*): yaitu menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan tujuan bersama.⁹

Masalahnya adalah bahwa dengan perkembangan zaman dan kehidupan yang berbeda di dunia akademik, diperlukan pandangan kecerdasan yang lebih luas. Pengalaman dan berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang dalam hidup ternyata tidak semata-mata ditentukan oleh IQ-nya. Ternyata masih ada faktor lain yang berperan dalam kesuksesan yaitu kecerdasan emosional (EQ). Satu hal lagi yang tak kalah pentingnya adalah SQ. Kecerdasan Spritual adalah kecerdasan jiwa yang dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun diri secara utuh. Ia berada di bagian diri yang *dalam*, berhubungan dengan kearifan di luar *ego* atau pikiran sadar. SQ adalah sebuah kesadaran yang dengannya seseorang tidak hanya mengakui nilai-nilai yang ada, tetapi secara kreatif mampu menemukan nilai-nilai baru. SQ tidak bergantung pada budaya maupun nilai, serta tidak *mengikuti* nilai-nilai yang ada, tetapi *menciptakan* kemungkinan untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri.¹⁰

Konteks permasalahan di sini adalah bagaimana mengupayakan guru PAI menjadi kreatif di dalam mengajarkan materi. Paparan serta kiat-kiat teknis mengenai IQ, EQ dan SQ, sebagaimana dipaparkan di muka, kiranya dapat menjadi alternatif pendekatan dan metode pengajaran yang mampu menyentuh seluruh ranah; kognitif, afektif dan psikomotor. Dengan kata-lain, ini merupakan sebuah upaya untuk menjadikan Pendidikan Agama Islam menjadi sebuah kesadaran yang utuh, lebih bermakna dalam realitas kehidupan siswa, dan bukan sekedar doktrin yang membelenggu.

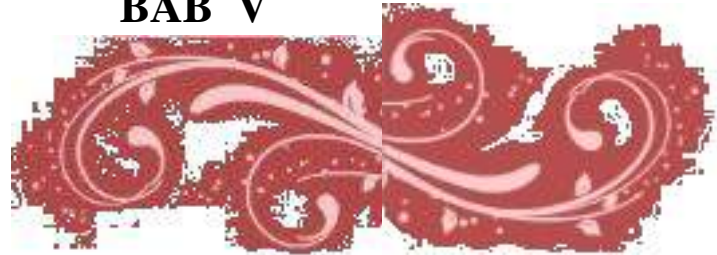
⁹ Mustaqim, *Op. Cit.*, hlm. 154-157.

¹⁰ Danah Zohar, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

REFERENSI

- Armstrong, Thomas, *Multiple Intelligence in the Classroom, Association for Supervision and Curriculum Development*, Aleksandria, Virginia, 1994-96.
- Cooper, Robert Ph. D, *Kecerdasan dalam Kepemimpinan dan Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- DePorter, B. & Hernacki M., *Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, Terjemahan, Kaifa Bandung, 1992.
- Fauzia, Aswin H, Prof, Dr, *Peranan IQ dan EQ bagi Keberhasilan Studi dan Hidup Seseorang, suatu Tinjauan Psikologis*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Goleman, Daniel, *Kecerdasan Emosional, Mengapa EI Lebih Penting daripada IQ*, Gramedia, Jakarta, 1999.
- Gordon, Deyden, *Revolusi Cara Belajar*, Bandung: Mizan Media Utama, 1999.
- Mustaqim, Drs. H., *Psikologi Pendidikan*, Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo-Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Zohar, Danah, Ian Marshall, *SQ Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan*, Bandung: Mizan, 2001.

BAB V



**PROBLEMATIKA
METODOLOGIS DAN PEMBELAJARAN**

Developmentally Appropriate Practice **Mengisi "Ruang Kosong" Pembelajaran PAI untuk Anak Usia Dini**

Banyak upaya dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Namun demikian, focus perbaikan lebih banyak ditujukan pada wilayah yang bersifat metodologis dan strategi pembelajaran. Kenyataan inilah yang menjadikan munculnya "ruang kosong" yang tidak diperhatikan oleh para pendidik. Perbaikan pembelajaran yang hanya menekankan aspek metodologis maupun strategi pembelajaran tanpa diikuti pemberian perlakuan psikologis, dimana anak diperlakukan secara patut dan utuh tentu akan menjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Bagaimanakah menyajikan materi Pendidikan Agama Islam kepada anak usia dini secara lebih bermakna? Apakah PAI menjadi pelajaran yang menjenuhkan atau bahkan menjadi "momok" bagi anak di usia dini? Pendekatan DAP merupakan sebuah tuntutan yang menawarkan praktek pendidikan dengan pendekatan yang patut, menyenangkan, sesuai dengan tingkat perkembangan, karakteristik dan minat anak serta daya dukung lingkungannya. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran PAI bagi anak usia dini menjadi lebih bermakna.

A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah dari Allah Swt. Karenanya, setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya agar kelak menjadi insan yang saleh, berilmu dan bertakwa. Hal ini merupakan wujud pertanggung jawaban orangtua kepada al-Khaliq.¹

Pada usia ini anak berada dalam tahap pre-operasional. Respon anak terhadap segala sesuatu sangat tergantung pada proses pengamatan dan pemahaman mereka terhadap objek nyata. Dalam tahap ini, materi Pendidikan Agama (Islam) akan cukup mengalami kendala jika praktek pembelajaran yang disajikan kurang sesuai dengan tingkat perkembangan, minat, karakteristik maupun daya dukung/konteks lingkungan sosial-budaya dimana si anak berada. Tak jarang Pendidikan Agama justru menjadi "momok" bagi anak karena banyak hal yang menakutkan, misalnya siksa kubur, siksa neraka dan sebagainya. Bisa juga praktek pembelajaran Agama menjadi sesuatu yang membosankan, membuat anak stress karena banyaknya pengulangan-pengulangan materi maupun hafalan yang tidak didukung dengan praktek pembelajaran yang patut dan menyenangkan. Jika hal ini terjadi pada anak usia dini, maka akan sangat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak serta kemauan belajar alamiah anak.

¹ Jaudah Muhammad Awwad, 1995, *Mendidik Anak secara Islami*, terj. *Manhaj al-Islam fi Tarbiyah al-Atfal* oleh Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 1

Menurut Peter Klein, sejak lahir manusia dianugerahi dengan 2 insting, yaitu insting untuk menyedot air susu ibu (*sucking instinct*) dan insting belajar. Insting belajar pada tiap anak dapat dilihat dari cepatnya seorang anak dalam menyerap bahasa dan mengenal situasi di sekelilingnya. Secara naluriah, anak kecil selalu tertarik dan selalu ingin tahu segala sesuatu yang ia jumpai di sekitarnya. Ia belajar melalui eksplorasi dengan melibatkan seluruh aspek inderanya seperti: melihat, mendengar, mencium, meraba, mencicipi, merasakan, berbicara dan aktivitas lainnya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa insting atau kecintaan untuk belajar ini seringkali berkurang drastis bahkan hilang dalam kehidupan anak, ketika ia masuk sekolah atau bahkan setelah ia dewasa?

Klein menyatakan pula bahwa penyebab hilangnya insting belajar pada anak adalah sikap para orangtua dan guru yang keliru dalam mendidik atau memperlakukan anak, serta sistem pembelajaran di sekolah yang tidak merangsang minat belajar anak. Cara-cara belajar yang diterapkan oleh orangtua maupun guru, baik di rumah maupun di sekolah, seringkali sangat terstruktur dan dipaksakan. Anak lebih banyak pasif, pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi dan melibatkan dirinya secara total dalam menyerap dan mengolah informasi yang mereka peroleh dalam pikiran mereka. Praktek pendidikan terstruktur dan dipaksakan ini masih sering dijumpai pada sistem pendidikan anak usia dini (di bawah 9 tahun). Cara semacam ini menyebabkan pembelajaran yang dilalui oleh anak menjadi sangat tidak menyenangkan, sehingga pada gilirannya menjadikan anak tidak gemar belajar.²

Konsep DAP ini telah menjadi isu besar sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Pada awal tahun 1980-an mulai muncul berbagai kritikan terhadap kurikulum lama yang dianggap telah mematikan semangat dan kecintaan anak untuk belajar, terutama oleh para pakar yang terhimpun dalam organisasi NAEYC (*National Association for the Education of Young Children*). Organisasi ini pada akhirnya merumuskan sebuah petisi untuk mereformasi pendidikan agar sesuai dengan konsep DAP. Gerakan ini dimotori oleh Sue Bredekamp.

² Peter Kline, dalam <http://www.literacynet.org/diversity2/intro/howwelearn.html>. Sebagaimana dikutip oleh Ratna Megawangi dkk. 2004, *Pendidikan yang Patut dan Menyenangkan*, Jakarta: Indonesia Heritage Poundation, hlm. 2-3.

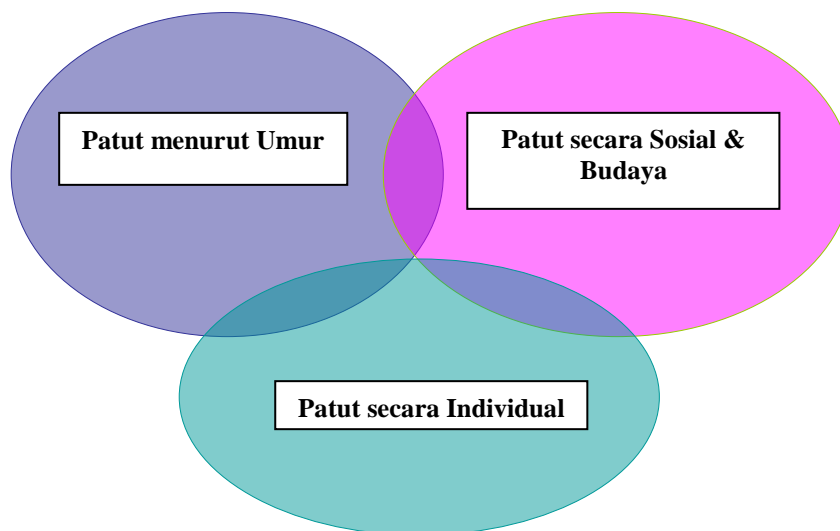
Implementasi konsep DAP dalam pendidikan anak usia dini memungkinkan para pendidik untuk dapat memperlakukan mereka sebagai individu yang utuh (*the whole child*), dengan melibatkan 4 komponen dasar yang ada pada diri anak, meliputi: pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skills*), sifat alamiah (*dispositions*), dan perasaan (*feelings*). (Katz, 1988) Mengapa implementasi DAP demikian penting? Banyak upaya dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Namun demikian, *focus* perbaikan lebih banyak ditujukan pada wilayah yang bersifat metodologis dan strategi pembelajaran. Kenyataan inilah yang menjadikan munculnya "ruang kosong" yang tidak diperhatikan oleh para pendidik. Perbaikan pembelajaran yang hanya menekankan aspek metodologis maupun strategi pembelajaran tanpa diikuti pemberian perlakuan psikologis, dimana anak diperlakukan secara patut dan utuh tentu akan menjadi kelemahan dalam proses pembelajaran. Jika ini terjadi maka pembelajaran akan "kering", masih terdapat jurang pemisah antara guru dengan siswa, yang berakibat pada munculnya jiwa inferior dalam diri anak, yang pada gilirannya akan menghambat tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Pendidikan Agama merupakan merupakan elemen penting dalam kurikulum sekolah. Pendidikan agama akan memberikan pondasi awal bagi keseimbangan tumbuh kembang anak (psiko-fisik). Namun demikian, sifat Pendidikan Agama yang masih sangat normative bagi anak usia dini, seringkali menjadi kesulitan tersendiri bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Bagaimanakah menyajikan materi Pendidikan Agama Islam kepada anak usia dini secara lebih bermakna? Apakah PAI menjadi pelajaran yang menjenuhkan atau bahkan menjadi "momok" bagi anak di usia dini? Pendekatan DAP merupakan sebuah tuntutan yang menawarkan praktek pendidikan dengan pendekatan yang patut, menyenangkan, sesuai dengan tingkat perkembangan, karakteristik dan minat anak serta daya dukung lingkungannya. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran PAI bagi anak usia dini menjadi lebih bermakna. Artinya, orientasi yang dituju tidak hanya berhenti pada aspek penanaman pengetahuan (kognitif) semata, namun juga akan mampu menanamkan nilai-nilai serta ketrampilan secara utuh.

B. KONSEP *Developmentally Appropriate Practice*

Terjemahan bebas dari *Developmentally Appropriate Practice* (DAP) dalam bahasa Indonesia adalah "pendidikan yang patut dan menyenangkan". Tiga dimensi dalam konsep DAP adalah, (1) *Patut menurut umur*, maksudnya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, (2) *Patut menurut lingkungan sosial budaya*, yaitu sesuai dengan pengalaman belajar yang bermakna, relevan dan sesuai dengan kondisi sosial budaya, dan (3) *Patut secara individual*, yaitu sesuai dengan pertumbuhan dan karakteristik anak, kelebihanannya, ketertarikannya dan pengalaman-pengalamannya.³



Gambar 1: Tiga Dimensi DAP yang saling terkait

Menurut Bredekamp & Rosegrant (1992) sebagaimana dikutip oleh Rebecca Novick dalam papernya *Developmentally Appropriate and Culturally Responsive Education: Theory in Practice*, menyatakan,

Developmentally appropriate practices reflect an interactive, constructivist view of learning (Bredekamp, 1987; Bredekamp & Rosegrant, 1992). Key to this approach is the principle that the child constructs his or her own knowledge through interactions with the social and physical environment. Because the child is viewed as intrinsically motivated and self-directed, effective teaching capitalizes

³ *Ibid.*, hlm. 5.

on the child's motivation to explore, experiment, and to make sense of his or her experience.⁴

DAP mencerminkan suatu pembelajaran yang interaktif dan berpandangan konstruktivisme. Kunci dari pendekatan ini adalah prinsip bahwa anak pada dasarnya membangun/mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik mereka. Dalam pendekatan ini diupayakan agar anak dapat memotivasi dan mengarahkan diri secara intrinsik, pembelajaran yang efektif yang mampu membangkitkan keingintahuan mereka melalui kegiatan eksplorasi, eksperimen dan dalam pengalaman nyata.

Terdapat benang merah antara Pendidikan Agama dengan prinsip-prinsip DAP ini. Dalam konsep Multiple Intelligence telah dikenal *Spiritual Smart* atau *Spiritual Quotient* (Kecerdasan Spiritual). Dalam interaksi sosialnya, seorang individu akan senantiasa berpikir tentang makna hidup, dan akan mempertanyakan "kenapa kita hidup", "mengapa kita mati". Dalam diri seorang individu pula terdapat sifat alamiah, jika melakukan suatu kesalahan, maka ia akan gelisah. Berangkat dari kenyataan itulah pendekatan DAP ini diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran PAI agar lebih patut, sesuai tingkat perkembangan, sesuai karakteristik dan kebutuhan anak serta sesuai dengan konteks lingkungan sosial-budaya anak.

Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik. Ia bukanlah makhluk dewasa dalam ukuran mini. Karenanya perlakuan terhadap anak haruslah berbeda. Secara umum karakteristik anak usia dini adalah; suka meniru, ingin mencoba, spontan, riang, suka bermain, serba ingin tahu, suka bertanya, jujur dan polos, banyak bergerak, ke-aku-annya tinggi.

Berdasarkan karakteristik tersebut, agaknya para ahli sepakat bahwa bermain merupakan bagian terpenting dalam kehidupan anak. Dalam aktivitas bermain ini anak secara tidak langsung mempelajari banyak hal yang konkrit, sehingga tumbuhlah daya cipta, kreatifitas dan imajinasinya.

Menurut Vygotsky sebagaimana dikutip oleh Ratna Megawangi, bermain dan aktifitas yang bersifat konkrit dapat memberikan momentum alami bagi

⁴ Rebecca Novick, 1996, *Developmentally Appropriate and Culturally Responsive Education: Theory in Practice*, Oregon, Child and Family Program, hlm. 3.

anak untuk belajar sesuatu yang sesuai dengan tahap perkembangan umurnya (*age-appropriate*), dan kebutuhan spesifik anak (*individual needs*) Bermain adalah cara yang paling efektif untuk untuk mematangkan perkembangan anak pada usia pra-sekolah (*Pre-operational thinking*), dan pada masa sekolah dasar (*concrete operational thinking*).⁵

Karakteristik di atas semestinya mendapatkan layanan yang optimal. Namun seringkali dikarenakan keadaan dan kondisi lingkungan, khususnya orangtua yang kurang memadai, maka akan berdampak kurang baik terhadap tumbuh kembang anak. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul dampak kejiwaan terhadap anak seperti; pemurung, kurang kreatif, pendiam, apatis, mudah putus asa dan sebagainya. Efek selanjutnya, anak tidak memiliki kepribadian yang utuh.⁶

Banyak konsep, gagasan yang selanjutnya ditindak lanjuti melalui pendidikan, pelatihan serta pengembangan strategi pembelajaran dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran. Namun menurut hemat penulis, kebanyakan masih ditumpukan kepada aspek metodologis, dan masih melupakan aspek psikologis. Akhirnya yang terjadi pembelajaran masih berjalan kering dikarenakan masih terdapat jarak atau jurang pemisah antara guru dengan siswa. Guru masih menjadi sosok yang cukup menakutkan bagi anak didiknya. Harga diri, ketertiban, otoritas seringkali masih dijadikan tameng bagi guru untuk membangun citra diri. Tentu hal ini semakin menciptakan kondisi yang kian tidak kondusif dalam konteks hubungan guru-anak didik.

Seorang tokoh pendidikan, penggagas pendidikan alternatif A.S. Neill meyakini bahwa, reformasi paling penting yang harus dilakukan terhadap sekolah adalah menghapus jurang pemisah yang melanggengkan paternalisme antara anak-anak dan guru-guru. Otoritas diktator semacam ini akan membuat anak merasa *inferior* sepanjang hidup mereka; dan setelah dewasa kelak (jika merekapun menjadi pendidik), mereka akan menyalin otoritas guru dengan otoritas bos.⁷

⁵ Ratna Megawangi, *Op. Cit.*, hlm. 7

⁶ Soegeng Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁷ Alexander Sutherland Neill, 2007, *Summerhill School, Pendidikan Alternatif yang Membebaskan*, terj. Agung Prihantoro, Jakarta: Serambi, hlm. 33.

Upaya memberikan pelayanan dalam rangka memfasilitasi dan mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak dapat dicapai melalui penerapan konsep DAP.

Mengapa konsep DAP begitu penting bagi proses belajar anak? Pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan alami untuk belajar, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip kerja struktur dan fungsi otak. Banyak ditengarai bahwa sekolah tradisional, yang menerapkan pembelajaran dengan cara-cara tradisional, telah menghambat proses belajar mengajar, dan tidak sesuai dengan prinsip alami ini.

Terkait dengan cara kerja struktur dan fungsi otak, terdapat beberapa prinsip *brain-based learning* yang sangat penting untuk diketahui oleh para pendidik.

- Otak memproses beberapa aktivitas dalam waktu bersamaan. Ketika seseorang sedang makan, secara simultan otak memproses kegiatan mulut untuk mengunyah, lidah untuk mengecap, dan hidung untuk mencium bau makanan.
- Otak memproses informasi secara keseluruhan dan secara bagian per bagian dalam waktu bersamaan (simultan). Ketika seorang anak belajar naik sepeda, aspek motorik, kognitif dan emosi anak terlibat secara bersamaan. Dengan demikian anak akan lebih cepat menguasai ketrampilan ini, daripada hanya memperoleh teori saja, yang hanya ditumpukan pada aspek kognitif.
- Proses pembelajaran melibatkan seluruh aspek fisiologi manusia secara alami otak selalu mencari makna atau arti dalam setiap informasi yang diterimanya. Otak akan memproses lebih lanjut informasi yang bermakna, namun tidak demikian dengan informasi yang tidak bermakna.
- Faktor emosi sangat mempengaruhi proses belajar.
- Motivasi belajar akan meningkat bila diberikan sesuatu yang menantang, dan akan terhambat bila diberikan ancaman.

- Manusia akan lebih mudah mengerti dengan diberikan fakta secara alami, atau ingatan spasial (bentuk atau gambar).⁸

Terdapat tiga dimensi yang harus dipahami dalam konsep DAP, yaitu:

1) *Patut Menurut Umur*

Dalam dimensi ini pendidik diharapkan memahami tahapan perkembangan anak secara kronologis. Pemahaman tentang hal ini dapat menjadi bekal bagi pendidik untuk mengetahui aktivitas, materi, pengalaman, dan interaksi sosial apa saja yang sesuai, menarik, aman, mendidik, dan menantang bagi anak. Hal ini sangat penting sebagai acuan dalam merancang dan menerapkan kurikulum, serta menyiapkan lingkungan belajar yang patut dan menyenangkan bagi anak.

2) *Patut Menurut Lingkungan Sosial dan Budaya*

Pemahaman pendidik terhadap latar belakang sosial budaya anak dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dalam mempersiapkan materi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak. Di samping itu, pendidik juga dapat mempersiapkan anak secara lebih dini untuk menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya.

3) *Patut Menurut Anak sebagai Individu yang Unik*

Pendidik juga harus memahami bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik, dimana ia membawa bakat, minat, kelebihan dan kekurangan, serta pengalaman masing-masing. Pendidik harus mempersiapkan diri untuk menghadapi keunikan masing-masing anak dalam berinteraksi.⁹

Meskipun DAP ini telah menjadi isu besar sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, namun masih menjadi pertanyaan besar, apakah para guru dan orangtua sudah memahami dan mampu menerapkan? Bagaimanakah dengan kondisi pembelajaran Pendidikan Agama pada anak usia dini yang ada sekarang? Sudahkan sesuai dengan prinsip-prinsip DAP? Beberapa pertanyaan ini menjadi

⁸ Ratna Megawangi, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

⁹ Ratna Megawangi, *Op. Cit.*, hlm. 5

sedemikian penting mengingat Pendidikan Agama merupakan merupakan elemen penting dalam kurikulum sekolah. Pendidikan agama akan memberikan pondasi awal bagi keseimbangan tumbuh kembang anak (psiko-fisik). Namun demikian, karakteristik materi yang masih sangat normative, minimnya jam, saratnya materi, tantangan perkembangan IPTEK, seringkali menjadi kendala tersendiri bagi guru dalam penyampaiannya. Berbagai kendala tersebut tentu tidaklah tepat dijadikan sebagai alasan pembenaran jika Pendidikan Agama tidak mampu mewujudkan harapan masyarakat, khususnya terhadap anak-anak mereka.

C. PAI UNTUK ANAK USIA DINI

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang menentukan terbentuknya kepribadian anak yang patut, utuh dan optimal. Program pendidikan ini diharapkan dapat menyiapkan anak untuk masa depannya dengan tumbuh-kembang yang sempurna baik secara fisik maupun psikis. Jika anak pada usia dini tidak mendapatkan layanan yang baik, dikhawatirkan akan berdampak kepada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangannya.

Proses pendidikan usia dini terjadi sejak anak dalam kandungan (secara tidak langsung), masa bayi hingga anak berumur kurang lebih delapan tahun. Batasan usia ini dimaksudkan sampai anak memasuki Sekolah Dasar awal/ tingkat rendah, yaitu kelas I sampai III. Adapun materi kegiatannya dapat berkaitan dengan agama, budi pekerti, etika, moral, toleransi, ketrampilan, gotong-royong, keuletan, kejujuran dan sifat-sifat lainnya.¹⁰

1. Karakteristik Anak Usia Dini

Perkembangan anak pada usia dini tentu sangat berbeda dan unik dibandingkan dengan masa-masa perkembangan yang lain. Pengenalan dan pemahaman yang baik terhadap karakteristik anak usia ini akan sangat

¹⁰ Soegeng Santoso, 2005, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Citra Pendidikan, hlm. 11

membantu upaya mendidik anak secara patut. Masa usia 3-5 tahun anak akan mengalami beberapa masa yakni

a. Masa Berkelompok

Pada masa ini anak tumbuh dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mempelajari dasar-dasar berperilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi, dimana hal ini diperlukan agar anak dapat menyesuaikan diri pada saat mereka memasuki jenjang Sekolah Dasar.

b. Masa Penjelajahan

Masa ini menunjukkan bahwa dalam diri anak tumbuh keinginan yang sangat kuat untuk mengetahui segala sesuatu yang terdapat di sekelilingnya, yang menyangkut, bagaimana mekanismenya, bagaimana perasaannya dan bagaimana ia dapat menjadi bagian dari lingkungan. Adapun cara yang paling umum untuk menjelajah adalah dengan bertanya tentang segala sesuatu. Karena itu, masa ini juga sering disebut dengan *masa bertanya*.

c. Masa Meniru

Masa meniru merupakan masa peka untuk mengidentifikasi diri dan meniru orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti meniru ucapan, tindakan baik yang baik maupun yang buruk.

d. Masa Kreatif

Hal yang paling menonjol yang terjadi dalam masa kanak-kanak atau usia dini adalah munculnya berbagai bentuk kreativitas dalam bermain. Bentuk kreativitas anak pada usia ini diyakini oleh para ahli sebagai bentuk kreativitas yang paling original, dengan frekuensi kemunculannya yang seolah tanpa kendali, dibandingkan dengan masa-masa lain dalam kehidupan seorang anak setelah masa ini berlalu.¹¹

Sedangkan usia 6-8 tahun dipandang sebagai masa peralihan dari pra sekolah (*pre-operational concrete*) menuju sekolah dasar (*concrete operational thinking*). Masa ini disebut pula sebagai masa peralihan dari kanak-kanak awal

¹¹ Yuliani Nurani Sujiono, 2005, Bambang Sujiono, *Menu Pembelajaran Anak Usia Dini*, Jakarta: Citra Pendidikan, hlm. 133-134

ke masa kanak-kanak akhir, sampai menjelang masa pra pubertas. Fokus perkembangan pada masa ini adalah penguasaan terhadap ketrampilan dasar, baik yang bersifat akademis pada tingkat awal (membaca, menulis dan berhitung), maupun yang bersifat non akademis yang mencakup aspek-aspek moralitas, kedisiplinan serta konsep diri yang merupakan perilaku dan menjadi lebih mandiri.¹²

Tentunya secara fisik, pertumbuhan anak pada usia 6-8 tahun ini relative lebih baik. Pertumbuhan fisik lebih pesat dan kuat, kondisi kesehatan akan lebih baik, artinya mereka lebih tahan terhadap gangguan situasi sekitar yang menyebabkan gangguan kesehatan. Perkembangan rohani juga semakin stabil, lebih dapat bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya. Keinginan untuk menjelajah alam sekitaryapun semakin besar dan lebih terfokus, seiring perkembangan daya nalar yang telah memasuki tahap pra operasional.

Namun demikian perhatian secara serius dari orangtua dan guru terhadap anak usia dini (3 – 8 tahun) ini tetap harus maksimal, dalam upaya membantu tumbuh kembang mereka secara optimal. Diabaikannya pertumbuhan dan perkembangan usia dini akan berdampak buruk bagi anak dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan pada masa-masa berikutnya.

2. Pendidikan Agama bagi Anak Usia Dini

Agama merupakan factor penting dalam kehidupan individu. Secara ruhaniah manusia memerlukan suatu pedoman yang dapat mengarahkan mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Ada hal-hal yang tidak mampu terjawab oleh diri manusia, karenanya ia memerlukan petunjuk dari Dzat yang menciptakan dirinya.

Islam merupakan agama dan sistem nilai yang paripurna. Ia memuat prinsip-prinsip pokok bagi tertatanya kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karenanya, upaya memberikan pendidikan agama Islam kepada generasi penerus dirasakan menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan.

¹² *Ibid.*, hlm. 169.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) seseorang yang diwujudkan melalui segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan atau menumbuhkembangkan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilainya.¹³ Pembelajaran Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam dari peserta didik. Disamping itu juga ditujukan untuk membangun kualitas kesalehan pribadi maupun sosial. Kualitas pribadi ini diharapkan dapat direfleksikan dalam keseharian terhadap sesama (bermasyarakat), baik yang seagama (sesama muslim) maupun yang berlainan agama, dalam berbangsa dan bernegara. Dengan upaya itu diharapkan akan terwujud persatuan dan kesatuan nasional (*ukhuwah wathaniyah*) maupun dengan sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*).¹⁴

Sedangkan menurut Arif Armai, Pendidikan Islam sebagai suatu proses pengembangan potensi kreatifitas peserta didik, bertujuan untuk mewujudkan manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, memiliki etos kerja yang tinggi, berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa dan negara serta agama.¹⁵

Ruang lingkup dan cakupan pendidikan agama Islam untuk anak usia dini tentu berbeda dan lebih spesifik dibandingkan dengan remaja dan orang dewasa. Diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang cermat dalam memilih materi serta menentukan strategi pendekatan yang tepat. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa tingkat pemahaman anak pada usia ini masih terbatas, sehingga dibutuhkan strategi tersendiri. Setidaknya terdapat dua kelompok besar bidang pengembangan dalam pendidikan agama Islam untuk usia dini, yaitu bidang *pembentukan perilaku melalui pembiasaan* dan *pengembangan moral dan nilai-nilai agama*. Adapun ruang lingkup PAI untuk anak usia dini dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹³Muhaimin dkk., 2002, *Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah)* (Bandung: Rosda Karya, hlm. 30.

¹⁴*Ibid*, hlm. 76.

¹⁵ Arif Armai, 2002, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, hlm. 3.

Tabel 1

Ruang Lingkup PAI pada Pendidikan Anak Usia Dini

Bidang Pengembangan	Kompetensi Dasar	Hasil Belajar	Indikator
Pembentukan Perilaku-perilaku melalui pembiasaan	Anak mampu mengucapkan bacaan doa/lagu-lagu keagamaan, meniru gerakan beribadah serta mengikuti aturan	Dapat berdoa dan menyanyikan lagu-lagu keagamaan secara sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan • Menyanyikan lagu-lagu keagamaan yang sederhana
		Dapat mengenal bermacam-macam agama	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan tempat-tempat ibadah • Menyebutkan hari-hari besar agama
		Mengenal ibadah secara sederhana menurut keyakinannya	<ul style="list-style-type: none"> • Meniru pelaksanaan kegiatan ibadah secara sederhana • Menyebutkan waktu beribadah
		Mengenal dan menyayangi ciptaan Tuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebutkan ciptaan-ciptaan Tuhan misalnya; manusia, bumi, langit, tanaman dan hewan.
		Memiliki sopan santun dan mengucapkan salam	<ul style="list-style-type: none"> • Mengucap salam • Selalu bersikap ramah • Berterima kasih jika memperoleh sesuatu • Meminta tolong dengan baik • Tidak mengganggu teman yang sedang melakukan/ melaksanakan kegiatan ibadah
		Mulai tumbuh disiplin diri	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tata tertib yang ada di sekolah • Mengikuti peraturan permainan

		Mulai dapat bersikap/berperilaku saling menghormati	<ul style="list-style-type: none"> • Mau mengalah • Mengikuti peraturan permainan
		Bersikap ramah	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahasa sopan dalam berbicara • Tidak lekas marah/membentak-bentak
		Tumbuhnya sikap kerjasama dan persatuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah bergaul/berteman • Suka menolong teman • Saling membantu sesama teman
		Mulai dapat menunjukkan rasa percaya diri	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu melaksanakan tugas sendiri • Menunjukkan kebanggaan terhadap hasil karyanya.
		Mulai menunjukkan kepedulian	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan barang orang lain dengan hati-hati • Mau membagi miliknya misalnya; mainan, makanan dll. • Meminjamkan miliknya dengan senang hati
		Dapat menjaga kebersihan diri dan mengurus dirinya sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Membersihkan diri sendiri dengan bantuan, misalnya; menggosok gigi, mandi, buang air dll. • Mengurus dirinya sendiri dengan sedikit bantuan misalnya; berpakaian atau makan sendiri
		Dapat menjaga lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembalikan mainan pada tempatnya setelah digunakan • Membuang sampah pada tempatnya • Membantu membersihkan lingkungan
		Mulai dapat	<ul style="list-style-type: none"> • Mau berpisah dengan ibu tanpa

		menunjukkan emosi yang wajar dan mengendalikan tindakan dan perasaannya	<p>menangis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sabar menunggu giliran • Berhenti bermain pada waktunya • Dapat dibujuk • Tidak cengeng
		Berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Mau menerima tugas • Mengerjakan tugas sampai selesai
Pengembangan moral dan nilai-nilai agama	Anaka percaya akan ciptaan Allah dan mencintai sesama	Anaka dapat berdoa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan (misalnya belajar, makan, tidur dll.)
		Anak dapat mengenal ibadah secara sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Meniru pelaksanaan ibadah agama
		Anak dapat menyayangi dan memelihara semua ciptaan Tuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyayangi dan memelihara semua ciptaan Tuhan • Cinta antara sesama suku bangsa Indonesia • Mengetahui arti kebersamaan dan persatuan
		Anak dapat mengenal sopan santun	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui sopan santun dengan berterima kasih • Mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain • Rapi dalam bertindak, berpakaian dan bekerja • Mengetahui konsep benar dan salah
		Anak dapat mengenal tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengurus dirinya sendiri • Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
		Anak dapat mengenal kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga kebersihan diri • Menjaga kebersihan

			lingkungan
		Anak dapat mencintai tanah air	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal bendera • Mengenal suku bangsa, pakaian, rumah adat, tarian
		Anak dapat mengenal musyawarah dan mufakat secara sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memutuskan sesuatu secara sederhana melalui musyawarah dan mufakat

Tabel tersebut memaparkan secara jelas dan rinci kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran PAI untuk anak usia dini. Menu pembelajaran tersebut telah didasarkan kepada perkembangan anak pada usia dini. Orangtua maupun guru sebagai pendidik formal di sekolah tentu diharapkan dapat mengikuti rambu-rambu tersebut dalam upaya memaksimalkan pembelajaran PAI sesuai taraf tumbuh kembang anak.

3. Implementasi DAP dalam PPAI untuk Anak Usia Dini

Untuk dapat mengimplementasikan DAP secara baik tentu harus berangkat dari analisis kebutuhan anak usia dini. Pada rentang 3-5 tahun, anak mulai memasuki masa prasekolah yang merupakan masa persiapan untuk memasuki pendidikan formal yang sebenarnya di sekolah dasar. Masa ini perkembangan kognitif anak masuk dalam perkembangan berpikir pra-operasional kongkrit.

Masa ini ditandai dengan masa peka terhadap segala rangsangan yang diterimanya melalui panca indera. Karenanya, guru dan orangtua harus menyikapi datangnya masa peka ini dengan memberikan stimulasi yang tepat, agar mempercepat penguasaan anak terhadap tugas-tugas perkembangan pada usianya.

Sedangkan untuk anak usia 6-8 tahun tentu memiliki kebutuhan tersendiri dibandingkan periode sebelumnya. Secara spesifik analisis kebutuhan anak pada periode ini dapat dijabarkan dalam table berikut ini,

Tabel 3

Analisis Kebutuhan Anak Usia 6 – 8 tahun

Moral/Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Anak berbuat baik karena ingin mendapat pujian. • Anak sudah dapat menyesuaikan diri dengan yang diinginkan kelompok sosialnya dan mana yang harus dihindari. • Anak patuh terhadap tuntutan atau aturan orangtua dan lingkungan sosialnya,
Konsep diri	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi lebih mandiri dalam banyak hal dan situasi. • Pengaruh guru dan teman sebaya sangat besar • Adanya perubahan nilai • Menyendiri dan tertutup • Mulai muncul perilaku sesuai dengan perannya kelak, seperti anak perempuan bersifat keibuan • Mulai suka pamer, membanggakan diri atas karya yang dihasilkan
Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • Bangun pagi dan tidur malam pada jam-jam rutin • Membuat peraturan/ tata tertib di rumah secara menyeluruh • Teratur dalam rutinitas seperti; berangkat dan pulang sekolah, merapikan peralatan sekolah dan merapikan pakaian

Dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas tentu telah cukup memberikan gambaran bagi para pendidik, tentang betapa penting atensi terhadap konsep DAP dalam mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan senantiasa memperhatikan konsep DAP akan membawa hasil yang lebih baik dan optimal.

Terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipahami dalam penerapan DAP.

- 1) Kurikulum harus dapat mencakup pengembangan seluruh dimensi tumbuh kembang anak; fisik, spiritual, kognitif, emosional, sosial secara terpadu (*integrated*). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa belajar yang efektif bukanlah belajar yang sempit dan terfragmentasi (satu mata pelajaran), namun harus dengan cara terintegrasi.
- 2) Pendidik harus mampu memodifikasi kurikulum sesuai tuntutan perubahan dari waktu-ke waktu. Karenanya, pendidik dituntut untuk mengenal secara baik kekuatan, bakat, minat, kebutuhan maupun latar belakang keluarga masing-masing anak.

- 3) Proses belajar mengajar harus berjalan aktif dan interaktif. Partisipasi aktif anak harus ditumbuhkan melalui kegiatan eksplorasi dan interaksi, baik dengan para guru maupun kawan-kawannya. Pendidik tidak menggunakan standar orang dewasa dalam mengevaluasi aktivitas anak. Biarkan anak memandu dirinya sendiri dalam mencari solusi, sehingga ketika mereka berhasil menyelesaikan persoalan, akan tumbuh kepercayaan diri yang akan memotivasi semangat belajar mereka.
- 4) Dalam kegiatan belajar mengajar harus menggunakan material yang konkrit, nyata serta relevan dengan kehidupan anak. Dalam bermain, anak akan melakukan eksplorasi konsep, sehingga secara perlahan akan mengerti konsep abstrak melalui simbol-simbol. Penggunaan gambar-gambar dan cerita dilakukan sesering mungkin, agar anak memperoleh pengalaman nyata. Sementara penggunaan buku-buku kerja atau LKS, buku mewarnai, model gambar yang dibuat oleh orang dewasa adalah tidak cocok bagi anak di bawah usia 6 tahun. Kunci keberhasilannya adalah partisipasi aktif anak dalam memandu diri sendiri, terlibat aktif dalam kegiatan yang konkrit, pengalaman hidup yang nyata, karena semua ini dapat memotivasi anak.
- 5) Pendidik harus siap melayani ketertarikan anak terhadap hal-hal baru yang terkadang di luar tahapan kronologis mereka. Hal ini dimungkinkan akibat kebosanan terhadap model-model permainan yang telah mereka kuasai, dan dianggap kurang menantang. Termasuk ketertarikan kepada produk teknologi mutakhir/ canggih seperti game elektronik, handphone, dan sebagainya.
- 6) Pendidik harus mengetahui kapan saat anak diberikan kegiatan atau permainan yang lebih menantang, karena bila anak telah menguasai suatu permainan akan menjadikan mereka bosan. Hal ini bisa dilakukan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, usulan-usulan, atau menambahkan material yang lebih kompleks.¹⁶

Ketika berbicara tentang konsep DAP, maka akan sampai pada sebuah kesimpulan apakah pembelajaran yang dilakukan itu patut atau tidak. Tentu parameter ini harus didasarkan kepada tiga pilar pokok DAP, yaitu patut

¹⁶ Ratna Megawangi dkk., *Op. Cit.*, hlm. 37-39.

menurut umur, patut menurut lingkungan sosial dan budaya serta patut secara individual.

Pendidikan Agama Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan materi lain. Banyak dimensi agama yang masih merupakan konsep abstrak, khususnya bagi anak. Tentunya diperlukan strategi pembelajaran khusus untuk menannamkan pemahaman kepada anak usia dini tentang konsep-konsep dalam agama Islam. Implementasi konsep DAP dalam Pendidikan Agama Islam dapat dikembangkan melalui beberapa model berikut ini,

1) Pembelajaran Integratif

Suatu prinsip yang seharusnya dianut dalam pendidikan islam adalah bahwa dunia merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Perilaku yang terdidik dan nikmat Tuhan apapun yang didapat dalam kehidupan harus diabdikan untuk mencapai kelayakan-kelayakan terutama dengan mematuhi kemauan Tuhan. Salah satu ayat Al Quran menyebutkan, "*Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara utuh ...*" (Q.S. al-Baqarah [2]: 208. Ayat tersebut memerintahkan kepada manusia agar tidak mengembangkan dirinya secara parsial atau setengah-setengah. Pengembangannya harus terintegrasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁷

Ketika berbicara tentang agama, maka konsep paling awal yang seringkali dipertanyakan oleh anak adalah konsep tentang keberadaan Tuhan. Guru maupun orang tua seringkali dibuat kebingungan atas pertanyaan-pertanyaan tak terduga yang muncul dari anak menyangkut konsep Tuhan.

Menurut Hamdan Rajih, upaya membimbing anak menuju akidah yang benar dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a) Senantiasa menannamkan rasa syukur yang dalam, karena dengan pengungkapan rasa syukur ini akan memperkenalkan anak kepada Dzat yang telah memberikan (*al-Mun'im*). Dengan rasa syukur ini, akan

¹⁷ Munzir Hitami, 2001, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*, Riau: Infinite Press, hlm. 24-25.

terbentuk konsep bahwa orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada gilirannya akan tumbuh pula rasa kasih sayang kepada orang lain.

- b) Membangkitkan potensi fitrah, berangkat dari pengakuan serta percaya kepada Allah akan melahirkan pengertian bahwa jiwa manusia, pada hakikatnya memiliki kecenderungan serta senang kepada kebaikan, serta tidak senang dan ingin menghindari kejahatan. Karena itu orang tua ataupun pendidik harus senantiasa mengarahkan kecenderungan anak tersebut ke arah kebaikan sedini mungkin.
- c) Memperkenalkan nikmat-nikmat Allah kepada anak sejak dini, dimanapun dan kapanpun. Sebagai langkah pertama orang tua bisa memperkenalkan anak kepada hal-hal yang terkait langsung dengan diri mereka, dan selanjutnya kepada hal-hal yang lebih kompleks.
- d) Menanamkan perasaan *Muraqabatullah* (merasa selalu dipantau oleh Allah) di dalam jiwa anak. Kepada anak harus ditanamkan pengertian bahwa segala sesuatu di alam raya ini berada di bawah kendali atau pengaturan Allah. Segala sesuatu berjalan sesuai hukum dan peraturan Allah. Pada saat itulah mulai ditanamkan satu bentuk ibadah yaitu *muraqabatullah*; perasaan bahwa Allah tidak pernah lalai memantau segala aktivitas manusia. Dan, pada masa-masa berikutnya orangtua mengajarkan berbagai bentuk ibadah kepada Allah.
- e) Mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam. Langkah ini bisa dimulai dengan mengajarkan membaca Al-Quran serta hafalan surat-surat pendek khususnya al-Fatihah, dan *al-Mu'awwizatain* (al-Nas dan al-Falaq) serta al-Ikhlas. Disamping itu ajarkan kandungan makna yang terdapat dalam surat-surat pendek tersebut.¹⁸

Beberapa yang dikemukakan di atas merupakan pendidikan awal yang harus dilakukan oleh orangtua maupun pendidik sebagai fondasi akidah bagi anak. Beberapa aspek tersebut hendaknya dapat diterapkan secara integrative dalam setiap aktivitas yang dilalui oleh anak. Dengan demikian

¹⁸ Hamid Rajih, 2005, *Spiritual Quotient for Children, Agar si Buah Hati Kuat Imanya dan Taat Ibadahnya*, terj. Abdul Wahid Hasan, Yogyakarta: Diva Press, hlm. 76-99.

diharapkan akan muncul pemahaman yang utuh terhadap konsep-konsep agama.

Dengan pendekatan ini diharapkan akan terus meningkatkan kemantapan akidah serta kegemaran ibadah pada perkembangan selanjutnya. Namun demikian pantauan dan bimbingan secara kontinu dari orangtua serta guru harus tetap dijalankan.

Masih dalam hal akidah, pengenalan awal tentang konsep Tuhan kepada anak usia dini memang menjadi kajian yang perlu mendapat perhatian cukup serius. Menurut Stoppard (1997) Proses terbentuknya konsep Tuhan pada anak umumnya dipahami sebagai proses transformasi (pengalihan) gagasan dari orang dewasa kepada anak-anak. Tuhan dipahami anak-anak karena lingkungan memberi pemahaman kepadanya. Realitas Tuhan memang tidak tampak dan belum pernah dilihat anak. Walaupun demikian gagasan mengenai Tuhan dan keberadaan-Nya mau tidak mau akan diterima anak karena seluruh lingkungan dimana anak tinggal sepertinya tidak ada yang tidak mengenal Tuhan.¹⁹

Adanya anggapan bahwa proses terbentuknya konsep Tuhan pada anak hanya terjadi karena proses transformasi gagasan semata, seringkali membuat orangtua dan guru memahami bahwa pendidikan agama itu dilangsungkan dengan jalan mentransfer sebanyak mungkin pengetahuan agama dan Tuhan pada anak. Pengajaran agama akhirnya cenderung ditekankan pada aspek kognitif.²⁰ Pendidikan agama akhirnya terjebak kepada praktek penyampaian dogma atau pengetahuan tentang agama yang harus diterima tanpa sikap kritis.

Kegagalan pendidikan agama mungkin tidak akan terjadi jika pemahaman mengenai terbentuknya konsep Tuhan pada anak bukan hanya dipahami sebagai proses transformasi gagasan semata. Menurut Goldman (1964) proses terbentuknya pemikiran religius pada anak akan dihasilkan dari proses generalisasi terhadap berbagai pengalaman, persepsi terdahulu, dan berpegang pada konsep yang telah ada untuk mengetahui aktivitas dan

¹⁹ *Psikologika*, 2006, Nomor 21 Tahun XI Januari, hlm. 5.

²⁰ *Ibid.*

sifat-sifat dasar Tuhan. Misalnya ada pernyataan bahwa, Tuhan Mahadekat, Dia ada di segala tempat" maka ketika anak memahami pernyataan tersebut akan menggunakan konsep pengetahuan yang telah ia miliki. Anak akan menerapkan konsep ruang dan waktu, jarak dan bilangan, secara fisik lahiriyah, sebagaimana misalnya kedekatan dia kepada orangtua.²¹

Jika orangtua atau guru mengajarkan kepada anak tentang aturan/perintah dan larangan di dalam agama, akan lebih bermakna jika kepada anak dikenalkan pula tentang kasih sayang Tuhan, mengapa Tuhan memerintahkan suatu perbuatan dan menyeru kepada manusia untuk menjauhi perbuatan jahat, dan juga hikmah dari segala penciptaan. Jika hal ini dilakukan, tentu anak akan lebih menyukai, serta akan lebih mendorong pemahaman dan wawasan anak tentang ajaran agama. Dan pada gilirannya akan tumbuh penghayatan dan pengamalan yang paripurna terhadap pelajaran agama.

Menurut Hurlock, untuk membuat anak kecil mengerti agama, konsep keagamaan diajarkan dalam bahasa sehari-hari dan dengan contoh dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian konsep-konsep menjadi konkrit dan realistis. Hurlock juga menambahkan bahwa pada rentang usia dini, kebanyakan anak mulai bertanya tentang agama, misalnya "Siapakah Tuhan?", "Dimana letak surga itu?" dan lain sebagainya.²²

Integrasi pendidikan agama Islam dalam setiap aktivitas anak akan menumbuhkan pemahaman yang komprehensif tentang makna agama. Pada gilirannya, agama tidak dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan duniawiah, dari kegiatan sehari-hari. Jika agama memiliki makna dalam kehidupan anak, maka akan tumbuh bentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial secara bersamaan.

2) Pembelajaran Tematik

Strategi pembelajaran Tematik merupakan pilihan strategi yang baik dalam pembelajaran anak usia dini. Strategi ini dalam praktiknya mencoba melibatkan beberapa bidang pengembangan, yang bertujuan memberikan

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

²² Elizabeth B. Hurlock, 1999, *Perkembangan Anak I*, terj. Muschilah dkk., Jakarta: Erlangga, hlm. 138.

pengalaman yang lebih bermakna kepada anak. Keterpaduan strategi pembelajaran ini tercermin dari aspek proses, kurikulum dan proses belajar mengajarnya. Strategi ini diterapkan kepada anak usia dini dikarenakan pada umumnya anak masih melihat segala sesuatu sebagai satu keutuhan (*holistic*). Mengapa demikian? Pertumbuhan fisik anak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mental, sosial dan emosionalnya.

Pembelajaran tematik dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan utuh. Dalam strategi ini guru dituntut mampu dan cermat dalam memilih tema yang terdekat dengan keseharian dan lingkungan anak. Hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan strategi pembelajaran tematik ini, guru harus mengutamakan kompetensi dasar yang akan dicapai daripada tema. Dalam pelaksanaannya, strategi pembelajaran ini perlu memperhatikan beberapa hal antara lain, alokasi waktu masing-masing tema, mempertimbangkan banyak-sedikitnya bahan/sumber belajar yang terdapat dilingkungan sekitar.²³

Sesuai tahap perkembangan fisik maupun psikis anak usia empat hingga enam tahun, pembelajaran pada tahap ini memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :

1. Berpusat pada anak.
2. Memberikan pengalaman langsung pada anak.
3. Pemisahan bidang pengembangan tidak begitu jelas.
4. Menyajikan konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam satu proses pembelajaran.
5. Bersifat fleksibel atau luwes.
6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak.

Adapun kekuatan pembelajaran tematik adalah :

1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak,
2. Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan anak,
3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna,

²³ Yuliani Nurani Sujiono, *Op. Cit.*, hlm. 257-259.

4. Mengembangkan ketrampilan berpikir anak dengan permasalahan yang dihadapi,
5. Menumbuhkan ketrampilan sosial dalam bekerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.²⁴

Strategi pembelajaran tematik lebih mengutamakan pengalaman belajar anak. Strategi ini mengupayakan belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan dan bersahabat namun tetap bermakna bagi anak. Karenanya, anak tidak perlu dipaksa ataupun *didrill*. Biarkan anak belajar melalui pengalaman nyata yang menghubungkan konsep/tema yang satu dengan tema yang lain yang sudah mereka pahami sebelumnya. Strategi ini akan menciptakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak dan perkembangan anak.

Beberapa langkah konkrit dalam menyusun pembelajaran tematik ini antara lain,

- a. Penentuan tema besar yang akan menjadi focus utama, misalnya tentang "Aku"
- b. Membuat model keterpaduan tema dalam satu kurun tertentu, misalnya satu semester atau satu tahun, dengan menggunakan prinsip dari tema yang terdekat dengan anak, konkrit dan sederhana.
- c. Tuangkan semua sub tema yang mungkin dapat dihubungkan dengan tema utama, misalnya identitas, panca indera, hobi, sekolah dan sebagainya
- d. Jumlah sub tema dapat disesuaikan dengan keluasan cakrawala pengetahuan yang dimiliki guru.
- e. Buat skala prioritas urutan sub tema dari yang terdekat, mudah dikenali anak berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk segera dibelajarkan kepada anak.
- f. Selanjutnya, guru bisa menjabarkan lagi masing-masing sub-sub tema tersebut, sehingga setiap sub tema memiliki cabang pengetahuan yang membangunnya, misalnya; sub tema "Agama" dikembangkan lagi ke dalam sub-sub; Tuhanku, Nabi, Yang baik dan yang buruk, Malaikat, Ibadah, dan sebagainya.
- g. Dalam mengembangkan sub tema seperti pada butir f, guru dapat menggunakan metode curah pendapat (*brainstorming*), misalnya sub AKU dan IDENTITASKU, guru bisa mengembangkan suruh pendapat terhadap aspek-aspek seperti; sifatku, ciri-ciriku, kemampuanku, kepunyaanku, dan sebagainya.
- h. Setelah seluruh sub tema dikembangkan, buatlah alokasi tema berdasarkan waktu/ jumlah tatap muka dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 257-258.

Perhatikan juga keluasan masing-masing tema dalam menentukan durasi yang digunakan.

- i. Kembangkan model keterpaduan tema, hasil belajar, indikator.²⁵

Penerapan strategi pembelajaran integrative dan tematik ini sangat mungkin untuk materi PAI. Strategi ini jika dikembangkan secara cermat sangat sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh konsep DAP. Tentunya penerapannya harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap cara-cara yang patut dan menyenangkan untuk anak usia dini sebagaimana dipaparkan dalam tabel 3.

Penerapan strategi yang baik dan tepat dibarengi dengan perhatian terhadap hal-hal yang patut untuk dilakukan dalam praktik pendidikan anak usia dini, akan menghasilkan pembelajaran yang berhasil, menyenangkan dan bermakna bagi anak maupun guru.

D. KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip DAP dalam upaya menciptakan pembelajaran yang patut, menyenangkan dan bermakna bagi anak usia dini merupakan sebuah kemutlakan. Hal ini akan membawa dampak positif bagi tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Sisi-sisi psikologis yang menjadi sorotan perhatian dari prinsip DAP ini dapat membantu guru menciptakan pembelajaran yang tidak "kering" namun lebih bersahabat dengan kejiwaan dan keseharian anak didik.

Tentunya pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip *Developmentally Appropriate Practice* ini wajib dimiliki oleh guru, khususnya guru PAI. Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi baik personal, professional, pedagogis maupun sosial patut untuk terus diupayakan. Pemahaman yang baik terhadap anak didik, kerja sama kolegial antar kawan sejawat maupun kolaborasi harmonis dengan orangtua anak akan sangat membantu penciptaan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan bermakna.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 262-268.

Ibarat pisau, kapasitas dan kompetensi harus terus diasah atau dilatih agar menghasilkan kualitas pembelajaran yang maksimal. Tentu sebagai pendidik, melihat anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan segenap potensi yang mereka miliki menjadi kepuasan tersendiri.

Daftar Pustaka

- Alexander Sutherland Neill, 2007, *Summerhill School, Pendidikan Alternatif yang Membebaskan*, terj. Agung Prihantoro, Jakarta: Serambi.
- Ali Maksum, Luluk Yunan Efendi, 2004, *Paradigma Pendidikan Universal*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Arif Armai, 2002, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Pers.
- Azyumardi Azra, 1999, *Esei-Esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, Jakarta: Logoss.
- Departemen Agama RI, 1986, *Kurikulum Madrasah Diniyah*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta.
- Direktorat PADU, 2001, *Pedoman Pelaksanaan PADU*, Jakarta: Direktorat Padu, Depdiknas.
- Elizabeth B. Hurlock, 1999, *Perkembangan Anak I*, terj. Muschilah dkk., Jakarta: Erlangga.
- Hamid Rajih, 2005, *Spiritual Quotient for Children, Agar si Buah Hati Kuat Imanya dan Taat Ibadahnya*, terj. Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta: Diva Press.
- Jaudah Muhammad Awwad, 1995, *Mendidik Anak secara Islami*, terj. *Manhaj al-Islam fi Tarbiyah al-Atfal* oleh Shihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhaimin dkk., 2002, *Paradigma Pendidikan Islam (Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah)*, Bandung: Rosda Karya.
- Munzir Hitami, 2001, *Mengonsep Kembali Pendidikan Islam*, (Riau: Infinite Press.
- Nugroho, 2004, *Era baru Menuju Pendidikan Bermutu*, Semarang: UNNES..
- Psikologika*, 2006, Nomor 21 Tahun XI Januari.
- Ratna Megawangi, et. Al., 2004, *Pendidikan yang Patut dan Menyenangkan: Penerapan Teori Developmentally Appropriate Practice (DAP)*, (Jakarta: Indonesian Heritage Fondation.
- Rebecca Novick, 2004, *Developmentally Appropriate and Culturally Responsive Education: Theory in Practice*, Oregon, Child and Family Program.
- Soegeng Santoso, 2004, *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Citra Pendidikan.
- Sumadi Suryabrata, 2004, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Yuliani Nurani Sujiono, 2005, Bambang Sujiono, *Menu Pembelajaran Anak Usia Dini*, Jakarta: Citra Pendidikan.

KEMANDIRIAN BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI

Ada gejala yang mengkhawatirkan tentang menurunnya kualitas lulusan perguruan tinggi. Kurang atau minimnya semangat membaca, kurangnya pemahaman tentang strategi belajar, serta menurunnya kemandirian belajar para mahasiswa.

Sesungguhnya pendidikan tinggi bukanlah semata-mata suatu persiapan untuk hidup, melainkan merupakan suatu kehidupan tersendiri, yaitu suatu kehidupan untuk mengejar kebenaran, menuntut pengetahuan ilmiah, mengalihkan kebudayaan, memperluas wawasan, mengembangkan ketrampilan, membina keyakinan, membentuk kepribadian, menguji keuletan, melakukan tata hubungan, dan persahabatan, sedangkan mempersiapkan diri untuk kehidupan kerja di masa depan hanyalah salah satu segi dari kehidupan itu. Oleh karena itu, setiap mahasiswa hendaknya menjalani kehidupan pendidikan tinggi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan itu perlu diperjuangkan dengan gairah belajar yang membara dan ditempuh secara tekun oleh setiap mahasiswa sehingga kelak dapat benar-benar menjadi seorang sarjana yang bermutu tinggi dan berbudi luhur

A. PENDAHULUAN

Mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi, bagi sebagian besar orang dipandang sebagai gerbang menuju sukses dalam kehidupan di masa yang akan datang. Kehidupan kampus sering dianggap sebagai persiapan untuk menghadapi kehidupan di masa depan. Namun sesungguhnya, ia merupakan kehidupan itu sendiri; *“College isn’t training for life, it is life”*¹

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa:

Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. (UUSPN No. 2 th 1989)

Untuk selanjutnya rumusan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990, sebagai aturan pelaksanaan, tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dirumuskan bahwa tujuan Pendidikan Tinggi ialah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

¹ Deese, James, Ellin K. Deese, *How to Study*, (New York: McGraw-Hill, 1979), hlm.116.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Melihat rumusan tersebut, maka keberadaan mahasiswa memiliki nilai strategis, sebagai agen perubahan sosial. Mereka harus siap untuk dipacu atau memacu diri dalam rangka mengukir prestasi. Bertolak dari sinilah maka membicarakan tentang bagaimana upaya-upaya yang perlu ditempuh guna membangun prestasi di bangku Perguruan Tinggi adalah sangat urgen.

Berbicara dalam konteks Pendidikan Islam, Azyumardi Azra melontarkan suatu keprihatinan terhadap *prestasi* Pendidikan Islam yang masih menempati posisi *periferal*. Azra menyatakan bahwa; dikarenakan pengelolaan yang secara umum tidak atau kurang profesional, Pendidikan Islam seringkali kalah bersaing dalam berbagai segi.dengan sub-sistem Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat lain. Bukan rahasia lagi, bahwa citra dan gengsi (baca: prestasi) lembaga Pendidikan Islam sering dipandang sebagai subordinat dari pendidikan yang diselenggarakan pihak lain.²

Dari *statement* tersebut dapat ditarik satu kata kunci yaitu “prestasi” Dari sisi lembaga kelemahan tersebut bisa jadi disebabkan oleh mismanajemen, sedang dari sisi “prestasi” outputnya (yang merupakan barometer suatu lembaga pendidikan) dimungkinkan, salah satunya, karena pengelolaan belajar yang kurang baik. Pengelolaan belajar secara individual adalah berangkat dari penciptaan pola belajar yang baik, yang pada gilirannya akan mampu memacu peningkatan prestasi.

Menurut Morgan “*Learning may be defined as any relatively permanent change in behavior which occurs as a result of experience or practice*”³ (Belajar bisa diartikan sebagai perubahan yang relatif permanen/tetap pada tingkah laku yang terjadi sebagai akibat dari pengalaman atau latihan).. Adapun *Pola Belajar* yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah, Bagaimana atau apa sajakah yang dilakukan oleh mahasiswa agar belajarnya di bangku kuliah dapat mencapai

² Azyumardi Azrz, *Esei-Esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*,(Jakarta: Logoss, 1999), hlm. 60.

³ Clifford T. Morgan, Ricard A. King, *An Introduction to Psychology*, (Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha, 1997), hlm. 783.

prestasi yang baik. Terdapat beberapa aspek utama yang dapat menunjang keberhasilan studi di perguruan tinggi, yaitu;

1. Aktivitas dalam perkuliahan,
2. Belajar Mandiri,
3. Belajar Kelompok,
4. Pemanfaatan Fasilitas Belajar (Perpustakaan, Laboratorium, dan sebagainya).

Namun demikian pembatasan ini bukanlah merupakan faktor kemutlakan tentang suatu pola baku. Pola belajar di sini lebih pada strategi belajar yang lazimnya ditempuh oleh seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Sehingga perbandingan yang dilakukan terhadap empat sub variabel ini, lebih pada pemfokusan unsur-unsur pokok pola atau strategi belajar yang lazimnya ditempuh oleh para mahasiswa. Dengan harapan, sorotan terhadap unsur-unsur pokok ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan strategi belajar yang baik atau ideal di bangku kuliah.

B. BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI

Sesungguhnya pendidikan tinggi bukanlah semata-mata suatu persiapan untuk hidup, melainkan merupakan suatu kehidupan tersendiri, yaitu suatu kehidupan untuk mengejar kebenaran, menuntut pengetahuan ilmiah, mengalihkan kebudayaan, memperluas wawasan, mengembangkan ketrampilan, membina keyakinan, membentuk kepribadian, menguji keuletan, melakukan tata hubungan, dan persahabatan, sedangkan mempersiapkan diri untuk kehidupan kerja di masa depan hanyalah salah satu segi dari kehidupan itu. Oleh karena itu, setiap mahasiswa hendaknya menjalani kehidupan pendidikan tinggi dengan sebaik-baiknya. Kehidupan itu perlu diperjuangkan dengan gairah belajar yang membara dan ditempuh secara tekun oleh setiap mahasiswa sehingga kelak dapat benar-benar menjadi seorang sarjana yang bermutu tinggi dan berbudi luhur.⁴

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan lembaga pendidikan di bawahnya.

⁴The Liang Gie, *Cara Belajar yang Baik bagi Mahasiswa* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 2-3.

Di bangku kuliah, ilmu pengetahuan memiliki karakteristik; *semakin luas dan mendalam*.

Berdasarkan asumsi tersebut, muncul satu pertanyaan mendasar yang perlu dicari jawaban dan pemecahannya; Bagaimanakah pola atau cara belajar di Perguruan Tinggi, agar bisa memperoleh hasil yang baik dan optimal? Hasil yang baik dan optimal di sini bukanlah semata-mata diperolehnya nilai-nilai ujian yang bagus (tinggi), akan tetapi (lebih dari itu) harus tercipta suatu pendalaman penguasaan keilmuan. Dengan demikian, pola belajar yang baik bukan semata-mata serangkaian langkah (baca: cara mudah) untuk mendapatkan nilai bagus, sebagaimana yang banyak ditawarkan oleh kursus-kursus atau bimbingan-bimbingan belajar, namun merupakan cara belajar agar bisa memperdalam serta memperluas ilmu, meningkatkan mutu keilmuan sekaligus memperoleh nilai baik.⁵

Kiranya bisa dipastikan bahwa “pola belajar” atau “cara belajar” antara masing-masing individu tidaklah sama. Berbagai langkah ditempuh dan terus dicoba-coba oleh setiap individu untuk menemukan suatu pola atau cara yang paling pas dan menyenangkan baginya dalam belajar; ada yang harus menempuh pola sistematis dengan mengkombinasikan berbagai sumber belajar, ada yang mampu belajar secara mandiri, bahkan dalam hal-hal kecil, ada yang harus berada dalam suasana yang hening, namun ada yang justru harus dengan iringan musik.

Kata “pola” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai “sistem, cara kerja” atau “bentuk pengorganisasian program kegiatan ataupun program belajar”⁶

Sedangkan “belajar” diartikan sebagai aktivitas “memperoleh kepandaian atau ilmu” atau “perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman”⁷

Jadi pola belajar dapat diartikan sebagai suatu cara atau bentuk pengorganisasian berbagai aktivitas dalam upaya memperoleh kepandaian atau

⁵ Timur Mahardika, *30 Menit Mengenal Cara Belajar Efektif di Perguruan Tinggi* (Solo: Pondok Edukasi, 2003), hlm. 3.

⁶ Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 692.

⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

ilmu yang diindikasikan dengan terjadinya perubahan tingkah laku atau tanggapan terhadap suatu permasalahan melalui pengalaman ataupun latihan.

Dalam hal gaya belajar, para peneliti menemukan setidaknya terdapat tiga gaya utama belajar :

1. Pelajar *haptik*, dari kata Yunani yang berarti “bergerak bersama”: orang yang belajar paling baik ketika mereka terlibat, bergerak, mengalami, dan mencoba-coba; sering disebut juga pelajar *kinestik*.
2. Pelajar *visual*, yang belajar paling baik ketika mereka melihat gambar-gambar yang mereka pelajari, sebagian kecil mereka berorientasi pada “teks tercetak” dan dapat belajar melalui membaca.
3. Pelajar *auditorial*, yang belajar paling baik melalui suara, musik dan berbicara.⁸

Ketiga pola ini, yang berangkat dari pendayagunaan fungsi indera, merupakan pola yang digunakan oleh peserta didik/pelajar untuk mengembangkan potensi pikir dan bertindak. Dari sinilah seorang pelajar akan mengukur serta mengorganisir berbagai aktivitas belajarnya untuk mencapai keberhasilan.

C. MENEMUKAN POLA BELAJAR YANG MANDIRI

Pola atau cara belajar yang salah akan menyebabkan atau mengakibatkan sulitnya masuk/diterimanya bahan atau materi perkuliahan di dalam kepala mahasiswa. Kesulitan semacam ini akan menimbulkan *rasa bosan*, *rasa muak* atau *rasa tertekan*, dan kalau perasaan –perasaan ini tidak segera dilenyapkan dalam waktu yang cepat, sedikit demi sedikit akan menjadi rintangan yang besar, menjadi *mekanisme psikis yang negatif* yang akan sulit menghilangkannya.

Cara mudah untuk mengetahui adanya mekanisme psikis negatif ini yaitu; ada apa tidak rasa malas, rasa bosan pada saat akan belajar. Kalau ada, berarti telah muncul tanda-tanda yang tidak baik, dan makin kuat rasa bosan itu, maka makin mendalam mekanisme tersebut.⁹

Belajar di perguruan tinggi bisa diibaratkan masuk ke medan pertempuran yang penuh tantangan. Oleh karenanya, seorang mahasiswa harus mampu

⁸ Dryden, Gordon, Dr. Jeannette Vos, *Revolusi Cara Belajar*, (Terj.), (Bandung: Kaifa, 1999), hlm. 129-130.

menerapkan teknik dan strategi yang baik agar dapat selamat dan berhasil dengan baik sampai ke tujuan; “kemenangan” yakni *prestasi*. Samuel Smith telah mengidentifikasi setidaknya terdapat empat penyebab utama inefisiensi dalam belajar (sebagai pangkal kegagalan dalam menempuh studi) yaitu; *excessive haste* (kesia-siaan), *lack of planning* (lemahnya perencanaan), *careless reading* (kecerobohan dalam membaca), dan *ineffective methods of studying*¹⁰ (penerapan metode-metode belajar yang tidak efektif).

Beberapa ketrampilan utama dalam upaya membangun prestasi di bangku perguruan tinggi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok aktivitas sebagai berikut :

1. Aktif Mengikuti Perkuliahan

Perkuliahan atau bentuk tatap muka dan interaksi antara Dosen dengan Mahasiswa merupakan satu komponen penting bagi keberhasilan studi yang tengah ditempuh oleh mahasiswa. Kuliah merupakan salah satu metode mengajar di perguruan tinggi yang ditempuh oleh para dosen untuk menyampaikan berbagai pengetahuan ilmiah melalui tatap muka (secara lisan, tulisan, demonstrasi, praktek dan lain sebagainya) kepada para mahasiswa.

Dalam *International Dictionary of Education*, “kuliah” atau *lecture* dirumuskan dalam sebuah statemen sebagai berikut:

*Teaching method in which facts or principles are presented orally to group of student who take notes, have little or no participations in learning, and experience passive rather than active learning. The lecturer may follow up his/her lecture with a seminar or tutorial.*¹¹

Artinya : Metode pengajaran yang dengannya fakta-fakta atau asas-asas disajikan secara lisan kepada kelompok mahasiswa yang membuat catatan-catatan, dengan sedikit atau tanpa partisipasi dalam belajar, dan mengalami proses belajar yang pasif daripada aktif. Dosen mungkin melanjutkan kuliahnya dengan suatu seminar atau bimbingan tatap muka oleh dosen pembantu kepada suatu kelompok kecil mahasiswa.

⁹ Timur Mahardika, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

¹⁰ Smith, Samuel, *Best Methods of Study*, (New York: Barnes and Noble Books, 1970), hlm. 1.

¹¹ G. Terry Page, at.al., *International Dictionary of Education*, (Cambridge: The MIT Press, 1980), hlm. 203.

Meskipun telah tersedia berbagai sumber belajar, namun perkuliahan tetap memiliki arti penting dan strategis. Di dalam perkuliahan dimungkinkan akan muncul penjelasan terhadap pokok-pokok bahasan yang sukar untuk dipahami sendiri oleh mahasiswa serta akan diperolehnya banyak gagasan melalui interaksi di dalam ruang kuliah yang boleh jadi tidak terdapat/dibahas dalam buku-buku ajar. Mengikuti suatu perkuliahan hanya akan berhasil bila diminati dengan sungguh-sungguh ingin belajar sesuatu. Bila tidak demikian halnya, lebih baik belajar dirumah saja. Banyak mahasiswa yang terlambat mengetahui bahwa cara kerjanya adalah keliru. Usahakan agar dapat hadir pada waktu kuliah dimulai. Bila datang terlambat, selain mengganggu dosen juga tidak dapat mengikuti pendahuluan yang diterangkan dosen. Usahakan duduk di tempat terbaik dalam ruang kuliah, agar dapat melihat dengan jelas apa yang tertulis dipapan tulis dan mendengar apa yang dikatakan oleh dosen.

Karena itu, di sinilah pentingnya kuliah-kuliah awal (pendahuluan). Kuliah-kuliah awal merupakan wahana untuk memperoleh bahan apersepsi atas materi perkuliahan yang diikuti. Maka jika perlu, aktivitas membaca buku agak sedikit ditunda, misalnya sesudah mengikuti 2 (dua) kali perkuliahan, agar gambaran umum tentang suatu materi perkuliahan bisa dimengerti.

Di samping itu, kemampuan lain yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam mengikuti perkuliahan adalah membuat catatan. Catatan merupakan salah satu unsur penting yang dapat menunjang pemahaman mahasiswa. Catatan kuliah akan membantu mahasiswa merumuskan pokok-pokok pikiran yang disampaikan dosen, membuat kerangka ilmiah dari suatu teori, konsep atau materi yang disampaikan, serta bisa juga memuat resume, yang dapat membantu mahasiswa menganalisis permasalahan-permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan ujian. Sehingga disini sangat perlu ditekankan tentang perlunya kemampuan mencatat yang baik ketika mengikuti perkuliahan.

Mahasiswa yang tidak menyiapkan diri dengan baik untuk mengikuti kuliah, biasanya akan jatuh dalam suatu penyakit yang dikenal sebagai "*stenografisme*", semua perkataan, kalimat yang keluar dari mulut dosen

dicatat seluruhnya tanpa pemikiran.¹² Hal ini dikarenakan pada saat mengikuti perkuliahan, pikiran tidak “on” atau tidak bekerja, yang bekerja hanya telinga dan tangannya saja. Bahkan yang lebih parah lagi, pekerjaan stenografisme ini kadang-kadang tidak begitu mekanis, sehingga mahasiswa bisa melakukannya sambil melihat-lihat luar ruangan kelas atau mengalihkan perhatian/pandangan ke arah lain.

Stenografisme ini sudahlah pasti suatu kesalahan yang besar dan fatal. Setidaknya ada lima akibat sebagai buah dari pekerjaan ini.

1. Mahasiswa akan mencatat bahan-bahan yang sangat besar/banyak. Pada gilirannya nanti, besarnya/ banyaknya bahan ini akan menimbulkan rasa malas sebelum belajar, dan tidak tahu darimana harus memulai.
2. Dikarenakan ketika proses mencatat, mahasiswa tidak menggunakan daya pikir atau penalaran, maka ketika membaca kembali akan mengalami berbagai kesulitan. Kalimat-kalimat yang diucapkan dosen dalam perkuliahan terlihat begitu terang, belum tentu dalam bentuk catatan akan sama terang/jelasnya. Hal ini disebabkan, kalimat-kalimat kuliah adalah kalimat-kalimat untuk diucapkan sehingga tekanan-tekanan suara, pemberhentian kalimat, aksentuasi, yang kesemuanya itu bertujuan untuk menegaskan suatu pengertian, akan tidak bias terlihat dalam tulisan/catatan.
3. Efek selanjutnya ialah, karena sulitnya memahami catatan-catatan kuliah tersebut, maka akan berakibat ditundanya belajar. Hal ini berangkat dari asumsi “nanti saja kalau catatannya sudah banyak/lengkap, mungkin bias menjadi terang”. Mahasiswa lupa , bahwa kuliah pertama merupakan basis (*cantolan*) untuk kuliah kedua, dan demikian seterusnya.
4. Karena proses mencatat ini hanya mekanis, maka titik dan koma-pun juga dicatat seluruhnya. Untuk itu jelas dibutuhkan kecepatan menulis/mencatat yang luar biasa. Namun demikian, bagaimanapun cepatnya seseorang mencatat dengan tulisan biasa, tetap tidak bisa mengimbangi kecepatan bicara. Sehingga jelas akan banyak kata yang tertinggal, yang bisa jadi penting atau menjadi kata kunci.

¹² Timur Mahardika, *Op. Cit.*, hlm. 28.

5. Karena otak tidak biasa digunakan, maka suasana ilmiahpun tidak akan bisa dilaksanakan secara baik. Akibatnya kelincahan berpikir, keriangin dalam beraktivitas tidak mampu dikembangkan lebih lanjut, seperti munculnya sikap kritis, rasa ingin tahu. Hal ini seringkali mengakibatkan mahasiswa jatuh ke dalam penyakit "*pokokisme*".¹³

Satu ketrampilan lagi yang biasanya tidak banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa adalah *mengajukan pertanyaan*. Hal ini dipicu oleh beberapa hal seperti; takut dianggap bodoh, menunggu saja kawan lain bertanya, menunggu saja apa yang akan terjadi kemudian, dan sebagainya.

Dalam mengikuti perkuliahan, biasanya ada sebagian materi yang belum jelas, yang bisa jadi disebabkan oleh kurang perhatian/konsentrasi, atau karena jalan pikiran antara mahasiswa dengan dosen berbeda ataupun ada jarak. Ketrampilan bertanya ini bisa dikembangkan baik secara lisan maupun tulisan. Sebaiknya dalam mengajukan pertanyaan ini, tidak ditunda sampai pertemuan/kuliah berikutnya. Ketika mahasiswa mendapatkan suatu ketidakjelasan, maka segeralah untuk dicatat, dan jangan berasumsi hal itu sepele ataupun takut dianggap bodoh oleh kawan lain. Pengembangan ketrampilan bertanya dalam perkuliahan, disamping dapat memperjelas permasalahan/materi perkuliahan, juga akan melatih berpikir kritis serta berlatih untuk aktualisasi diri. Dua kemampuan yang disebut terakhir ini, biasanya tidak diajarkan secara langsung di dalam perkuliahan, namun harus lebih dikembangkan sendiri oleh mahasiswa. Pada gilirannya nanti, kemampuan berpikir kritis serta aktualisasi diri ini akan memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan kuliah dan karier.

Berpijak dari uraian di atas, maka kontribusi dari mengikuti kuliah dengan baik, dengan mengembangkan berbagai teknik yang tepat merupakan salah kunci utama keberhasilan mencapai prestasi yang baik di bangku kuliah.

Berbagai kemampuan tersebut mutlak untuk dimiliki serta dikembangkan oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan pola dan iklim belajar di perguruan tinggi sangatlah berbeda dengan pola belajar di jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Iklim belajar di perguruan tinggi menuntut *kemandirian* dari para peserta didiknya.

¹³ *Ibid.*, hlm. 28 – 31.

2. Belajar Mandiri

Aktivitas utama dalam belajar mandiri adalah membaca. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa jiwanya kuliah adalah “membaca”, sehingga membaca buku merupakan suatu keharusan. Kenapa membaca menjadi keharusan? Karena mahasiswa tidak bisa atau tidak boleh hanya mendasarkan pemahamannya kepada apa yang disampaikan oleh dosen, karena dengan alokasi waktu kuliah yang terbatas, maka sesungguhnya yang diberikan oleh dosen hanyalah pokok-pokok persoalan saja, bagaimana membahasnya. Dengan kata lain, dalam perkuliahan dosen lebih memberikan “kail” kepada mahasiswa, agar mereka mampu secara mandiri mengembangkan fakta, konsep serta bangunan keilmuan.

Berangkat dari pengalaman memberi kuliah, penulis menangkap fenomena, yang boleh jadi merupakan gejala yang agak umum, bahwa mahasiswa menginginkan segala sesuatunya serba *mudah* dan *instant*. Beberapa permintaan misalnya; Literturnya jangan banyak-banyak dan sulit pak! Soal ujiannya yang mudah-mudah pak! Nilainya jangan pelit-pelit pak! Merupakan beberapa indikator bahwa tujuan perkuliahan hanyalah berputar-putar pada pemerolehan nilai yang baik. Kemauan dan kemampuan untuk bereksplorasi serta mengembangkan kemampuan keilmuan mereka masih relatif rendah, dan kondisi ini berujung pada rendahnya/ minimnya kemauan untuk membaca.

Menurut The Liang Gie, setidaknya terdapat 4 (empat) cirri dari seorang pembaca yang efisien; (1) mempunyai kebiasaan (*habit*) membaca yang baik, misalnya memusatkan perhatian secara sungguh-sungguh ketika membaca, atau duduk tegak pada meja belajar (tidak sambil tiduran), (2) membaca secara tepat, (3) dapat menangkap dan memahami isi dari bahan bacaannya, dan (4) se usai membaca membaca dapat mengingat butir-butir gagasan utama dari bahan bacaannya.¹⁴ Tentunya untuk mencapai kemampuan membaca, sebagaimana terdapat dalam empat ciri tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan latihan, teknik/ketrampilan serta kemauan keras.

¹⁴ The Liang Gie, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Belajar (dengan membaca) secara efektif, yang dalam hal ini dinamakan “Belajar Mendalam” mempunyai beberapa tahapan pokok sebagai berikut :

- *Tahap pertama* adalah tahap orientasi, yakni dengan mencoba memperoleh gambaran umum mengenai susunan dan isi suatu bahan. Tahap ini ditempuh dengan cara menyimpulkan garis besarnya dan bertanya kepada diri sendiri mengenai apa yang telah diketahui tentang bahan tersebut.
- *Tahap kedua* adalah membaca secara mendalam, yakni mempelajari bahan sampai mengerti. Untuk itu diperlukan bantuan (tidak sekedar membaca) lain seperti; membuat skema, menggarisbawahi, memberi catatan pinggir dan sebagainya.
- *Tahap ketiga* adalah tahap pengulangan. Biasanya tahap ini akan efektif jika langsung dilaksanakan setelah tahap kedua selesai. Tahap ini mempunyai tiga langkah yaitu; (1) membaca sepintas sambil memberi perhatian khusus pada bagian-bagian tertentu (misal: yang digarisbawah, catatan pinggir), agar dapat menolong pembaca untuk melihat struktur bahan secara keseluruhan, (2) mencoba mengulangi pokok-pokok bahan tanpa pertolongan teks atau buku, dan sebaiknya pokok-pokok tersebut ditulis kembali, dan (3) memeriksa kembali sampai sejauhmana pokok-pokok bahan tersebut dapat diingat dan dimengerti. Dari sinilah kekurangan-kekurangan yang masih ada dapat diisi atau disempurnakan.¹⁵

Ada orang yang berpendapat bahwa waktu akan berkurang apabila bahan dibaca duakali secara mendalam. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa hal ini tidak benar. Dalam metode yang diuraikandi atas, seorang pelajar harus bekerja lima kali secara berlainan, sedangkan dalam cara kedua harus bekerja dua kali dengan cara yang sama. Setidaknya akan dapat diketahui bahwa yang dipelajari secara aktif dengan cara-cara yang berlainan sambil memperhatikan strukturnya akan dimengeti lebih baik dan diingat lebih lama. Hal yang penting diketahui adalah bahwa apabila belajar dengan banyak variasi, maka akan lebih senang belajar.

¹⁵ Ad. Rooijackers, *Cara Belajar di Perguruan Tinggi Beberapa Petunjuk Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Cet. VII, hlm. 32-33.

Dalam waktu yang sama hasil lebih efektif dengan metode: “Belajar mendalam”. Untuk melalui cara belajar seperti di atas, tentu saja akan memerlukan latihan. Pada tahap permulaan seseorang memerlukan banyak waktu, tetapi lama kelamaan anda akan merasa proses belajar semakin cepat dan akhirnya suatu kebiasaan.

Pada dasarnya membaca buku memiliki beberapa keuntungan, antara lain (1) untuk memperluas pengetahuan/ materiil lebih lanjut, (2) agar memperoleh bahan pembandingan yang baik, dan (3) agar lebih merangsang dan memacu lebih lanjut kegiatan belajar (*coriousity*).¹⁶

Semakin luas dan kaya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa, maka akan semakin banyak bahan-bahan komparasi sebagai titik tolak pengembangan sebuah gagasan pikir. Dengan kekayaan bahan-bahan pembandingan tersebut, maka semakin luaslah cakrawala pandang keilmuannya, yang pada gilirannya akan menjadikannya semakin tertarik, tekun dan makin haus akan ilmu pengetahuan yang digelutinya.

Faktor lain yang tak kalah pentingnya dalam menunjang keberhasilan belajar adalah factor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang kondusif. Makna lingkungan belajar yang kondusif ini tentulah akan berlainan antara satu individu dengan individu yang lain. Sehingga pada point ini, peran masing individu dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bisa dibangun dan dilatih. Bisa jadi, kemampuan ini berangkat dari hasil membaca, atau dari pengalaman orang lain yang kemudian cocok diterapkan dalam diri individu yang bersangkutan.

Suasana kondusif yang dimaksud disini pada prinsipnya lebih bersifat *personal*. Dengan kata lain, suasana yang kondusif bagi seseorang tidak bisa dipaksakan dalam diri orang lain. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa kenikmatan dan efektifitas belajar masing-masing orang akan berlainan. Ada yang belajar harus dalam ruangan khusus, dengan suasana tenang, jauh dari gangguan. Namun ada sebagian lagi yang justru harus diiringi dengan musik dan bisa dimanapun. Sehingga *konsentrasi* dan *kenikmatan belajar* ini harus ditemukan oleh masing-masing individu.

3. Belajar Kelompok

Sudah menjadi suatu kenyataan yang sulit disangkal bahwa didalam belajar, orang membutuhkan bantuan orang lain. Di dalam belajar orang tidak bisa berdiri sendiri. Dan sekarang ini timbul gejala yang sedang berkembang, yaitu adanya saling tolong menolong antar mahasiswa sendiri, mereka mengadakan kelompok-kelompok belajar bersama, sebab menurut pengalaman mereka sendiri belajar bersama itu lebih mudah, lebih efektif dan lebih terjamin kebenarannya.

Prestasi studi yang mereka capai dengan belajar bersama jauh lebih baik daripada prestasi study sendiri. Pengalaman ini meskipun belum bisa diformulasi menjadi kesimpulan yang meyakinkan, pengalaman praktis inilah yang mendorong adanya regu-regu belajar bersama. Bisa dikatakan bahwa regu-regu ini meliputi sebagian besar dari mahasiswa. Ada yang sudah dengan ikatan tetap, ada insidental sifatnya, ada yang sudah kontinyu, ada yang fragmentaris.¹⁷

Belajar bersama ini mempunyai beberapa keuntungan pokok,antara lain :

- Saling membenarkan/mengkritisi,
- Saling mengingatkan,
- Saling melengkapi,
- Lebih kaya perbandingan.

Dengan belajar bersama orang bisa menyatakan kepada temannya yang kebetulan lebih mengerti, bisa tukar pengalaman sehingga mengoreksi pikiran-pikiran yang salah, bisa saling memberi sehingga memperlengkap bahan dan sebagainya. Dalam hal ini ada 2 periode di dalam belajar bersama, yaitu :

1. Periode *orientasi* dimana orang saling menambah bahan, saling melengkapi bahan, saling menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti.

¹⁶ Timur Mahardika, *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹⁷ Timur Mahardika, *Op. Cit.*, hlm. 62.

2. Periode *evaluasi* dimana orang saling membahas bersama-sama sampai dimana kebenaran pendapat nya, saling mengkritik, saling mengoreksi, saling memberikan argumentasi dan sebagainya.¹⁸

Adapun teknis belajar kelompok ini perlu dikembangkan agar kegiatan tersebut berjalan terarah dan tidak menjadi ajang “ngobrol” semata. Ada beberapa langkah yang bisa dikembangkan dalam membangun kelompok belajar yaitu :

- Buatlah kelompok paling banyak lima orang, agar lebih efektif, dan usahakan setiap individu yang terlibat mempunyai kesungguhan,
- Susun rencana kerja beserta jadwal yang disepakati oleh kelompok. Buat penugasan serta tentukan buku/bahan-bahan yang akan dikaji untuk jangka waktu tertentu,
- Pada setiap pertemuan, masing-masing anggota kelompok harus sudah membaca bahan yang akan dibahas. Di dalam pertemuan, masing-masing yang sudah siap dengan bahan yang dipelajari tersebut menjelaskan maksudnya, sementara anggota lain mengkritisi, dan seterusnya,
- Selama diskusi berjalan, buatlah catatan tentang hal-hal yang disalah mengerti atau dilupakan.¹⁹

4. Memanfaatkan Perpustakaan

Dalam dunia pendidikan tinggi perpustakaan merupakan “jantung” sebuah perguruan tinggi. Ia merupakan salah satu komponen (fasilitas) pokok penunjang aktivitas belajar-mengajar di perguruan tinggi, disamping sarana lain seperti, laboratorium, ruang kuliah, dan sebagainya.

Tidak ada kegiatan belajar di perguruan tinggi yang dapat dilaksanakan tanpa pembacaan dan gudang bacaan adalah perpustakaan. Bahkan menurut penulis dan sejarawan Thomas Carlye (1795-1881), Universitas sejati dewasa ini adalah sekumpulan buku (*The true university of these days is a collections of books*) Perpustakaan adalah sebuah bangunan gedung beserta semua isinya berupa buku-buku dan bahan bacaan lainnya

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁹ Ad. Rooijackers, *Op. Cit.*, hlm. 43.

serta berbagai sumber pengetahuan seperti misalnya film, kaset, dan piringan hitam yang diserahkan untuk dimanfaatkan oleh para pengguna.²⁰

Untuk memiliki semua bahan/materi/buku kuliah, baik yang wajib maupun anjuran, rasanya tidaklah mungkin. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan, disamping dunia keilmuan terus berkembang dari hari ke hari, sehingga sudah barang tentu akan muncul karya-karya terbaru yang sangat dibutuhkan.

Memang terdapat keuntungan besar dengan memiliki buku-buku (perpustakaan) pribadi. Disamping bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu, juga bisa membuat catatan-catatan di dalam buku tersebut, sekiranya dipandang perlu. Maka dalam hal ini, mahasiswa harus selektif memilih buku mana yang wajib dibeli untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Perpustakaan itu hanya dapat memberikan mafaat yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa kalau ia mengetahui bagaimana menggunakannya. Untuk menjadi seorang pengguna perpustakaan yang cerdas, ada sekurang kurangnya 4 langkah yang perlu ditempuh, yaitu :

1. Mengetahui waktu kerja perpustakaan perguruan tingginya.
2. Mempelajari semua peraturan tata tertib penggunaan perpustakaan.
3. Memahami tertib penggolongan buku pada perpustakaan.
4. Menguasai rakitan buku ilmiah dan cara-cara memanfaatkannya.²¹

Seorang mahasiswa haruslah sedemikian akrab dengan perpustakaan, dan bisa dikatakan kehidupan kampus adalah kehidupan perpustakaan. Dalam memanfaatkan perpustakaan ini, penting diketahui beberapa prinsip, antara lain :

- Tidak perlu meminjam semua buku yang disampaikan dosen
- Lihat sepintas isinya, sesuai atau tidak dengan kebutuhan materi yang diinginkan
- Jangan meminjam dan membawa pulang buku perpustakaan jika sekiranya tidak akan dibaca.
- Bahan pustaka selain buku seperti; jurnal, majalah, Koran juga penting untuk diakses.²²

²⁰ The Liang Gie, *Op. Cit.*, hlm. 41.

²¹ *Ibid.*

Demikian paparan tentang empat komponen penunjang keberhasilan belajar (prestasi) di perguruan tinggi.

D. CATATAN AKHIR

Pola belajar mahasiswa merupakan suatu pengorganisasian aktivitas belajar guna mencapai prestasi yang baik/ maksimal dan kesuksesan menempuh studi di perguruan tinggi. Meskipun terdapat faktor lain yang ikut menentukan kesuksesan seorang mahasiswa, namun faktor pola belajar ini merupakan faktor terpenting, karena menyangkut aktor utama (baca: mahasiswa). Kontribusi dari pengembangan pola ataupun strategi belajar di bangku kuliah dengan baik, merupakan salah kunci utama keberhasilan mencapai prestasi yang baik.

Berbagai kemampuan tersebut mutlak untuk dimiliki serta dikembangkan oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan pola dan iklim belajar di perguruan tinggi sangatlah berbeda dengan pola belajar di jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Iklim belajar di perguruan tinggi menuntut *kemandirian* dari para peserta didiknya. Jika kemandirian belajar ini telah mencapai pada tahapan kenikmatan belajar, maka pencapaian prestasi yang tinggi di perguruan tinggi akan semakin terbuka lebar.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, prestasi belajar diartikan sebagai “penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”²³

Prestasi belajar merupakan suatu kondisi yang diciptakan sehingga interaksi antara pendidik dan peserta didik akan dapat saling diukur. Peserta didik akan puas dengan capaian hasil belajarnya, sementara pendidik akan memperoleh *feed-back* guna peningkatan kualitas pengajarannya.

Dalam konteks ini, memang tidak bisa secara mutlak dikatakan bahwa, pola belajar merupakan satu-satunya faktor yang menentukan prestasi belajar. Banyak faktor lain yang menjadi kontributor atau justru sebagai penghambat prestasi. Bagaimana cara mengajar dosen? Bagaimana dukungan sarana

²² Ad. Rooijackers, *Op. Cit.*, hlm. 28-29.

²³ Anton M. Moeliono, *Op. Cit.*, hlm. 721

prasarana yang ada? Apakah struktur kurikulum yang ada sudah sesuai dengan minat siswa, sehingga bisa meningkatkan prestasi? Inilah beberapa faktor lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan penulis yakin bahwa semua faktor tersebut ikut memberikan pengaruh bagi pencapaian prestasi belajar mahasiswa.

Namun demikian dari sudut pandang kemandirian belajar maka pola belajar merupakan faktor yang paling dominan di antara banyak faktor lain, dalam upaya mencapai prestasi yang baik di bangku kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton M. Moeliono, et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logoss, 1999).
- Ad. Rooijackers, *Cara Belajar di Perguruan Tinggi Beberapa Petunjuk Praktis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), Cet. VII.
- Clifford T. Morgan, Ricard A. King, *An Introduction to Psychology*, (Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha, 1997).
- Gordon Dryden, Dr., Dr. Jeannette Vos, *Revolusi Cara Belajar*, (Terj.), (Bandung: Kaifa, 1999).
- G. Terry Page, at.al., *International Dictionary of Education*, (Cambridge: The MIT Press, 1980).
- James Deese, Ellin K. Deese, *How to Study*, (New York: McGraw-Hill, 1979).
- Samuel Smith, *Best Methods of Study*, (New York: Barnes and Noble Books, 1970).
- Suharsimi Arikunnto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Sutrisno Hadi, M.A., Prof., Drs., *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986).
- , *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).
- The Liang Gie, *Cara Belajar yang Baik bagi Mahaiswa* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000).
- Timur Mahardika, *30 Menit Mengenal Cara Belajar Efektif di Perguruan Tinggi* (Solo: Pondok Edukasi, 2003).
- Winarno Surachmad, M.Ed., Prof., Dr., *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1987).

TENTANG PENULIS

ABDUL WAHID, lahir di Semarang, 14 November 1969. Menamatkan pendidikan hingga jenjang SLTA (1987) di kota kelahirannya, Semarang. Selanjutnya meneruskan pendidikan ke Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam (lulus tahun 1992).

Dua tahun berselang yakni pada tahun 1994, mengabdikan di almamaternya yaitu Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo sebagai tenaga edukatif. Pada tahun 1997 penulis memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi S.2 pada Program Pascasarjana di IAIN Walisongo Semarang (Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam), yang pada waktu itu merupakan angkatan pertama. Dua tahun kemudian, tahun 1999, penulis berhasil menyelesaikan studi tersebut.

Di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, penulis pernah diamanatkan sebagai Sekretaris Program Bimbingan Konseling dan Bahasa Inggris. Mulai tahun 2007, penulis berkhidmat sebagai Ketua Jurusan Tadris yang membawahi Program studi: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika dan Pendidikan Matematika.

Matakuliah yang diampu oleh penulis adalah *Isu-isu Kontemporer Pendidikan Islam, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*. Di samping perkuliahan reguler,

penulis juga pernah mengajar diberbagai program khusus seperti AKTA IV, D-2 GPAI, S-1 Kualifikasi. Disamping tugas mengajar, penulis juga aktif dalam berbagai pelatihan baik di tingkat Jawa Tengah maupun Nasional.

Berbicara tentang Pendidikan Islam, tentu kita akan menemukan di lembar sejarah umat Islam, bahwa Islam pernah mencapai puncak kejayaan (*the golden age of Islam*). Masa ini praktik-praktik pendidikan menemukan momentum puncak, sehingga jati diri Islam benar-benar terwujud. Namun demikian, pada masa berikutnya, di tengah keterlanaan, secara cukup drastis umat Islam terpuruk. Bangsa Eropa yang dahulu banyak belajar dari umat Islam, justru pada masa berikutnya (hingga kini) berhasil mentransfer dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pernah dibanggakan oleh umat Islam pada masanya. Umat Islam mengalami proses "tidur panjang". Pendidikan Islam yang diharapkan mampu menjadi pemecah kebuntuan, pembuka jalan menuju kemajuan nampaknya belum cukup efektif memainkan perannya.

Buku ini mencoba memotret dan memetakan beberapa kendala, kelemahan dan tantangan Pendidikan Islam, bersamaan dengan itu mencoba memunculkan prospek yang memungkinkan terurainya belitan masalah yang menghambat kemajuan Pendidikan Islam. Beberapa tema yang diangkat tentu tidak dapat mewakili seluruh problem yang dihadapi oleh dunia Pendidikan Islam, namun setidaknya bisa menjadi bahan bagi perenungan panjang menyangkut upaya membangun kembali kejayaan umat Islam melalui pendidikan.



Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
Telp. (024) 7615923; 081325639165
E-mail: walisongopress@gmail.com

ISBN 978-602-9029-15-4



9 786029 029154 >